



**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PASAMAN BARAT**



PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2023

**Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pasaman Barat**



dr. Hj. ANNA RAHMADIA, M.KM

SAMBUTAN BUPATI PASAMAN BARAT

Untuk mewujudkan tujuan Pembangunan Nasional yang berkesinambungan (Sustainable Development Goals/SDGs) setiap program atau bidang pembangunan harus memperhatikan dan merespon kesetaraan gender. Keterbukaan akses yang setara dan kontrol yang seimbang menjadi syarat utama agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil dan merata antara laki-laki dan perempuan.

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mendukung sepenuhnya program kesetaraan gender yang dibuktikan dengan adanya Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 62 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Data Gender dan Anak.

Untuk mengetahui pencapaian Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka dibutuhkan data terpilah yang dapat menggambarkan posisi dan kondisi serta peran dan partisipasi laki-laki dan perempuan diberbagai bidang pembangunan.

Data terpilah gender dan anak sebagai bahan pertimbangan dan acuan dalam menyusun perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi, serta pengambilan kebijakan pembangunan, sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak.

Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat telah menyusun Buku Profil Gender dan Anak Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023. Publikasi ini diharapkan dapat dimanfaatkan dan menjadi referensi serta acuan bagi seluruh pihak terkait dalam menyusun perencanaan program, kegiatan, kebijakan, sekaligus sebagai bahan evaluasi

dalam upaya peningkatan pencapaian Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Pasaman Barat.

Ucapan terimakasih disampaikan kepada seluruh pihak atas dukungan dan partisipasi dalam mendukung program kegiatan yang terbaik untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Pasaman Barat.

Simpang Empat, Oktober 2023

BUPATI PASAMAN BARAT,



H. HAMSUARDI

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahNya sehingga Tim Penulis dapat menyelesaikan penyusunan Buku Profil Gender dan Anak Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 dengan baik.

Buku Profil Gender dan Anak Tahun 2023 ini disusun oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Pasaman Barat dan dibantu oleh Badan Pusat Statistik dan Instansi terkait lainnya, dalam rangka meningkatkan ketersediaan data dan informasi gender dan anak di Kabupaten Pasaman Barat dalam berbagai bidang pembangunan. Data gender dan anak merupakan elemen penting bagi terselenggaranya Pengarusutamaan Gender (PUG) serta Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA), yang dapat membantu para pengambil kebijakan untuk memberikan gambaran secara spesifik mengenai peran, situasi dan kondisi perempuan dan laki-laki di Kabupaten Pasaman Barat sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam penyusunan program pembangunan yang responsif gender di Kabupaten Pasaman Barat.

Dalam penyusunan Buku ini, kami telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada :

1. Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati dan Bapak Sekda yang telah mendukung pelaksanaan kebijakan perencanaan daerah melalui pengarusutamaan gender.

2. Bapak/Ibu Kepala Organisasi Perangkat Daerah, instansi vertikal dan instansi terkait lainnya di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat yang telah memfasilitasi ketersediaan data dan informasi gender dan anak sesuai dengan tupoksi masing-masing.
3. Bapak/Ibu anggota Kelompok Kerja data terpilah gender dan anak se-Kabupaten Pasaman Barat yang telah berpartisipasi aktif dalam memberikan informasi, sumbangan pemikiran, saran dan masukan yang diperlukan dalam penyusunan buku ini.

Semoga semua bantuan dan dukungan yang diberikan menjadi amal ibadah mendapat imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna dan dengan segala keterbatasan yang ada, maka kerjasama yang baik dan berkesinambungan serta kritikan dan saran sangat diperlukan demi sempurnanya penyusunan buku ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Pasaman Barat.

Simpang Empat, Oktober 2023

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Pasaman Barat



dr. Hj. ANNA RAHMADIA, M.KM

Pembina Tk. I/IV.b

NIP. 19820927 200905 2 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	xvi

BAB I PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang	1
1.2	Tujuan	3
1.3	Sasaran	3
1.4	Sumber Data	3
1.5	Input	4
1.6	Output	4
1.7	Hasil Yang Diinginkan	4

BAB II KEPENDUDUKAN

2.1	Jumlah dan Persebaran Penduduk	6
2.2	Distribusi Penduduk	10
2.3	Angka Beban Ketergantungan	13

BAB III PENDIDIKAN

3.1	Angka Partisipasi Kasar	19
3.2	Angka Partisipasi Murni	21
3.3	Angka Partisipasi Sekolah	24
3.4	Angka Melek Huruf	25
3.5	Angka Putus Sekolah	28
3.6	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	30
3.7	Rata-rata Lama Sekolah	32
3.8	Sertifikasi Guru.....	33
3.9	Angka Kelulusan Paket A, B, dan C.....	35

BAB IV KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

4.1	Kematian Ibu Melahirkan	39
4.2	Penyebab Kematian Ibu Melahirkan	41
4.3	Penolong Persalinan	44
4.4	Kunjungan Ibu Hamil (K1/K4)	47
4.5	Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil	51
4.6	Pemberian Tablet Zat Besi (Fe) pada Ibu Hamil	54
4.7	Peserta/Akseptor Keluarga Berencana (KB)	56
4.8	Pemberian Imunisasi pada Balita	60
4.9	Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang	64
4.10	Kematian Pada Bayi	68
4.11	Kematian Pada Balita (AKABa)	70
4.12	Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)	72
4.13	ASI Eksklusif	74
4.14	Usia Perkawinan Pertama	76
4.15	Pengguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA)	80
4.16	Penderita HIV / AIDS	82

BAB V EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN

5.1	Rumah Tangga Miskin	86
5.2	Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	90
5.3	Keanggotaan Koperasi	93
5.4	Penduduk Usia Kerja	96
5.5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	101
5.6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	104
5.7	Distribusi Sektoral Penyerapan Tenaga Kerja	106
5.8	Pekerja Perempuan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Dan Instansi Vertikal Di Kabupaten Pasaman Barat	108
5.9	Pekerja Formal dan Informal	112

BAB VI BIDANG POLITIK DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

6.1	Keterwakilan di Lembaga Legislatif	118
a.	Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat Menurut Partai.....	118
b.	Anggota DPRD Kabupaten Menurut Komisi	120
c.	Pengurus Organisasi Sosial dan Politik	122
d.	Pengurus Harian Parpol	124
6.2	Peranan dan Komposisi di Lembaga Yudikatif	125
a.	Jaksa menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin	126
b.	Hakim Menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin	128
c.	Polisi Menurut Jenis Kepangkatan dan Jenis Kelamin	129
6.3	Peran dan Posisi di Lembaga Eksekutif	132
a.	PNS Pusat Menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin	132
b.	PNS Pusat Menurut Golongan Ruang dan Jenis Kelamin	134
c.	PNS Daerah Menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin	136
d.	PNS Daerah Berdasar Golongan Ruang dan Jenis Kelamin	138
e.	PNS Daerah Menurut Tingkat Pendidikan	141
f.	Camat	142
g.	Walinagari	144
h.	Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan	146
i.	Pengurus dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa/ Bamus Nagari	147

BAB VII BIDANG HUKUM, SOSIAL-BUDAYA DAN LINGKUNGAN

7.1	Bidang Hukum dan Sosial Budaya	151
a.	Penghuni Lembaga Permayarakatan (Lapas) Menurut Jenis dan Jenjang Pendidikan	152
b.	Jumlah Penghuni LAPAS menurut Jenis Lapas dan Kelompok Umur	153
c.	Jumlah Penghuni Lapas menurut Jenis Lapas dan Jenis Kasus	155
d.	Jumlah Jenis Lapas menurut Kabupaten	156
e.	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	157
f.	Lansia Terlantar	159
g.	Penyandang Disabilitas (Penda)	161
7.2	Bidang Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan	169

BAB VIII KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

8.1	Kekerasan Terhadap Perempuan	172
1.	Perempuan Sebagai korban	172
a.	Kelompok Umur	173
b.	Tingkat Pendidikan	175
c.	Status Pekerjaan	177
d.	Status Perkawinan	179
e.	Jenis Pekerjaan	181
f.	Tempat Kejadian	183
g.	Jenis Pelayanan yang diberikan	185
h.	Frekuensi Kekerasan	187
2.	Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan	
a.	Tingkat Pendidikan	190
b.	Status Pekerjaan	192
c.	Hubungan dengan Korban	194
d.	Kebangsaan	195
8.2	Perlindungan Terhadap Anak	196
a.	Kekerasan Terhadap Anak	196
b.	Jenis Kekerasan Terhadap Anak	197
c.	Tempat Kejadian Kekerasan Terhadap Anak	200
d.	Lembaga Layanan Yang Menangani Kekerasan Terhadap Anak	202
e.	Sifat Lembaga Layanan Anak Korban Kekerasan	203
f.	Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Menurut Jenis Layanan Yang Diberikan	204
g.	Pelaku	206
h.	Anak Terlantar	208
i.	Kepemilikan Akta Kelahiran	210
j.	Lingkungan Keluarga & Pengasuhan Alternatif	213
8.3	Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)	216
a.	Sekolah Luar Biasa	217
b.	Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)	220
8.4	Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	223

8.5	Anak Dibawah 18 Tahun Korban Penyalah Gunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA)	225
BAB IX DAFTAR JENIS DATA KELEMBAGAAN		
9.1	Kelembagaan Pengarustamaan Gender	228
9.2	Kelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak	232
BAB X PENUTUP		236

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2022	6
Tabel 2.2 Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan Tahun 2022	8
Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022	11
Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Usia 0-18 Tahun Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Pasaman Barat Tahun 2022	13
Tabel 2.5 Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Produktif dan Jenis Kelamin Tahun 2022	14
Tabel 2.6 Rasio Ketergantungan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2022	15
Tabel 3.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2022	20
Tabel 3.2 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2022	22
Tabel 3.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur Sekolah dan Jenis Kelamin 2022	24
Tabel 3.4 Angka Melek Huruf (AMH) Menurut Kemampuan Baca Tulis dan Jenis Kelamin Tahun 2022	26
Tabel 3.5 Angka Putus Sekolah Menurut Kelompok Umur Sekolah dan Jenis Kelamin Tahun 2017	28
Tabel 3.6 Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin Tahun 2022	31
Tabel 3.7 Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Menurut Jenis Kelamin Tahun 2022	32
Tabel 3.8 Jumlah Guru Negeri Yang Telah Memperoleh Sertifikasi Jenjang Pendidikan SD, SLTP, dan SLTA Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2022	34

Tabel 3.9	Angka Kelulusan Paket A, B, dan C Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Tahun 2022	36
Tabel 4.1	Jumlah Kematian Ibu Melahirkan di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022	40
Tabel 4.2	Penyebab Kematian Ibu Karena Hamil, Melahirkan dan Nifas di Pasaman Barat Tahun 2022	42
Tabel 4.3	Jumlah Kelahiran Menurut Penolong Persalinan dan Kecamatan Tahun 2022	45
Tabel 4.4	Jumlah Kelahiran Bayi dengan Penolongan Persalinan oleh Dokter pada Rumah Sakit Di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022	47
Tabel 4.5	Jumlah Kelahiran Bayi (Bayi Lahir Hidup) Pada Rumah Sakit Di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022	47
Tabel 4.6	Kunjungan Ibu Hamil (K1/K4) ke Sarana Pelayanan Kesehatan Tahun 2022	49
Tabel 4.7	Jumlah Imunisasi <i>Tetanus Toxoid</i> (TT) Pada Ibu Hamil Kab. Pasaman Barat Tahun 2022	52
Tabel 4.8	Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapat Tablet Zat Besi (Fe) Menurut Kecamatan Tahun 2022	55
Tabel 4.9	Jumlah Peserta/Akseptor Keluarga Berencana (KB) Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2022	58
Tabel 4.10	Jumlah Balita Yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022	63
Tabel 4.11	Jumlah Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022	66
Tabel 4.12	Jumlah Kematian Bayi Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022	69
Tabel 4.13	Jumlah Kematian Balita (AKABa) Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022	71
Tabel 4.14	Jumlah Bayi Lahir, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), BBLR Dirujuk, dan Bergizi Buruk di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022	73

Tabel 4.15	Jumlah Bayi yang mendapat ASI Eksklusif selama 6 bulan di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022	75
Tabel 4.16	Perkawinan Anak Usia s/d 18 Tahun di Kabupaten Pasaman Barat	78
Tabel 4.17	Jumlah Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin, 2022	81
Tabel 4.18	Penderita HIV / AIDS di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022	82
Tabel 5.1	Kepala Rumah Tangga Miskin Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2022	89
Tabel 5.2	Pelaku Usaha Mikro Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2022	91
Tabel 5.3	Keanggotaan Koperasi menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2022	94
Tabel 5.4	Penduduk usia Kerja Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022	96
Tabel 5.5	Penduduk Usia Kerja 15+ Yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin dan Status Dalam Pekerjaan Utama di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022	97
Tabel 5.6	Penduduk Usia 15+ Berdasarkan Kelompok Umur dan Angkatan Kerja Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022	99
Tabel 5.7	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kab. Pasaman Barat 2022	102
Tabel 5.8	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022	105
Tabel 5.9	Komposisi Penduduk Yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin dan Lapangan Usaha Tahun 2022	106
Tabel 5.10	Pekerja Perempuan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Dan Instansi Vertikal di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022	108
Tabel 5.11	Penduduk 15 tahun keatas yang bekerja Berdasarkan Status Formal Informal, Lapangan Usaha, dan Jenis Kelamin Tahun 2022	113

Tabel 5.12	Jumlah Pekerja Pada Lembaga Swasta Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Pasaman Barat 2022	115
Tabel 6.1	Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat Menurut Partai dan Jenis Kelamin Tahun 2020 – 2024	119
Tabel 6.2	Anggota DPRD Kabupaten Pasaman barat Menurut Komisi dan Jenis Kelamin Tahun 2022	121
Tabel 6.3	Pengurus Partai Politik Menurut Jenis Kelamin di Pasaman Barat Tahun 2022	123
Tabel 6.4	Pengurus Harian Parpol Menurut Jenis Kelamin di Indonesia Tahun 2017	124
Tabel 6.5	Jaksa Menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022	127
Tabel 6.6	Hakim Menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2022	129
Tabel 6.7	Jumlah Polisi Menurut Jenis Kepangkatan dan Jenis Kelamin Tahun 2022	130
Tabel 6.8	Jumlah PNS Pusat Menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2022	133
Tabel 6.9	Jumlah PNS Pusat Menurut Golongan Ruang dan Jenis Kelamin Tahun 2022	135
Tabel 6.10	Jumlah PNS Daerah Menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2022	137
Tabel 6.11	Jumlah PNS Daerah Berdasar Golongan Ruang dan Jenis Kelamin 2022	139
Tabel 6.12	Jumlah PNS Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2022	141
Tabel 6.13	Jumlah Camat Menurut Jenis Kelamin di Kab. Pasaman Barat Tahun 2022	143
Tabel 6.14	Jumlah Wali Nagari Menurut Jenis Kelamin di Kab. Pasaman Barat Tahun 2022	145
Tabel 6.15	Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan menurut Jenis Kelamin di Indonesia Tahun 2022	147

Tabel 6.16	Pengurus dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa/ Bamus Nagari menurut Jenis Kelamin di Pasaman Barat Tahun 2022	148
Tabel 7.1	Jumlah Penghuni Lapas Menurut Jenis Lapas dan Jenjang Pendidikan Tahun 2022	152
Tabel 7.2	Jumlah Penghuni LAPAS Menurut Jenis Lapas dan Kelompok Umur Tahun 2022	154
Tabel 7.3	Jumlah Penghuni LAPAS Menurut Jenis Lapas dan Jenis Kasus Tahun 2022	155
Tabel 7.4	Jumlah Jenis Lapas di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022	156
Tabel 7.5	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022	158
Tabel 7.6	Jumlah Lansia Terlantar Miskin Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022	160
Tabel 7.7	Jenis dan Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Menurut Kecamatan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022	162
Tabel 7.8	Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Kecamatan di Pasaman Barat Tahun 2022	166
Tabel 7.9	Jumlah Penyandang Disabilitas/ Cacat Anak dibawah Umur 18 Tahun Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat, 2022	167
Tabel 7.10	Data Terpilah Bidang SDA Dan Lingkungan Tahun 2019	170
Tabel 8.1	Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022	173
Tabel 8.2	Korban Kekerasan terhadap Perempuan menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022	175
Tabel 8.3	Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Status Pekerjaan di Kab. Pasaman Barat Tahun 2022	177
Tabel 8.4	Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Status Perkawinan di Kab. Pasaman Barat Tahun 2022	179

Tabel 8.5	Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Jenis Kekerasan di Kab. Pasaman Barat Tahun 2022	181
Tabel 8.6	Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Tempat Kejadian di Kab. Pasaman Barat Tahun 2022	183
Tabel 8.7	Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Jenis Pelayanan Yang Diberikan di Kab. Pasaman Barat Tahun 2022	185
Tabel 8.8	Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Frekuensi Kekerasan di Kab. Pasaman Barat Tahun 2022	187
Tabel 8.9	Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Tingkat Pendidikan di Kab. Pasaman Barat Tahun 2022	190
Tabel 8.10	Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Status Pekerjaan di Kab. Pasaman Barat Tahun 2022	192
Tabel 8.11	Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Hubungan Dengan Korban di Kab. Pasaman Barat Tahun 2022	194
Tabel 8.12	Pelaku Kekerasan terhadap Perempuan menurut Kebangsaan di Pasaman Barat Tahun 2022	195
Tabel 8.13	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak Menurut Kecamatan dan Jenis Kekerasan Tahun 2022	198
Tabel 8.14	Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Menurut Kecamatan dan Tempat Kejadian Tahun 2022	200
Tabel 8.15	Jumlah Lembaga Layanan Yang Menangani Anak Korban Kekerasan Menurut Kabupaten Tahun 2022	203
Tabel 8.16	Lembaga yang Menangani Anak Korban Kekerasan Menurut Sifatnya di Kab. Pasaman Barat Tahun 2022	203
Tabel 8.17	Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak menurut Kecamatan Jenis Pelayanan Yang Diberikan dan Jenis Kelamin Tahun 2022	204
Tabel 8.18	Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Menurut Hubungan Pelaku dan Jenis Kelamin Tahun 2022	207
Tabel 8.19	Jumlah Anak Terlantar Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2022	209

Tabel 8.20	Jumlah Anak Yang Berumur Dibawah 18 Tahun Dengan Kepemilikan Akta Lahir Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2022	210
Tabel 8.21	Jumlah Anak Yang Ditampung di Panti Asuhan dan Non Panti Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2022	214
Tabel 8.22	Jumlah Panti Asuhan Yatim Piatu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022	215
Tabel 8.23	Jumlah SLB Negeri dan Swasta Menurut Kabupaten Tahun 2022 Kab. Pasaman Barat	217
Tabel 8.24	Jumlah Siswa SLB Negeri dan Swasta Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2022	218
Tabel 8.25	Jumlah Guru SLB Negeri dan Swasta Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2022	219
Tabel 8.26	Jenis dan Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Tahun 2022	220
Tabel 8.27	Jumlah Anak berhadapan dengan Hukum Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2022	224
Tabel 8.28	Peraturan Per Undang-Undangan yang digunakan dalam penanganan ABH Tahun 2022 Kabupaten Pasaman Barat	224
Tabel 8.29	Jumlah Anak Dibawah 18 Tahun Korban Penyalah Gunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA)	226
Tabel 9.1	Daftar Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Berdasarkan Kabupaten Tahun 2022	229
Tabel 9.2	Jumlah dan Jenis Kebijakan/Program/Kegiatan Yang Responsif Gender Tahun 2022	229
Tabel 9.3	Jumlah dan jenis Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Perempuan Tahun 2022	230
Tabel 9.4	Jumlah dan Jenis Kebijakan/Program/Kegiatan tentang Perlindungan Perempuan Tahun 2022	230
Tabel 9.5	Daftar Kelembagaan Unit Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Pasaman Barat Tahun 2022	231

Tabel 9.6	Gugus Tugas dan Kebijakan terkait Pemeberantasan Perdagangan Orang Tahun 2022	231
Tabel 9.7	Jumlah dan jenis Peraturan Daerah yang peduli Anak Tahun 2022	232
Tabel 9.8	Jumlah Kelembagaan Tumbuh Kembang dan Kelangsungan Hidup Anak Tahun 2022	233
Tabel 9.9	Jumlah Kelembagaan Partisipasi Anak Tahun 2022	233
Tabel 9.10	Jumlah Kelembagaan Untuk Perlindungan Anak Tahun 2022	234

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2022	7
Gambar 2.2 Sex Ratio Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2022	8
Gambar 2.3 Perbandingan Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan Tahun 2022	9
Gambar 2.4 Piramida Penduduk Pasaman Barat Tahun 2022	10
Gambar 2.5 Komposisi Penduduk Laki-laki dan Perempuan Menurut Kelompok Umur Tahun 2022	12
Gambar 2.6 Jumlah Penduduk Usia 0-18 Tahun Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Pasaman Barat Tahun 2022	13
Gambar 2.7 Komposisi Penduduk Menurut Umur Produktif dan Jenis Kelamin tahun 2022	15
Gambar 3.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2022	21
Gambar 3.2 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2022	23
Gambar 3.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2022	25
Gambar 3.4 Angka Melek Huruf (AMH) Menurut Kemampuan Baca Tulis dan Jenis Kelamin Tahun 2022	27
Gambar 3.5 Angka Putus Sekolah Menurut Kelompok Umur Sekolah dan Jenis Kelamin Tahun 2017	30
Gambar 3.6 Pendidikan Tertinggi yang Dimiliki menurut Jenis Kelamin Tahun 2022	31
Gambar 4.1 Jumlah Kematian Ibu Melahirkan di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022	41
Gambar 4.2 Penyebab Kematian Ibu karena Hamil, Melahirkan dan Nifas di Pasaman Barat Tahun 2022	44

Gambar 4.3	Jumlah Kelahiran Menurut Penolong Persalinan dan Kecamatan, Tahun 2022	46
Gambar 4.4	Kunjungan Ibu Hamil (K1/K4) ke Sarana Pelayanan Kesehatan Tahun 2022	50
Gambar 4.5	Jumlah Imunisasi Tetanus Toxoid Pada Ibu Hamil Kab.Pasaman Barat Tahun 2022	53
Gambar 4.6	Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapat Tablet Zat Besi (Fe) Menurut Kecamatan Tahun 2022	56
Gambar 4.7	Jumlah Peserta/Akseptor Keluarga Berencana (KB) Perempuan Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2022	59
Gambar 4.8	Jumlah Balita Yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022	64
Gambar 4.9	Jumlah Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022	67
Gambar 4.10	Jumlah Kematian Bayi Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022	70
Gambar 4.11	Jumlah Kematian Balita (AKABa) Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022	72
Gambar 4.12	Jumlah Bayi Lahir, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), BBLR Dirujuk, dan Bergizi Buruk di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022	74
Gambar 4.13	Jumlah Bayi yang mendapat ASI Eksklusif selama 6 bulan di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022	76
Gambar 4.14	Perkawinan Anak Usia s/d 18 Tahun Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022	79
Gambar 5.1	Kepala Rumah Tangga Miskin Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2022	90
Gambar 5.2	Keanggotaan Koperasi Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2022	95
Gambar 5.3	Penduduk Usia Kerja di Kab. Pasaman Barat Tahun 2022	97

Gambar 5.4	Penduduk Usia 15+ Yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin Dan Status Dalam Pekerjaan Utama di Kab. Pasaman Barat Tahun 2022	99
Gambar 5.5	Jumlah Angkatan Kerja (Penduduk Usia Kerja) Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022	101
Gambar 5.6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Pasaman Barat Menurut Kecamatan Tahun 2022	103
Gambar 5.7	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kab. Pasaman Barat Tahun 2022	105
Gambar 5.8	Pekerja Perempuan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Dan Instansi Vertikal di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022	111
Gambar 5.9	Penduduk 15 tahun keatas yang bekerja Berdasarkan Status Formal Informal, Lapangan Usaha, dan Jenis Kelamin Tahun 2022	114
Gambar 5.10	Jumlah Pekerja Pada Lembaga Swasta Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Pasaman Barat 2022	116
Gambar 6.1	Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat Menurut Partai dan Jenis Kelamin Tahun 2020 - 2024	120
Gambar 6.2	Anggota DPRD Kabupaten Pasaman barat Menurut Komisi dan Jenis Kelamin Tahun 2022	122
Gambar 6.3	Pengurus Harian Parpol Menurut Jenis Kelamin di Indonesia Tahun 2022	125
Gambar 6.4	Jumlah Polisi Menurut Jenis Kepangkatan dan Jenis Kelamin Tahun 2022	131
Gambar 6.5	PNS Pusat Menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2022	134
Gambar 6.6	Jumlah PNS Pusat Menurut Golongan Ruang dan Jenis Kelamin Tahun 2022	136
Gambar 6.7	Jumlah PNS Daerah Menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2022	138
Gambar 6.8	PNS Daerah Berdasar Golongan Ruang dan Jenis Kelamin Tahun 2022	140

Gambar 6.9	PNS Daerah Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2022	142
Gambar 7.1	Jumlah Penghuni Lapas Menurut Jenis Lapas dan Jenjang Pendidikan Tahun 2022	153
Gambar 7.2	Jumlah Penghuni LAPAS Menurut Jenis Lapas dan Kelompok Umur Tahun 2022	154
Gambar 7.3	Jumlah Penghuni Lapas Menurut Jenis Lapas dan Jenis Kasus Tahun 2022	156
Gambar 7.4	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022	159
Gambar 7.5	Jenis dan Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Menurut Kecamatan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022	165
Gambar 7.6	Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Kecamatan di Pasaman Barat Tahun 2022	167
Gambar 7.7	Jumlah Penyandang Disabilitas/Cacat Anak dibawah Umur 18 Tahun Menurut Kecamatan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022	168
Gambar 8.1	Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022	174
Gambar 8.2	Korban Kekerasan terhadap Perempuan menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022	176
Gambar 8.3	Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Status Pekerjaan di Kab. Pasaman Barat Tahun 2022	178
Gambar 8.4	Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Status Perkawinan di Kab. Pasaman Barat Tahun 2022	180
Gambar 8.5	Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Jenis Kekerasan di Kab. Pasaman Barat Tahun 2022	182
Gambar 8.6	Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Tempat Kejadian di Kab. Pasaman Barat Tahun 2022	184

Gambar 8.7	Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Jenis Pelayanan Yang Diberikan di Kab. Pasaman Barat Tahun 2022	186
Gambar 8.8	Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Frekuensi Kekerasan di Kab. Pasaman Barat Tahun 2022	188
Gambar 8.9	Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Tingkat Pendidikan di Kab. Pasaman Barat Tahun 2022	191
Gambar 8.10	Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Status Pekerjaan di Kab. Pasaman Barat Tahun 2022	193
Gambar 8.11	Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Hubungan Dengan Korban di Kab. Pasaman Barat Tahun 2022	195
Gambar 8.12	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak Menurut Kecamatan dan Jenis Kekerasan Tahun 2022	199
Gambar 8.13	Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Menurut Kecamatan dan Tempat Kejadian Tahun 2022	201
Gambar 8.14	Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak menurut Kecamatan Jenis Pelayanan Yang Diberikan dan Jenis kelamin Tahun 2022	205
Gambar 8.15	Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Menurut Hubungan Pelaku dan Jenis Kelamin Tahun 2022	208
Gambar 8.16	Jumlah Anak Yang Berumur Dibawah 18 Tahun Yang Memiliki Akta Lahir Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2022	212
Gambar 8.17	Jenis dan Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Tahun 2022	222

BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan suatu daerah adalah sumber daya manusia yang berkualitas baik dalam hal kemampuan (*skill*) maupun produktivitasnya. Untuk meningkatkan daya saing dan pembangunan suatu daerah perlu meningkatkan kesetaraan gender yaitu meningkatkan hak, tanggung jawab, kapabilitas dan peluang yang sama bagi perempuan dan laki-laki. Dimana selama ini masih dikontaminasi oleh diskriminasi/kesenjangan gender yang sangat dirasakan oleh kaum perempuan.

Masih adanya isu gender disebabkan oleh adanya kesenjangan atau *diskriminasi* gender yang pada prakteknya sering menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi kaum perempuan baik dilingkungan rumah tangga, pekerjaan, masyarakat, kultur, maupun negara. Oleh karena itu perlu upaya untuk menghilangkan kesenjangan tersebut di Indonesia maupun berbagai belahan dunia dengan mengevaluasi manfaat hasil pembangunan terhadap laki-laki dan perempuan itu sendiri.

Menurut PBB, kesetaraan gender merupakan pandangan bahwa semua orang menerima perlakuan yang setara dan tidak diskriminasi berdasarkan jenis kelamin mereka. Pada September 2015 PBB meluncurkan program pembangunan berkelanjutan yang diberi nama "*Sustainable Development Goals*" (SDGs) untuk menggantikan program sebelumnya "*Millennium Development Goals*" (MDGs) yang telah berakhir 2015. SDGs memiliki 17 program dan berlaku bagi semua negara, termasuk Indonesia. Isu gender masuk dalam agenda pembangunan Tujuan 5. Isi tujuan tersebut diantaranya mencapai kesetaraan gender,

memberdayakan perempuan, dan mengakhiri segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan.

Di Indonesia, isu kesetaraan gender juga tertuang dalam visi pembangunan nasional yaitu mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa adil berarti tidak ada pembatasan/diskriminasi dalam bentuk apapun, baik individu, wilayah, maupun jenis kelamin. Penghapusan diskriminasi gender di semua bidang kemudian menjadi isu yang terus menerus dibahas sebagai target pembangunan.

Data terpilah menurut jenis kelamin dapat membuka wawasan tentang adanya kesenjangan gender. Pemilahan menurut jenis kelamin di berbagai bidang dapat menunjukkan status, peran, kondisi dan kebutuhan masyarakat perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan, serta permasalahan yang dihadapi dalam upaya mengurangi kesenjangan. Pemilahan data menurut jenis kelamin merupakan prasyarat utama dilakukannya analisis gender yang bermanfaat dalam penyusunan analisis kebijakan dan penyusunan anggaran yang responsif gender. Untuk mengevaluasi sejauh mana kesetaraan dan pemberdayaan gender yang sudah tercapai dapat dilihat dari berbagai ukuran. Indikator-indikator yang menunjukkan capaian- capaian pembangunan berbasis gender akan memberikan gambaran yang nyata tentang pengarusutamaan gender di Kabupaten Pasaman Barat.

Terkait dengan hal diatas, maka disusunlah buku yang berjudul “Profil Gender dan Anak Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 ” sebagai gambaran tentang keadaan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan di Kabupaten Pasaman Barat.

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Profil Gender dan Anak Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 ini adalah untuk menyajikan data terpilah yang dapat menginformasikan lebih jelas kondisi perempuan dibanding laki-laki terkait dalam masalah kependudukan, karakteristik rumah tangga, pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana, ketenagakerjaan, sektor publik, kekerasan terhadap perempuan, sosial ekonomi lainnya, dan kesulitan fungsional penyandang disabilitas, serta memberikan gambaran dan informasi tentang kondisi anak Kabupaten Pasaman Barat yang diamati dari aspek lingkungan keluarga, pendidikan, kesehatan dan perlindungan anak baik terhadap masalah sosial, hukum, kekerasan, anak bekerja dan anak cacat.

1.3. Sasaran

Penggalan data gender yang menyangkut semua isu dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan ketenagakerjaan, pertanian, politik, sosial budaya, hukum dan data anak meliputi tumbuh kembang, kelangsungan hidup, perlindungan data kelembagaan yang meliputi kelembagaan PUG, kelembagaan PUHA di wilayah Kabupaten Pasaman Barat.

1.4 Sumber Data

Data-data yang disajikan dalam publikasi Profil Gender dan Anak Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 ini diperoleh dari berbagai sumber yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pasaman Barat, Pengadilan Tinggi Kabupaten Pasaman Barat, Polres Kabupaten Pasaman Barat, Kejaksaan Tinggi Kabupaten Pasaman Barat, dan Organisasi Perangkat Daerah serta Instansi Vertikal lainnya yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender Kabupaten Pasaman Barat.

1.5 Input

- a. Merupakan kelanjutan dari buku data terpilah gender dari tahun sebelumnya
- b. Ketersediaan data terpilah gender menjadi suatu kebutuhan semua pihak pemangku kepentingan

1.6 Output

- a. Mengidentifikasi perbedaan kondisi perempuan dan laki - laki termasuk anak dalam dimensi tempat dan waktu
- b. Mengidentifikasi masalah, membangun opsi dan memilih opsi yang paling efektif untuk kemaslahatan perempuan dan laki -laki yang responsif terhadap masalah kebutuhan pengalaman perempuan dan laki - laki
- c. Buku Profil Gender dan Anak Tahun 2023

1.7 Hasil Yang Diinginkan

- a. Buku Profil Gender Dan Anak Tahun 2023
- b. Data gender dan anak untuk memberikan acuan bagi pemerintah dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak
- c. Adanya kerjasama dengan lembaga sektoral dalam penyelenggaraan data gender dan anak
- d. Base data gender dan anak, dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Bab II

Kependudukan



BAB II

KEPENDUDUKAN

Penduduk atau masyarakat merupakan bagian penting atau titik sentral dalam pembangunan, karena peran penduduk sejatinya adalah sebagai subjek dan objek dari pembangunan itu sendiri. Jumlah penduduk bukan hanya merupakan modal, tetapi juga merupakan beban dalam pembangunan. Pertumbuhan penduduk yang meningkat berkaitan dengan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan jumlah penduduk yang sangat tinggi tersebut akan melahirkan beragam masalah dalam kehidupan. Masalah utama yang dihadapi di bidang kependudukan di Indonesia adalah masih tingginya pertumbuhan penduduk dan kurang seimbangnya penyebaran dan struktur umur penduduk.

Untuk menyukseskan pembangunan di suatu daerah, diperlukan komponen penduduk yang berkualitas. Karena dari penduduk berkualitas itulah memungkinkan untuk bisa mengolah dan mengelola potensi sumber daya alam dengan baik, tepat, efisien, dan maksimal, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Oleh sebab itu, dalam menunjang keberhasilan pembangunan, pemerintah tidak saja mengarahkan pada upaya pengendalian penduduk tetapi juga menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusianya itu sendiri. Oleh karena itu, informasi tentang komponen-komponen kependudukan seperti jumlah, komposisi, sertadistribusi penduduk perjenis kelamin sangat diperlukan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan selanjutnya.

2.1 Jumlah dan Persebaran Penduduk

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2022

Kecamatan		Jenis Kelamin			Sex Ratio
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1	Sungai Beremas	14.670	13.806	28.476	106
2	Ranah Batahan	14.149	13.963	28.112	101
3	Koto Balingka	15.680	15.584	31.264	101
4	Sungai Aur	18.628	18.217	36.845	102
5	Lembah Melintang	25.429	25.036	50.465	102
6	Gunung Tuleh	12.595	12.204	24.799	103
7	Talamau	15.572	14.825	30.397	105
8	Pasaman	40.173	39.418	79.591	102
9	Luhak Nan Duo	22.851	22.306	45.157	102
10	Sasak Ranah Pasisie	7.710	7.474	15.184	103
11	Kinali	36.739	35.450	72.189	104
Pasaman Barat		224.196	218.283	442.479	103

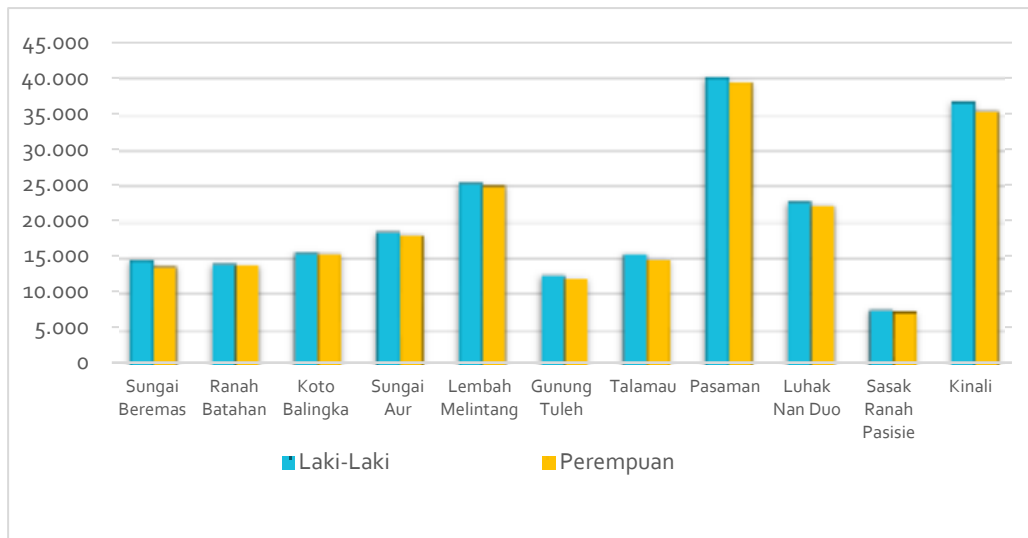
Sumber : BPS (Proyeksi Sensus Penduduk 2020)

Berdasarkan hasil proyeksi Sensus Penduduk tahun 2022 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Kabupaten Pasaman Barat mencapai 442.479 jiwa dengan komposisi jumlah penduduk laki-laki sebanyak 224.196 jiwa (50,67 %) dan penduduk perempuan sebanyak 218.283 jiwa (49,33 %). Hal ini menunjukkan tren bahwa komposisi penduduk yang hampir seimbang antara penduduk laki-laki dan perempuan.

Total *Sex Ratio* (Rasio Jenis Kelamin) Penduduk Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022 adalah 102,71 artinya terdapat 103 jiwa penduduk laki-laki diantara 100 jiwa penduduk perempuan. Sex ratio adalah perbandingan antara banyaknya jumlah penduduk laki-laki dengan banyaknya jumlah penduduk perempuan pada

suatu daerah dalam waktu tertentu. Dinyatakan dalam banyak penduduk laki-laki per 100 orang perempuan.

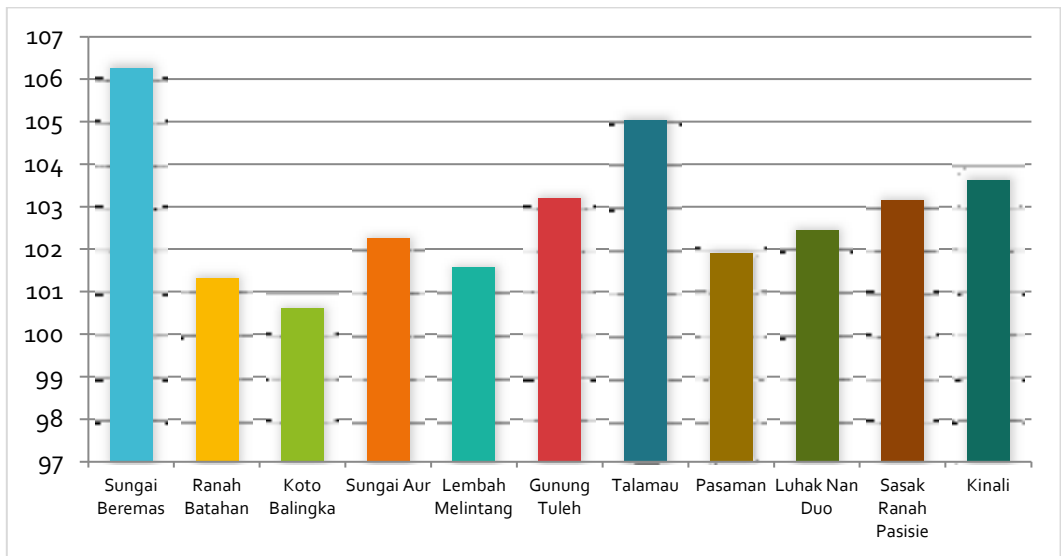
Gambar 2.1 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2022



Sumber : BPS (Proyeksi Sensus Penduduk 2020)

Dari gambar 2.1 terlihat persebaran penduduk menurut kecamatan dan jenis kelamin, yang belum merata di setiap kecamatan. Kecamatan Pasaman sebagai ibu kota Kabupaten Pasaman Barat memiliki penduduk yang jauh lebih banyak dibanding kecamatan lainnya yaitu sebanyak 77.770 jiwa. Sedangkan kecamatan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Kecamatan Sasak Ranah Pasisie yang hanya 16.371 jiwa.

Gambar 2.2 Sex Ratio Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2022



Sumber : BPS (Proyeksi Sensus Penduduk 2020)

Tabel 2.2 Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan Tahun 2022

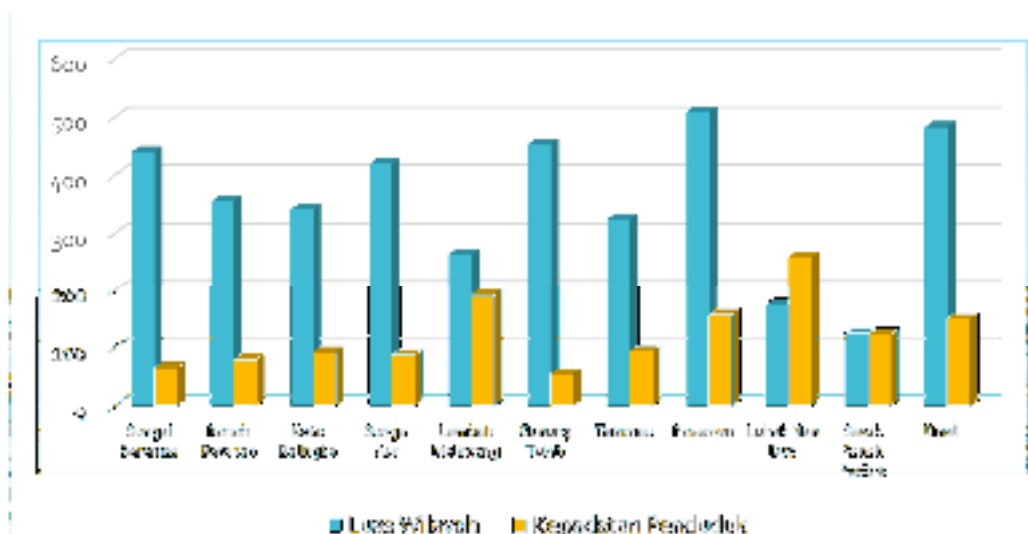
	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk per Km ²
1	Sungai Beremas	440,48	65
2	Ranah Batahan	354,88	79
3	Koto Balingka	340,78	92
4	Sungai Aur	420,16	88
5	Lembah Melintang	263,77	191
6	Gunung Tuleh	453,97	55
7	Talamau	324,24	94
8	Pasaman	508,93	156
9	Luhak Nan Duo	174,21	259
10	Sasak Ranah Pasisie	123,71	123
11	Kinali	482,64	150
	Pasaman Barat	3.887,77	114

Sumber : BPS (Proyeksi Sensus Penduduk 2020)

Kabupaten Pasaman Barat dengan luas wilayah 3.887,77 Km² ini memiliki kepadatan penduduk 114 jiwa per Km² dimana Kecamatan Luhak Nan Duo merupakan kecamatan terpadat yakni 259 jiwa per Km², dan Kecamatan Gunung Tuleh sebagai kecamatan terjarang dengan kepadatan penduduk 55 jiwa per Km².

Kepadatan penduduk adalah banyaknya penduduk per satuan luas. Kegunaannya adalah sebagai dasar kebijakan pemerataan penduduk dalam program transmigrasi. Kepadatan penduduk kasar atau *crude population density* (CPD) menunjukkan jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah. Luas wilayah yang dimaksud adalah luas seluruh daratan pada suatu wilayah administrasi. Semakin padat suatu wilayah tentunya menuntut perhatian yang lebih, sebab semakin tinggi kepadatan penduduk akan semakin sulit memenuhi kebutuhan pokok seluruh penduduk, terutama perumahan karena luas lahan menjadi terbatas.

Gambar 2.3 Perbandingan Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2022



Sumber : BPS (Proyeksi Sensus Penduduk 2020)

2.2 Distribusi Penduduk

Distribusi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin dapat digambarkan dalam bentuk piramida penduduk. Piramida penduduk menggambarkan perkembangan penduduk pada setiap kelompok umur yang berbeda. Piramida penduduk adalah dua buah diagram batang, pada satu sisi menunjukkan jumlah penduduk laki-laki dan pada sisi lainnya menunjukkan jumlah penduduk perempuan dalam kelompok interval usia penduduk lima tahunan.

Grafik dapat menunjukkan jumlah penduduk atau presentase jumlah penduduk terhadap jumlah penduduk total. Perubahan pada bentuk piramida penduduk akan dipengaruhi oleh kelahiran, tingkat kelangsungan hidup setiap kelompok umur serta proses perpindahan penduduk.

Gambar 2.4 Piramida Penduduk Pasaman Barat Tahun 2022



Sumber: BPS (Proyeksi Sensus Penduduk 2020)

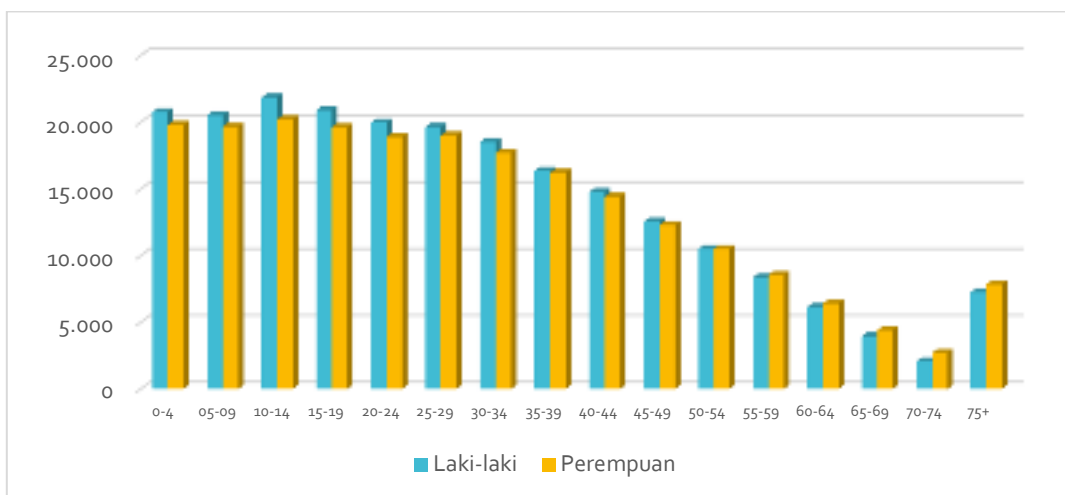
Gambar 2.4 menunjukkan bahwa struktur umur penduduk Kabupaten Pasaman Barat didominasi oleh penduduk kelompok umur muda yang ditandai dengan alas piramida yang lebih lebar yakni pada kelompok umur 0-4 tahun, 5-9 tahun dan 10-14 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Pasaman Barat memiliki karakteristik expansive seperti yang digambarkan oleh piramida penduduk yang berbentuk limas dengan dasar yang melebar dan slope yang tidak terlalu curam. Bentuk piramida seperti ini umumnya dijumpai di negara-negara berkembang, disebabkan oleh tingkat kelahiran yang tinggi seperti yang terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-4	20.763	19.810	40.573
5-9	20.511	19.651	40.162
10-14	21.864	20.223	42.087
15-19	20.905	19.626	40.531
20-24	19.970	18.887	38.857
25-29	19.650	19.024	38.674
30-34	18.523	17.705	36.228
35-39	16.362	16.224	32.586
40-44	14.777	14.422	29.199
45-49	12.562	12.306	24.868
50-54	10.502	10.503	21.005
55-59	8.368	8.547	16.915
60-64	6.156	6.409	12.565
65-69	3.956	4.408	8.364
70-74	2.070	2.696	4.766
75+	7.257	7.842	15.099
Jumlah	224.196	218.283	442.479

Sumber: BPS (Proyeksi Sensus Penduduk 2020)

Gambar 2.5 Komposisi Penduduk Laki-laki dan Perempuan Menurut Kelompok Umur Tahun 2022



Sumber : BPS (Proyeksi Sensus Penduduk 2020)

Gambar 2.5 menunjukkan komposisi penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur. Persentase tertinggi berada pada umur 10-14 tahun baik pada penduduk laki-laki, maupun perempuan. Penduduk Laki-laki pada usia 10-14 tahun sebesar 4,94 persen dan Perempuan sebesar 4,57 persen dari total penduduk. Persentase terendah berada pada kelompok umur 70-74 tahun. Penduduk Laki-laki pada kelompok umur 70-74 tahun sebesar 0,47 persen dan Perempuan sebesar 0,61 persen dari total penduduk.

Pada Diagram di atas terlihat bahwa komposisi penduduk menurut kelompok umur didominasi oleh penduduk dalam usia produktif. Kesimpulannya adalah bahwa Negara didominasi penduduk usia muda.

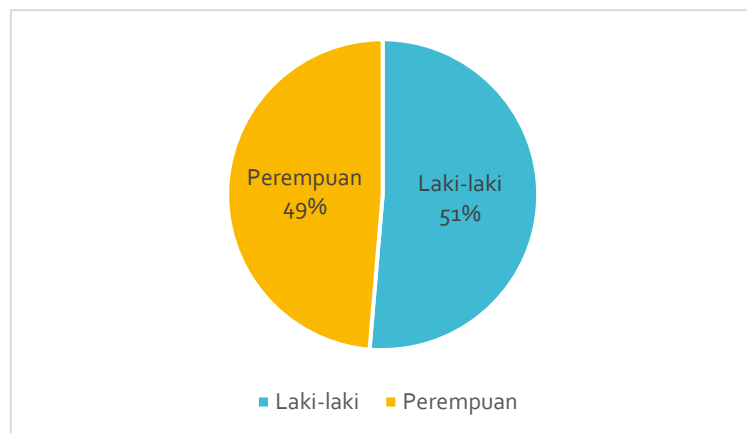
Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Usia 0-18 Tahun Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Pasaman Barat Tahun 2022

Kabupaten	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Pasaman Barat	79.910	75.754	155.664

Sumber: BPS, Proyeksi Interim SP2020

Berdasarkan table 2.4 diatas terlihat bahwa penduduk usia 0-18 tahun di Kabupaten Pasaman Barat berjumlah 155.664 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 79.910 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 75.754 jiwa.

Gambar 2.6 Jumlah Penduduk Usia 0-18 Tahun Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Pasaman Barat Tahun 2022



Sumber : BPS, Proyeksi Interim SP2020

2.3 Angka Beban Ketergantungan

Dependency ratio juga dapat disebut dengan angka ketergantungan atau beban ketergantungan (dependency ratio) adalah angka yang menunjukkan besarnya penduduk golongan umur produktif yang dapat menghasilkan barang

dan jasa ekonomi bagi golongan umur muda dan umur tua (golongan umur tidak produktif) atau angka ketergantungan atau beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif terhadap penduduk usia non produktif.

Semakin tinggi angka Dependency Ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung oleh penduduk produktif. Jadi semakin sedikit jumlah usia non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) akan mengurangi angka beban tanggungan, yang mengindikasikan bahwa akan semakin banyak kesempatan penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas diri.

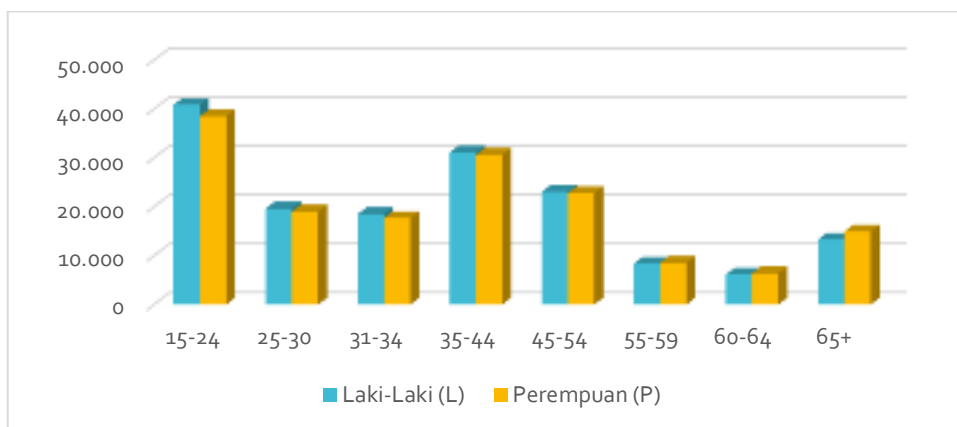
Mereka yang digolongkan dalam kelompok umur bekerja adalah berumur 15 tahun ke atas sampai dengan umur 64 tahun. Sedangkan yang berumur 14 tahun ke bawah dan umur 65 tahun keatas digolongkan dalam usia beban ketergantungan. Komposisi penduduk menurut kelompok umur produktif digolongkan menjadi tiga kelompok, yaitu belum produktif (umur 0-14 tahun), produktif (umur 15-64 tahun), tidak produktif lagi (65+ tahun).

Tabel 2.5 Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Produktif dan Jenis Kelamin Tahun 2022

Kelompok Umur Produktif	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
15-24	40.875	38.513	79.388
25-30	19.650	19.024	38.674
31-34	18.523	17.705	36.228
35-44	31.139	30.646	61.785
45-54	23.064	22.809	45.873
55-59	8.368	8.547	16.915
60-64	6.156	6.409	12.565
65+	13.283	14.946	28.229
Jumlah	161.058	158.599	319.657

Sumber : BPS (Proyeksi Sensus Penduduk 2020)

Gambar 2.7 Komposisi Penduduk Menurut Umur Produktif dan Jenis Kelamin Tahun 2022



Sumber : BPS (Proyeksi Sensus Penduduk 2020)

Dari Tabel 2.5 menunjukkan bahwa persentase kelompok umur produktif (15-64 tahun) laki-laki lebih besar dari perempuan. Apabila dinyatakan dalam persentase yaitu 46,23 persen laki-laki dan 44,94 persen perempuan. Sedangkan kelompok umur tidak produktif (65+) persentase penduduk perempuan lebih besar dari laki-laki yaitu 4,68 persen perempuan dan 4,16 persen jiwa laki-laki. Hal ini menggambarkan pada usia senja penduduk perempuan lebih tinggi harapan hidupnya dari penduduk laki-laki.

Tabel 2.6 Rasio Ketergantungan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2022

Kelompok Umur		Jenis Kelamin		Rasio
		Laki-Laki	Perempuan	
1	0-14	62.943	59.825	122.768
2	15-64	152.609	147.625	300.234
3	65+	8.644	10.833	19.477
Total		224.196	218.283	442.479

Sumber : BPS, Proyeksi Interim SP2020

Lanjutan Tabel 2.6

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Rasio
	Laki-Laki	Perempuan	
1 Rasio Ketergantungan Muda (Penduduk 0-14 tahun)	41,24	40,52	40,88
2 Rasio Ketergantungan Tua (Penduduk 65+)	5,66	7,34	6,50
3 Rasio Ketergantungan (Penduduk Usia 0-14 dan 65+)	46,91	47,86	47,39

Sumber : BPS, Proyeksi Interim SP2020

Rasio ketergantungan penduduk Pasaman Barat tahun 2022 alah sebesar 47,39 persen. Angka ini berarti bahwa setiap 100 (seratus) penduduk usia produktif di Pasaman Barat mampu menanggung penduduk usia tidak produktif (anak dan lansia) sekitar 47-48 orang. Sedangkan bila dirinci menurut jenis kelamin, rasio ketergantungan antara penduduk laki-laki dan perempuan tidak berbeda terlalu jauh. Rasio ketergantungan pada penduduk laki-laki tercatat sebesar 46,91 persen dan penduduk perempuan sebesar 47,86 persen.

Secara umum, yang menjadi beban tanggungan penduduk usia non produktif di Pasaman Barat adalah penduduk usia muda (0-14 tahun). Pada kelompok ini angka Young Dependent Ratio (YDR) atau rasio ketergantungan muda mencapai 40,88 persen, untuk laki-laki sebesar 41,24 persen dan perempuan sebesar 50,52 persen. Sedangkan angka beban tanggungan penduduk usia tua (65+ tahun), yang dilihat dari Old Dependent Ratio (ODR) hanya sekitar 6,50 persen, yakni untuk laki-laki sebesar 5,66 persen dan perempuan 7,34 persen. Jadi kesimpulannya adalah setiap 100 penduduk usia produktif mampu menanggung sekitar 40-41 orang usia muda dan 6-7 orang lansia.

BAB III

PENDIDIKAN



BAB III

PENDIDIKAN

Pendidikan adalah kegiatan belajar mengajar pada semua tingkatan dan satuan pendidikan baik formal, informal dan non formal. Terdapat tiga pilar untuk mengkaji pelaksanaan pengarusutamaan gender di bidang pendidikan yaitu akses dan pemerataan, mutu dan relevansi, tata kelola dan pencitraan pendidik. Tolok ukur yang digunakan antara lain angka partisipasi sekolah di berbagai jenjang, angka putus sekolah/ angka buta huruf, guru dan kepala sekolah. Pendidikan merupakan tolok ukur pembangunan sumberdaya manusia, disamping kesehatan dan pendapatan (faktor ekonomi). Terpenuhinya pendidikan yang layak bagi setiap penduduk erat kaitannya dengan kualitas sumberdaya manusia sebagai pelaku pembangunan. Kualitas penduduk harus ditingkatkan agar pembangunan dapat berjalan sesuai dengan harapan. Dalam dimensi Gender, perlu disajikan data terpilah berdasar jenis kelamin sehingga diketahui sejauh mana akses, peluang, kontrol, dampak dan manfaat pendidikan bagi perempuan dan laki-laki serta bias-bias Gender yang ditimbulkan.

Indikator pendidikan seperti Angka Melek Huruf (AMH), status pendidikan, rata-rata lama sekolah dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan merupakan indikator yang dapat menunjukkan tingkat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya bagi perempuan dan anak. Semakin tinggi pendidikan dan rata-rata lama sekolah bagi perempuan akan berdampak kepada pola pikir dan tingkat kesejahteraannya. Perempuan yang berkualitas diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam mensukseskan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga dan bangsa.

Begitu pentingnya pendidikan dalam kehidupan, sehingga pemerintah menjadikan pendidikan sebagai hak dasar setiap manusia Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kesempatan memperoleh pendidikan diberikan kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Tetapi bagi sebagian masyarakat masih ada yang berpandangan bahwa pendidikan lebih diutamakan untuk kaum laki-laki dibanding perempuan, karena adanorma dimasyarakat yang menganggap bahwa perempuan dibutuhkan untuk membantu mengurus rumah tangga, sedangkan laki-laki berkewajiban dalam mencari nafkah dan membantu menambah penghasilan rumah tangga sehingga menyebabkan pendidikan kaum perempuan masih tertinggal dibanding kaum laki-laki.

3.1 Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

Angka Partisipasi Kasar digunakan dibagi dalam tiga kelompok jenjang pendidikan yaitu SD (penduduk usia 7-12 tahun), SMP (penduduk usia 13-15 tahun), dan SMA (penduduk usia 16-18 tahun). Semakin tinggi nilai APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu. Nilai APK bisa lebih dari 100, karena ada anak yang berada diluar usia resmi sekolah sedang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu.

Tabel 3.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2022

Jenjang Pendidikan		Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
(1)		(2)	(3)	(4)
1	SD	104,95	110,15	107,49
2	SMP	97,17	87,36	93,42
3	SMA	76,70	95,21	86,09

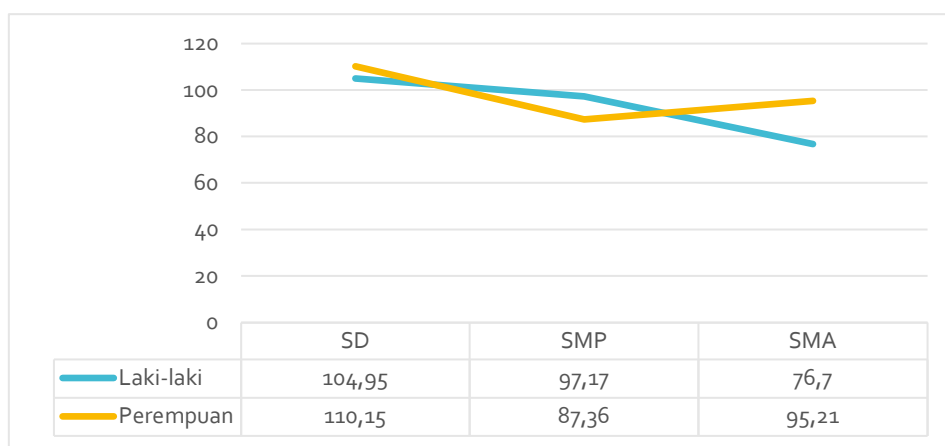
Sumber : BPS - Susenas Maret 2022

Tabel 3.1 menunjukkan pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) nilai APK berada diatas 100 yaitu 107,49 persen yang artinya dari 100 orang anak usia sekolah dasar SD, terdapat 107-108 orang yang sudah masuk Sekolah Dasar. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat murid sekolah dasar yang berusia di luar batas usia resmi jenjang pendidikan sekolah dasar (7-12 tahun). Hal yang berbeda justru ditunjukkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi dimana nilai APK jenjang pendidikan SMP sebesar 93,42 persen, yang berarti dari 100 orang yang berusia sekolah pada jenjang pendidikan SMP (13-15 tahun) hanya 93-94 orang yang sedang bersekolah di jenjang pendidikan tersebut. Begitu juga dengan APK jenjang pendidikan SMA dimana hanya sebesar 86,09 persen yang artinya dari 100 orang yang berusia sekolah pada jenjang pendidikan SMA (16-18 tahun) hanya 86-87 orang yang sedang bersekolah di jenjang pendidikan tersebut.

Adanya siswa dengan usia yang lebih tua dibanding usia standar di jenjang pendidikan tertentu menunjukkan terjadinya kasus tinggal kelas atau

terlambat masuk sekolah. Sebaliknya siswa yang lebih muda dibanding usia standar di jenjang pendidikan tertentu menggambarkan siswa tersebut masuk sekolah pada usia yang lebih muda.

Gambar 3.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2022



Sumber : BPS - Susenas Maret 2022

Angka Partisipasi Kasar (APK) cenderung menurun pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Angka Partisipasi Kasar (APK) Perempuan cenderung lebih tinggi daripada Angka Partisipasi Kasar (APK) Laki-laki pada jenjang yang lebih tinggi (SMP dan SMA).

3.2 Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Indikator APM ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan yang sesuai. Semakin tinggi

APM berarti banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah pada tingkat pendidikan tertentu. Nilai ideal APM = 100 % karena adanya murid usia sekolah dari luar daerah tertentu, diperbolehkannya mengulang di setiap tingkat, daerah kota atau daerah perbatasan.

Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak diluar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah. Keterbatasan APM adalah kemungkinan adanya underestimate karena adanya siswa diluar kelompok usia yang standar di tingkat pendidikan tertentu.

Tabel 3.2 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2022

Jenjang Pendidikan		Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
(1)		(2)	(3)	(4)
1	SD	96,63	100,00	98,28
2	SMP	86,01	76,59	82,41
3	SMA	55,42	76,26	65,99

Sumber : BPS - Susenas Maret 2022

Dari tabel 3.2 terlihat APM (Angka Partisipasi Murni) menurut jenis kelamin dan menurut jenjang pendidikan di Pasaman Barat Tahun 2022. Bila dilihat berdasarkan jenjang pendidikan, APM tertinggi berada pada jenjang pendidikan Sekolah dasar (SD) dengan APM mencapai 98,28 artinya dari 100 anak yang berusia 7-12 tahun sebanyak 98-99 orang sedang bersekolah di SD. Sedangkan APM untuk jenjang pendidikan SMP sebesar 82,41 persen dan

jenjang pendidikan SMA sebesar 65,99 persen. Artinya dari 100 orang anak usia 13-15 tahun, sebanyak 82-83 orang bersekolah di SMP dan dari 100 orang anak berusia 16-18 tahun, sebanyak 65-66 orang bersekolah di jenjang pendidikan SMA.

Gambar 3.2 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2022



Sumber : BPS - Susenas Maret 2022

Sama halnya dengan APK (Angka Partisipasi Kasar), trendnya cenderung menurun pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pula angka putus sekolahnya.

Bila dibandingkan dengan APM pada jenjang pendidikan SD, maka APM pada jenjang pendidikan SMP lebih rendah. Hal ini bisa disebabkan karena banyak anak usia 13-15 tahun yang justru masih bersekolah di jenjang pendidikan SD. Begitu juga dengan APM jenjang pendidikan SMA, anak-anak pada jenjang umur 16-18 tahun justru masih banyak yang bersekolah di jenjang SMP. Kemungkinan besar mereka ini adalah anak-anak yang tidak naik kelas ataupun anak yang dulunya ‘terlambat’ masuk sekolah.

3.3 Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Indikator ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang telah bersekolah di semua jenjang pendidikan. Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Nilai ideal APS = 100 % dan tidak akan terjadi lebih besar dari 100 %, karena murid usia sekolah dihitung dari murid yang ada di semua jenjang pendidikan pada suatu daerah.

Tabel 3.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur Sekolah dan Jenis Kelamin 2022

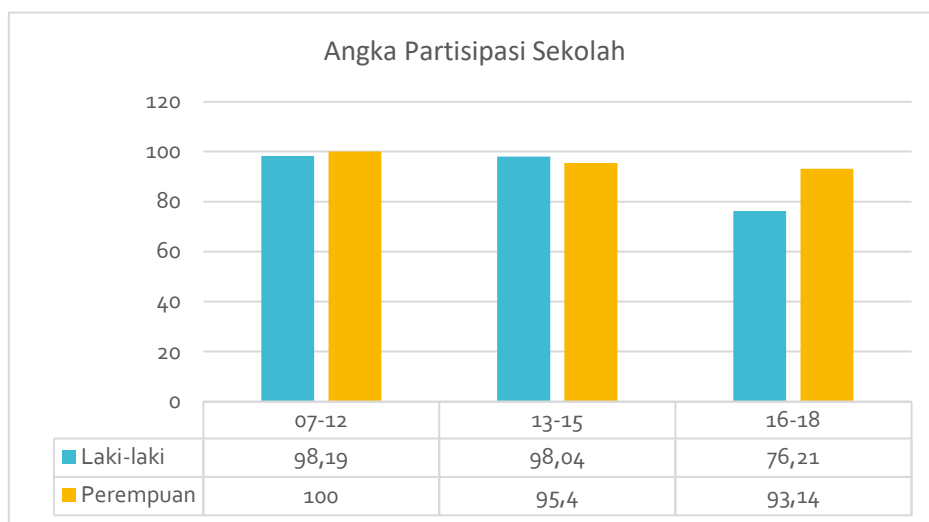
Kelompok Umur (Tahun)		Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	7-12	98,19	100,00	99,07
2	13-15	98,04	95,40	97,03
3	16-18	76,21	93,14	84,80

Sumber : BPS - Susenas Maret 2022

APS kelompok umur 7-12 tahun menggambarkan persentase penduduk berumur 7-12 tahun yang masih bersekolah, baik di SD maupun SMP. Pada tabel 3.3 menunjukkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Pasaman Barat pada kelompok umur 7 – 12 tahun sebesar 99,07 persen. Tingginya capaian APS ini menggambarkan bahwa anak usia 7-12 tahun di Pasaman Barat hampir semuanya sedang bersekolah (baik di tingkat SD maupun SMP).

Sedangkan pada kelompok umur 13-15 tahun, APS mencapai 97,03 persen. Sedangkan Pada APS kelompok umur 16-18 tahun mencapai 84,80 persen.

Gambar 3.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur Sekolah dan Jenis Kelamin 2022



Sumber : BPS - Susenas Maret 2022

Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin menurun Angka Partisipasi Sekolah. APS kelompok umur 16-18 tahun berbeda jauh dari kelompok umur lainnya, salah satunya dikarenakan pada usia ini sudah masuk dalam usia kerja sehingga ada anak yang memilih untuk bekerja dibandingkan dengan sekolah dan hanya menikmati masa pendidikan dasar 9 tahun.

3.4 Angka Melek Huruf

Kemampuan membaca dan menulis dicerminkan oleh indikator tingkat melek huruf. Angka Melek Huruf (AMH) merupakan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf

lainnya serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Angka ini digunakan untuk mengukur keberhasilan program pemberantasan buta huruf dimana masih tinggi jumlah penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD. Selain itu juga digunakan untuk menunjukkan kemampuan penduduk dalam menyerap informasi serta menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis.

Angka Buta Huruf (ABH) adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Tingkat buta huruf yang rendah menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan/atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajarannya. Di bawah ini adalah tabel angka melek huruf dan buta huruf menurut jenis kelamin di Pasaman Barat Tahun 2022 .

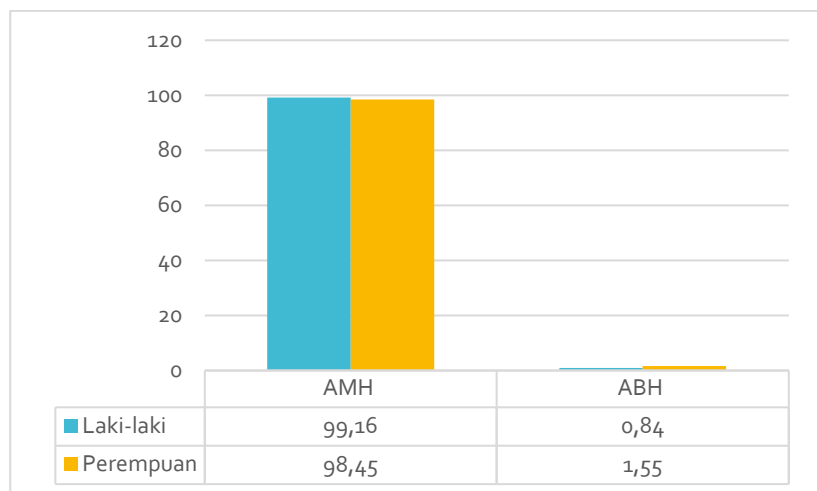
Tabel 3.4 Angka Melek Huruf (AMH) Menurut Kemampuan Baca Tulis dan Jenis Kelamin Tahun 2022

Jenis Kelamin	AMH (%)	ABH (%)
(1)	(2)	(3)
Laki-laki	99,16	0,84
Perempuan	98,45	1,55
Pasaman Barat	98,81	1,19

Sumber : BPS - Statistik Kesejahteraan Rakyat 2022

Dari tabel 3.4 terlihat pencapaian angka melek huruf (AMH) di Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2022 adalah sebesar 98,81 yang artinya lebih dari 98 persen penduduk Pasaman Barat telah mampu membaca dan menulis baik tulisan latin, arab, maupun huruf lainnya. Sedangkan Angka Buta Huruf (ABH) atau orang yang tidak bisa membaca dan menulis huruf latin, arab, dan huruf lainnya hanya 1,19 persen.

Gambar 3.4 Angka Melek Huruf (AMH) Menurut Kemampuan Baca Tulis dan Jenis Kelamin Tahun 2022



Sumber : BPS - Statistik Kesejahteraan Rakyat 2022

Jika dilihat menurut gender pada gambar 3.4 terlihat bahwa angka melek huruf penduduk laki-laki ternyata lebih tinggi dari penduduk perempuan, yakni 99,16 persen untuk AMH laki-laki dan 98,45 persen untuk AMH perempuan, sehingga angka buta huruf laki-laki menjadi lebih kecil daripada angka buta huruf perempuan. Masih adanya sebagian kecil penduduk yang buta huruf kemungkinan disebabkan oleh kondisi pendidikan pada masa lalu, dimana waktu itu partisipasi sekolah penduduk masih rendah akibatnya banyak penduduk yang tidak bisa membaca dan menulis.

3.5 Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah (APtS) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid putus sekolah pada jenjang pendidikan tertentu (SD, SMP, SMA dan sebagainya) dengan jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu dan dinyatakan dalam persentase. Proporsi penduduk menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk yang pernah/sedang bersekolah pada kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Adapun kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok umur 7-12 tahun, 13-15 tahun, 16-18 tahun dan 19-24 tahun.

Hasil perhitungan APS ini digunakan untuk mengetahui banyaknya siswa putus sekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu. Semakin tinggi APS berarti semakin banyak siswayang putus sekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. Angka Putus Sekolah dapat mengindikasikan tingkat keberhasilan atau kegagalan sistem pendidikan menurut jenjangnya ataupun menggambarkan kemampuan penduduk menyelesaikan pendidikan pada jenjang-jenjang tertentu.

Tabel 3.5 Angka Putus Sekolah Menurut Kelompok Umur Sekolah dan Jenis Kelamin Tahun 2021

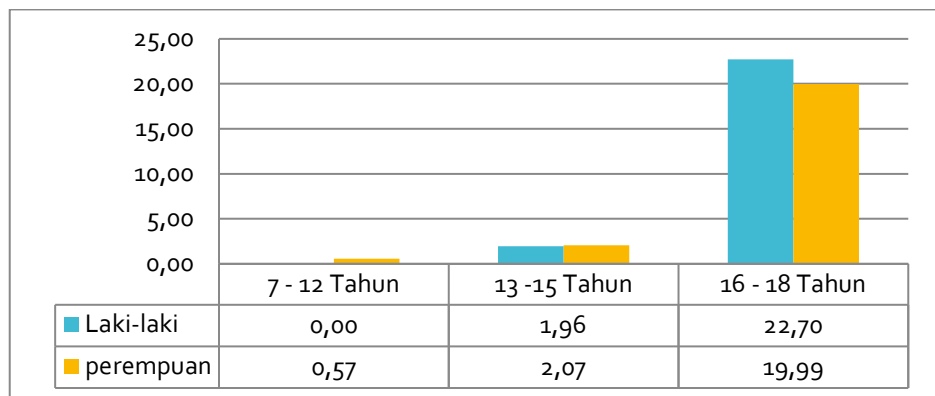
Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Total
7 - 12 Tahun	0	0,57	0,28
13 -15 Tahun	1,96	2,07	2,01
16 - 18 Tahun	22,7	19,99	21,35
Pasaman Barat	8,22	7,54	7,88

Sumber : BPS – Statistik Kesejahteraan Rakyat 2021 (Data Tahun 2022 tidak tersedia)

Dari Tabel 3.5 tampak bahwa angka putus sekolah dari kelompok umur terkecil sampai yang terbesar menunjukkan kenaikan angka yang signifikan. Semakin tinggi jenjang pendidikan, maka semakin tinggi pula Angka Putus Sekolahnya. Semakin tinggi angka putus sekolah menggambarkan kondisi pendidikan yang tidak baik dan tidak merata. Begitu sebaliknya jika angka putus sekolah semakin kecil maka kondisi pendidikan di suatu wilayah semakin baik.

Sebagai contoh, APtS kelompok umur 7-12 sebesar 0,28 % berarti secara rata-rata dari 100 anak usia 7-12 tahun yang sedang atau pernah bersekolah terdapat 0 sampai 1 anak yang putus sekolah dan lebih cenderung tidak ada anak yang putus sekolah. Pada kelompok umur 13-15 tahun sebesar 2,01 persen berarti secara rata-rata dari 100 anak usia 13-15 tahun yang sedang atau pernah bersekolah terdapat 2 sampai 2 anak yang putus sekolah dan lebih cenderung 2 orang anak yang putus sekolah. Begitu juga halnya APtS pada kelompok umur 16-18 tahun sebesar 21,35 berarti secara rata-rata dari 100 anak usia 16-18 tahun yang sedang atau pernah bersekolah terdapat 21 sampai 35 orang anak yang putus sekolah dan lebih cenderung 21 orang anak yang putus sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa sangat sedikitnya anak yang tamat SMA/Sederajat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Gambar 3.5 Angka Putus Sekolah Menurut Kelompok Umur Sekolah dan Jenis Kelamin Tahun 2021



Sumber : BPS – Statistik Kesejahteraan Rakyat 2021 (Data Tahun 2022 tidak tersedia)

Angka putus sekolah perempuan lebih sedikit dibanding laki-laki dalam setiap kelompok umur. Meskipun trendnya tidak jauh berbeda dengan angka putus sekolah laki-laki yang selalu naik, nyatanya kemauan perempuan untuk menimba ilmu pendidikan lebih besar daripada laki-laki.

3.6 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Kualitas sumber daya manusia secara spesifik dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk. Komposisi penduduk menurut pendidikan yang ditamatkan memberikan gambaran tentang kualitas sumber daya manusia. Semakin banyak penduduk yang berpendidikan tinggi, maka kualitas SDM di wilayah tersebut juga semakin bagus.

SDM yang berkualitas ini akan mudah terserap dalam dunia kerja, dan pada akhirnya akan menaikkan tingkat pendapatan. Dengan demikian, secara tidak langsung tingkat pendidikan yang baik juga akan mengurangi tingkat kemiskinan.

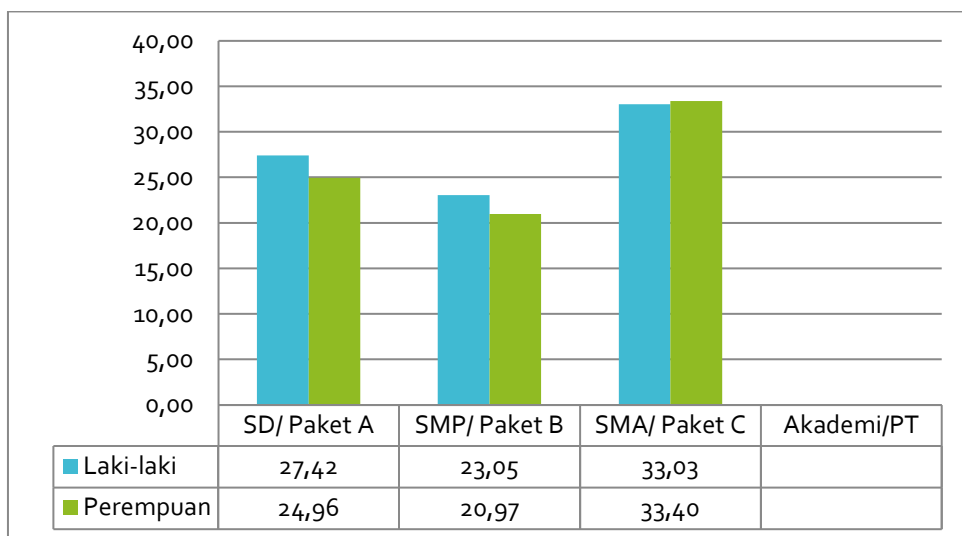
Tabel 3.6 Penduduk Menurut Jenis Pendidikan Tertinggi yang Dimiliki dan Jenis Kelamin Tahun 2022

Jenjang Pendidikan	Laki-laki (Persen)	Perempuan (Persen)	Total (Persen)
(1)	(2)	(3)	(4)
SD/ Paket A	27,42	24,96	52,38
SMP/ Paket B	23,05	20,97	44,02
SMA/ Paket C	33,03	33,40	66,43
Akademi/PT	-	-	-

Sumber : BPS - Susenas 2022

Dari tabel 3.6 terlihat jumlah penduduk Pasaman Barat yang tamat SMA/Paket C merupakan yang tertinggi dibanding tamatan jenjang pendidikan lainnya yakni mencapai 66,43 persen yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 33,03 persen dan perempuan sebanyak 33,40 persen. Penduduk yang tamat SMP/ Paket B mencapai 44,02 persen yang terdiri dari penduduk laki-laki sebesar 23,05 persen dan penduduk perempuan sebesar 20,97 persen. Untuk penduduk yang tamat SD/Paket A mencapai 52,38 persen yang terdiri atas penduduk laki-laki sebesar 27,42 persen dan penduduk perempuan sebesar 24,96 persen. Sedangkan penduduk tamat Akademi/Perguruan tinggi datanya tidak dapat ditampilkan.

Gambar 3.6 Pendidikan Tertinggi yang Dimiliki menurut Jenis Kelamin Tahun 2022



Sumber : BPS - Susenas 2022

3.7 Rata-rata Lama Sekolah

Secara umum, tingkat pendidikan penduduk dapat dilihat dari rata-rata lama bersekolah. Indikator ini dapat menunjukkan sampai pada jenjang pendidikan apa penduduk di suatu wilayah dapat menikmati pendidikan. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani.

Tabel 3.7 Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Menurut Jenis Kelamin Tahun 2022

Indikator	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
MYS	-	-	8,55

Sumber Data : BPS Provinsi Sumatera Barat (Data IPM Provinsi, Kab/Kota)

Rata-rata lama sekolah penduduk di Pasaman Barat tahun 2022 adalah sekitar 8,55 tahun. Ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pendidikan penduduk baru dapat menjalani pendidikannya sampai kelas VIII atau kelas 2 SMP atau putus sekolah di kelas 2 SMP. Angka ini masih rendah bila dibandingkan dengan program pendidikan wajib belajar (wajib) 9 tahun yang dicanangkan oleh pemerintah.

3.8 Sertifikasi Guru

Sertifikasi Guru atau Sergur merupakan sebuah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang sudah memenuhi standar profesional atau kelayakan seorang guru dalam Kegiatan Belajar Mengajar di sekolah. Seorang guru yang sudah bersertifikat, akan memiliki nilai lebih yang dapat digunakan sebagai nilai tambah ketika seorang guru akan berpindah ke sekolah lain yang mungkin lebih menjanjikan. Sertifikasi Guru ini diberikan kepada tenaga pendidik yang sudah memenuhi syarat.

Program sertifikasi guru merupakan program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dilatarbelakangi oleh kualitas pendidikan. Mutu masih menjadi paradigma dalam dunia pendidikan. Banyak faktor mengapa kualitas pendidikan masih perlu pembenahan lebih lanjut. Salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas di dunia pendidikan adalah guru.

Guru merupakan ujung tombak dalam peningkatan kualitas pendidikan. Masalah pendidikan yang sering muncul adalah berkaitan dengan profesionalisme dan kesejahteraan. Untuk menjawab itu pemerintah telah mengeluarkan program sertifikasi guru melalui Undang-undang Nomor 14 Tahun 2015.

Tabel 3.8 Jumlah Guru Negeri yang telah Memperoleh Sertifikasi Jenjang Pendidikan SD, SLTP, dan SLTA Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2022

No	Kecamatan	SD			SLTP			SLTA		
		L	P	TOTAL	L	P	TOTAL	L	P	TOTAL
1	Sungai Beremas	8	47	55	12	14	26	4	10	14
2	Ranah Batahan	26	84	110	6	14	20	15	19	34
3	Koto Balingka	20	65	85	14	11	25	14	23	37
4	Sungai Aur	25	71	96	6	24	30	8	11	19
5	Lembah Melintang	31	149	180	19	43	62	27	47	74
6	Gunung Tuleh	26	71	97	5	27	32	14	30	44
7	Talamau	31	73	104	8	30	38	11	30	41
8	Pasaman	40	185	225	24	83	107	23	73	96
9	Luhak Nan Duo	20	68	88	15	46	61	7	19	26
10	Sasak Ranah Pasisie	4	21	25	6	8	14	4	13	17
11	Kinali	43	98	141	19	49	68	27	46	73
Pasaman Barat		266	885	1.151	122	335	457	154	321	475

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat (Cabdin Wilayah IV)

Dari tabel 3.8 terlihat bahwa jumlah guru SD lebih banyak memperoleh sertifikasi dibanding dengan guru SLTP dan guru SLTA dikarenakan jumlah guru di jenjang pendidikan SD lebih banyak pada semua jenjang pendidikan terlihat bahwa guru yang perempuan lebih banyak memperoleh sertifikasi dibandingkan guru laki-laki baik pada jenjang pendidikan SD, SLTP maupun SLTA.

3.9 Angka Kelulusan Paket A, B, dan C

Kejar Paket A yaitu Ujian kesetaraan yang dilaksanakan untuk jenjang pendidikan SD sederajat untuk mendapatkan bukti lulus atau Ijazah Kesetaraan tingkat SD. Hal ini dilakukan untuk memberikan kepada masyarakat yang tidak memiliki ijazah SD sederajat maka dia diperkenankan untuk mengikuti kejar paket A. Usia Peserta tidak dibatasi (bebas usia namun tidak masa usia belajar).

Kejar Paket B yaitu Ujian kesetaraan yang dilaksanakan untuk jenjang pendidikan SMP/Mts sederajat untuk mendapatkan bukti lulus atau Ijazah Kesetaraan tingkat SMP/Mts. Hal ini dilakukan untuk memberikan kepada masyarakat yang tidak memiliki ijazah SMP/Mts sederajat maka dia diperkenankan untuk mengikuti kejar paket B.

Kejar Paket C yaitu Ujian kesetaraan yang dilaksanakan untuk jenjang pendidikan SMA IPA SMA IPS/ Sederajat untuk mendapatkan bukti lulus atau Ijazah Kesetaraan tingkat SMA IPA SMA IPS/ Sederajat. Hal ini dilakukan untuk memberikan kepada masyarakat yang tidak memiliki ijazah SMA IPA SMA IPS/ Sederajat maka dia diperkenankan untuk mengikuti kejar paket C

Tabel 3.9 Angka Kelulusan Paket A, B, dan C Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Tahun 2022

No	Kecamatan	Paket A			Paket B			Paket C		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1.	Sungai Beremas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Ranah Batahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Koto Balingka	4	-	4	35	36	71	100	35	135
4.	Sungai Aur	4	2	-	-	-	-	14	10	24
5.	Lembah Melintang	25	15	40	65	59	124	85	75	160
6.	Gunung Tuleh	-	-	-	-	-	-	7	7	14
7.	Talamau	-	-	-	13	16	29	2	2	4
8.	Pasaman	60	33	93	90	70	160	90	110	200
9.	Luhak Nan Duo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Sasak Ranah Pasisie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Kinali	-	-	-	36	10	56	29	14	43
	Pasaman Barat	93	50	137	239	191	440	327	253	580

Sumber data: Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat

Pada Tabel 3.9 di atas terlihat bahwa jumlah penduduk laki-laki yang mengejar pendidikan paket baik Paket A, B dan C lebih besar dari pada penduduk perempuan. Hal ini memeperlihatkan bahwa kesempatan belajar bagi laki-laki yang putus sekolah lebih besar daripada perempuan.

BAB IV KESEHATAN



BAB IV

KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

Tingkat kualitas kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia suatu wilayah. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi suatu daerah yang berdampak pada peningkatan produktivitas penduduk. Oleh karena itu, investasi sumber daya manusia bidang kesehatan perlu terus mendapat perhatian besar baik dari pemerintah dan masyarakat, dan usaha yang dilakukan harus berkesinambungan.

Salah satu upaya pemerintah dalam memperhatikan kesejahteraan perempuan salah satunya adalah program Keluarga Berencana (KB). Kesehatan perempuan dapat diukur berdasarkan kualitas fisik perempuan melalui indikator kematian ibu melahirkan, penolong persalinan, Kunjungan ibu hamil (K1/K4) ke sarana pelayanan kesehatan, Imunisasi TT pada ibu hamil, Ibu hamil yang mendapat tablet Zat Besi (Fe). Program Keluarga Berencana (KB) merupakan upaya pemerintah dalam mendukung kesejahteraan perempuan dan menekan laju pertumbuhan penduduk. Indikator yang digunakan meliputi status pemakaian alat/cara KB, jenis-jenis alat KB yang digunakan dan anak lahir hidup.

4.1 Kematian Ibu Melahirkan

Dalam penyelenggaraan upaya kesehatan, ibu dan anak merupakan anggota keluarga yang perlu mendapatkan prioritas. Oleh karena itu, upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak mendapat perhatian khusus. Hal tersebut dikarenakan Angka Kematian Ibu merupakan salah satu indikator yang bisa menggambarkan kesejahteraan masyarakat disuatu daerah.

Menurut WHO, Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu sebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau insidensif) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan). Tanpa memperhitungkan lama kehamilan per100.000 kelahiran hidup. AKI diperhitungkan pula dalam jangka waktu 6 minggu sehingga setahun setelah melahirkan. Indikator ini secara langsung digunakan untuk memonitor kematian terkait dengan kehamilan. AKI dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk kesehatan secara umum, pendidikan dan pelayanan selama kehamilan dan melahirkan.

Pemerintah bersama masyarakat bertanggung jawab dalam upaya percepatan penurunan angka kematian ibu melahirkan dengan menjamin bahwa setiap ibu memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas, mulai dari saat hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih, dan perawatan pascapersalinan bagi ibu dan bayi, perawatan khusus dan rujukan jika terjadi komplikasi serta akses terhadap keluarga berencana.

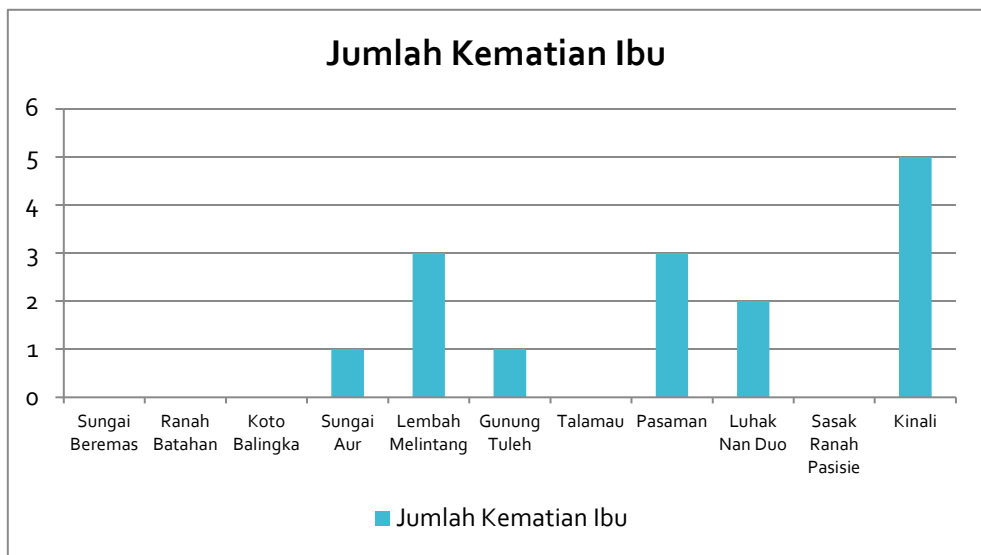
Tabel 4.1 Jumlah Kematian Ibu Melahirkan di Kabupaten Pasaman Barat, Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Kematian Ibu
1	Sungai Beremas	0
2	Ranah Batahan	0
3	Koto Balingka	0
4	Sungai Aur	1
5	Lembah Melintang	3
6	Gunung Tuleh	1
7	Talamau	0
8	Pasaman	3
9	Luhak Nan Duo	2
10	Sasak Ranah Pasisie	0
11	Kinali	5
Kabupaten Pasaman Barat		15

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat

Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat tercatat selama tahun 2022 terjadi kematian ibu melahirkan sebanyak 15 kasus. Jika dilihat perkecamatan, jumlah kematian ibu melahirkan pada tahun 2022 terjadi di 6 kecamatan. Kecamatan tertinggi jumlah kematian ibunya adalah Kecamatan Kinali. Selain itu, terdapat 5 kecamatan yang mendapatkan zero kasus. Hal ini mengindikasikan bahwa *poned* (pelayanan) Puskesmas di kecamatan-kecamatan tersebut sudah berjalan dengan baik.

Gambar 4.1 Jumlah Kematian Ibu Melahirkan di Kabupaten Pasaman Barat, Tahun 2022



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat

4.2 Penyebab Kematian Ibu Melahirkan

Salah satu indikator yang menunjukkan kesejahteraan masyarakat di suatu negara adalah angka kematian ibu atau AKI. Semakin tinggi AKI maka semakin rendah kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya semakin rendah AKI maka kesejahteraan masyarakat suatu negara meningkat. Masih menjadi pekerjaan yang menantang bagi Indonesia untuk menurunkan angka kematian ibu yang tertuang dalam Millenium Development Goals (MDGs).

Rendahnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan ibu hamil menjadi faktor penentu angka kematian. Tingginya angka kematian ibu di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, mulai dari fase sebelum hamil, yaitu kondisi wanita subur yang mengalami anemia, kurang kalori, obesitas, dan mempunyai penyakit penyerta. Selain itu juga disebabkan oleh beberapa faktor yang lazim

muncul, yakni hipertensi, pendarahan, keracunan kehamilan yang disertai kejang-kejang, aborsi dan infeksi.

Tabel 4.2 Penyebab Kematian Ibu karena hamil, melahirkan dan nifas di Pasaman Barat Tahun 2022

No	Kecamatan	Penyebab kematian Ibu karena hamil, melahirkan dan nifas					
		Eklam- psia	Infek- si	Abortus	Kompl. Masa puepureum	Pendar- han	Lain- lain
1	Sungai Beremas	-	-	-	-	-	-
2	Ranah Batahan	-	-	-	-	-	-
3	Koto Balingka	-	-	-	-	-	-
4	Sungai Aur	-	-	-	-	-	1
5	Lembah Melintang	1	-	-	-	-	2
6	Gunung Tuleh	-	-	-	-	-	1
7	Talamau	-	-	-	-	-	-
8	Pasaman	1	-	-	-	1	-
9	Luhak Nan Duo	1	-	-	-	-	1
10	Sasak Ranah Pasisie	-	-	-	-	-	-
11	Kinali	-	-	-	-	1	5
	Pasaman Barat	3	-	-	-	2	10

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat

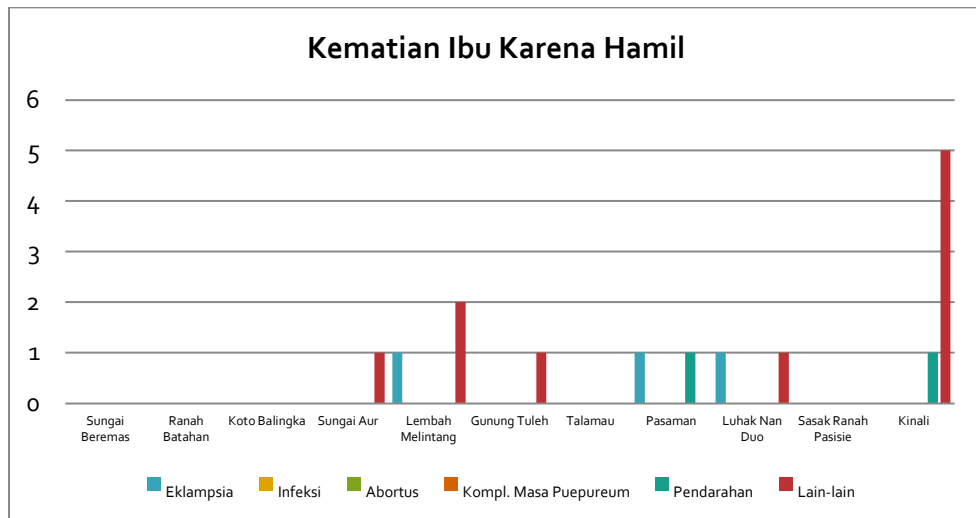
Ada beberapa hal penyebab kematian Ibu karena hamil, melahirkan dan nifas, diantaranya eklampsia. Eklampsia adalah kondisi yang menyebabkan ibu hamil mengalami kejang dan merupakan salah satu kegawatdaruratan pada masa kehamilan. Meski jarang terjadi, eklampsia adalah kondisi yang berbahaya karena dapat membuat ibu hamil mengalami kejang dan hilang kesadaran. Terdapat 3 kasus eklampsia yaitu di Kecamatan Lembah Melintang,

Kecamatan Pasaman, dan Kecamatan Luhak Nan Duo masing-masing 1 kasus. Selain itu, kematian ibu melahirkan juga disebabkan oleh pendarahan terdapat 2 kasus yaitu di Kecamatan Pasaman dan Kecamatan Kinali masing-masing 1 kasus. Dan beberapa kasus lainnya sebanyak 10 kasus. Penyebab kematian ibu hamil lainnya adalah infeksi, Emboli Obstetri pendarahan, Leukimia, Gagal Jantung dan Hipertensi.

Kecamatan dengan jumlah kasus kematian ibu melahirkan paling banyak yaitu Kecamatan Kinali Sebanyak 6 Kasus. Penyebabnya antara lain akibat pendarahan sebanyak 1 kasus, dan 5 kasus lainnya. Kematian dengan Penyebab tidak langsung sebanyak 4 kasus yaitu : Kelainan metabolik (Gula Darah/GDR), Gagal jantung, Hiperemesis Gravidarum (HG) berat, dan HG Hepatitis. dan dari penyebab langsung sebanyak 1 kasus yaitu pasien dengan Hemoragic Post Partum (HPP) disertai dengan komplikasi. Penyebab tidak langsung adalah penyakit yang sudah diderita ibu sebelum hamil, sehingga kehamilan memperberat penyakit yang dideritanya, dan akibat dari kurangnya pemantauan ibu selama kehamilan di lapangan.

Untuk mengatasi hal di atas perlunya edukasi dan pemantauan yang terjadwal dan berkala pada calon ibu hamil dan ibu hamil oleh petugas, adanya monitoring, evaluasi berjenjang mulai dari Kabupaten, Kecamatan, dan Nagari oleh OPD terkait.

Gambar 4.2 Penyebab Kematian Ibu karena Hamil, Melahirkan dan Nifas di Pasaman Barat Tahun 2022



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat

4.3 Penolong Persalinan

Tenaga penolong persalinan adalah orang yang biasa memeriksa kehamilan atau memberikan pertolongan selama persalinan dan masa nifas meliputi dokter spesialis kebidanan, dokter umum, bidan dan perawat yang dilatih kebidanan (Permenkes RI No. 97 Tahun 2014). Rendahnya cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan merupakan salah satu penyebab tingginya AKI (Angka Kematian Ibu) dan AKB (Angka Kematian Bayi) di Indonesia.

Salah satu cara untuk menurunkan jumlah kematian ibu melahirkan adalah dengan meningkatkan pertolongan persalinan oleh tenaga medis dan meningkatkan pelayanan neonatal. Proses persalinan ini diyakini akan berpengaruh terhadap pengurangan kematian bayi dan kematian ibu yang sedang melahirkan, dimana pemerintah mengupayakan agar para ibu hamil

dapat melahirkan dengan selamat, demikian pula bayi yang dilahirkan dapat terlahir dengan sehat. Untuk itu pemerintah terus berupaya agar tenaga kesehatan tersebar sampai ke seluruh pelosok daerah.

Tabel 4.3 Jumlah Kelahiran Menurut Penolong Persalinan dan Kecamatan Tahun 2022

No	Kecamatan	Penolong Persalinan				
		Dokter	Bidan	Dukun	Lainnya	Total
1.	Sungai Beremas	137	431	4	-	572
2.	Ranah Batahan	160	346	1	11	518
3.	Koto Balingka	158	385	-	2	545
4.	Sungai Aur	190	455	7	-	652
5.	Lembah Melintang	206	653	14	7	880
6.	Gunung Tuleh	177	212	-	-	389
7.	Talamau	189	207	-	-	396
8.	Pasaman	531	717	6	2	1.256
9.	Luhak Nan Duo	245	471	3	-	719
10.	Sasak Ranah Pasisie	131	111	-	2	244
11.	Kinali	487	880	9	1	1.377
Pasaman Barat		2.611	4.868	44	25	7.548

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat

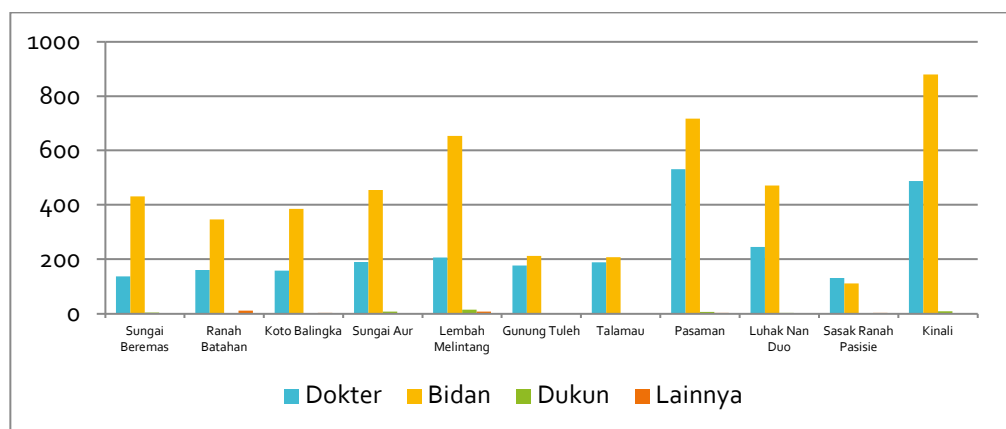
Keterangan : Penolong persalinan oleh dokter pada Puskesmas

Tabel 4.3 di atas bisa dilihat bahwa masyarakat sudah mulai menyadari betapa pentingnya proses persalinan. Dari 7.548 jumlah persalinan, sebanyak 7.479 (99,08 persen) ibu melahirkan sudah ditangani oleh tenaga kesehatan (Dokter dan Bidan) . Akan tetapi angka ini belum mencapai target Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat yakni sebesar 100 persen Ibu melahirkan yang harus ditangani oleh Tenaga Kesehatan.

Tenaga dukun masih menjadi pilihan lain bagi ibu melahirkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi ibu-ibu dalam memilih dukun bayi sebagai penolong persalinan yang pertama ialah faktor kepercayaan. Mereka percaya karena dukun bayi dianggap memiliki kemampuan yang lebih, antara lain kemampuan membacakan doa-doa yang memberikan efek rasa nyaman dan perasaan tenang kepada klien. Selain itu yang menambah kepercayaan masyarakat terhadap dukun bayi ialah mereka telah lulus mengikuti kursus kebidanan. Faktor lainnya yang relatif besar pengaruhnya adalah biaya yang relatif terjangkau.

Diharapkan program pemerintah tidak hanya menambah tenaga medis, akan tetapi juga tetap diperlukan peningkatan keterampilan dan pengetahuan kesehatan bagi dukun bayi karena mengingat eksistensi mereka tersebut. Pemerintah diminta membuat peraturan yang menyatakan penanganan ibu melahirkan wajib dilakukan oleh tenaga medis. Aturan tersebut diharapkan dapat menekan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB).

Gambar 4.3 Jumlah Kelahiran Menurut Penolong Persalinan dan Kecamatan Tahun 2022



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat

Tabel 4.4 Jumlah Kelahiran Bayi dengan Penolongan Persalinan oleh Dokter pada Rumah Sakit Di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022

No	Nama Rumah Sakit	Jumlah Persalinan	Keterangan
1.	RSUD Pasaman Barat	479	-
2.	RSI Ibnu Sina Simpang Empat	2.331	-
3.	RSIA Al Ihsan Simpang Empat	1.668	-
4.	RSUD Pratama Ujung Gading	0	-
	Pasaman Barat	4.478	-

Sumber : Rumah Sakit se- Kabupaten Pasaman Barat

Tabel 4.5 Jumlah Kelahiran Bayi (Bayi Lahir Hidup) Pada Rumah Sakit Di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022

No	Nama Rumah Sakit	Jumlah Persalinan	Bayi Lahir Hidup	Ket
1.	RSUD Pasaman Barat	479	474	
2.	RSI Ibnu Sina Simpang Empat	2.343	2.331	
3.	RSIA Al Ihsan Simpang Empat	1.668	1.638	
4.	RSUD Pratama Ujung Gading	0	0	
	Pasaman Barat	4.490	4.443	

Sumber : Rumah Sakit se- Kabupaten Pasaman Barat

4.4 Kunjungan Ibu Hamil (K1/K4)

K1 adalah cakupan ibu hamil yang pertama kali mendapat pelayanan antenatal oleh tenaga kesehatan professional (Dokter Spesialis Kandungan dan Kebidanan, Dokter Umum, Bidan dan Perawat) di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Indikator akses ini digunakan untuk mengetahui jangkauan pelayanan antenatal serta kemampuan program dalam

menggerakkan masyarakat.

K1 adalah kontak pertama ibu hamil dengan tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi untuk mendapatkan pelayanan terpadu dan komprehensif sesuai standar. Kontak pertama ini harus dilakukan sedini mungkin pada trisemester pertama sebaiknya minggu ke 8 dan pada saat kunjungan ini ibu juga diberikan buku KIA sebagai pedoman para ibu dimulai dari kehamilan sampai setelah melahirkan.

K4 adalah kontak ibu hamil sebanyak 4 kali atau lebih dengan tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi, untuk mendapatkan pelayanan terpadu dan komprehensif sesuai standar. Kontak empat kali ini dilakukan dengan rincian satu kali pada trisemester I (kehamilan hingga 12 minggu) dan trisemester kedua (>12 – 24 minggu), kemudian minimal 2 kali kontak pada trisemester ketiga dilakukan setelah minggu ke 24 sampai umur 36. Kunjungan antenatal ini bisa lebih dari 4 kali sesuai dengan kebutuhan dan jika ada keluhan, penyakit atau gangguan kehamilan.

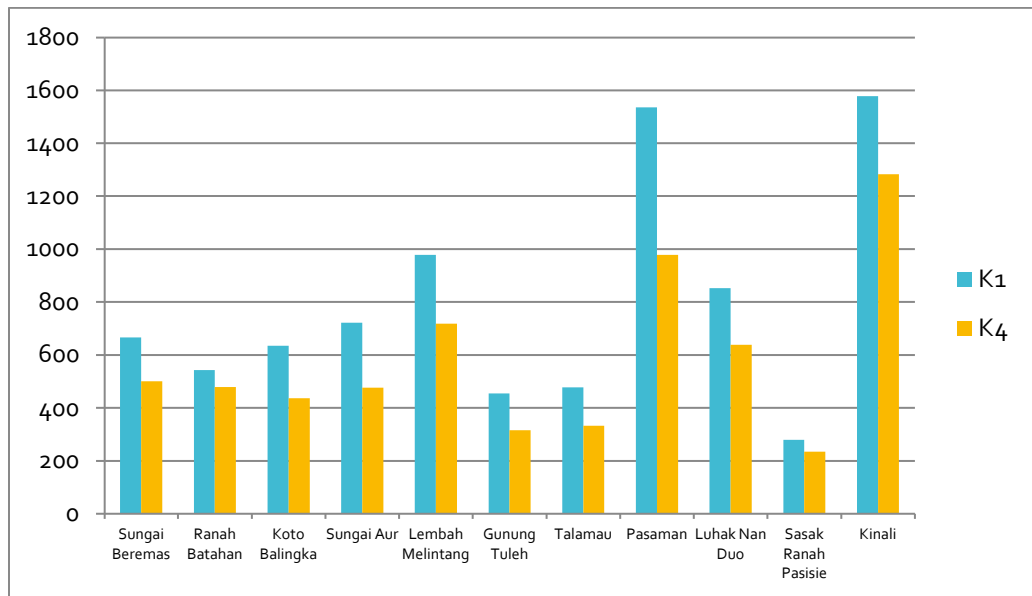
Tabel 4.6 Kunjungan Ibu Hamil (K1/K4) ke Sarana Pelayanan Kesehatan Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Kunjungan	
		K1	K4
1.	Sungai Beremas	666	500
2.	Ranah Batahan	543	479
3.	Koto Balingka	635	436
4.	Sungai Aur	722	476
5.	Lembah Melintang	978	718
6.	Gunung Tuleh	454	315
7.	Talamau	477	333
8.	Pasaman	1.535	978
9.	Luhak Nan Duo	852	638
10.	Sasak Ranah Pasisie	279	235
11.	Kinali	1.578	1.283
	Pasaman Barat	8.719	6.391

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat

Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa kesadaran ibu hamil untuk memeriksakan kandungannya secara dini ke dokter sudah cukup tinggi dimana jumlah kunjungan K1 pada tahun 2022 sebanyak 8.719 orang. Jumlah kunjungan K1 yang paling banyak ada pada Kecamatan Kinali sebanyak 1.578 orang dan paling sedikit ada di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie sebanyak 279 orang. Begitu juga halnya dengan jumlah kunjungan K4 paling banyak ada di Kecamatan Kinali sebanyak 1.283 orang dan paling sedikit ada di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie sebanyak 235 orang.

Gambar 4.4 Kunjungan Ibu Hamil (K1/K4) ke Sarana Pelayanan Kesehatan Tahun 2022



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat

Pada kunjungan K4 terjadi penurunan jumlah kunjungan ibu hamil menjadi 6.391 orang (42,29 persen). Hal ini dikarenakan banyaknya ibu hamil yang memeriksakan kehamilan K1 pada usia lebih dari 12 minggu. K1 idealnya dilakukan pada usia kehamilan kurang dari 12 minggu.

Jika K1 dilakukan pada usia lebih dari 12 minggu, maka secara otomatis K4 nya tidak tercapai karena seorang ibu hamil dikatakan mendapatkan kunjungan K4 selama kehamilan apabila mendapatkan pemeriksaan kehamilan minimal empat kali selama hamil dengan pola 1 kali di trimester I, 1 kali di trimester II, dan 2 kali di trimester III. Jika kontak pertama diberikan pada ibu hamil dengan usia kehamilan lebih dari 12 minggu, maka secara otomatis K4 nya tidak akan tercapai atau *lost*.

Dengan sering memeriksakan diri ke sarana pelayanan kesehatan selama kehamilan, dapat mendeteksi secara cepat jika ada permasalahan, ataupun gangguan dengan kehamilan sehingga kesehatan ibu dan calon bayi tetap terjaga.

4.5 Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil

Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) penting diberikan pada ibu hamil. Manfaatnya adalah untuk mencegah tetanus bagi ibu dan bayinya. Tetanus adalah penyakit yang mengancam jiwa yang disebabkan oleh toksin dari bakteri yang disebut *Clostridium Tetani*. Bakteri ini masuk ke dalam tubuh melalui luka terbuka. Bisa berupa luka akibat tusukan kecil atau goresan pada kulit.

Pemberian imunisasi TT pada ibu hamil memiliki tujuan mencegah tetanus pada proses persalinan, dimana terdapat luka baik pada rahim maupun pada tali pusat bayi. Hal ini terutama mencegah tetanus pada persalinan beresiko tinggi yaitu apabila persalinan dilakukan dengan alat-alat yang tidak steril. Antibodi akan terbentuk dalam tubuh setelah vaksinasi atau imunisasi TT diberikan, antibodi ini akan diteruskan kepada bayi dan melindunginya selama beberapa bulan setelah lahir. Sebelum adanya imunisasi TT banyak ditemui kasus tetanus neonatorum yaitu tetanus yang terjadi pada bayi baru lahir sebelum berusia 1 bulan.

Berikut ini adalah informasi durasi proteksi imunisasi TT pada ibu hamil menurut WHO (*World Health Organization*) ;

1. TT1 diberikan pada kontak pertama
2. TT2 diberikan pada 4 minggu setelah TT1 dengan tingkat proteksi 8 persen dan durasi proteksi 3 tahun

3. TT3 diberikan minimum 6 bulan setelah TT2 dengan tingkat proteksi 95 persen dan durasi proteksi 5 tahun
4. TT4 diberikan minimum 1 tahun setelah TT3 dengan tingkat proteksi 99 persen dan durasi proteksi 10 tahun
5. TT5 diberikan minimum 1 tahun setelah TT4 dengan tingkat proteksi 99 persen dan durasi proteksi 30 tahun

Tabel 4.7 Jumlah Imunisasi *Tetanus Toxoid* (TT) Pada Ibu Hamil Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022

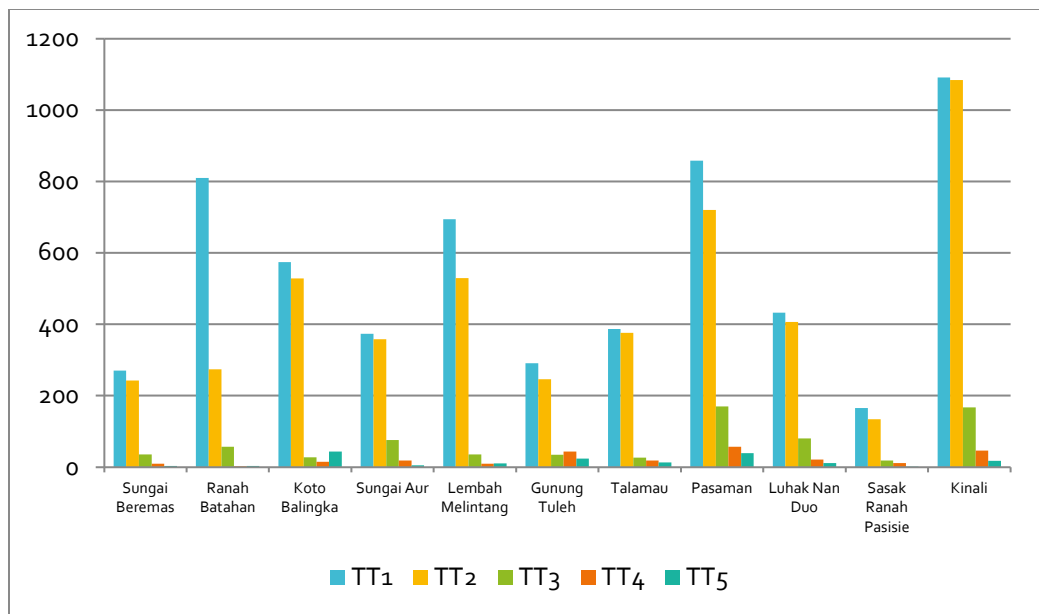
No	Kecamatan	Jumlah Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) Pada Ibu Hamil				
		TT1	TT2	TT3	TT4	TT5
1.	Sungai Beremas	270	242	35	9	3
2.	Ranah Batahan	810	274	57	2	3
3.	Koto Balingka	574	528	27	15	43
4.	Sungai Aur	373	358	76	18	5
5.	Lembah Melintang	694	529	35	9	10
6.	Gunung Tuleh	291	246	34	43	24
7.	Talamau	387	376	26	18	13
8.	Pasaman	858	720	170	57	39
9.	Luhak Nan Duo	432	406	80	21	11
10.	Sasak Ranah Pasisie	165	134	18	11	1
11.	Kinali	1.091	1.084	167	46	17
Pasaman Barat		5.945	4.897	725	249	169

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa pemberian Imuniasi *Tetanus Toxoid* (TT) Pada Ibu Hamil paling banyak diberikan pada imuniasi TT1 yakni sebanyak 5.945 orang dengan jumlah terbanyak ada di Kecamatan Kinali yaitu 1.091

orang dan Paling sedikit berada pada Kecamatan Sasak Ranah Pasisie yakni 165 orang.

Gambar 4.5 Jumlah Imunisasi Tetanus Toxoid Pada Ibu Hamil Kab. Pasaman Barat Tahun 2022



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat

Dari Gambar 4.5 terlihat bahwa tren pemberian imunisasi TT pada ibu hamil semakin mengecil ke ujung dalam artian dari TT1 ke TT5 semakin berkurang penerima imuniasi TT tersebut. Bahwa alasan dari ibu hamil tidak melakukan imunisasi TT lengkap paling banyak disebabkan oleh dukungan keluarga yang memberikan informasi salah mengenai imunisasi TT berdasarkan pengalaman hamil yang terdahulu.

4 .6 Pemberian Tablet Zat Besi (Fe) pada Ibu Hamil

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator keberhasilan layanan kesehatan suatu daerah. Kematian ibu dapat terjadi karena beberapa sebab, diantaranya karena anemia. Tablet Zat Besi (Fe) adalah suatu tablet vitamin dan mineral yang sangat penting bagi ibu hamil untuk mencegah kecacatan pada perkembangan bayi baru lahir dan kematian ibu yang disebabkan oleh anemia berat. Tablet ini sangat diperlukan oleh ibu hamil.

Manfaat Tablet Fe pada ibu hamil, diantaranya yaitu mencegah terjadinya anemi defisiensi besi, mencegah terjadinya pendarahan pada saat persalinan, dapat meningkatkan asupan nutrisi bagi janin, serta anemi dan pendarahan dapat dicegah sehingga kematian ibu pun dapat diturunkan.

Tablet Fe diberikan kepada ibu hamil sebanyak satu tablet setiap hari berturut-turut minimal selama 90 hari selama masa kehamilan. Sudah selayaknya seorang ibu hamil akan mendapatkan minimal 60 sampai 90 tablet Fe selama kehamilannya dan diberikan secara gratis. Tablet Fe mengandung 200 mg ferro sulfat setara dengan 60 miligram besi elemental dan 0,25 mg asam folat.

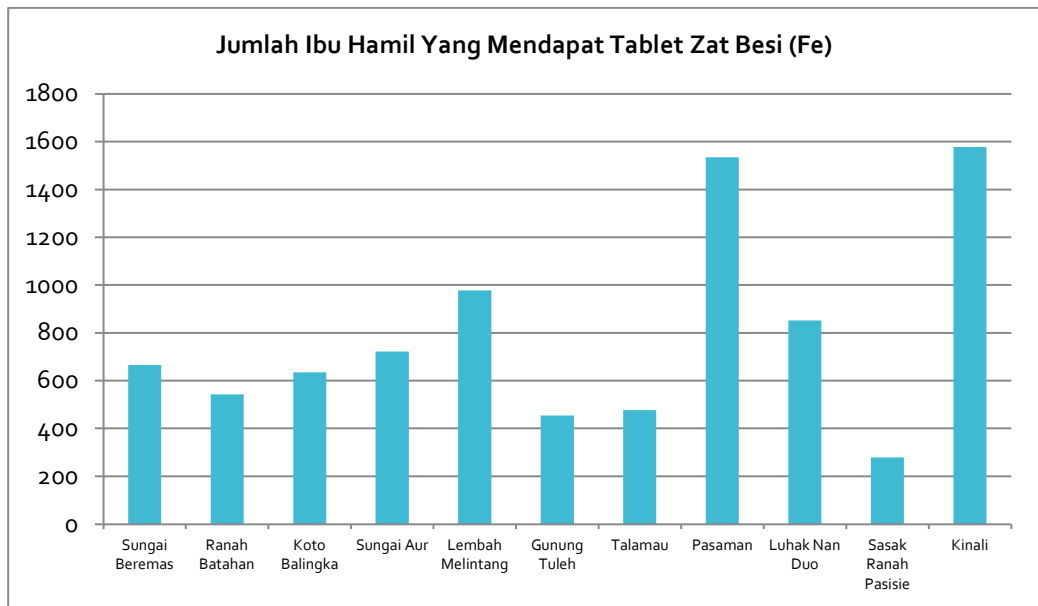
Tabel 4.8 Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapat Tablet Zat Besi (Fe) Menurut Kecamatan Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Ibu Hamil yang mendapat Tablet Zat Besi (Fe)
1.	Sungai Beremas	666
2.	Ranah Batahan	543
3.	Koto Balingka	635
4.	Sungai Aur	722
5.	Lembah Melintang	978
6.	Gunung Tuleh	454
7.	Talamau	477
8.	Pasaman	1.535
9.	Luhak Nan Duo	852
10.	Sasak Ranah Pasisie	279
11.	Kinali	1.578
	Pasaman Barat	8.719

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat

Data dari Dinas Kesehatan Kab. Pasaman Barat tercatat jumlah ibu hamil yang mendapat tabel Zat Besi (Fe) pada tahun 2022 sebanyak 8.719 orang. Jumlah penerima terbanyak ada di Kecamatan Kinali (1.578 orang) dan Kecamatan Pasaman (1.535 orang) dimana kedua kecamatan tersebut juga berpenduduk paling banyak. Jumlah penerima paling sedikit berada di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie yang merupakan kecamatan terkecil di Pasaman Barat.

Gambar 4.6 Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapat Tablet Zat Besi (Fe) Menurut Kecamatan Tahun 2022



Mengingat pentingnya mengkonsumsi Tablet Fe pada ibu hamil untuk pencegahan kecacatan pada bayi dan kematian ibu, pemerintah melalui Dinas Kesehatan sepatutnya harus lebih mensosialisasikan kepada masyarakat umumnya dan ibu hamil khususnya akan pentingnya mengkonsumsi Tablet Zat Besi (Fe).

4.7 Peserta/Akseptor Keluarga Berencana (KB)

Keluarga Berencana (KB) merupakan sektor pembangunan nasional yang memiliki peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan ibu, anak dan keluarga pada umumnya serta menurunkan laju pertumbuhan penduduk melalui pembatasan kelahiran. Usia antara 15-49 tahun merupakan usai pasangan subur bagi perempuan karena pada usia ini kemungkinan untuk

melahirkan anak sangat besar. Perempuan yang usianya berada pada usia ini disebut Wanita Usia Subur (WUS) dan Pasangan Usia Subur (PUS) bagi yang berstatus kawin.

Semakin banyak jumlah PUS, maka semakin banyak pula jumlah anak yang dilahirkan. Semakin banyak jumlah anak maka semakin besar tanggungan kepala keluarga dalam memenuhi kebutuhan material dan spiritual anggota rumah tangga. Dengan demikian, pembatasan jumlah anak sangat perlu diperhatikan demi tercapainya keluarga sejahtera.

Penggunaan alat kontrasepsi adalah salah satu cara untuk menekan angka kelahiran. Pada masyarakat awam, alat kontrasepsi dikenal hanya sebagai alat yang digunakan untuk mencegah kehamilan, namun sebenarnya banyak sekali manfaat dari alat kontrasepsi. Contohnya sebagai kebutuhan fisik, kontrasepsi memiliki peranan dalam setiap fase reproduksi, yaitu untuk menunda kehamilan dan menjarangkan kehamilan.

Tabel 4.9 Jumlah Peserta/Akseptor Keluarga Berencana (KB) Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2022

No	Kecamatan	Peserta KB Perempuan						Peserta KB laki-Laki			Total
		MOW	IUD	Implant	Suntik	Pil	Jml	MOP	Kon dom	Jml	
1	Sungai Beremas	106	99	403	1129	231	1968	0	277	277	2245
2	Ranah Batahan	59	120	749	2123	471	3522	0	258	258	3780
3	Koto Balingka	62	128	566	2074	116	2946	0	98	98	3044
4	Sungai Aur	171	42	502	3028	370	4113	0	278	278	4391
5	Lembah Melintang	421	654	977	477	629	3158	0	605	605	3763
6	Gunung Tuleh	131	250	923	1724	594	3622	0	261	261	3883
7	Talamau	104	20	396	1206	253	1979	0	45	45	2024
8	Pasaman	221	470	1030	2938	879	5538	0	579	579	6117
9	Luhak Nan Duo	246	100	841	1572	398	3157	0	62	62	3219
10	Sasak Ranah Pasisie	91	28	287	891	583	1880	0	333	333	2213
11	Kinali	481	389	1342	5632	1436	9280	0	546	546	9826
	Pasaman Barat	2093	2300	8016	22794	5960	41163	0	3342	3342	44505

Sumber Data : DPPKBP3A Kab. Pasaman Barat (Bidang KBKR)

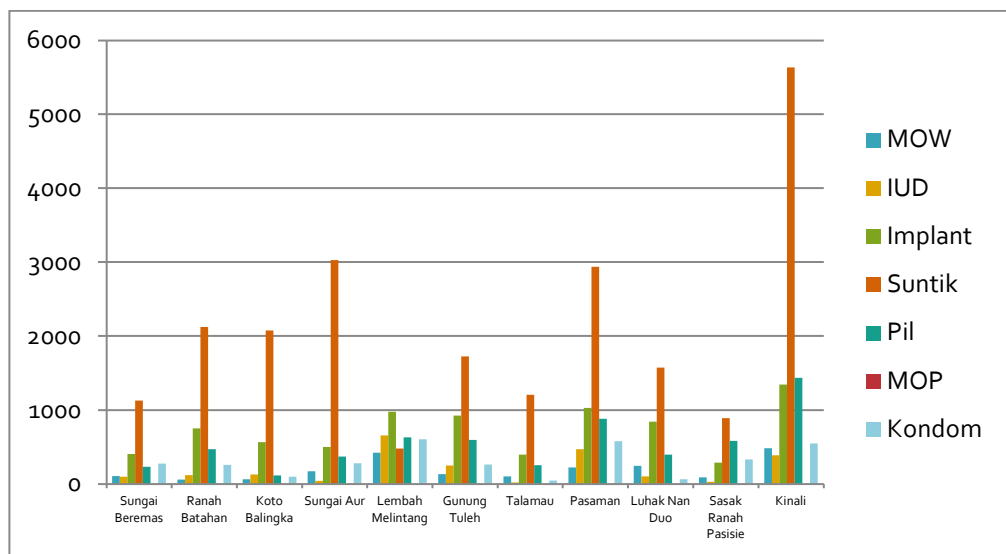
Ket : MOW : Metode Operasi Wanita, MOP : Metode Operasi Pria

Selama tahun 2022 tercatat Jumlah peserta KB perempuan sebanyak 41.163 orang, sedangkan peserta KB laki-laki berjumlah 3.342 orang. Alat kontrasepsi yang paling banyak digunakan oleh perempuan adalah suntik yang berjumlah 22.794 orang dan yang paling sedikit adalah MOW sebanyak 2.093 orang.

Mayoritas perempuan menggunakan alat kontrasepsi suntik dan pil karena harganya yang relatif murah, mudah diperoleh dan praktis.

Sedangkan alat kontrasepsi untuk laki-laki hanya ada dua jenisnya yaitu kondom dan MOP (Vasektomi). Sebanyak 3.342 orang laki-laki di Pasaman Barat menggunakan alat kontrasepsi kondom dan tidak ada yang memilih kontrasepsi MOP (Vasektomi). Implant atau dikenal dengan KB susuk merupakan metode yang cukup banyak juga digunakan oleh perempuan, karena tidak menimbulkan efek samping dan bisa menunda kehamilan dalam jangka waktu panjang. Sedangkan alat kontrasepsi untuk laki-laki hanya ada dua jenisnya yaitu kondom dan MOP (Vasektomi). Sebanyak 682 orang laki-laki di Pasaman Barat menggunakan alat kontrasepsi kondom dan sisanya sebanyak 3 orang memilih kontrasepsi MOP (Vasektomi).

Gambar 4.7 Jumlah Peserta/Akseptor Keluarga Berencana (KB) Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2022



Sumber Data : DPPKBP3A Kab. Pasaman Barat (Bidang KBKR)

4.8 Pemberian Imunisasi pada Balita

Imunisasi adalah program pencegahan penyakit menular yang diterapkan dengan memberikan vaksin sehingga orang tersebut imun atau resisten terhadap penyakit tersebut. Program imunisasi dimulai sejak usia bayi hingga masuk usia sekolah. Melalui program ini, anak akan diberikan vaksin yang berisi jenis bakteri atau virus tertentu yang sudah dilemahkan atau dinonaktifkan guna merangsang sistem imun dan membentuk antibodi di dalam tubuh mereka. Antibodi yang terbentuk setelah imunisasi bermanfaat untuk melindungi tubuh dari serangan bakteri dan virus tersebut di masa yang akan datang.

Metode pemberian vaksin dalam imunisasi beragam, ada yang dengan cara disuntikkan, dimasukkan (ditetesi) ke dalam mulut, atau bahkan disemprotkan ke dalam mulut atau hidung. Sejumlah vaksin ada yang hanya diberikan sekali seumur hidup dan ada juga yang perlu diberikan secara berkala agar kekebalan tubuh terbentuk dengan sempurna. Jenis-jenis vaksin yang direkomendasikan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dalam program imunisasi, di antaranya; Hepatitis B, Polio, BCG, DTP, Campak, Hib, PCV, Rotavirus, Influenza, MMR, Tifoid, Hepatitis A, Varisela, HPV. Di Indonesia vaksin hepatitis B, polio, BCG, DTP dan campak merupakan imunisasi wajib. Sedangkan sisanya merupakan vaksinasi yang direkomendasikan.

Berikut adalah urutan imunisasi dasar lengkap dari Kemenkes dan IDAI yang dapat diikuti oleh masyarakat Indonesia.

1. Usia 0–6 Bulan

Jadwal imunisasi dasar lengkap pada anak usia 0–6 bulan adalah sebagai berikut:

- **Hepatitis B:** Diberikan empat kali, yaitu 24 jam setelah bayi lahir, kemudian di usia 2, 3, dan 4 bulan. Vaksin *booster* akan diberikan ketika bayi berusia 18 bulan.
- **DPT:** Diberikan sebanyak tiga kali, yaitu di usia 2, 3, dan 4 bulan. Vaksin *booster* akan diberikan dua kali pada usia 18 bulan dan 5–7 tahun.
- **BCG:** Hanya diberikan satu kali pada usia 0–1 bulan.
- **HiB:** Diberikan sebanyak tiga kali pada usia 2, 3, dan 4 bulan. Vaksin *booster* akan diberikan satu kali saat usia 18 bulan.
- **Polio:** Vaksin polio oral diberikan ketika bayi lahir sampai berusia 1 bulan. Sementara itu, vaksin polio suntik setidaknya perlu diberikan 2 kali sebelum anak berusia 1 tahun. Kemudian, pemberian vaksin polio oral maupun suntikan juga akan dilakukan secara berulang setiap bulan, yaitu usia 2, 3, dan 4 bulan.
- **PCV (pneumokokus):** Pemberian vaksin PCV dilakukan sebanyak tiga kali pada usia 2, 4, dan 6 bulan. Vaksin *booster* akan diberikan saat usia 12–15 bulan.
- **Rotavirus:** Rotavirus jenis monovalen akan diberikan sebanyak dua kali. Dosis pertama pada usia 6 minggu dan dosis kedua diberikan 4 minggu setelahnya, atau maksimal usia bayi 24 minggu. Sementara itu, Rotavirus jenis pentavalen akan diberikan sebanyak tiga kali, yaitu pada usia 6–12 minggu, kemudian dosis kedua dan ketiganya diberikan 4–10 minggu setelahnya. Imunisasi ini harus selesai saat anak berusia 32 minggu.

2. Usia 6–12 Bulan

Kemudian, ketika anak sudah mencapai usia 6–12 bulan, beberapa imunisasi yang wajib diberikan adalah:

- **Influenza:** Imunisasi ini akan diberikan kepada anak saat berusia 6 bulan, dilanjutkan dengan pemberian setahun sekali ketika memasuki usia 18 bulan hingga 18 tahun.
- **Japanese Encephalitis (JE):** JE diberikan satu kali ketika anak berusia 9 bulan, dilanjutkan dengan *booster* saat anak berusia 2–3 tahun.
- **MMR:** Vaksinasi ini diberikan ketika anak memasuki usia 9 bulan, lalu dilanjutkan *booster* saat usia 18 bulan atau ketika memasuki usia 5–7 tahun.

3. Usia 12–24 Bulan

Ketika memasuki usia satu tahun, sejumlah imunisasi yang tak kalah penting dan perlu diberikan kepada anak di antaranya:

- **Hepatitis A:** Diberikan sebanyak dua kali dimulai pada usia 12 bulan dan dilanjutkan dengan interval 6–12 bulan setelah dosis pertama.
- **Varisela:** Pemberian varisela dilakukan dua kali ketika anak berusia 12–18 bulan dengan jarak untuk dosis keduanya adalah 6 minggu sampai 3 bulan.

4. Usia 2–18 Tahun

Sementara itu, jadwal imunisasi untuk anak usia 2–18 tahun adalah sebagai berikut:

- **Tifoid:** Diberikan sekali pada usia 2 tahun, lalu diberikan ulang setiap 3 tahun sekali sejak usia 5–18 tahun.

- **Dengue:** Diberikan sebanyak tiga kali dalam rentang usia 9–16 tahun, dengan masing-masing dosisnya berjarak 6 bulan.
- **HPV:** Diberikan kepada anak perempuan dua kali dalam rentang usia 9–14 tahun dengan jarak 6–15 bulan setiap dosisnya.

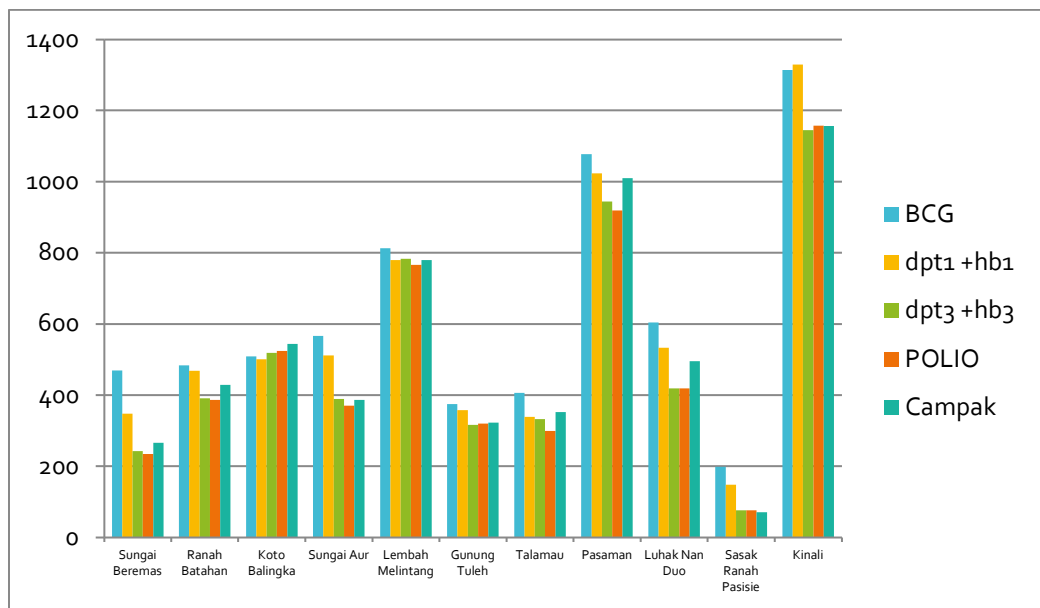
Tabel 4.10 Jumlah Balita Yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Bayi	Jenis Imunisasi (Jumlah Bayi/ Persentase)				
			BCG	dpt1 +hb1	dpt3 +hb3	POLIO	Campak
1.	Sungai Beremas	584	469	348	243	235	266
2.	Ranah Batahan	704	484	468	391	387	429
3.	Koto Balingka	666	509	501	519	524	544
4.	Sungai Aur	779	566	512	389	370	387
5.	Lembah Melintang	1.108	813	780	783	766	780
6.	Gunung Tuleh	689	375	358	316	320	323
7.	Talamau	752	406	339	333	299	352
8.	Pasaman	1.767	1.077	1.023	944	919	1.010
9.	Luhak Nan Duo	914	604	533	419	419	495
10.	Sasak Ranah Pasisie	383	199	148	76	76	71
11.	Kinali	1.656	1.314	1.329	1.145	1.157	1.156
	Jumlah	10.002	6.816	6.339	5.558	5.472	5.813

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kab. Pasaman Barat

Pada tabel 4.10 terlihat bahwa jenis imunisasi yang paling banyak diberikan kepada balita adalah BCG (*Bacillus Calmette-Guérin*) sebanyak 6.816 orang karena vaksin ini paling efektif bila diberikan pada bayi yang baru lahir sampai usia dua bulan. Sedangkan jenis imunisasi yang paling sedikit diberikan pada balita adalah polio.

Gambar 4.8 Jumlah Balita Yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022



4.9 Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang

Balita gizi buruk atau malnutrisi adalah kondisi ketika anak tidak menerima nutrisi, mineral, dan kalori yang cukup untuk membantu perkembangan organ vital. Gizi buruk akan berdampak pada pertumbuhan dan kesehatan anak. Dalam hal ini, kelebihan asupan nutrisi juga menyebabkan balita gizi buruk. Karena itulah penting untuk menjalankan diet gizi seimbang untuk menjaga kadar nutrisi yang cukup di dalam tubuh.

Berikut ini adalah beberapa faktor yang bisa menjadi penyebab balita gizi buruk:

1. Kurang makan: Kurangnya asupan makanan bisa memicu kekurangan nutrisi yang penting hingga berujung pada gizi buruk.
2. Makan tidak teratur: Makan secara tidak teratur bisa memicu masalah

pencernaan dan malnutrisi.

3. Gangguan pencernaan: Beberapa anak mungkin mengalami gangguan pencernaan, seperti penyakit Crohn's, yang membatasi kemampuan tubuh untuk menyerap nutrisi meski mengonsumsi makanan sehat.
4. Kurang ASI: Air susu ibu bagi anak yang baru lahir sangat penting karena mengandung nutrisi penting. Kurangnya ASI berisiko menyebabkan bayi gizi buruk.
5. Kurang aktivitas: Pencernaan tidak akan berjalan lancar jika anak kurang beraktivitas hingga memicu malnutrisi.
6. Fasilitas layanan dasar buruk: Sejumlah layanan dasar, misalnya sanitasi, yang buruk juga bisa memicu masalah gizi.

Balita gizi kurang adalah kekurangan energi dan protein tingkat berat akibat kurang mengonsumsi makanan yang bergizi dan menderita sakit yang begitu lama. Keadaan ini dengan status gizi sangat kurus (BB/TB) dan atau hasil pemeriksaan klinis menunjukkan gejala marasmus, kwashiorkor atau marasmik kwashiorkor. Data dari WHO menunjukkan bahwa dari 7.6 juta kematian balita setiap tahunnya, 35% disebabkan oleh faktor yang berhubungan dengan nutrisi. Malnutrisi ditemukan berhubungan kuat dengan angka kematian bayi dan balita akibat diare dan infeksi saluran pernapasan.

Ada beberapa hal yang menyebabkan balita gizi kurang, diantaranya ; Penyakit infeksi seperti demam dan diare, pola asuh dimana yang mengasuh bukan ibu kandung, pemberian makan pada anak yang kurang tepat seperti MPASI yang terlalu cepat atau terlalu lambat, sanitasi lingkungan yang buruk, serta ekonomi keluarga yang belum memadai. Untuk mencegah masalah gizi ini, para orang tua diharapkan menerapkan pola makan diet seimbang pada anak dan memastikan layanan dasar mereka tercukupi.

Tabel 4.11 Jumlah Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022

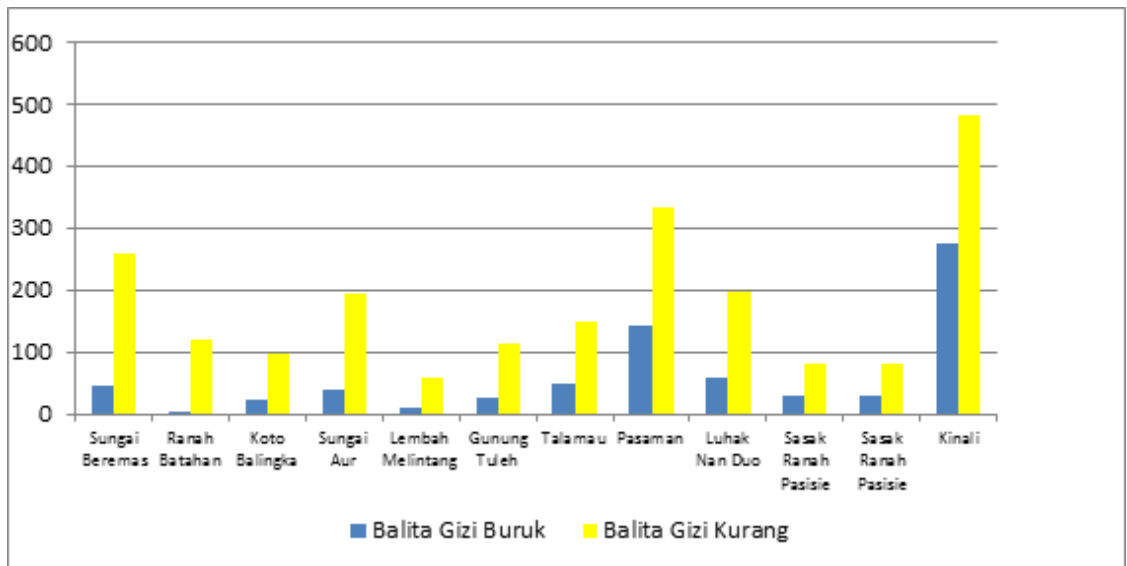
No	Kecamatan	Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang	
		Balita Gizi Buruk	Balita Gizi Kurang
1.	Sungai Beremas	47	258
2.	Ranah Batahan	3	121
3.	Koto Balingka	23	97
4.	Sungai Aur	39	193
5.	Lembah Melintang	9	60
6.	Gunung Tuleh	26	112
7.	Talamau	49	150
8.	Pasaman	143	334
9.	Luhak Nan Duo	57	196
10.	Sasak Ranah Pasisie	28	80
11.	Kinali	276	483
	Pasaman Barat	728	2.164

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kab. Pasaman Barat

Jumlah balita penderita gizi buruk di Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2022 sebanyak 728 orang dengan penyebarannya ada pada setiap kecamatan. Kecamatan yang paling banyak penderita gizi buruk ada di Kecamatan Kinali sebanyak 276 orang dan Kecamatan Pasaman sebanyak 143. Jumlah penduduk pada dua kecamatan tersebut lebih banyak dari kecamatan lainnya sehingga jumlah balitanya juga lebih banyak.

Selain gizi buruk, balita penderita gizi kurang di Kabupaten Pasaman Barat juga cukup tinggi yaitu sebanyak 2.164 orang balita yang tersebar di setiap kecamatan. Jumlah balita gizi kurang terbanyak berada di Kecamatan Kinali (483 orang) dan Kecamatan Pasaman (334 orang).

Gambar 4.9 Jumlah Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022



Pada tahun 2022 telah dilakukan pendataan menyeluruh terhadap balita di Kabupaten Pasaman Barat oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat. Pendataan tersebut melibatkan tenaga kesehatan seperti Bidan dan mitranya. Metode yang dipakai juga semakin kompleks dan lengkap sehingga hasil yang didapat juga lebih baik dari tahun sebelumnya. Itulah sebabnya jumlah Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang pada tahun 2022 jauh meningkat jumlahnya dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Penanggulangan kasus balita gizi kurang pada tahun 2022 dilakukan dengan pemberian PMT yang pendanaanya melalui dana APBD Kabupaten Pasaman Barat dan APBD Propinsi Sumatra Barat. PMT yang diberikan berupa pemberian Susu, Biskuit MP-ASI dan Bubur Susu. Dari jumlah kasus yang dibantu hampir semuanya mengalami kenaikan Berat Badan yang cukup menggembirakan.

4.10 Kematian Pada Bayi

Kematian pada bayi disebut juga dengan kematian neonatal. Kematian neonatal merupakan kematian pada periode saat bayi lahir hidup hingga bayi berumur 28 hari (WHO, 2006). Kematian neonatal tersebut dibagi ke dalam dua fase, yakni kematian early neonatal dan kematian late neonatal. Kematian neonatal tersebut, banyak terjadi pada bayi dengan berat lahir rendah (BBLR). Semakin rendah berat lahir bayi, semakin besar probabilitas kematian neonatalnya. Seiring dengan hal tersebut, risiko kematiannya juga lebih tinggi.

Selain berat lahir, kematian neonatal juga dipengaruhi oleh faktor bayi seperti jenis kelamin. Beberapa studi menyatakan bahwa laki-laki memiliki risiko lebih tinggi untuk meninggal pada masa neonatal dibandingkan dengan bayi perempuan. Dari segi maternal, BBLR yang memiliki ibu dengan paritas dua atau lebih mempunyai risiko besar untuk mengalami kematian neonatal. Kematian BBLR saat neonatal juga dipengaruhi oleh faktor pelayanan kesehatan. Sebuah penelitian menyatakan kelahiran di luar rumah sakit memiliki risiko untuk mengalami kematian neonatal.

Angka Kematian Neonatal (AKN) adalah jumlah anak yang dilahirkan pada tahun tertentu dan meninggal dalam periode 28 hari pertama kehidupan dan dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup.

Tabel 4.12 Jumlah Kematian Bayi Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022

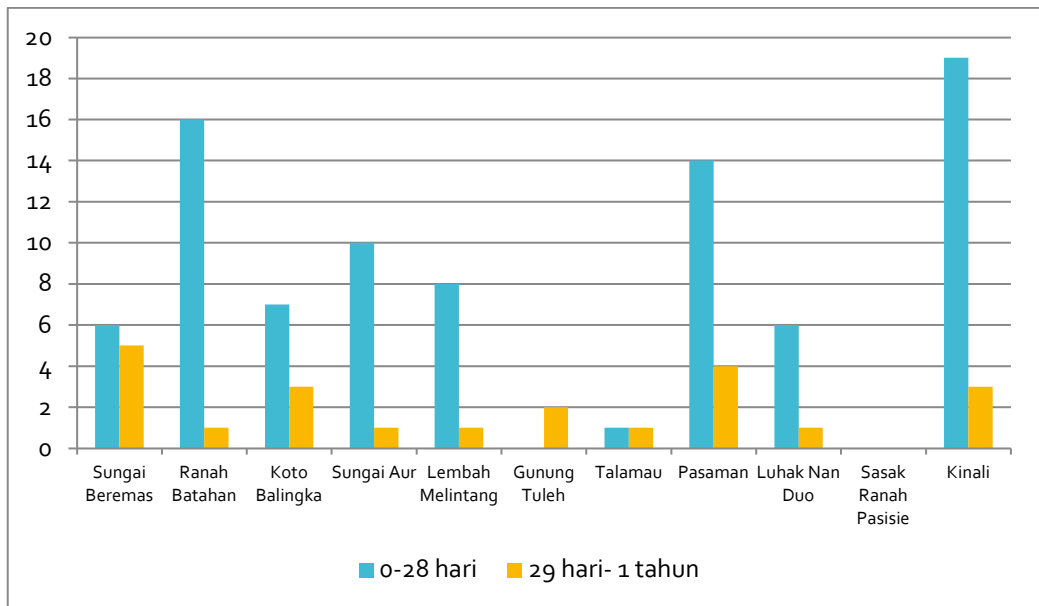
No	Kecamatan	0-28 hari	29 hari- 1 tahun
1.	Sungai Beremas	6	5
2.	Ranah Batahan	16	1
3.	Koto Balingka	7	3
4.	Sungai Aur	10	1
5.	Lembah Melintang	8	1
6.	Gunung Tuleh	0	2
7.	Talamau	1	1
8.	Pasaman	14	4
9.	Luhak Nan Duo	6	1
10.	Sasak Ranah Pasisie	0	0
11.	Kinali	19	3
Pasaman Barat		87	22

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kab. Pasaman Barat

Pada tahun 2022 , Jumlah kematian bayi usia 0-28 hari di Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 87 jiwa yang disebut dengan kematian neonatal. Jumlah kematian paling banyak terjadi di Kecamatan Kinali (19 jiwa) dan Kecamatan Ranah Batahan (16 jiwa). Sedangkan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2022 sebanyak 22 jiwa. Jumlah kematian bayi paling banyak terjadi di Kecamatan Sungai Beremas yaitu 5 jiwa.

Ada beberapa penyebab kematian pada bayi diantaranya BBLR (Berat Badan Lahir Rendah), asfiksia, Tetanus, Neonatorum, Sepsis, Kelainan Bawaan dan beberapa penyebab lainnya.

Gambar 4.10 Jumlah Kematian Bayi Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022



4.11 Kematian Pada Balita (AKBa)

Kematian Pada Balita (AKBa) adalah Jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun (0-59 bulan) pada tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun yang sama (termasuk kematian bayi). Nilai normatif AKBa adalah sebagai berikut: ≥ 140 = sangat tinggi.

Indikator ini terkait langsung dengan target kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan anak-anak bertempat tinggal termasuk pemeliharaan kesehatannya. AKBa kerap dipakai untuk mengidentifikasi kesulitan ekonomi penduduk.

Menurut WHO, setiap tahun lebih dari sebelas juta anak meninggal karena menderita sakit dan kurang gizi. Di beberapa negara, satu atau lebih dari lima anak meninggal sebelum mencapai usia lima tahun. Tujuh dari

sepuluh penyebab kematian anak di negara berkembang dapat disebabkan oleh lima penyebab utama atau kombinasinya yaitu: pneumonia, diare, campak, malaria dan kurang gizi. Di negara dunia ketiga dari setiap empat anak yang berobat ke tempat pelayanan kesehatan menderita paling tidak satu dari penyakit tersebut.

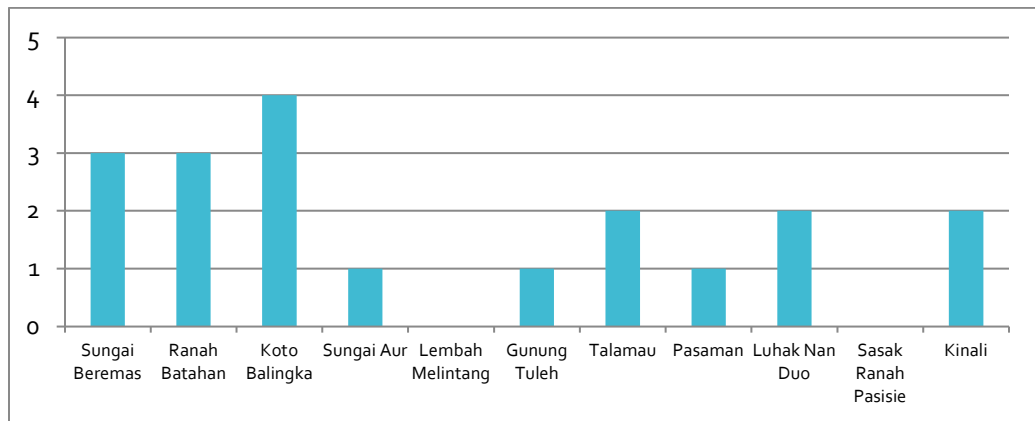
Tabel 4.13 Jumlah Kematian Balita (AKBa) Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Kematian Balita
1.	Sungai Beremas	3
2.	Ranah Batahan	3
3.	Koto Balingka	4
4.	Sungai Aur	1
5.	Lembah Melintang	0
6.	Gunung Tuleh	1
7.	Talamau	2
8.	Pasaman	1
9.	Luhak Nan Duo	2
10.	Sasak Ranah Pasisie	0
11.	Kinali	2
	Pasaman Barat	19

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kab. Pasaman Barat

Jumlah kematian balita di Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2022 sebanyak 19 jiwa, dimana jumlah terbanyak ada di Kecamatan Koto Balingkayakni 4 jiwa. Semakin tinggi tingkat kematian balita, maka mengindikasikan bahwa tingkat pemenuhan kebutuhan balita kurang di daerah tersebut dan sebaliknya semakin rendah angka kematian balita maka semakin tinggi pemenuhan kebutuhan gizi balita di kecamatan tersebut.

Gambar 4.11 Jumlah Kematian Balita (AKABa) Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022



Sumber Data : Dinas Kesehatan Kab. Pasaman Barat

4.12 Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)

Berat badan lahir rendah (BBLR) adalah berat badan lahir yang kurang dari 2,5 kg. Bayi yang lahir dengan BBLR akan terlihat lebih kecil dan kurus, serta memiliki ukuran kepala yang terlihat lebih besar. BBLR dapat terjadi ketika bayi lahir secara prematur atau mengalami gangguan perkembangan saat di dalam kandungan.

Banyak kondisi yang menyebabkan bayi lahir dengan berat badan rendah. Penyebab utama dan yang paling banyak terjadi adalah kelahiran prematur, yaitu persalinan yang terjadi sebelum usia kehamilan 37 minggu. Pertumbuhan bayi umumnya meningkat pesat di minggu-minggu akhir kehamilan. Maka dari itu, bayi yang lahir lebih awal tidak memiliki cukup waktu untuk tumbuh dan berkembang sehingga cenderung memiliki berat badan yang lebih rendah dan bertubuh kecil.

Selain itu, berat badan lahir rendah juga sering kali terjadi akibat *intrauterine growth restriction* (IUGR), yaitu kondisi ketika bayi tidak tumbuh dengan baik saat berada di dalam kandungan. Masalah ini dapat dipicu oleh gangguan pada plasenta, kondisi kesehatan ibu, atau kondisi kesehatan bayi.

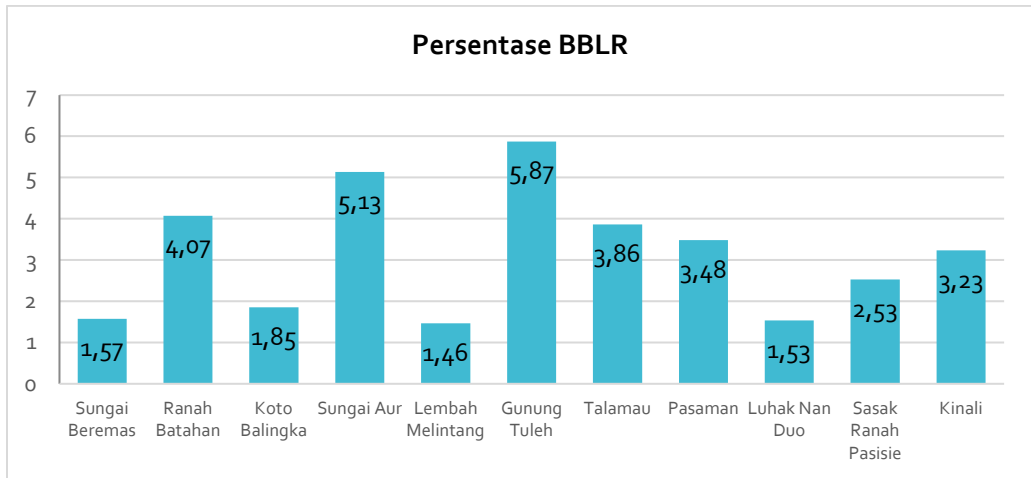
Tabel 4.14 Jumlah Bayi Lahir, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), BBLR Dirujuk, dan Bergizi Buruk di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022

No	Kecamatan	Bayi lahir	BBLR 2022		Persentase
			Jumlah	Dirujuk	
1.	Sungai Beremas	572	9	3	1,57
2.	Ranah Batahan	491	20	1	4,07
3.	Koto Balingka	542	10	3	1,85
4.	Sungai Aur	682	35	21	5,13
5.	Lembah Melintang	891	13	0	1,46
6.	Gunung Tuleh	477	28	5	5,87
7.	Talamau	440	17	3	3,86
8.	Pasaman	1.266	44	20	3,48
9.	Luhak Nan Duo	721	11	0	1,53
10.	Sasak Ranah Pasisie	237	6	0	2,53
11.	Kinali	1.361	44	13	3,23
	Pasaman Barat	7.680	237	69	3,09

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kab. Pasaman Barat

Persentase BBLR tertinggi ada di Kecamatan Gunung Tuleh yaitu 5,87 persen dan paling sedikit berada pada Kecamatan Lembah Melintang yaitu 1,46 persen dari jumlah bayi yang lahir. Hal ini menggambarkan kualitas hidup di dua Kecamatan yang berbeda.

Gambar 4.12 Jumlah Bayi Lahir, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), BBLR Dirujuk, dan Bergizi Buruk di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022



Sumber Data : Dinas Kesehatan Kab. Pasaman Barat

4.13 ASI Eksklusif

Sesuai dengan rekomendasi dari badan kesehatan dunia (WHO, World Health Organization), bayi yang belum genap berusia 6 bulan selayaknya HANYA mendapatkan ASI secara eksklusif, tanpa tambahan makanan atau minuman apapun. Namun, pada penerapannya, seringkali ibu memang mengalami berbagai kendala. Termasuk yang asalnya justru dari keluarga sendiri, misalnya orang tua.

Perlu diketahui, pemberian ASI eksklusif sangat bermanfaat bayi perkembangan daya tahan tubuh bayi, kesehatan sistem pencernannya, kecukupan gizinya, meminimalisasi potensi alergi, dan juga meningkatkan kedekatan emosional antara ibu dengan bayi. Memberikan makanan atau minuman pendamping selain ASI (termasuk air tajin) di usia bayi yang masih sangat muda bisa berisiko menyebabkan beberapa gangguan kesehatan,

seperti alergi, mual, muntah, nyeri perut, diare, konstipasi, gangguan gizi (misalnya kurang gizi atau justru obesitas), dan sebagainya.

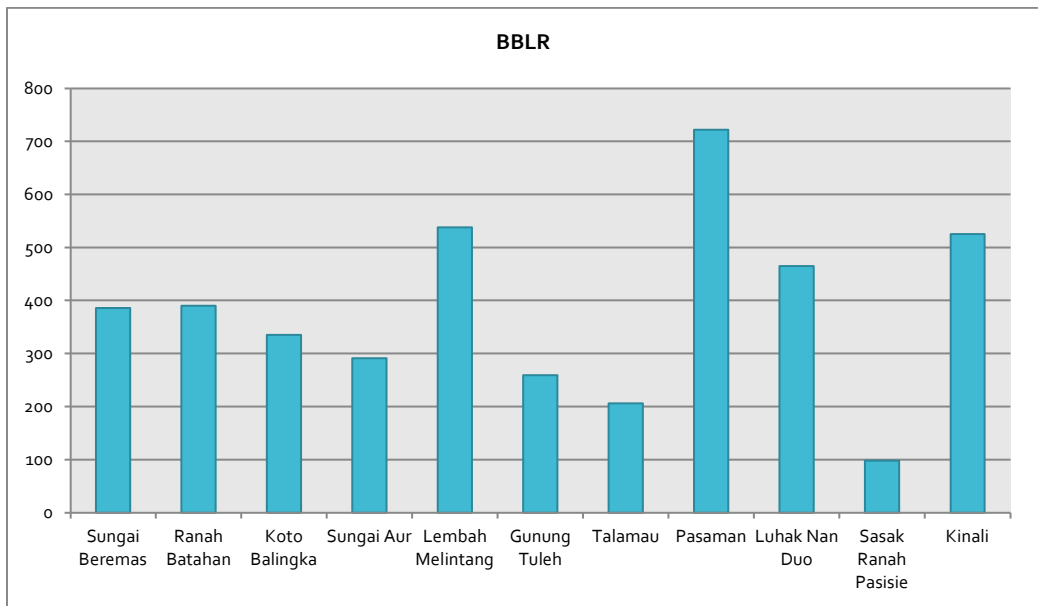
Tabel 4.15 Jumlah Bayi yang mendapat ASI Eksklusif selama 6 bulan di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Bayi Yang Mendapat ASI Eksklusif (Usia s/d 6 bulan)
1.	Sungai Beremas	386
2.	Ranah Batahan	390
3.	Koto Balingka	335
4.	Sungai Aur	291
5.	Lembah Melintang	538
6.	Gunung Tuleh	259
7.	Talamau	206
8.	Pasaman	722
9.	Luhak Nan Duo	465
10.	Sasak Ranah Pasisie	98
11.	Kinali	525
Pasaman Barat		4.215

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kab. Pasaman Barat

Jumlah Bayi yang mendapat ASI Eksklusif selama 6 bulan di Kabupaten Pasaman Barat pada Tahun 2022 sebanyak 4.215 orang. Jumlah paling tinggi berada di Kecamatan Pasaman yakni sebanyak 722 orang dan terendah berada di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie sebanyak 98 orang. Hal ini juga berbanding lurus dengan jumlah penduduk di kecamatan tersebut yang berbeda jauh.

Gambar 4.13 Jumlah Bayi yang mendapat ASI Eksklusif selama 6 bulan di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022



4.14 Usia Perkawinan Pertama

Umur perkawinan pertama wanita erat hubungannya dengan fertilitas. Bila umur perkawinan pertama seorang perempuan semakin muda semakin mendekati umur haid pertama kali, maka semakin lama masa reproduksinya. Hal ini berarti semakin panjang masa bagi seorang wanita untuk hamil dan melahirkan. Usia yang dianjurkan bagi perempuan untuk melangsungkan perkawinan pertama adalah pada usia 21 tahun. Sebagian besar perempuan 10 tahun keatas yang berstatus pernah kawin di Kabupaten Pasaman melakukan perkawinan pertama pada usia 21 tahun ke atas. Meskipun demikian masih terdapat perempuan yang melangsungkan perkawinan pertama pada usia dibawah 21 tahun.

Ada beberapa alasan mengapa perempuan lebih dirugikan dalam kasus ini. Pertama, perempuan yang menikah dini berkorelasi dengan angka kehamilan di bawah umur. Hal tersebut meningkatkan risiko penyakit, seperti kanker serviks, eklampsia, puerperal endometritis, dan systemic infections. Lebih lanjut, perempuan yang melahirkan sebelum usia 15 tahun berisiko meninggal lima kali lebih besar dibandingkan usia 20 tahun ke atas. Tak berhenti sampai situ, bayi yang dilahirkannya memiliki risiko mengalami mortalitas dan morbiditas 50 persen lebih tinggi serta cenderung prematur dengan berat badan lahir yang rendah.

Selain itu, perempuan yang menikah dini juga berpeluang lebih tinggi mengalami putus sekolah, kekerasan dalam rumah tangga, dan melanggengkan jerat kemiskinan. Hal ini akan berdampak secara psikologis yang bisa menimbulkan kecemasan, stress, dan depresi. Hal tersebut diakibatkan kematangan psikologis yang belum maksimal dan stabil. Fenomena ini juga berpotensi merenggut hak anak atau yang kerap disebut *the best interest of the child* atau dengan kata lain, para korban dipaksa menjadi dewasa dan cenderung kehilangan jati dirinya.

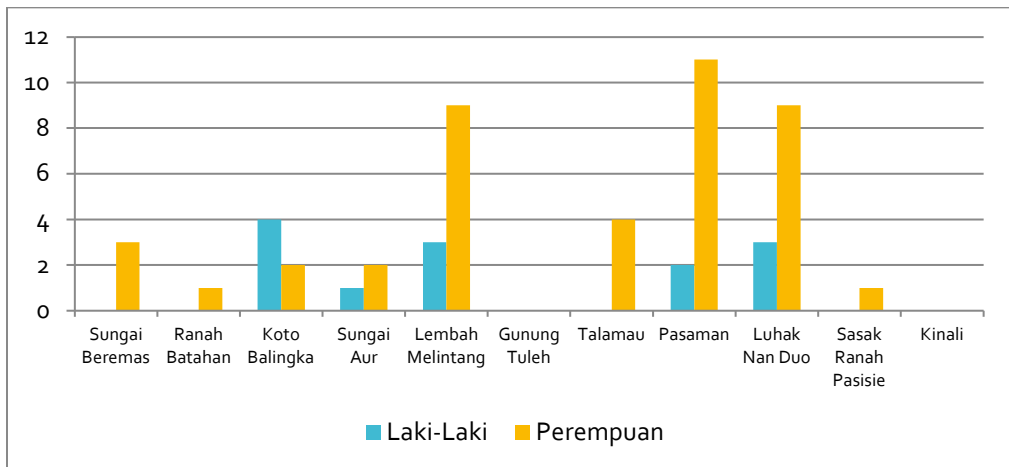
Tabel 4.16 Perkawinan Anak Usia s/d 18 Tahun Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022

Kecamatan	Sudah Menikah		
	Laki-Laki	Perempuan	Total
1 Sungai Beremas	-	3	-
2 Ranah Batahan	-	1	1
3 Koto Balingka	4	2	6
4 Sungai Aur	1	2	3
5 Lembah Melintang	3	9	12
6 Gunung Tuleh	-	-	-
7 Talamau	-	4	4
8 Pasaman	2	11	13
9 Luhak Nan Duo	3	9	12
10 Sasak Ranah Pasisie	-	1	1
11 Kinali	-	-	-
Pasaman Barat	13	42	55

Sumber Data : Kemenag Kab. Pasaman Barat

Dari tabel 4.16 di atas terlihat bahwa perkawinan anak usia 18 tahun ke bawah terjadi di hampir semua kecamatan. Dari tabel terlihat bahwa jumlah terbanyak berada di 3 kecamatan yaitu Kecamatan Pasaman (13 perkawinan), Kecamatan Lembah Melintang dan Kecamatan Luhak Nan Duo, masing-masing 12 perkawinan. Tidak ada alasan spesifik mengapa di 3 kecamatan tersebut cukup tinggi perkawinan usia 18 tahun ke bawah, akan tetapi bila dilihat dari kepadatan penduduknya, ketiga kecamatan tersebut merupakan kecamatan yang padat penduduknya.

Gambar 4.14 Perkawinan Anak Usia s/d 18 Tahun Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022



Sumber Data : Kemenag Kab. Pasaman Barat

Dari Gambar 4.16 di atas terlihat bahwa pelaku perkawinan usia 18 tahun ke bawah umumnya dialami oleh perempuan. Dari grafik terlihat jelas perbedaannya dengan laki-laki. Hal ini membuktikan bahwa perempuan masih menjadi korban perkawinan di bawah umur. Banyak variabel yang ditengarai menjadi dasar pernikahan dini, salah satunya adalah faktor ekonomi. Karena merasa tak mampu membiayai hidup anak gadisnya, sebagian orang tua memilih jalan menikahkan putrinya sedini mungkin. Faktor lain yang juga mempengaruhi antara lain pengaruh adat, kebiasaan masyarakat, agama, pendidikan rendah, hingga pergaulan remaja yang menyebabkan terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan.

4.15 Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA)

Korban Penyalahgunaan NAPZA, adalah seseorang yang menderita ketergantungan yang disebabkan oleh penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat-zat Adaptif lainnya termasuk minuman Keras) baik atas kemauan sendiri ataupun karena dorongan atau paksaan orang lain.

Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif, atau lebih sering disingkat Napza, mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki risiko kecanduan bagi penggunaannya. Napza dikenal juga dengan istilah narkoba. Menurut pakar kesehatan, napza sebenarnya adalah senyawa-senyawa yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun kini persepsi itu disalahartikan akibat pemakaian di luar peruntukan dan dosis yang semestinya.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-Undang No. 35 tahun 2009). Cara kerjanya mempengaruhi susunan syaraf yang dapat membuat kita tidak merasakan apa-apa, bahkan bila bagian tubuh kita disakiti sekalipun. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku (Undang-Undang No. 5/1997).

Zat adiktif adalah zat-zat yang bisa membuat ketagihan jika dikonsumsi secara rutin. Bahan adiktif berbahaya termasuk bahan-bahan alamiah, semi

sintetis maupun sintetis yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina yang dapat mengganggu sistem syaraf pusat, seperti Alkohol yang mengandung ethyl etanol, inhalen/sniffing (bahan pelarut) berupa zat organik (karbon) yang menghasilkan efek yang sama dengan yang dihasilkan oleh minuman yang beralkohol atau obat anaestetik jika aromanya dihisap, Nikotin, Kafein dan Zat Desainer.

Tabel 4.17 Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin, 2022

No	Kecamatan	Korban Penyalahgunaan NAPZA		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Sungai Beremas	3	0	3
2.	Ranah Batahan	0	0	0
3.	Koto Balingka	1	0	1
4.	Sungai Aur	0	0	0
5.	Lembah Melintang	1	1	2
6.	Gunung Tuleh	2	0	2
7.	Talamau	1	0	1
8.	Pasaman	6	0	6
9.	Luhak Nan Duo	5	1	6
10.	Sasak Ranah Pasisie	1	0	6
11.	Kinali	7	0	7
	Pasaman Barat	27	2	29

Sumber Data : Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pasaman Barat

Dari tabel 4.17 terlihat hampir di seluruh kecamatan terjadi korban penyalahgunaan NAPZA. Korban terbanyak ada di Kecamatan Kinali (7 orang), dan Kecamatan Pasaman, Luhak Nan Duo dan Sasak Ranah Pasisie masing-masing 6 orang. Para korban penyalahgunaan narkoba itu penting untuk menjalani program rehabilitasi secara sempurna atau berkelanjutan, tak hanya

rehabilitasi medis dan sosial akan tetapi dilanjutkan dengan pendampingan baik dari keluarga maupun institusi yang menaunginya. Dengan program rehabilitasi, maka mereka bisa abstinen atau berhenti mengkonsumsi narkoba. Selanjutnya mereka dilatih untuk mampu disiplin, dan mengendalikan diri sehingga dapat mengatasi dari potensi kekambuhannya. Di samping itu pula, mereka dapat mengelola fungsi sosialnya.

4.16 Penderita HIV / AIDS

HIV adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh dan melemahkan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi dan penyakit. HIV belum bisa disembuhkan, tapi ada pengobatan yang bisa digunakan untuk memperlambat perkembangan penyakit.

Pengobatan ini juga akan membuat penderitanya hidup lebih lama, sehingga bisa menjalani hidup dengan normal. Dengan diagnosis HIV dini dan penanganan yang efektif, pengidap HIV tidak akan berubah menjadi AIDS. AIDS adalah stadium akhir dari infeksi virus HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya.

Tabel 4.18 Penderita HIV / AIDS di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022

Kecamatan	1-4 Tahun		20-29 Tahun		30-39 Tahun		40-49 Tahun		50-59 Tahun		Total
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
Pasaman Barat	2	-	12	2	14	-	1	1	2	0	34

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kab. Pasaman Barat

Data berdasarkan jumlah pasien yang berobat di RSUD Pasaman Barat

Berdasarkan laporan jumlah pasien yang berobat di RSUD Pasaman Barat Dinas, tercatat sebanyak 34 orang terinfeksi virus HIV/AIDS. Dari tabel terlihat bahwa pasien didominasi oleh laki-laki usia dewasa usia 20 tahun ke atas. Namun ada juga pasien laki-laki usia 1-4 tahun, dimana mereka mendapatkan virus tersebut dari orang tuanya yang juga terinfeksi virus HIV/AIDS. Penularan HIV sejatinya hanya bisa terjadi karena adanya kontak dengan cairan tubuh penderita. Kontak cairan tersebut adalah darah, sperma, cairan vagina, cairan anus, serta ASI. HIV tidak dapat ditularkan melalui udara, air, keringat, air mata, air liur, gigitan nyamuk, ataupun sentuhan fisik.

BAB V

EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN



BAB V

EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN

Indikator ekonomi dan ketenagakerjaan merupakan indikator penting dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan. baik dibidang sosial maupun dibidang ekonomi. Indikator ini dapat memberikan gambaran tentang daya serap ekonomi terhadap pertumbuhan penduduk dan produktifitas tenaga kerja. Apabila perekonomian tidak dapat menyerap pertumbuhan tenaga kerja maka peningkatan pengangguran tidak dapat dihindari sehigga pada akhirnya banyak pengangguran yang nantinya akan mengakibatkan banyak terjadi masalah sosial.Selain itu. informasi dan kondisi ketenagakerjaan suatu daerah menjadi semakin penting mengingat salah satu tujuan pembangunan adalah menciptakan lapangan pekerjaan dalam jumlah dan kualitas yang memadai dan pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting untuk menunjukkan kesejahteraan masyarakat. Banyaknya penduduk yang bekerja menggambarkan tingkat kesejahteraan yang baik. sebaliknya banyaknya penduduk yang menganggur menjadi indikator buruknya tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu. semakin banyak penduduk usia kerja yang terlibat dalam kegiatan ekonomi dan terserap di dunia kerja menjadi satu tanda bahwa tingkat kesejahteraan akan semakin baik.

5.1 Rumah Tangga Miskin

Kemiskinan adalah kondisi keterbatasan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak seperti keterbatasan dalam pendapatan, keterampilan, kondisi kesehatan, penguasaan aset ekonomi, ataupun akses informasi. Pengukuran ini bersifat materi atau pendekatan moneter. Pengukuran dengan pendekatan moneter dapat dilakukan dengan menggunakan data pengeluaran sebagai pendekatan pendapatan rumah tangga. Kemudian data pengeluaran ini diperbandingkan dengan suatu batas nilai tukar rupiah yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Batas ini sering disebut sebagai garis kemiskinan. Penduduk yang pengeluarannya lebih kecil daripada garis kemiskinan ini disebut penduduk miskin. Pemerintah menggunakan garis kemiskinan berdasarkan ukuran dari BPS yang dihitung berdasarkan data Survei Sosial-Ekonomi Nasional (Susenas).

Secara umum kemiskinan dijelaskan oleh indikator sebagai berikut (i) kekurangan kebutuhan dasar: ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar yaitu makanan dan gizi, pakaian, pendidikan dan kesehatan; (ii) ketidakproduktifan: ketidakmampuan melakukan upaya-upaya produktif; (iii) ketertutupan akses terhadap sumberdaya sosial dan ekonomi; (iv) keterpurukan: ketidakmampuan menentukan nasibnya sendiri, diperlakukan secara tidak adil, didera ketakutan dan keraguan, dan berlaku apatis serta pesimistik; dan (v) ketergantungan: tidak mampu melepaskan diri dari kemiskinan dan mentalitas kultural serta rendah dalam apresiasi diri. Ada beberapa ukuran kemiskinan yang telah diterapkan di Indonesia dewasa ini, diantaranya adalah ukuran dari Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dan United Nations Development Program (UNDP).

BPS mengartikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non-makanan. Dari sisi makanan, BPS menggunakan indikator yang direkomendasikan oleh Widyakara Pangan dan Gizi tahun 1998 yaitu kebutuhan gizi 2.100 kalori per orang per hari, sedangkan dari sisi kebutuhan non-makanan tidak hanya terbatas pada sandang dan papan melainkan termasuk pendidikan dan kesehatan. Model ini pada intinya membandingkan tingkat konsumsi penduduk dengan suatu garis kemiskinan (GK), yaitu jumlah rupiah untuk konsumsi per orang per bulan. Sedangkan data yang digunakan adalah data makro hasil Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas).

Selain melakukan perhitungan jumlah penduduk miskin dalam analisis tentang penduduk miskin, BPS juga menyertakan hasil analisis tentang karakteristik rumah tangga miskin. Di dalamnya tergambar kondisi rumah tangga miskin berdasarkan karakteristik sosial demografi, pendidikan, kesehatan, sumber penghasilan, rasio ketergantungan, ketenagakerjaan, kondisi perumahan dan lainlainnya. Karakteristik rumah tangga yang dianggap BPS memiliki keterkaitan erat dengan kemiskinan diantaranya adalah jumlah anggota rumah tangga, mereka yang kepala rumah tangganya berstatus sebagai janda, pendidikan kepala rumah tangga rendah atau kepala rumah tangga buta huruf, perbedaan geografis antara kota dan desa, lapangan usaha dan status pekerjaan, penguasaan luas lantai per kapita, rumah tangga tanpa akses terhadap air bersih, fasilitas buang air besar, pemanfaatan listrik dan sebagainya.

Dari segi faktor penyebabnya, kemiskinan dapat dibedakan menjadi kemiskinan kultural, kemiskinan sumber daya ekonomi, dan kemiskinan struktural. Menurut Surbakti (Usman, 2006: p136), kemiskinan kultural bukanlah bawaan melainkan akibat dari tidak kemampuan menghadapi kemiskinan yang berkepanjangan.

Kemiskinan bukanlah sebab melainkan akibat. Sikap-sikap seperti ini diabadikan melalui proses sosialisasi dari generasi ke generasi. Kemiskinan sumber daya ekonomi melihat fenomena kemiskinan dari sisi ketiadaan atau kelangkaan sumber daya ekonomi baik faktor-faktor produksi yang berupa modal, tanah, sumber daya manusia dalam hal ini tingkat dan kualitas pendidikan maupun kondisi geografis yang terkait dengan tempat tinggal suatu masyarakat. Kemiskinan struktural merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh faktor struktur ekonomi dan politik yang melingkupi si miskin.

Struktur ekonomi dan politik yang kurang berpihak pada sekelompok masyarakat tertentu sehingga menimbulkan hambatan-hambatan dalam akses sumber daya ekonomi, lapangan pekerjaan dan partisipasi dalam pembangunan ..

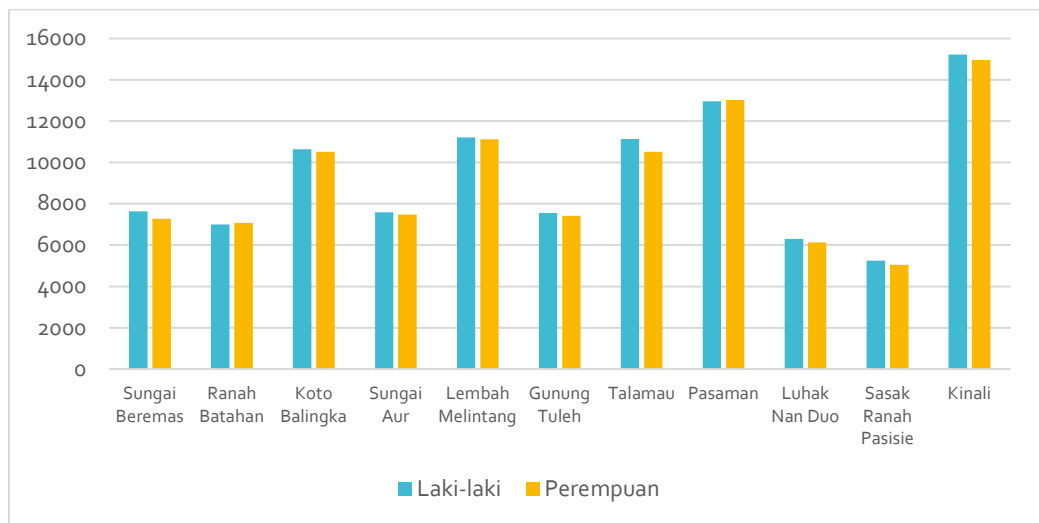
Tabel 5.1 Kepala Rumah Tangga Miskin Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2022

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		L+P
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Sungai Beremas	7.634	7.274	14.908
2.	Ranah Batahan	7.004	7.068	14.072
3.	Koto Balingka	10.637	10.509	21.146
4.	Sungai Aur	7.581	7.471	15.052
5.	Lembah Melintang	11.209	11.115	22.324
6.	Gunung Tuleh	7.560	7.413	14.973
7.	Talamau	11.132	10.519	21.651
8.	Pasaman	12.961	13.020	25.981
9.	Luhak Nan Duo	6.305	6.126	12.431
10.	Sasak Ranah Pasisie	5.255	5.046	10.301
11.	Kinali	15.217	14.966	30.183
Kab. Pasaman Barat		102.495	100.527	203.022

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat

Data Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 mencatat rumah tangga miskin terlihat bahwa kaum perempuan yang menanggung beban sebagai kepala rumah tangga miskin sebanyak 100.527 orang (49,51 %). Pada umumnya yang masuk dalam kategori ini adalah para janda yang ditinggal mati suami karena konflik atau meninggal karena sakit. Secara kultural di Indonesia, biasanya para istri yang ditinggal mati suaminya sering tidak berumah tangga lagi dan bertahan hidup sendiri untuk membiayai anggota keluarga. Sedangkan jumlah kepala keluarga miskin laki – laki sebanyak 102.495 orang (50,41 %). Perbandingan jumlah kepala rumah tangga perempuan dan laki-laki setiap kecamatan bisa terlihat dalam grafik berikut ini.

Gambar 5.1 Kepala Rumah Tangga Miskin Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2022



Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat

Dari grafik diatas terlihat bahwa terdapat di semua kecamatan, grafik perempuan dan laki-laki yang menjadi kepala rumahtangga miskin tidak berbeda jauh. Hal ini menandakan bahwa masih banyak perempuan di kecamatan tersebut yang masih meletakkan perempuan sebagai kepal rumah tangga miskin.

5.2 Usaha Mikro dan Kecil (UMK)

Usaha Mikro dan Kecil (UMK) merupakan kegiatan Ekonomi Rakyat yang terbukti tangguh menghadapi goncangan krisis multi dimensi yang melanda Indonesia sejak awal 1998 yang lalu (Mardikanto. 2010). Jika dicermati, usaha mikro dan kecil sebagian besar merupakan kegiatan agrobisnis (onfarm dan off-farm) dan kegiatan-kegiatan non-farm yang dilakukan oleh keluarga petani/nelayan kecil.

Tabel 5.2 Pelaku Usaha Mikro Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2022

No	Kecamatan	Jenis Usaha	Usaha Mikro		Total
			L	P	
1.	Sungai Beremas	Home Industri. Perdagangan dan Jasa	740	658	1398
2.	Ranah Batahan	Home Industri. Perdagangan dan Jasa	718	811	1529
3.	Koto Balingka	Home Industri. Perdagangan dan Jasa	777	760	1537
4.	Sungai Aur	Home Industri. Perdagangan dan Jasa	890	1005	1895
5.	Lembah Melintang	Home Industri. Perdagangan dan Jasa	977	1002	1979
6.	Gunung Tuleh	Home Industri. Perdagangan dan Jasa	788	998	1786
7.	Talamau	Home Industri. Perdagangan dan Jasa	752	1030	1782
8.	Pasaman	Home Industri. Perdagangan dan Jasa	2992	2146	4138
9.	Luhak Nan Duo	Home Industri. Perdagangan dan Jasa	1010	1147	2157
10.	Sasak Ranah Pasisie	Home Industri. Perdagangan dan Jasa	787	875	1642
11.	Kinali	Home Industri. Perdagangan dan Jasa	1795	2193	3988
Pasaman Barat			11.206	12.625	23.831
Sumber Data : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kab. Pasaman Barat					

Pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Pasaman Barat didominasi oleh kaum perempuan, dimana dari total 23.831 orang pelaku Usaha Mikro, sebanyak 12.625 orang atau 52,97 persen adalah perempuan. Kecamatan yang memiliki pelaku usaha mikro terbanyak adalah Kecamatan Pasaman dengan jumlah 4.138 pelaku usaha atau 17,37 persen dengan jenis usaha yang beragam.

Berikut ini rincian beberapa contoh *Home Industri* pada masing-masing Kecamatan ;

1. Kecamatan Sungai Beremas, jenis usahanya antara lain sulaman benang emas, kue, ikan kering, gula merah, industri tahu, air minum isi ulang, dan lainnya
2. Kecamatan Ranah Batahan, jenis usahanya antara lain tahu-tempe, gula merah, furniture dan lainnya
3. Kecamatan Koto Balingka, jenis usahanya antara lain sapu ijuk, gula merah, air minum isi ulang, tahu, anyaman bambu, kerupuk, kue dan lainnya
4. Kecamatan Lembah melintang, jenis usahanya antara lain industri tahu, gula merah, kerupuk, sirup, kue, papan/balok, teralis/pagar, kerajinan kayu/furniture, kopi bubuk dan lainnya
5. Kecamatan Sungai Aur, jenis usahanya antara lain Industri tahu, gula merah, sapu ijuk ddan lainnya
6. Kecamatan Gunung Tuleh, jenis usahanya antara lain Industri gula merah, batako, minyak nilam, sapu ijuk dan lainnya
7. Kecamatan Talamau, jenis usahanya antara lain sapu ijuk, minyak nilam, anyaman rotan untuk peralatan dapur, rending kacang, gula merah, furniture, kopi bubuk, tahu, dan lainnya
8. Kecamatan Pasaman, jenis usahanya antara lain tanaman hias, lele asap, air minum isi ulang, furniture, tahu tempe, penjahit pakaian dan lainnya
9. Kecamatan Luhak Nan Duo, jenis usahanya antara lain industri tahu tempe, anyaman rotan dan bambu, gula merah, kopi bubuk dan lainnya
10. Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, jenis usahanya antara lain ikan kering, lele asap, kue kering, cinderamata khas dari batok kelapa, air minum isi ulang danlainnya

11. Kecamatan Kinali, jenis usahanya antara lain air minum isi ulang, industri tahu tempe, lele asap, ikan kering, furniture, minyak nilam, industri kapal/perahu dan lainnya

5.3 Keanggotaan Koperasi

Pemerintah melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasaman Barat menganggap bahwa dalam konteks pasar bebas Asean Economic Community (AEC) di tahun 2015 menjadi tantangan untuk meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM. Hal ini merupakan peluang bisnis sekaligus ancaman bagi Koperasi dan UMKM, baik dari sisi produk yang dihasilkan maupun Pemasaran produknya.

Pemerintah juga meyakini bahwa SME (Small Medium Enterprise) dan Koperasi merupakan tulang punggung bagi kegiatan perekonomian yang positif. Ketika perekonomian dan industri negara maju mengalami kontraksi, justru negara-negara yang menyupport perekonomian mikro dan koperasi mampu bertahan dari goncangan global dengan baik.

Tabel 5.3 Keanggotaan Koperasi Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2022

No	Kecamatan	Keanggotaan Koperasi		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Sungai Beremas	5.864	1.299	7.141
2.	Ranah Batahan	1.031	421	1.452
3.	Koto Balingka	537	422	959
4.	Sungai Aur	4.657	3.933	8.590
5.	Lembah Melintang	357	290	647
6.	Gunung Tuleh	2.779	3.574	5.353
7.	Talamau	1.407	1.020	2.427
8.	Pasaman	5.578	3.299	8.877
9.	Luhak Nan Duo	3.886	2.719	6.605
10.	Sasak Ranah Pasisie	1.098	956	2.054
11.	Kinali	2.234	1414	3.648
Kab. Pasaman Barat		29.406	18.437	47.753

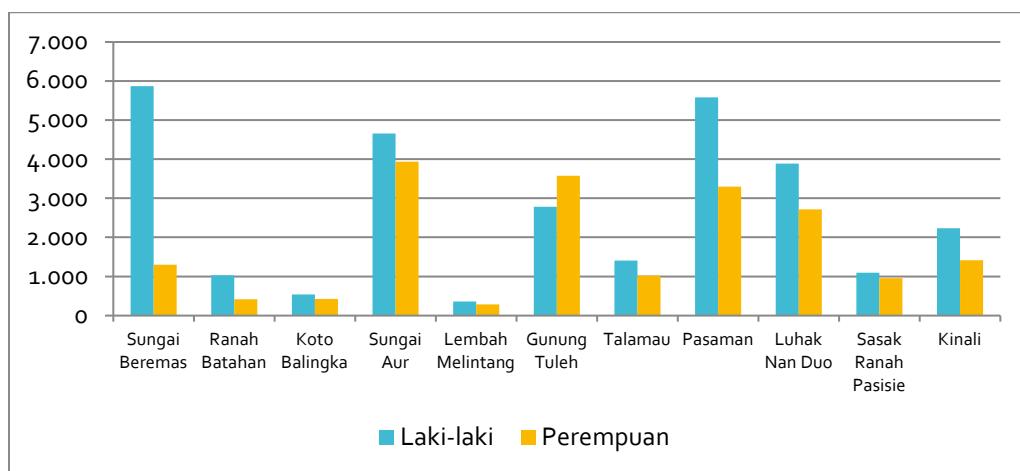
Sumber data : Dinas Kopersi Usaha Kecil dan Menengah Kab. Pasaman Barat

Pada tabel diatas bisa dilihat bahwa jumlah anggota koperasi perempuan sebanyak 18.347 orang, lebih sedikit dibandingkan jumlah anggota koperasi laki-laki atau hanya sekitar 38,42 persen dari total anggota koperasi. Hal ini disebabkan oleh sektor perkebunan kelapa sawit merupakan koperasi yang paling banyak di Kabupaten Pasaman Barat dengan anggota koperasinya dominan Kepala Rumah Tangga laki-laki. Ini mengandung implikasi bahwa kepentingan perempuan belum mendapat perhatian secara proporsional sehingga manfaat koperasi belum dapat dinikmati sebagaimana mestinya.

Anggota koperasi perempuan terbanyak ada di Kecamatan Sungai Aur yaitu sebanyak 5.842 atau 8,23 persen di Pasaman Barat. Anggota koperasi dari kalangan perempuan paling sedikit ad di Kecamatan Lembah Melintang

yakni 290 orang atau 0,60 persen dari total anggota koperasi di Kabupaten Pasaman Barat. Hal ini disebabkan karena di wilayah tersebut ada koperasi perkebunan sawit yang merupakan koperasi penyumbang anggota koperasi tersebar di Kabupaten Pasaman Barat.

Gambar 5.2 Keanggotaan Koperasi Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2022



Sumber data : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kab. Pasaman Barat

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa anggota koperasi perempuan yang paling banyak ada di Kecamatan Sungai Aur yakni 3.933 orang atau 8,23 persen dari anggota koperasi di Kabupaten Pasaman Barat. Anggota koperasi dari kalangan perempuan paling sedikit ada di Kecamatan Lembah Melintang yakni sebanyak 290 orang atau 0,60 persen dari total anggota koperasi di Kabupaten Pasaman Barat. Hal ini dikarenakan di Kecamatan tersebut tidak terdapat perkebunan kelapa sawit yang merupakan penyumbang anggota koperasi terbesar di Kabupaten Pasaman Barat.

5.4 Penduduk Usia Kerja

Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun dan lebih. Penduduk yang telah memasuki usia kerja dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Kelompok angkatan kerja terdiri atas penduduk yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja (pengangguran). Kelompok bukan angkatan kerja adalah penduduk yang memasuki usia kerja tetapi tidak aktif dalam kegiatan ekonomi seperti ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa dan melakukan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.

Tabel 5.4 Penduduk Usia Kerja Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022

Penduduk Usia Kerja	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
Pasaman Barat	167.220	163.430	330.650

Sumber Data : BPS - Hasil Sakernas Agustus 2022

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman Barat mencatat, berdasarkan hasil olahan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2020 menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Pasaman Barat mencapai 330.650 jiwa (74,73 persen dari total penduduk). Apabila dilihat perbandingan penduduk usia kerja antara laki-laki dan perempuan tidak berbeda jauh. Akan tetapi, penduduk usia kerja perempuan lebih sedikit yakni 163.430 jiwa (36,94 persen dari total penduduk) dan penduduk usia kerja laki-laki sebanyak 167.220 jiwa (37,79 persen dari total penduduk) Kabupaten Pasaman Barat.

Gambar 5.3 Penduduk Usia Kerja Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022



Gambar di atas menunjukkan jumlah/proporsi yang seimbang antara penduduk usia kerja laki-laki dan penduduk usia kerja perempuan (hampir sama-sama 50 %).

Tabel 5.5 Penduduk Usia 15+ Yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin Dan Status Dalam Pekerjaan Utama di Kab. Pasaman Barat Tahun 2022

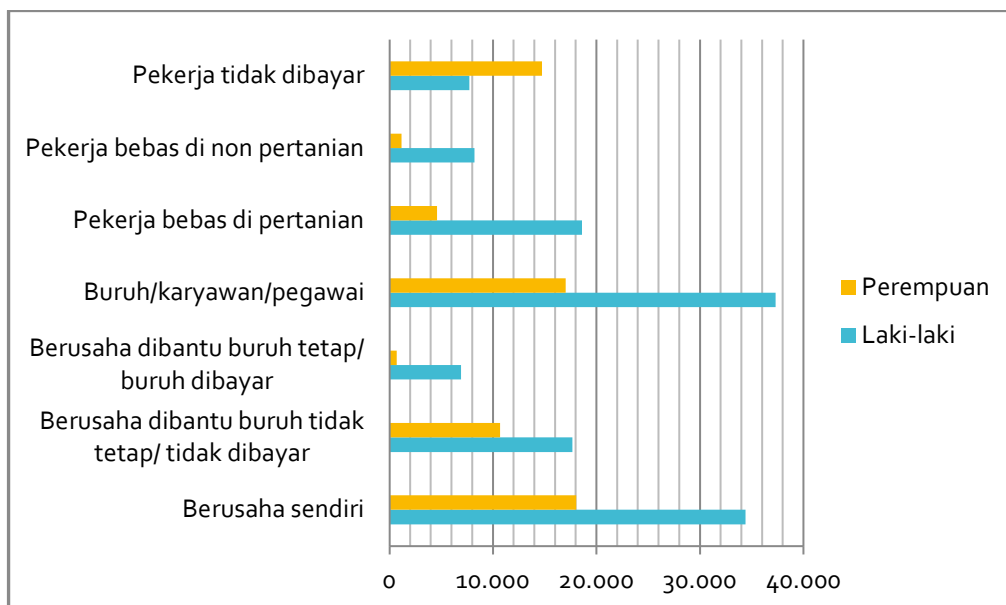
No	Status Dalam Pekerjaan Utama	Jumlah Tenaga Kerja		
		L	P	Total
1	Berusaha sendiri	34.397	18.062	52.459
2	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/ tidak dibayar	17.692	10.690	28.382
3	Berusaha dibantu buruh tetap/ buruh dibayar	6.911	695	7.606
4	Buruh/karyawan/pegawai	37.304	17.019	54.323
5	Pekerja bebas di pertanian	18.602	4.591	23.193
6	Pekerja bebas di non pertanian	8.228	1.181	9.409
7	Pekerja tidak dibayar	7.720	14.755	22.475
Pasaman Barat		130.854	66.993	197.847

Sumber Data : BPS - Hasil Sakernas Agustus 2022

Dari data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022 menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 197.847 orang atau 44,71 persen dari total penduduk. Sementara itu, jumlah laki-laki yang bekerja lebih banyak daripada perempuan yakni 130.854 orang laki-laki yang bekerja atau 29,57 persen dari total penduduk. Jumlah perempuan yang bekerja hanya mencapai 66.993 orang atau 29,57 persen dari total penduduk Kabupaten Pasaman Barat.

Apabila dilihat dari status pekerjaan, pekerjaan yang paling banyak masih didominasi oleh buruh/karyawan/pegawai yakni sebanyak 54.323 orang. Hal ini sejalan dengan jumlah lapangan usaha terbesar di Kabupaten Pasaman Barat yakni pertanian terutama perkebunan kelapa sawit, kehutanan dan perikanan dimana terdapat banyak perusahaan perkebunan yang menampung jumlah tenaga kerja buruh/karyawan dalam jumlah yang cukup banyak. Selain itu, status pekerjaan yang berusaha sendiri menjadi penyumbang kedua status pekerjaan terbanyak yakni sebanyak 52.459 orang dengan lapangan pekerjaannya pedagang harian.

Gambar 5.4 Penduduk Usia 15+ Yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin Dan Status Dalam Pekerjaan Utama di Kab. Pasaman Barat Tahun 2022



Sumber Data : BPS - Hasil Sakernas Agustus 2022

Tabel 5.6 Penduduk 15+ Berdasarkan Kelompok Umur Dan Angkatan Kerja Kab. Pasaman Barat Tahun 2022

No	Kelompok Umur	Angkatan Kerja		Jumlah Angkatan Kerja
		Bekerja	Pengangguran	
1	15 - 19	8.010	1.013	9.023
2	20 - 24	17.591	7.241	24.832
3	25 - 29	26.423	2.386	28.809
4	30 - 34	27.138	1.757	28.895
5	35 - 39	26.373	235	26.608
6	40 - 44	24.193	745	24.938
7	45 - 49	22.943	-	22.943
8	50 - 54	17.735	-	17.735
9	55 - 59	11.216	-	11.216
10	60 +	16.225	-	16.225
Pasaman Barat		197.847	13.377	211.224

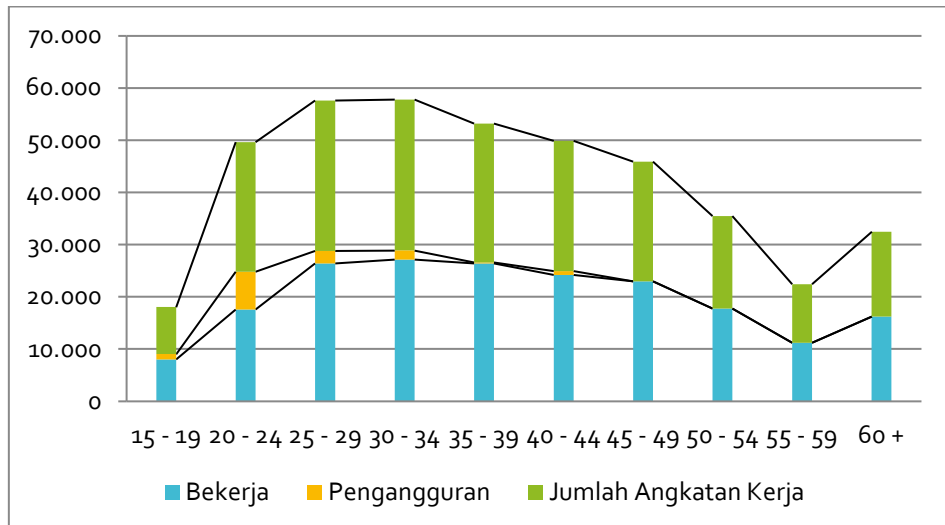
Sumber Data : BPS – Hasil Sakernas Agustus 2022

Dari tabel 5.6 terlihat pada tahun 2022 jumlah angkatan kerja Kabupaten Pasaman Barat sebesar 212.825 jiwa. terdiri dari penduduk bekerja sebanyak 211.224 jiwa (47,74 persen dari total penduduk Pasaman Barat Tahun 2022), dimana jumlah Angkatan Kerjanya mencapai 197.847 (44,71 persen) dan pengangguran sebanyak 13.377 jiwa (3,02 persen).

Jumlah angkatan kerja paling banyak berada pada kelompok umur 25-29 dan 30-35 tahun yakni masing-masing sebanyak 28.809 jiwa (6,51 persen) dan 28.895 jiwa (5,53 persen dari total penduduk Pasaman Barat). Persentase penduduk usia produktif tampak sedemikian besar. Sebagian besar dari dua generasi ini masuk dalam kategori usia produktif yang dapat menjadi peluang mempercepat pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya, itu menunjukkan bahwa Indonesia masih berada pada era bonus demografi.

Sedangkan angkatan kerja paling sedikit ada pada kelompok umur 15-19 tahun (usia sekolah) yakni 9.023 jiwa (2,04 persen dari total penduduk Pasaman Barat). Dari data di atas juga terlihat bahwa terdapat penduduk kelompok umur 60+ yang masih bekerja yakni sebanyak 16.225 jiwa (3,67 persen). Disini terlihat masih banyak lanjut usia yang menghabiskan waktu dan tenaga demi memenuhi ekonomi keluarga. Lanjut usia yang bekerja lebih banyak bekerja dengan mengandalkan tenaga dan jasa. Pekerjaan seperti menjadi tenaga kebersihan, berdagang dan keahlian khusus menjadi jenis pekerjaan pilihan bagi lanjut usia.

Gambar 5.5 Jumlah Angkatan Kerja (Penduduk Usia Kerja) Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kab. Pasaman Barat Tahun 2020



Sumber Data : BPS – Hasil Sakernas Agustus 2022

Dari gambar 5.6 diatas terlihat bahwa trend jumlah angkatan kerja (penduduk usia kerja) di Kabupaten Pasaman Barat seperti piramida. Penduduk Usia Kerja paling banyak ada pada kelompok umur 25-29 dan 30-34 tahun. Jumlah angkatan kerja cenderung menurun ke usia yang semakin tinggi, namun agak sedikit naik pada usia 60 ke atas.

5.5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) atau tingkat kegiatan ekonomi/ EAR adalah rasio antara angkatan kerja dan ukuran keseluruhan kelompok mereka (penduduk nasional rentang usia yang sama). Istilah umumnya tidak termasuk pengusaha atau manajemen dan dapat menyiratkan mereka yang terlibat dalam kerja manual. Ini juga berarti semua orang yang

tersedia untuk bekerja. Akan tetapi, apabila angka TPAK kecil maka dapat diduga bahwa penduduk usia kerja banyak yang tergolong bukan angkatan kerja, baik yang sedang sekolah maupun mengurus rumah tangga dan lainnya.

Dengan demikian angka TPAK dipengaruhi oleh faktor jumlah penduduk yang masih bersekolah dan penduduk yang mengurus rumah tangga (Mantara, 2000).

Adapun dalam mengetahui TPAK dapat di hitung menggunakan rumus berikut ini:

$$TPAK = \frac{\text{Angkatan Kerja}}{\text{Penduduk Usia Kerja}} \times 100$$

Tabel 5.7 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Pasaman Barat Menurut Kecamatan Tahun 2022

Kategori	Jenis kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
Penduduk Usia kerja	167.220	163.430	330.650
Angkatan Kerja	138.986	72.238	211.224
TPAK	83,12	44,20	63,88

Sumber Data : Hasil Sakernas Agustus 2020

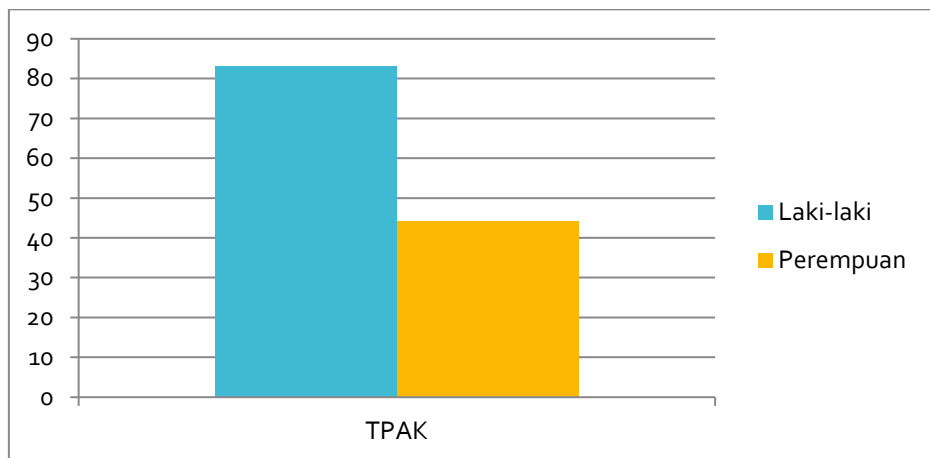
TPAK= Proporsi angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2022, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Pasaman Barat sebesar 63,68 persen artinya dari setiap 100 orang penduduk usia 15 tahun keatas, sebanyak 62-63 orang telah aktif dalam aktivitas ekonomi (bekerja). sedangkan sisanya adalah mereka yang mempunyai kegiatan lain seperti sekolah, mengurus rumah tangga dan kegiatan lainnya selain “kegiatan

pribadi” seperti olahraga, kursus, piknik, kegiatan sosial dan kegiatan keagamaan.

Apabila dilihat dari jenis kelamin, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan lebih sedikit dibanding laki-laki yakni hanya 44,20 persen saja atau setengah dari jumlah TPAK laki-laki. Hal ini menandakan bahwa partisipasi kerja perempuan masih rendah dibanding laki-laki. Padahal setengah dari penduduk Pasaman Barat saat ini adalah perempuan. Temuan ini sedikit banyak berkaitan dengan budaya patriarki yang masih mengakar dan mengidentikkan perempuan dengan pekerjaan di ranah domestic.

Gambar 5.6 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Pasaman Barat Menurut Kecamatan Tahun 2022



Sumber Data : Hasil Sakernas Agustus 2020

TPAK= Proporsi angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) laki-laki hampir dua kali lebih banyak dibanding perempuan. Kesenjangan itu terlihat dari masih adanya gap yang tinggi antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dianggap sangat wajar, mengingat setiap penduduk laki-laki dewasa memang dituntut untuk mencari nafkah bagi dirinya maupun keluarganya. Sedangkan penduduk perempuan memang tidak dituntut untuk bekerja sebagaimana kaum laki-laki. Selain itu, terbatasnya lapangan pekerjaan bagi kaum perempuan kemungkinan menjadi penyebab kecilnya angka TPAK ini.

5.6 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Indikator yang digunakan untuk mengukur angka pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang merupakan persentase pengangguran terhadap angkatan kerja. Dalam bahasan ini yang termasuk penganggur adalah mereka yang tergolong dalam usia kerja (15 tahun ke atas) yang pada saat pencacahan tidak bekerja dan bersedia menerima pekerjaan. tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan. tidak bekerja dan sedang mempersiapkan usaha. tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (discouraged workers). serta tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja (future starts). Untuk mengetahui sampai sejauh mana pengangguran yang terjadi, dapat dilakukan dengan menghitung tingkat pengangguran terbuka.

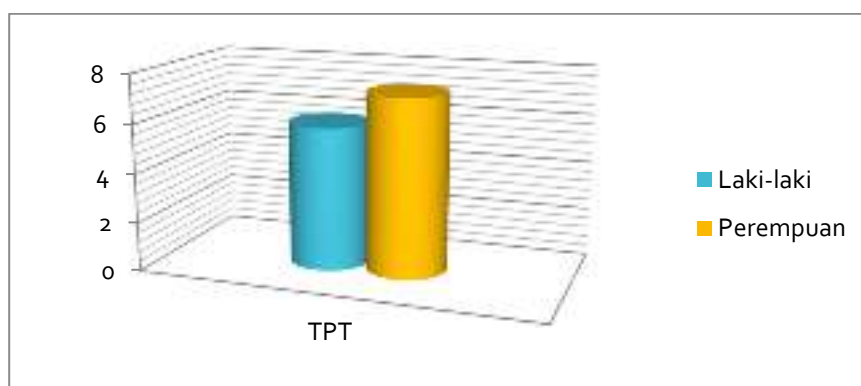
Tabel 5.8 Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Pasaman Barat Tahun 2022

No.	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
	Angkatan Kerja	138.986	72.238	211.224
1	Bekerja	130.854	66.993	197.847
2	Pengangguran	8.132	5.245	13.377
	TPT	5,85	7,26	6,33

Sumber Data : Hasil Sakernas Agustus 2022

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2022, BPS Kabupaten Pasaman Barat mencatat persentase tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Pasaman Barat mencapai 6,33 persen. Tingkat pengangguran terbuka perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki yakni 7,26 persen yang artinya ada sekita 6-7 orang perempuan yang menganggur dari total angkatan kerja perempuan. Sebaliknya tingkat pengangguran terbuka laki-laki lebih rendah yakni sebesar 5,85 persen dari total angkatan kerja laki-laki.

Gambar 5.7 Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Pasaman Barat Tahun 2022



Sumber Data : Hasil Sakernas Agustus 2022

5.7 Distribusi Sektoral Penyerapan Tenaga Kerja

Distribusi sektoral penyerapan tenaga kerja menggambarkan komposisi penduduk yang bekerja menurut kelompok lapangan pekerjaan utama. Data ini digunakan sebagai salah satu indikator untuk melihat kemampuan sektor-sektor ekonomi dalam menyerap tenaga kerja, sekaligus sebagai tolak ukur untuk menilai kemajuan perekonomian suatu daerah.

Tabel 5.9 Komposisi Penduduk Yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin dan Lapangan Usaha Tahun 2022

Kategori		Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
A	Pertanian, Kehutanan & Perikanan	68.149	21.626	89.775
B	Pertambangan & Penggalian	3.586	-	3.586
C	Industri Pengolahan	6.430	3.502	9.932
D, E	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas & Udara Dingin dan Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment & Pemulihan	-	184	184
F	Konstruksi	8.954	-	8.954
G	Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi & Perawatan Mobil & Sepeda Motor	24.086	20.687	44.773
H	Pengangkutan & Pergudangan	3.116	-	3.116
I	Penyediaan Akomodasi & Penyediaan Makan Minum	3.247	6.284	9.531
J	Informasi & Komunikasi	346	352	698
K, L	Aktivitas Keuangan & Asuransi dan Real Estat	422	147	569
M, N	Jasa Profesional & Perusahaan	1.345	1.131	2.476
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	3.632	1.449	5.081
P	Pendidikan	2.172	8.344	10.516
Q	Aktivitas Kesehatan Manusia & Aktivitas Sosial	693	1.034	1.727
R, S, T	Jasa Lainnya	4.676	2.253	6.929
Pasaman Barat		130.854	66.993	197.847

Sumber Data : Sakernas Agustus 2022

Penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya lapangan kerja yang sudah terisi yang tercermin dari banyaknya jumlah penduduk bekerja. Penduduk yang bekerja terserap dan tersebar di berbagai sektor perekonomian. Terserapnya penduduk bekerja disebabkan oleh adanya permintaan akan tenaga kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja adalah tingkat upah, nilai produksi dan investasi.

Perluasan penyerapan tenaga kerja sangat di perlukan untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk usia muda yang masuk ke pasar tenaga kerja. Ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dan penciptaan lapangan kerja akan menyebabkan tingginya angka pengangguran.

Dari data di atas terlihat bahwa sektor pertanian masih menyumbang penyerapan tenaga kerja paling banyak di Kabupaten Pasaman Barat. Tercatat sebanyak 89.775 orang (4538 persen) bekerja di sektor pertanian, dengan rincian pekerja laki-laki sebanyak 68.149 orang (34,45 persen) dan perempuan sebanyak 21.626 (10,93 persen) orang dari total angkatan kerja. Banyaknya pekerja di sektor pertanian salah satunya disebabkan oleh banyaknya perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Pasaman Barat. Data Pasaman Barat Dalam Angka tahun 2022, luas perkebunan sawit yang ada di Pasaman Barat tercatat seluas 126.934 hektar yang tersebar di 11 kecamatan, baik perkebunan milik perusahaan maupun perkebunan pribadi milik masyarakat.

Sektor pertanian merupakan komponen ekonomi nasional yang sangat strategis dan penting, karena menghasilkan sebagian besar dari produk domestik bruto negara, memberikan sebagian besar pendapatan ekspor dan mempekerjakan jutaan orang.

5.8 Pekerja Perempuan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Dan Instansi Vertikal Di Kabupaten Pasaman Barat

Tabel 5.10 Pekerja Perempuan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Dan Instansi Vertikal di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022

No.	Unit Organisasi	PNS			Non PNS		
		L	P	Total	PTT	THL	Total
A.	Perangkat Daerah	1.130	2.807	3.937	120	1.860	5.917
1	Sekretariat Daerah	60	19	79	37	198	314
2	Sekretariat DPRD	18	10	28	4	59	91
3	Sekretariat KPUD	1	0	1	-	-	1
4	Badan Aset dan Pendapatan Daerah	17	19	36	5	49	90
5	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	7	15	22	4	39	65
6	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	14	2	16	4	46	66
7	Dinas Kesehatan	99	619	718	5	387	1110
8	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	11	13	24	4	46	74
9	Dinas Lingkungan Hidup	16	16	32	1	124	157
10	Dinas Pariwisata	10	8	18	0	39	57
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	60	7	67	9	74	150
12	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	697	1.961	2.658	13	345	3.016
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak	7	37	44	5	52	101
14	Dinas Perhubungan	23	4	27	12	113	152
15	Dinas Perikanan	15	9	24	3	35	62
16	Dinas Perkebunan	18	12	30	8	56	94
17	Dinas Sosial	8	8	16	3	45	64
18	Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan	35	35	70	2	135	207
19	Dinas Tenaga Kerja	14	13	27	1	18	46

Lanjutan Tabel 5.10

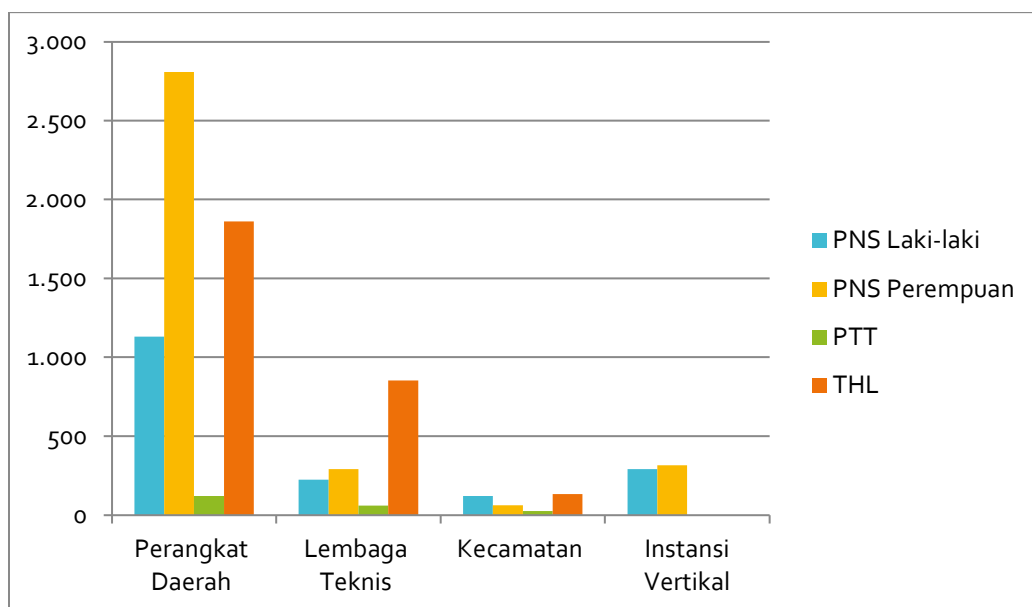
No.	Unit Organisasi	PNS			Non PNS		
		L	P	Total	PTT	THL	Total
B.	Lembaga Teknis	225	292	517	60	853	1.430
1	Inspektorat	23	21	44	4	24	72
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	13	17	30	5	25	60
3	Dinas Kepegawaian dan Pengembangan SDM	18	17	35	12	26	73
4	Satuan Pamong Praja dan Kebakaran	26	4	30	6	268	304
5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	13	14	27	4	21	52
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari	11	11	22	5	25	52
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	12	-	12	0	39	51
8	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	18	5	23	4	62	89
9	Rumah Sakit Umum Daerah	42	128	170	7	194	371
10	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	8	14	22	3	34	59
11	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9	6	15	4	31	50
12	Dinas Ketahanan Pangan	7	9	16	3	38	57
13	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	10	16	26	1	26	53
14	Dinas Penanggulangan Bencana Daerah	12	6	18	2	40	60
15	RSUD Pratama	3	24	27	-	-	27

Lanjutan Tabel 5.10

No	Unit Organisasi	PNS			Non PNS		
		L	P	Total	PTT	THL	Total
C.	Kecamatan	120	63	183	25	134	342
1	Kecamatan Ranah Batahan	11	6	17	1	14	32
2	Kecamatan Koto Balingka	7	9	16	0	10	26
3	Kecamatan Sungai Aur	8	4	12	2	11	25
4	Kecamatan Lembah Melintang	10	6	16	4	7	27
5	Kecamatan Gunung Tuleh	13	2	15	4	8	27
6	Kecamatan Talamau	13	5	18	1	13	32
7	Kecamatan Pasaman	14	10	24	2	15	41
8	Kecamatan Luhak nan Duo	12	5	17	3	12	32
9	Kecamatan Sasak Ranah Pasisie	6	5	11	2	16	29
10	Kecamatan Kinali	15	5	20	5	14	39
11	Kecamatan Ranah Batahan	11	6	17	1	14	32
D.	Instansi Vertikal	312	324	636	-	-	-
1	Kejaksaan Negeri Pasaman Barat	21	10	31	-	-	-
2	Pengadilan Negeri Pasaman Barat	14	11	25	-	-	-
3	Pengadilan Agama Pasaman Barat	22	3	25	-	-	-
4	Lapas Kelas Iii Talu	29	3	32	-	-	-
5	Lapas Terbuka	38	2	40	-	-	-
6	Bnnk Pasaman Barat	7	4	11	-	-	-
7	Kementerian Agama Pasaman Barat	152	275	427	-	-	-
8	Bps Pasaman Barat	11	11	22	-	-	-
9	Badan Pertanahan Nasional Pasaman Barat	18	5	23	-	-	-
Total		1.787	3.486	5.273	205	2.847	7.689

Berdasarkan table 5.10 diatas terlihat bahwa analisa PNS dan NON PNS pada OPD juga tidak jauh berbeda, karena secara umum populasi PNS lebih banyak perempuan, baik dari kategori jabatan, kepangkatan, dan pendidikan, maka berdasarkan penempatan pada OPD juga akan terlihat jumlah PNS perempuan lebih banyak ketimbang laki-laki. Hal ini dimungkinkan karena dari jumlah jabatan fungsional tertentu seperti tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, populasinya lebih banyak didominasi oleh perempuan. Kualifikasi pendidikan seperti bidan dan perawat juga lebih banyak dari perempuan. Sehingga dalam hal jumlah penempatan di OPD, jumlah perempuan akan lebih banyak daripada laki-laki.

Gambar 5.8 Pekerja Perempuan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Dan Instansi Vertikal di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022



Sumber Data : Sakernas Agustus 2022

5.9. Pekerja Formal dan Informal

Dalam melakukan pekerjaan bisa dikelompokkan menjadi pekerjaan sektor formal dan informal. Pengelompokan definisi formal dan informal menurut Hendri Saparini dan M. Chatib Basri dari Universitas Indonesia menyebutkan bahwa ciri-ciri tenaga kerja sektor informal adalah sebagai berikut:

- a. Tenaga kerja bekerja pada segala jenis pekerjaan tanpa ada perlindungan negara dan atas usaha tersebut tidak dikenakan pajak.
- b. Pekerja tidak menghasilkan pendapatan yang tetap,
- c. Tempat bekerja tidak terdapat keamanan kerja (job security),
- d. Tempat bekerja tidak ada status permanen atas pekerjaan, dan tidak berbadan hukum.

Selain itu, ciri-ciri kegiatan informal adalah mudah masuk, artinya setiap orang dapat kapan saja masuk ke jenis usaha informal ini, bersandar pada sumber daya lokal, biasanya usaha milik keluarga, operasi skala kecil, padat karya, keterampilan diperoleh dari luar sistem formal sekolah dan tidak diatur dan pasar yang kompetitif. Contoh dari jenis kegiatan sektor informal antara lain pedagang kaki lima (PKL), becak, penata parkir, pengamen dan anak jalanan, pedagang pasar, buruh tani dan lainnya.

Sedangkan ciri-ciri pekerja sektor formal atau yang biasa disebut pekerja manajerial adalah terdiri dari tenaga profesional, teknisi dan sejenisnya, tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan, tenaga tata usaha dan sejenisnya, tenaga usaha penjualan, tenaga usaha jasa. Untuk bekerja pada sektor formal biasanya membutuhkan tingkat pendidikan yang memadai dan dikenai pajak (Hendri Saparini dan M. Chatib Basri).

Status pekerjaan juga bisa membedakan antara pekerjaan di sektor formal dan informal. Tiga macam status pekerjaan yaitu berusaha sendiri tanpa dibantu orang lain, berusaha dengan dibantu anggota rumah tangga/buruh tidak tetap, pekerja keluarga, sering dipakai sebagai proksi pekerja sektor informal. Sedangkan dua status pekerjaan yang lain, yaitu buruh/karyawan, berusaha dengan buruh tetap, dianggap sebagai proksi pekerja sektor formal.

Tabel 5.11 Penduduk 15 tahun keatas yang bekerja Berdasarkan Status Formal Informal, Lapangan Usaha, dan Jenis Kelamin Tahun 2022

No.	Status	Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
	Formal	44.215	17.714	61.929
1	Pertanian	16.665	1.447	18.112
2	Industri/Manufaktur	6.306	697	7.003
3	Jasa	21.244	15.570	36.814
	Informal	86.639	49.279	135.918
1	Pertanian	51.484	20.179	71.663
2	Industri/Manufaktur	12.664	2.989	15.653
3	Jasa	22.491	26.111	48.602
	Total	130.854	66.993	197.847

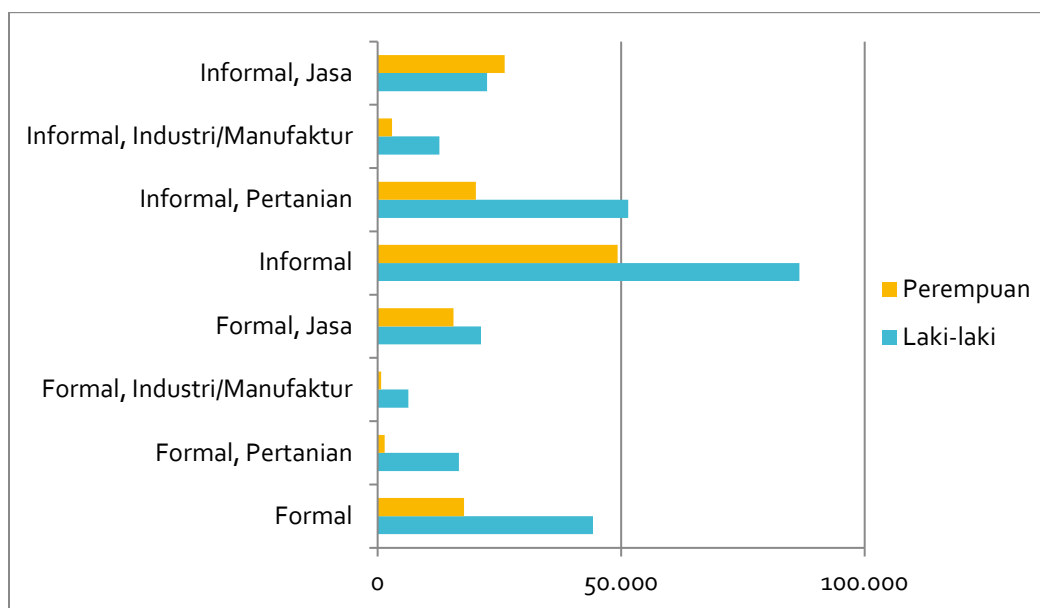
Sumber Data : Sakernas Agustus 2022

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa penduduk yang bekerja di sektor informal lebih banyak dibanding penduduk bekerja di sektor formal. Jumlah pekerja formal menyerap 31,30 persen tenaga kerja, sedangkan sektor informal mampu menyerap 68,70 persen tenaga kerja. Sektor pertanian masih menjadi penyumbang terbesar penyerapan tenaga kerja baik tenaga formal maupun informal. Hal ini menggambarkan bahwa banyaknya perusahaan perkebunan di Pasaman Barat mampu menyerap tenaga kerja yang cukup

banyak. Akan tetapi, apabila dilihat dari jenis kelamin, pekerja laki-laki (baik formal maupun informal) lebih banyak daripada pekerja perempuan yakni mencapai 66,14 persen.

Tingginya peran sektor informal dalam perekonomian Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor utama: pertama, pertumbuhan angkatan tenaga kerja baru yang lebih tinggi dari ketersediaan lapangan kerja formal; kedua, arus migrasi desakota yang cukup besar tidak semuanya terserap di sektor industri modern di kota, mengakibatkan sektor informal lebih dipilih oleh para migran yang tidak dapat masuk ke sektor industri modern; dan ketiga, sektor informal mudah dimasuki oleh banyak orang karena tidak memerlukan tingkat keahlian atau spesifikasi pendidikan yang tinggi dan modal yang diperlukan relatif kecil.

Gambar 5.9 Penduduk 15 tahun keatas yang bekerja Berdasarkan Status Formal Informal, Lapangan Usaha, dan Jenis Kelamin Tahun 2022



Sumber Data : Sakernas Agustus 2022

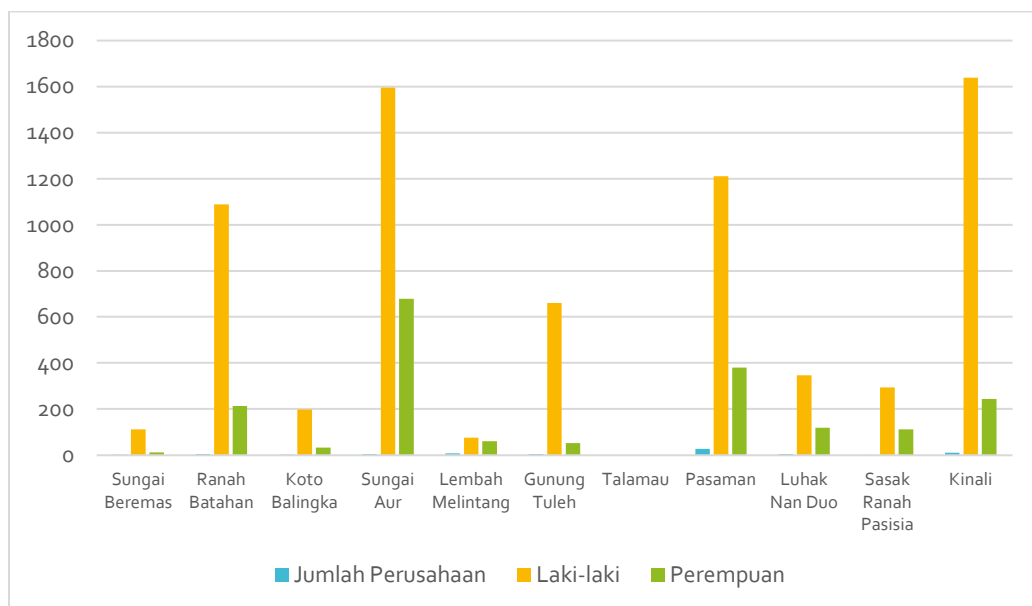
Tabel 5.12 Jumlah Pekerja Pada Lembaga Swasta Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Pasaman Barat 2022

No.	Kecamatan	Jumlah Perusahaan	Jenis Kelamin		Total
			Laki-laki	Perempuan	
1	Sungai Beremas	2	111	12	123
2	Ranah Batahan	4	1.089	213	1.302
3	Koto Balingka	2	198	32	230
4	Sungai Aur	4	1.596	678	2.274
5	Lembah Melintang	7	75	60	135
6	Gunung Tuleh	4	661	52	713
7	Talamau	0	0	0	0
8	Pasaman	27	1.211	380	1.591
9	Luhak Nan Duo	4	347	119	466
10	Sasak Ranah Pasisia	1	293	111	404
11	Kinali	10	1.639	243	1.882
	Pasaman Barat	65	7.220	1.900	9.120

Sumber Data : Sakernas Agustus 2022

Jumlah perusahaan yang terdata di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2022 adalah sebanyak 65 perusahaan yang tersebar disejumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Pasaman Barat. Jumlah pekerja pada perusahaan atau lembaga swasta yang ada di Kabupaten Pasaman Barat adalah sebanyak 9.120 orang terdiri dari 7.220 orang tenaga kerja laki-laki (79,16%) dan 1.900 orang (tenaga kerja perempuan (20,83%). Lembaga atau perusahaan yang beralamat di Kecamatan sungai Aur menyerap paling banyak tenaga kerja yakni sebanyak 1596 orang tenaga kerja laki-laki (17,5) dan 678 tenaga kerja perempuan (7,37), sedangkan di kecamatan Talamau tidak terdapat satupun lembaga atau perusahaan sehingga tidak satupun tenaga kerja yang terserap.

Gambar 5.10 Jumlah Pekerja Pada Lembaga Swasta Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Pasaman Barat 2022



Sumber Data : Sakernas Agustus 2022

A top-down view of a wooden desk. In the top left, a portion of a silver laptop is visible, showing the keyboard and trackpad. In the top right, a white ceramic mug is filled with dark coffee. In the bottom right, a square chalkboard with a light wood frame is positioned. The chalkboard has the word 'POLITICS' written in white capital letters. At the bottom of the chalkboard, several white letter tiles are scattered, some of which are arranged to spell out 'POLITICS' in reverse. The overall scene is well-lit and has a clean, professional aesthetic.

Bab VI

BIDANG POLITIK DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

POLITICS

POLITICS

BAB VI

BIDANG POLITIK DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

6.1 Keterwakilan di Lembaga Legislatif

Partisipasi perempuan Indonesia dalam Parlemen masih sangat rendah. Menurut data dari World Bank (2019), negara Indonesia menduduki peringkat ke-7 se-Asia Tenggara untuk keterwakilan perempuan di parlemen. Rendahnya angka keterwakilan perempuan di parlemen sedikit banyak berpengaruh terhadap isu kebijakan terkait kesetaraan gender dan belum mampu merespon masalah utama yang dihadapi oleh perempuan. Dalam pelaksanaan Grand Design Peningkatan Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif terdapat dua metode yaitu berbasis pendidikan politik dengan melibatkan perempuan berperan aktif di kepengurusan partai dan pemilu sebagai calon anggota legislatif. Metode berbasis sosialisasi yaitu Kementerian dan Lembaga melakukan sosialisasi mengenai pentingnya keterwakilan perempuan dengan berbagai saluran secara konvensional tatap muka maupun digital

a. Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat Menurut Partai

Partai politik merupakan salah satu wadah dimana perempuan bisa berkiprah dalam bidang politik atau dengan kata lain untuk meningkatkan pemberdayaan politik perempuan, partai politik di Indonesia juga merupakan jenjang untuk seseorang menjadi anggota parlemen. Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang seperti UU Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik yang menyatakan bahwa partai politik harus memenuhi kuota 30 persen bagi perempuan dalam partai politik terutama di Lembaga Perwakilan Rakyat. Dengan dibentuknya UU tersebut seharusnya perempuan Indonesia khususnya

di Kabupaten Pasaman Barat bisa memanfaatkan peluang untuk lebih berkiprah lagi dalam bidang politik.

Pada hasil pemilu 2014 yang lalu, keterlibatan perempuan di Kabupaten Pasaman Barat dalam bursa pemilihan Anggota DPRD Pasaman Barat masih sangat rendah dimana hanya satu orang saja yang berhasil duduk di kursi DPRD Kabupaten Pasaman Barat.

Tabel 6.1 Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat Menurut Partai dan Jenis Kelamin Tahun 2020 - 2024

No	Partai	Anggota DPR-RI		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1	GERINDRA	7	0	7
2	DEMOKRAT	5	1	6
3	GOLKAR	5	0	5
4	PDI-P	3	1	4
5	PAN	4	0	4
6	PPP	2	0	2
7	PKS	3	0	3
8	HANURA	1	1	2
9	NASDEM	3	0	3
10	PKB	2	0	2
11	PBB	1	0	1
12	PERINDO	1	0	1
	Jumlah	37	3	40

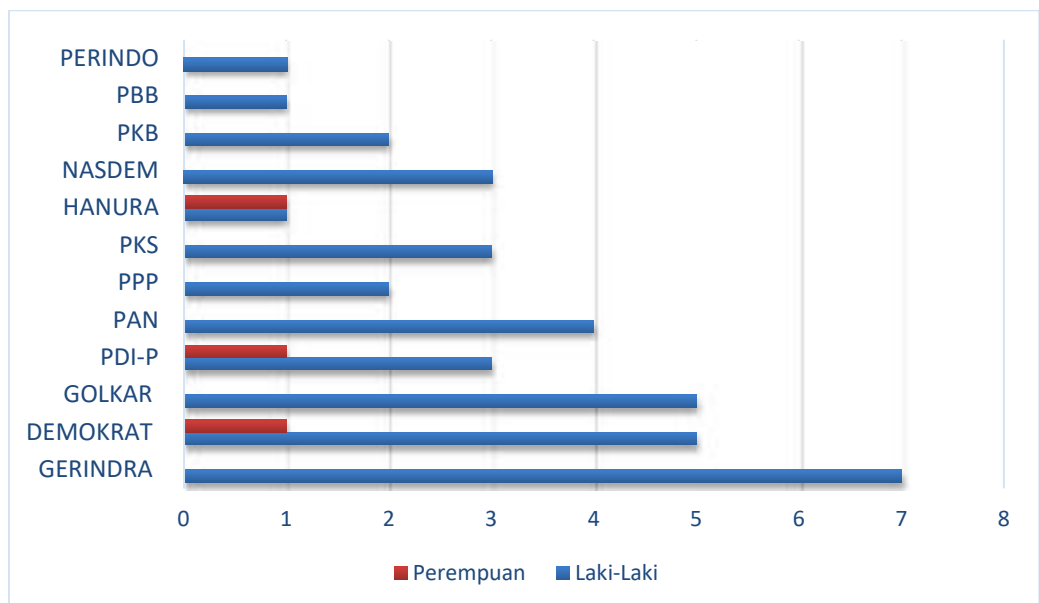
Sumber Data : Sekretariat DPRD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022

Tabel 6.1 di atas menunjukkan bahwa dari 40 orang anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat, hanya 3 orang keterwakilan perempuan di dalamnya yakni berasal dari Partai Demokrat, PDI-P dan Hanura yang masing-masing berjumlah 1 orang. Kurangnya kepercayaan diri perempuan berkompetisi

dengan pria dalam dunia politik menjadi salah satu faktor penyebab minimnya keterlibatan perempuan.

Disamping itu, budaya masyarakat setempat masih mempercayakan kepada laki-laki untuk memimpin. Hal itu dapat terlihat pada hasil pemilu periode 2020 -2024 lalu.

Gambar 6.1 Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat Menurut Partai dan Jenis Kelamin Tahun 2020 - 2024



Sumber Data : Sekretariat DPRD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022

b. Anggota DPRD Kabupaten Menurut Komisi

Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Setiap anggota DPRD kecuali pimpinan DPRD wajib menjadi anggota salah satu komisi. Komisi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat sebagai berikut ;

- a. Komisi I : Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan
- b. Komisi II : Bidang Perekonomian dan Keuangan
- c. Komisi III : Bidang Pembangunan
- d. Komisi IV : Bidang Kesejahteraan Rakyat

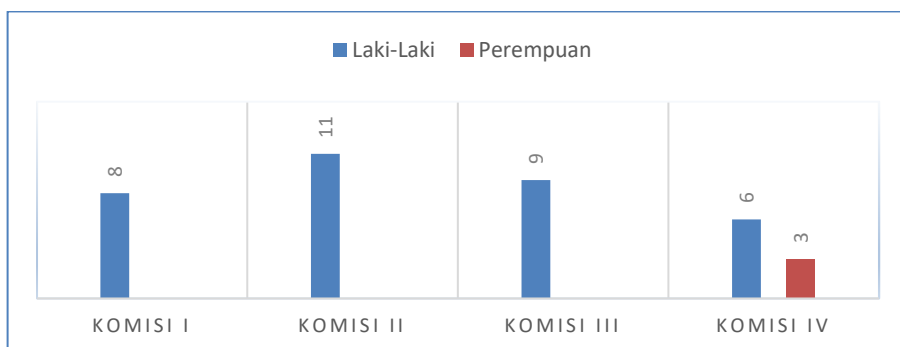
Tabel 6.2 Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat Menurut Komisi dan Jenis Kelamin Tahun 2022

No	Komisi	Anggota DPRD Kab. Pasaman Barat		
		Laki-Laki	Perempuan	L+P
1	KOMISI I	8	-	8
2	KOMISI II	11	-	11
3	KOMISI III	9	-	9
4	KOMISI IV	6	3	9
	Jumlah	34	3	37

Sumber Data : Sekretariat DPRD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022

Dari tabel di atas terlihat bahwa keterwakilan perempuan tidak mengisi keseluruhan komisi yang ada di DPRD Kab. Pasaman Barat. Pada Komisi I, Komisi II dan III diisi seluruhnya oleh laki-laki dan hanya pada Komisi IV saja (Bidang Kesejahteraan Rakyat) baru ada anggota DPRD perempuan. Hal ini tentunya masih menjadi pekerjaan bersama bagaimana perempuan bisa menduduki jabatan-jabatan strategis di kursi DPRD sehingga kepentingan perempuan bisa disuarakan.

Gambar 6.2 Anggota DPRD Kabupaten Pasaman barat Menurut Komisi dan Jenis Kelamin Tahun 2022



Sumber Data : Sekretariat DPRD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022

c. Pengurus Organisasi Sosial dan Politik

Representasi perempuan di bidang politik boleh dikatakan masih jauh dari harapan. Meski negara kini relatif lebih akomodatif terhadap wacana dan tuntutan keterwakilan politik perempuan (seperti tercermin dalam UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum), namun harus disadari bahwa ruang ekspresi politik perempuan yang diberikan negara (dan para elite partai) masih jauh dari spirit keadilan dan kesetaraan. Hal ini bisa dilihat pada tabel tentang pengurus partai politik dari kalangan perempuan di Pasaman Barat berikut ini.

Tabel 6.3 Pengurus Partai Politik Menurut Jenis Kelamin di Pasaman Barat Tahun 2022

No	Partai	DPP			DPW			DPC		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	PKB	-	-	-	-	-	-	15	7	22
2	GERINDRA	-	-	-	-	-	-	24	22	46
3	PDI-P	-	-	-	-	-	-	12	7	19
4	GOLKAR	-	-	-	-	-	-			
5	NASDEM	-	-	-	255	111	36	107	58	165
6	BERKARYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	PKS	-	-	-	200	22	422	-	-	-
8	PERINDO	-	-	-	-	-	-	3	2	5
9	PPP	-	-	-	-	-	-	34	9	43
10	PSI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	PAN	-	-	-	-	-	-	31	24	55
12	HANURA	-	-	-	-	-	-	9	5	14
13	DEMOKRAT	-	-	-	-	-	-	37	18	55
14	PBB	-	-	-	-	-	-	6	4	10
	Pasaman Barat	-	-	-	45	33	78	278	156	434

Sumber Data : Badan Kesbangpol Kab. Pasaman Barat Tahun 2022

Dari tabel 6.3 di atas terlihat bahwa keterwakilan perempuan menjadi pengurus partai politik masih rendah. Pada tahun 2020, pengurus tingkat DPC paratai politik laki-laki dan perempuan berjumlah 513 orang, terdiri dari 341 laki-laki dan 172 orang perempuan. Jika dilihat dari perbandingan jumlah tersebut persentase keterlibatan laki-laki sebesar 66,47% dan Perempuan 33,53% dari 14 partai politik.

d. Pengurus Harian Parpol

Keberadaan partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi menjamin kontribusi aktif masyarakat dalam pembangunan nasional. Selain sebagai media sosialisasi dan rekrutmen politik, partai politik penting sebagai sarana artikulasi kepentingan di masyarakat. Maka dari itu, kehadiran kantor perwakilan partai politik hingga ke level ranting perlu diregulasi secara ketat oleh pemerintah pusat untuk memaksimalkan partisipasi publik. Pengurus harian partai politik di Pasaman Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini.

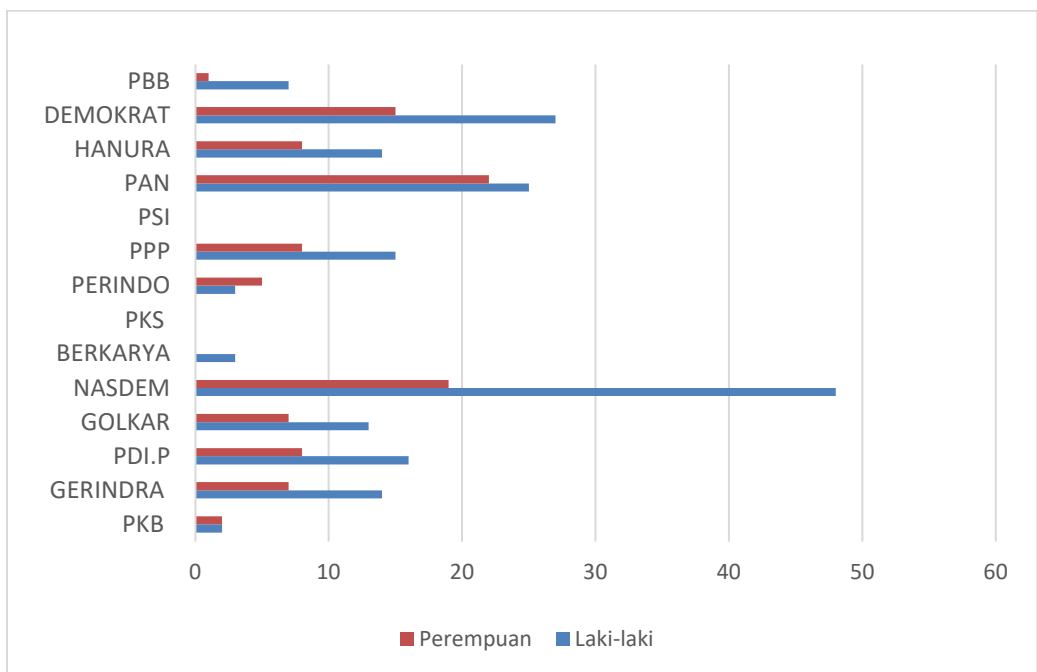
Tabel 6.4 Pengurus Harian Parpol Menurut Jenis Kelamin di Indonesia Tahun 2022

No	Partai	Jenis Kelamin		
		(L)	(P)	L+P
1	PKB	2	2	4
2	GERINDRA	14	7	21
3	PDI.P	16	8	24
4	GOLKAR	13	7	20
5	NASDEM	48	19	67
6	BERKARYA	3		3
7	PKS	-	-	-
8	PERINDO	3	5	8
9	PPP	15	8	23
10	PSI	-	-	-
11	PAN	25	22	47
12	HANURA	14	8	22
13	DEMOKRAT	27	15	42
14	PBB	7	1	8
	Pasaman Barat	205	122	327

Sumber Data : Badan Kesbangpol Kab. Pasaman Barat Tahun 2022

Dari tabel 6.3 dapat terlihat bahwa keterlibatan perempuan dalam kepengurusan harian partai politik masih belum berimbang dimana dari total 327 orang pengurus, jumlah perempuan hanya 122 orang (37,30%) dan laki-laki 205 orang (62,69 persen) dari 14 partai politik pada tahun 2022.

Gambar 6.3 Pengurus Harian Parpol Menurut Jenis Kelamin di Indonesia Tahun 2022



Sumber Data : Badan Kesbangpol Kab. Pasaman Barat Tahun 2022

6.2 Peranan dan Komposisi di Lembaga Yudikatif

Teori Trias Politika, meletakkan fungsi-fungsi lembaga Negara sebagai sistem *check and balances*. Peran lembaga yudikatif dalam *check and balances* itu sebagai lembaga yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Peradilan Indonesia mempunyai beberapa lingkungan dan tingkatan.

Lingkungan peradilan terdiri dari empat peradilan, yaitu: Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara (TUN), dan Peradilan Militer yang semuanya berujung pada satu institusi, Mahkamah Agung (MA). Peraturan mengenai Peradilan di Indonesia belum mengatur keterwakilan perempuan dalam jabatan-jabatan dalam lingkungan itu. Sehingga menjadi pertanyaan bagaimanakah posisi perempuan dalam jabatan tersebut. Berikut adalah sebaran jabatan lembaga hukumberdasarkan jenis kelamin di lingkungan peradilan :

a. Jaksa menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI menjelaskan bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang memegang kekuasaan di bidang penuntutan dan kewenangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kekuasaan Kejaksaan terdiri dari tiga bagian, seperti dijelaskan dalam Pasal 3 dan 4, yaitu Kejaksaan Agung yang berkedudukan di ibu kota negara Indonesia dan memiliki daerah kekuasaan hukum di seluruh wilayah negara, Kejaksaan Tinggi yang berkedudukan di ibu kota provinsi dan memiliki daerah kekuasaan hukum di wilayah provinsi tersebut, dan Kejaksaan Negeri yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan memiliki daerah kekuasaan hukum di wilayah kabupaten/kota tersebut.

Definisi jaksa sendiri dijelaskan dalam Pasal 1, yakni sebagai pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta memiliki wewenang lain yang berdasarkan undang-undang.

Sedangkan menurut UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004, jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Representasi perempuan menurut jabatan pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6.5 Jaksa Menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022

No	Jenis Jabatan Jaksa	Jumlah Jaksa		
		Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Fungsional	1	2	3
2	Struktural	-	-	-
	Eselon I	-	-	-
	Eselon II/a	-	-	-
	Eselon II/b	-	-	-
	Eselon III/a	-	-	-
	Eselon III/b	1	-	1
	Eselon IV	6	-	6
	Eselon V	3	-	3
	Jumlah	11	2	13

Sumber Data : Kejaksaan Negeri Pasaman Barat

Data tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah jaksa perempuan relatif sedikit dibandingkan dengan jaksa laki-laki. Dari 13 orang jumlah Jaksa, hanya 2 orang (15,38 %) perempuan yang menduduki jabatan tersebut dan sisanya dijabat oleh laki-laki sebanyak 12 orang (84,62%).

b. Hakim Menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin

Hakim adalah pejabat umum yang diberikan wewenang untuk dapat mengadili, memutuskan perkara-perkara yang tidak bertanggung dan memimpin perkara hukum yang diajukan ke Pengadilan atau Mahkamah.

Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Hakim Agung adalah hakim pada Mahkamah Agung. Tugas dan fungsi Hakim Agung adalah memiliki Ketua Mahkamah Agung. Hakim Konstitusi adalah hakim pada Mahkamah Konstitusi. Hakim *ad hoc* adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang.

Partisipasi perempuan dalam lembaga-lembaga hukum yaitu hakim dan jaksa di Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2022 tampak pada tabel berikut ini.

Tabel 6.6 Hakim Menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2022

No	Jenis Jabatan Hakim	Jumlah Hakim		
		Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Ketua Pengadilan Tinggi	-	-	-
2	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi	-	-	-
3	Hakim Pengadilan Tinggi	-	-	-
4	Ketua Pengadilan Negeri	1	-	1
5	Wakil Ketua Pengadilan Negeri	-	-	-
6	Hakim Pengadilan Negeri	5	2	7
	Jumlah	6	2	8

Sumber Data : Pengadilan Negeri Pasaman Barat

Pada tabel 6.6 diatas terlihat bahwa berdasarkan data Pengadilan Negeri Pasaman Barat terlihat bahwa jumlah hakim di Pengadilan Negeri Pasaman Barat sebanyak 8 orang dengan komposisi 2 orang perempuan (25 %) dan 6 orang laki-laki (75 persen). Perempuan yang menduduki posisi strategis di lembaga yudikatif (Pengadilan Negeri) sebanyak 2 orang atau memperlihatkan distribusi keterwakilan perempuan sebanyak 25 persen, sedangkan Hakim laki-laki berjumlah 6 orang (75 persen). Sedangkan di Pengadilan Negeri Kabupaten Pasaman Barat tidak ada perempuan yang menduduki jabatan Ketua maupun Wakil Ketua Pengadilan Negeri.

c. Polisi Menurut Jenis Kepangkatan dan Jenis Kelamin

Kepolisian (serapan dari bahasa Belanda: politie) adalah badan petugas yang mewakili otoritas sipil pemerintah. Polisi bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan keamanan pemerintahan dan masyarakat, menegakkan hukum, dan mencegah punyuh, menyeleksi, serta melakukan penyelidikan aktivitas kriminal hukum pidana dan perdata. Fungsi ini dikenal

sebagai Kepolisian, polisi juga dipercayakan dengan berbagai kegiatan perizinan, pengawalan dan Pengaturan.

Peran polisi di masyarakat adalah sebagai penjaga keamanan ketertiban masyarakat dengan menindak para pelanggar hukum (perjudian, pencurian, narkoba, asusila,separatis, terorisme, pelanggaran lalu lintas, dll). Kadang kala pranata ini bersifat militaristis (Polisi Militer, *Carabinieri*) dan *paramilitaristis*.

Tabel 6.7 Jumlah Polisi Menurut Jenis Kepangkatan dan Jenis Kelamin Tahun 2022

No	Jenis Kepangkatan	Jumlah Polisi		
		Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Perwira Tinggi (Pati) :	-	-	-
A	Jenderal Polisi	-	-	-
B	Komisaris Jenderal Polisi	-	-	-
C	Inspektur Jenderal Polisi	-	-	-
D	Brigadir Jenderal Polisi	-	-	-
2	Perwira Menengah (Pamen)	4	-	4
A	Komisaris Besar Polisi	-	-	-
B	Ajun Komisaris Besar Polisi	1	-	1
C	Komisaris Polisi	3	-	3
3	Perwira Pertama (Pama)	59	4	63
A	Ajun Komisaris Polisi	18	1	19
B	Inspektur Satu Polisi	15	2	17
C	Inspektur Dua Polisi	26	1	27
4	Bintara	347	19	366
	Jumlah	410	23	433

Sumber Data : Polres Pasaman Barat

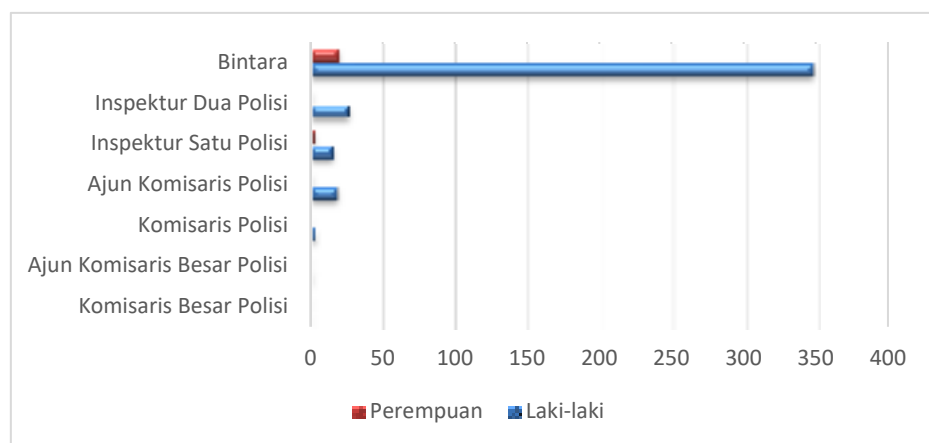
Tabel 6.6 menunjukkan bahwa jumlah keseluruhan polisi di Kabupaten Pasaman Barat di tahun 2022 sebanyak 433 orang, dan jumlah polwan hanya 23 orang atau hanya 5,31 persen dari total jumlah polisi di Pasaman Barat dan

paling banyak berpangkat Bintara. Itu berarti seorang polwan di Pasaman Barat melayani 9.000 perempuan yang jumlahnya sekitar 49,48 persen dari keseluruhan jumlah penduduk Pasaman Barat. Hal ini dikarenakan penerimaan/ formasi polwannya lebih sedikit dibanding polisi laki-laki.

Sejarah kelahiran Polisi Wanita (Polwan) di Indonesia tak jauh berbeda dengan proses kelahiran Polisi Wanita di negara lain, yang bertugas dalam penanganan dan penyidikan terhadap kasus kejahatan yang melibatkan kaum wanita baik korban maupun pelaku kejahatan. Polwan di Indonesia lahir pada 1 September 1948, berawal dari kota Bukittinggi, Sumatera Barat, tatkala Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) menghadapi Agresi Militer Belanda II, dimana terjadinya pengungsian besar-besaran.

Tugas Polwan di Indonesia terus berkembang tidak hanya menyangkut masalah kejahatan wanita, anak-anak dan remaja, narkoba dan masalah administrasi bahkan berkembang jauh hampir menyamai berbagai tugas polisi pria.

Gambar 6.4 Jumlah Polisi Menurut Jenis Kepangkatan dan Jenis Kelamin Tahun 2022



Sumber Data : Polres Pasaman Barat

6.3 Peran dan Posisi di Lembaga Eksekutif

Lembaga eksekutif adalah lembaga yang diberi kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Saat ini, kedudukan lembaga eksekutif dipegang oleh kepala pemerintahan, yakni presiden dan wakilnya serta menteri-menteri. Merujuk pengertian tersebut, presiden merupakan lembaga pemerintahan yang bersifat atau memiliki kekuasaan eksekutif. Dalam arti luas, lembaga eksekutif mencakup para pegawai negeri sipil dan militer. Oleh sebab itu, secara sederhana, lembaga eksekutif dapat disebut sebagai pemerintah.

Kurangnya keterwakilan perempuan dalam posisi-posisi pengambilan keputusan di sektor publik dapat berujung pada pembangunan keistimewaan terhadap perspektif dan kepentingan kaum laki-laki, serta investasi sumber-sumber daya nasional dengan pertimbangan keuntungan bagi kaum laki-laki.

Berdasarkan atas hal tersebut maka dirasakan pentingnya peran perempuan dalam pembangunan dengan meningkatkan kuantitas perempuan dalam lembaga pemerintahan (Eksekutif).

a. PNS Pusat Menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin

Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Jumlah PNS Pusat di Kabupaten Pasaman Barat menurut jenis jabatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6.8 Jumlah PNS Pusat Menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2022

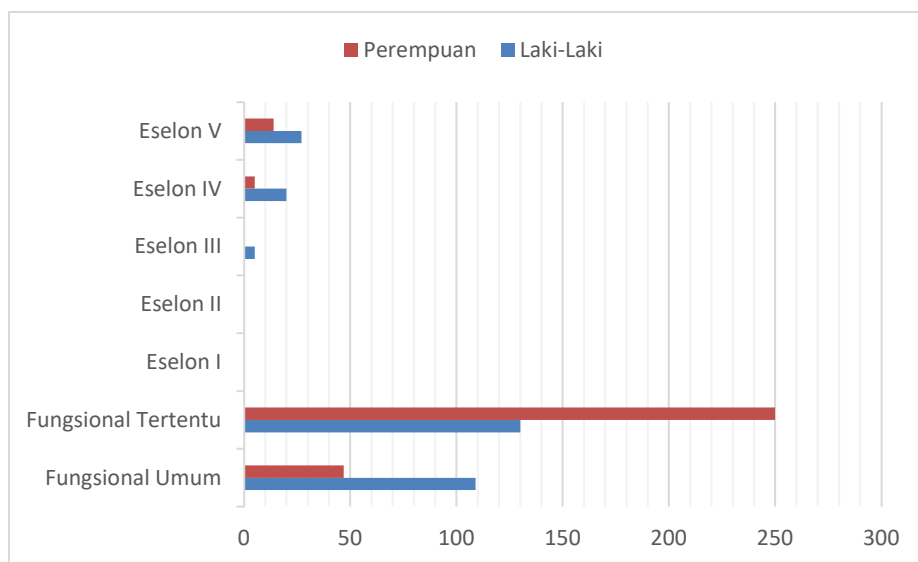
No	Jenis Jabatan PNS	Jumlah PNS		
		Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Fungsional Umum	109	47	156
2	Fungsional Tertentu	130	250	380
3	Eselon I	-	-	-
4	Eselon II	-	-	-
5	Eselon III	5	0	5
6	Eselon IV	20	5	25
7	Eselon V	27	14	41
	Jumlah	291	316	607

Sumber Data : Instansi Vertikal se- Kab. Pasaman Barat

Dari tabel 6.8 di atas dapat dilihat bahwa jumlah PNS Pusat di Kabupaten Pasaman Barat yang perempuan lebih banyak bila dibandingkan dengan laki-laki. Dari 607 orang jumlah PNS Pusat, sebanyak 291 orang merupakan perempuan atau sebesar 52,14 persen dibandingkan jumlah laki-laki. Jumlah yang terbanyak terletak pada Jabatan Fungsional Tertentu. Akan tetapi, bila dilihat pada posisi Eselon III, IV dan V perbedaan tersebut cukup signifikan dimana hanya sekitar 36,36 persen keterwakilan perempuan pada posisi tersebut.

Jumlah PNS Pusat perempuan paling banyak menduduki jabatan Fungsional Tertentu yaitu diisi oleh guru-guru dari Kementerian Agama di Madrasah baik Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah maupun Madrasah Aliyah.

Gambar 6.5 PNS Pusat Menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2022



Sumber Data : Instansi Vertikal se- Kab. Pasaman Barat

Untuk jabatan eselon pada Instansi Vertikal tingkat Kabupaten/Kota paling tinggi diduduki oleh Eselon III dan biasanya jabatan Kepala Kantor sehingga tidak terdapat Eselon I dan II pada Instansi Vertikal kabupaten/Kota.

b. PNS Pusat Menurut Golongan Ruang dan Jenis Kelamin

Pangkat dan golongan/ruang ialah tingkat atau jenjang kedudukan seorang PNS dalam rangkaian sistem kepegawaian yang digunakan sebagai dasar penggajian. Sedangkan jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS.

Jumlah PNS pusat di Kabupaten Pasaman Barat menurut Golongan Ruang dapat dilihat pada tabel berikut.

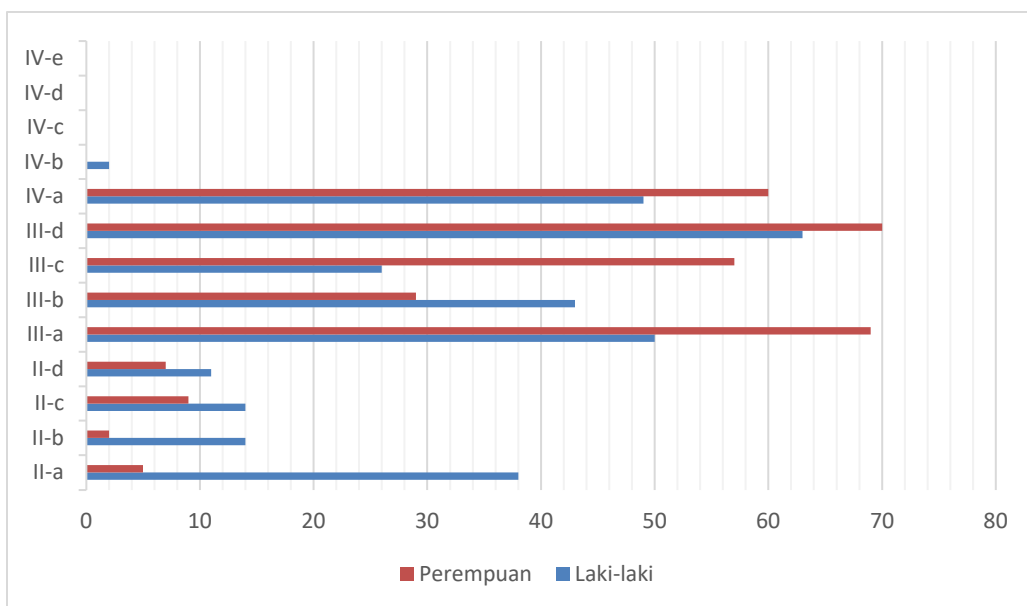
Tabel 6.9 Jumlah PNS Pusat Menurut Golongan Ruang dan Jenis Kelamin Tahun 2022

No	Golongan Ruang Kepangkatan PNS	Jumlah PNS		
		Laki-Laki	Perempuan	Total
1	I-a	-	-	-
2	I-b	-	-	-
3	I-c	-	-	-
4	I-d	-	-	-
	Golongan I	-	-	-
5	II-a	38	5	43
6	II-b	14	2	16
7	II-c	14	9	23
8	II-d	11	7	18
	Golongan II	72	29	101
9	III-a	50	69	119
10	III-b	43	29	72
11	III-c	26	57	83
12	III-d	63	70	133
	Golongan III	188	215	403
13	IV-a	49	60	109
14	IV-b	2	0	2
15	IV-c	-	-	-
16	IV-d	-	-	-
17	IV-e	-	-	-
	Golongan IV	39	60	99
	Jumlah	299	304	603

Sumber Data : Instansi Vertikal se- Kab. Pasaman Barat

Dari tabel 6.9 di atas menunjukkan bahwa jumlah PNS Pusat Perempuan di Kabupaten Pasaman Barat menurut golongan ruang sudah memperlihatkan hasil yang menggembirakan dimana dari 603 orang PNS Pusat yang tercatat di Pasaman Barat, sebanyak 304 orang atau sekitar 50,42 persen merupakan PNS perempuan. Jumlah tersebut didominasi oleh tenaga pendidik/guru Madrasah di Kementerian Agama Kabupaten Pasaman Barat.

Gambar 6.6 Jumlah PNS Pusat Menurut Golongan Ruang dan Jenis Kelamin Tahun 2022



Sumber Data : Instansi Vertikal se- Kab. Pasaman Barat

Dari grafik di atas terlihat bahwa Pangkat dan Golongan PNS Pusat di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022 ada pada Golongan III, mulai dari III/a sampai III/d. Hanya sedikit yang menduduki Golongan II dan Golongan IV. Selain itu, tidak terdapat PNS Pusat pada Golongan I.

c. PNS Daerah Menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin

Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota, atau dipekerjakan diluar Instansi induknya.

Tabel 6.10 Jumlah PNS Daerah Menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2022

No	Jenis Jabatan PNS	Jumlah PNS		
		Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Fungsional Umum	367	333	700
2	Fungsional Tertentu	794	2.700	650
3	Eselon I	0	0	0
4	Eselon II	35	3	38
5	Eselon III	117	51	168
6	Eselon IV	130	113	243
7	Eselon V	0	0	0
	Jumlah	1.443	3.200	4.643

Sumber Data : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Pasaman Barat

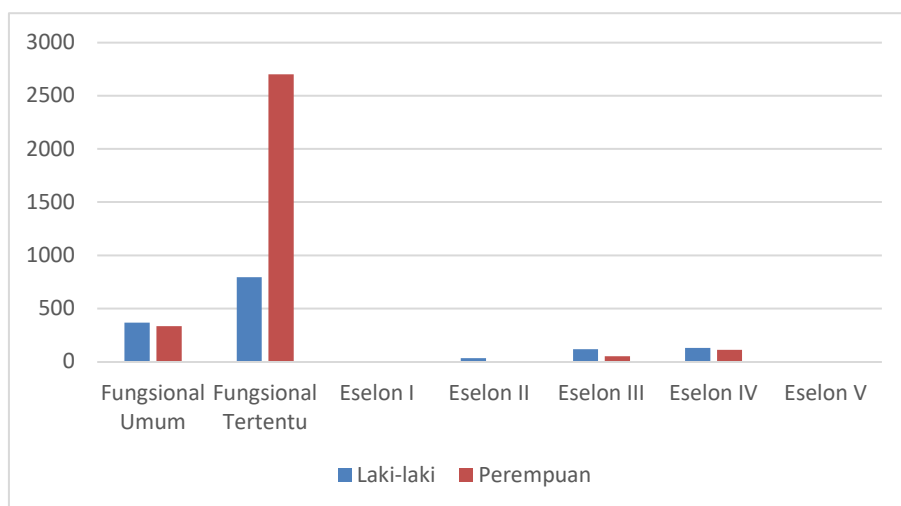
Dari tabel 6.10 di atas terlihat bahwa berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pasaman Barat, jumlah PNS di Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasaman Barat mencapai 4.643 orang yang terdiri dari 1.443 orang PNS laki-laki (31,07 persen) dan 3.200 orang PNS perempuan (68,92 persen).

Jumlah PNS perempuan lebih banyak bila dibandingkan dengan jumlah PNS laki-laki. Jumlah ini didominasi oleh jabatan Fungsional Umum dan Fungsional Tertentu seperti Tenaga Pendidik/Guru pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Tenaga Tenaga Kesehatan seperti Bidan dan Perawat pada Dinas Kesehatan.

Meskipun perempuan sudah dapat menikmati kesetaraan dalam pekerjaan sebagai PNS, namun belum banyak yang berada pada posisi pengambil keputusan. Sebagian besar pejabat struktural didominasi oleh kaum laki-laki. Pejabat eselon II hanya diisi oleh 3 orang perempuan saja, dan sisanya laki-laki yakni sebanyak 35 orang. Begitu juga dengan Jabatan Eselon

III, dari 168 jabatan structural yang ada, ada 117 orang posisi yang diisi laki-laki dan hanya 51 posisi yang diisi oleh perempuan. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi jabatan semakin kecil persentase perempuan yang menduduki jabatan tersebut.

Gambar 6.7 Jumlah PNS Daerah Menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2022



Sumber Data : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Pasaman Barat

d. PNS Daerah Berdasar Golongan Ruang dan Jenis Kelamin

Jumlah PNS Daerah berdasarkan Golongan Ruang pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasaman Barat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.11 Jumlah PNS Daerah Berdasar Golongan Ruang dan Jenis Kelamin Tahun 2022

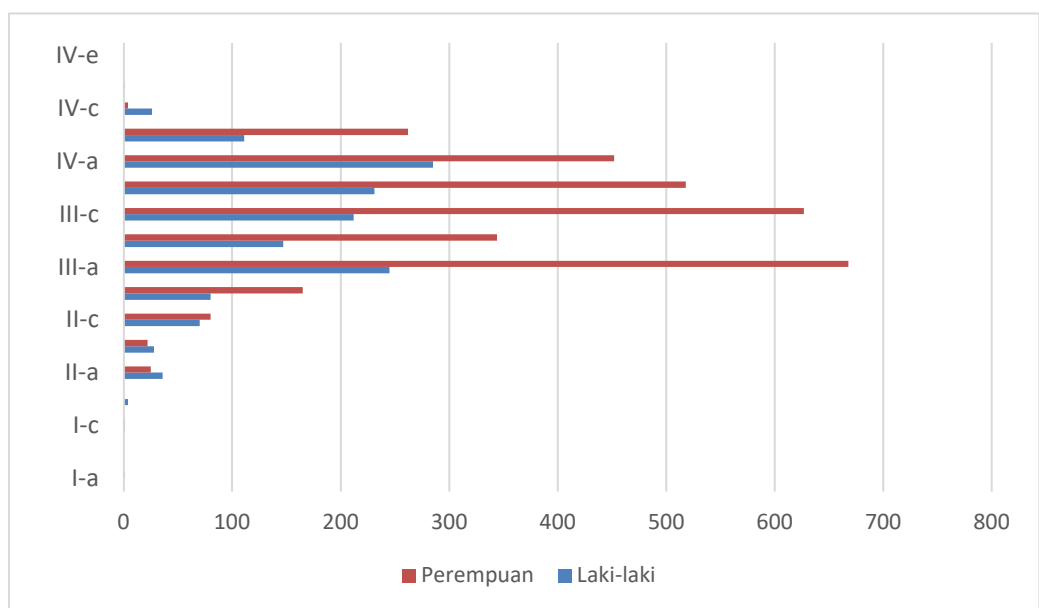
No	Golongan Ruang Kepangkatan PNS	Jumlah PNS		
		Laki-Laki	Perempuan	Total
1	I-a	0	1	1
2	I-b	0	0	0
3	I-c	1	1	2
4	I-d	4	0	4
	Golongan I	5	2	7
1	II-a	36	25	61
2	II-b	28	22	50
3	II-c	70	80	150
4	II-d	80	165	245
	Golongan II	214	292	506
1	III-a	245	668	913
2	III-b	147	344	491
3	III-c	212	627	839
4	III-d	231	518	749
	Golongan III	835	2.157	2.992
1	IV-a	285	452	737
2	IV-b	111	262	373
3	IV-c	26	4	30
4	IV-d	1	0	1
5	IV-e	0	0	0
	Golongan IV	423	718	1.141
	Jumlah	1.477	3.169	4.646

Sumber Data : BKP SDM Kabupaten Pasaman Barat

Berdasarkan tabel 6.11 diatas terlihat bahwa jumlah terbanyak Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Pasaman Barat adalah Golongan III yakni sebanyak 2.992 orang dan didominasi oleh perempuan sebanyak 3.169 jiwa (68% dan laki-laki sebanyak 1477 jiwa (32%) dari total Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Hal ini dimungkinkan karena dari jumlah jabatan fungsional tertentu seperti tenaga pendidik dan tenaga kesehatan lebih banyak didominasi oleh perempuan. Kualifikasi pendidikan seperti bidan dan perawat juga lebih banyak dari perempuan. Terlebih populasi untuk jabatan fungsional tertentu juga paling besar di Lingkungan Pemda Pasaman Barat sehingga dalam jumlah tingkat kepangkatan juga jumlah perempuan (68%) akan lebih banyak dibanding laki-laki (32%).

Gambar 6.8 PNS Daerah Berdasar Golongan Ruang dan Jenis Kelamin Tahun 2022



e. PNS Daerah Menurut Tingkat Pendidikan

Jumlah PNS Daerah menurut Tingkat Pendidikan pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasaman Barat dapat dilihat pada tabel berikut.

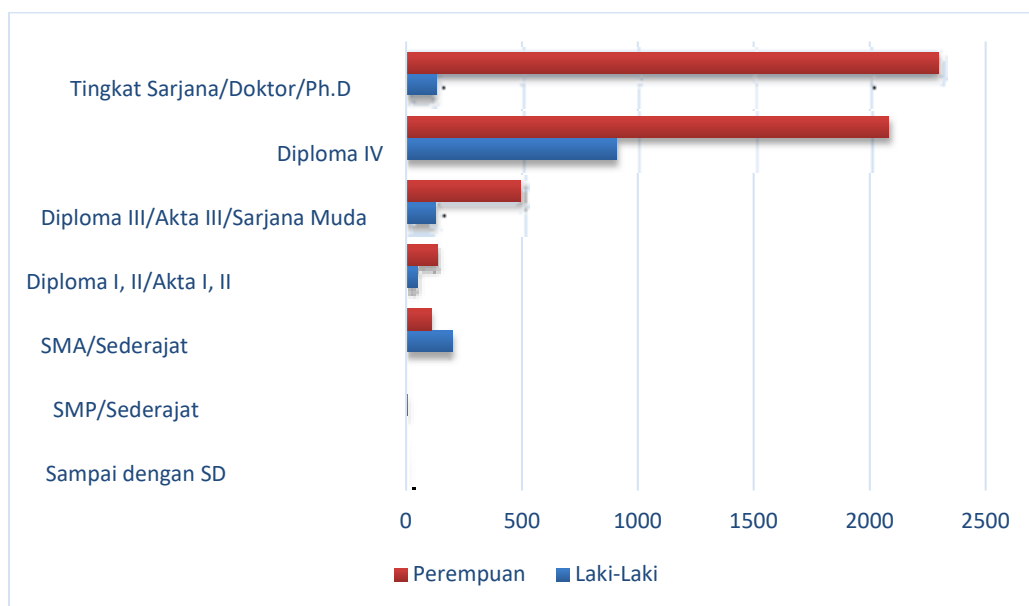
Tabel 6.12 Jumlah PNS Daerah Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2022

No	Jenis Jabatan PNS	Jumlah PNS		
		Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Sampai dengan SD	3	1	4
2	SMP/Sederajat	7	1	8
3	SMA/Sederajat	200	108	308
4	Diploma I, II/Akta I, II	49	134	183
5	Diploma III/Akta III/Sarjana Muda	126	496	624
6	Diploma IV	909	2.082	2.956
7	Tingkat Sarjana/Doktor/Ph.D	130	2.296	3.205
	Jumlah	1.436	3.207	4.643

Sumber Data : BKP SDM Kabupaten Pasaman Barat

Dalam hal kategori kepangkatan dan jabatan, jumlah PNS perempuan lebih banyak dari laki-laki, maka berdasarkan tingkat pendidikan juga akan terlihat jumlah PNS perempuan (68,92%) lebih banyak dibanding laki-laki (31,07%). Hal ini dimungkinkan karena dari jumlah jabatan fungsional tertentu seperti tenaga pendidik dan tenaga kesehatan lebih banyak didominasi oleh perempuan. Kualifikasi pendidikan seperti bidan dan perawat juga lebih banyak dari perempuan sehingga dalam hal jumlah tingkat pendidikan, jumlah perempuan juga akan lebih banyak daripada laki-laki.

Gambar 6.9 PNS Daerah Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2022



Sumber Data : BKP SDM Kabupaten Pasaman Barat

f. Camat

Camat merupakan pemimpin kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, berada di bawah, dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten atau Kota.

Camat diangkat oleh Bupati atau Wali Kota atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten atau Kota terhadap Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat. Jumlah camat perempuan di Pasaman Barat bisa dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 6.13 Jumlah Camat Menurut Jenis Kelamin di Kab. Pasaman Barat Tahun 2022

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	Sungai Beremas	1	-	1
2	Ranah Batahan	1	-	1
3	Koto Balingka	1	-	1
4	Sungai Aur	1	-	1
5	Lembah Melintang	1	-	1
6	Gunung Tuleh	1	-	1
7	Talamau	-	1	1
8	Pasaman	1	-	1
9	Luhak Nan Duo	-	1	1
10	Sasak Ranah Pasisie	1	-	1
11	Kinali	1	-	1
	Kab. Pasaman Barat	9	2	11

Sumber Data : Bagian Pemerintahan Nagari, Kecamatan se-Kab. Pasaman Barat

Dari tabel 6.13 di atas terlihat jelas bahwa posisi Camat perempuan lebih sedikit bila dibandingkan dengan Camat laki-laki. Dari 11 kecamatan yang ada di Pasaman Barat, hanya 2 kecamatan yang dipimpin oleh camat perempuan yakni di Kecamatan Talamau dan Kecamatan Luhak Nan Duo. Hal ini seharusnya menjadi perhatian Pemerintah Daerah bahwa pentingnya menambah jumlah perempuan yang menjadi Camat di suatu kecamatan agar program-program pemberdayaan perempuan di kecamatan bisa dilakukan. Sesuai dengan ungkapan selama ini bahwa yang mengerti perempuan hanyalah perempuan.

g. Walinagari

Nagari adalah pembagian wilayah administratif sesudah kecamatan di provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Istilah nagari menggantikan istilah desa, yang digunakan di provinsi lain di Indonesia. Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberadaan Nagari sebagai organisasi pemerintahan terendah di Sumatera Barat sejak empat dasawarsa yang lalu memperlihatkan perkembangannya yang menarik, terutama dari sisi jumlah. Jika pada tahun 1976 di Sumatera Barat terdapat 543 Nagari dan dalam kurun waktu 30 tahun jumlahnya relatif tetap, bahkan terlihat berkurang pada tahun 2006 menjadi 519 Nagari. Pertambahan jumlah Nagari di Sumatera Barat tampak mulai bergerak naik pada tahun 2007 dan dari tahun ke tahun terus bertambah.

Bertambahnya jumlah nagari itu di Sumatera Barat tentu dengan berbagai latar belakang dan pertimbangan, namun bertambahnya jumlah Nagari itu tentulah hanya dalam perspektif nagari sebagai organisasi dan administrasi pemerintahan. Artinya pertambahan atau berkurangnya jumlah Nagari di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat tidak senantiasa identik dengan konsep bertambah dan berkurangnya Nagari secara kualitas geneologis atau dalam perspektif adat dan budaya Minangkabau sebagai sebuah sistem.

Posisi walinagari dari kaum perempuan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6.14 Jumlah Wali Nagari Menurut Jenis Kelamin di Kab. Pasaman Barat Tahun 2022

No	Kecamatan/Nagari	Jenis Kelamin				Total
		Nagari Induk		Nagari Persiapan		
		L	P	L	P	
1	Sungai Beremas					
	1. Aia Bangih	1	-	-	-	1
2	Ranah Batahan					
	1. Batahan	1	-	4	-	5
	2. Desa Baru	1	-	1	-	2
3	Koto Balingka					
	1. Parik	1	-	4	1	6
4	Sungai Aur					
	1. Sungai Aua	1	-	4	2	7
5	Lembah Melintang					
	1. Ujung Gading	1	-	7	1	8
6	Gunung Tuleh					
	1. Muaro Kiawai	1	-	1	1	3
	2. Rabi Jonggor	1	-	2	1	4
7	Talamau					
	1. Kajai	1	-	2	-	3
	2. Talu	1		2		3
	3. Sinuruik	1	-	1	-	2
8	Pasaman					
	1. Aua Kuniang	1	-	4	-	5
	2. Aia Gadang	1	-	2	-	3
	3. Lingkuang Aua	1	-	3	4	8
9	Luhak Nan Duo					
	1. Koto Baru	1	-	5	2	8
	2. Kapa	1	-	-	-	1
1-	Sasak Ranah Pasisie					
	1. Sasak	1	-	2	1	4
11	Kinali					
	1. Kinali	1	-	14	1	16
	2. Katiagan	1	-	-	-	1
	Pasaman Barat	19	-	56	15	90

Sumber Data : Bagian Pemerintahan Nagari

Dari tabel 6.14 di atas menunjukkan bahwa jabatan walinagari induk belum ada yang dipegang oleh kaum perempuan. Dari 19 nagari induk yang ada di Pasaman Barat, tidak satupun nagari yang dipimpin oleh perempuan. Hal disebabkan oleh sistem pemilihan Walinagari yang dipilih langsung oleh masyarakat.

Namun berbeda halnya dengan nagari persiapan yang pemilihan walinagarinya ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Pasaman Barat dengan status Pelaksana Tugas (Plt). Pada Nagari Persiapan terdapat 15 orang walinagari perempuan yang tersebar di 8 kecamatan.

h. Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, bahwa Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) terdiri dari Baperjakat Instansi Pusat, Baperjakat Instansi Daerah Provinsi, Baperjakat Instansi Daerah Kabupaten atau Kota.

Tugas pokok Baperjakat adalah memberikan pertimbangan kepada pejabat pembina kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural Eselon II ke bawah. Kemudian, Baperjakat bertugas memberikan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang dalam pemberian kenaikan pangkat bagi yang menduduki jabatan struktural, menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya, menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara dan pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun PNS yang menduduki jabatan struktural Eselon I dan Eselon II.

Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baper- jakat) Kabupaten Pasaman Barat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.15 Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Menurut Jenis Kelamin di Indonesia Tahun 2022

No	Nama Jabatan	Jumlah PNS		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	Pasaman Barat	4	1	5
	Pasaman Barat	4	1	5

Sumber Data : BKPSDM Kabupaten Pasaman Barat

Sesuai SK Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/ /BUP-PASBAR/2021 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat, jumlah pengurus dan Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pasaman Barat sebanyak anggota 5 orang terdiri dari 4 orang laki-laki dan 1 orang perempuan.

i. Pengurus dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa/ Bamus Nagari

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau Bamus Nagari merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa/nagari. BPD/Bamus dapat dianggap sebagai "parlemen"-nya desa. BPD/Bamus merupakan lembaga baru di desa/nagari pada era otonomi daerah di Indonesia. Anggota BPD/Bamus adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Anggota BPD/Bamus terdiri dari Kepala Jorong, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD/Bamus adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan Anggota BPD/Bamus tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa/Wali Nagari dan Perangkat Desa/Nagari.

Tabel 6.16 Pengurus dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa/ Bamus Nagari Menurut Jenis Kelamin di Pasaman Barat Tahun 2022

No	Kecamatan/Nagari	Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	Sungai Beremas			
	1. Aia Bangih	8	1	9
2	Ranah Batahan			
	1. Batahan	7	2	9
	2. Desa Baru	8	1	9
3	Koto Balingka			
	1. Parik	8	1	9
4	Sungai Aur			
	1. Sungai Aua	8	1	9
5	Lembah Melintang			
	1. Ujung Gading	8	1	9
6	Gunung Tuleh			
	1. Muaro Kiawai	8	1	9
	2. Rabi Jonggor	9	1	10
7	Talamau			
	1. Kajai	7	2	9
	2. Talu	6	3	9
	3. Sinuruik	7	2	9
8	Pasaman			
	1. Aua Kuniang	8	1	9
	2. Aia Gadang	8	1	9
	3. Lingkuang Aua	7	2	9

Lanjutan Tabel 6.16

No	Kecamatan/Nagari	Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
9	Luhak Nan Duo			
	1. Koto Baru	7	1	8
	2. Kapa	8	1	9
10	Sasak Ranah Pasisie			
	1. Sasak	8	1	9
11	Kinali			
	1. Kinali	6	1	7
	2. Katiagan	8	1	9
	Pasaman Barat	144	29	169

Sumber data : Bagian Pemnag Setda, Kecamatan se-Kab. Pasaman Barat

BAB VII

BIDANG HUKUM, SOSIAL-BUDAYA DAN LINGKUNGAN



JUSTICE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

BAB VII

BIDANG HUKUM, SOSIAL BUDAYA DAN LINGKUNGAN

7.1 Bidang Hukum dan Sosial Budaya

Perlindungan hukum adalah suatu upaya melindungi hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan undang-undang, oleh karenanya untuk setiap pelanggaran hukum yang dituduhkan padanya serta dampak yang diderita olehnya ia berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang diperlukan sesuai dengan asas hukum.

Dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi perempuan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengeluarkan Deklarasi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan, yang memuat hak dan kewajiban berdasarkan persamaan hak dengan laki-laki. Berdasarkan deklarasi ini komisi PBB tentang Kedudukan Perempuan menyusun rancangan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women – CEDAW*). Pada tanggal 18 Desember 1979, Majelis Umum PBB menyetujui Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Karena konvensi tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila maupun UUD 1945, maka Pemerintah Republik Indonesia ikut menandatangani konvensi tersebut dan diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Disini jelas terlihat bahwa negara mempunyai komitmen terhadap perlindungan hak-hak perempuan, ditambah lagi komitmen khusus yakni perlindungan terhadap diskriminasi, dan bahkan penghapusan terhadap diskriminasi itu sendiri.

a. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Menurut Jenis dan Jenjang Pendidikan

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sedangkan Rumah Tahanan Negara (Rutan) adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia. Tabel berikut ini menyajikan data tentang Penghuni Lapas menurut jenis lapas dan jenjang pendidikan.

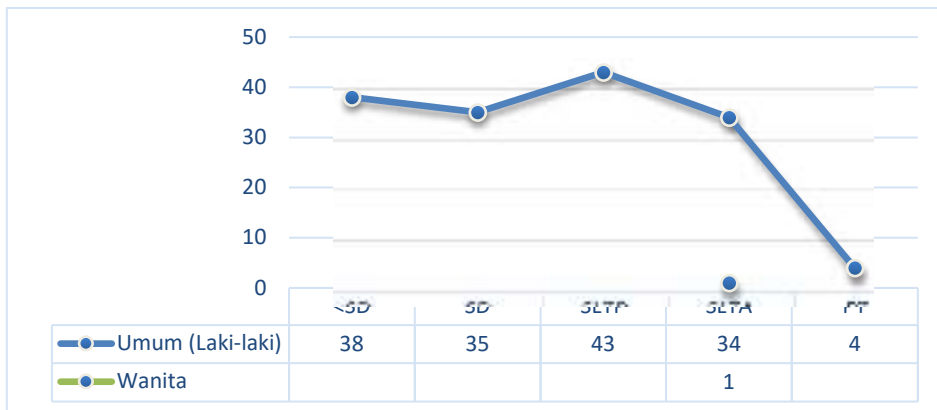
Tabel 7.1 Jumlah Penghuni Lapas Menurut Jenis Lapas dan Jenjang Pendidikan Tahun 2022

No	Jenis Lapas	Pendidikan					
		<SD	SD	SLTP	SLTA	PT	Jumlah
1	Umum (Laki-laki)	38	35	43	34	4	154
2	Anak	-	-	-	-	-	-
3	Wanita	-	-	-	1	-	1
	Total	38	35	43	35	4	155

Sumber Data : Lapas Kelas III Talu

Tabel 7.1 di atas menunjukkan bahwa jenis lapas yang paling banyak dihuni adalah Lapas Umum (laki-laki) yakni sebanyak 154 orang narapidana dengan jenjang pendidikan tidak tamat SD sebanyak 38 orang, pendidikan SD sebanyak 35 orang, pendidikan SLTP sebanyak 43 orang dan SLTA sebanyak 34 orang serta jenjang pendidikan Perguruan Tinggi sebanyak 4 orang. Untuk penghuni Lapas Anak tidak ada, sedangkan untuk lapas Wanita dihuni oleh 1 orang dengan latar belakang pendidikan SLTA.

Gambar 7.1 Jumlah Penghuni Lapas Menurut Jenis Lapas dan Jenjang Pendidikan Tahun 2022



Sumber Data : Lapas Kelas III Talu

Dari grafik di atas terlihat bahwa penghuni lapas terbanyak ada di lapas laki-laki dengan tingkat pendidikan SLTP/ sederajat. Sedangkan tingkat pendidikan Perguruan Tinggi merupakan penghuni lapas umum paling sedikit. Sebenarnya, apabila dilihat grafiknya semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin kecil menjadi penghuni lapas kecuali pada tingkat Pendidikan SLTP/ sederajat.

b. Jumlah Penghuni LAPAS menurut Jenis Lapas dan Kelompok Umur

Tabel berikut ini menyajikan data tentang Penghuni Lapas menurut jenis lapas dan kelompok umur.

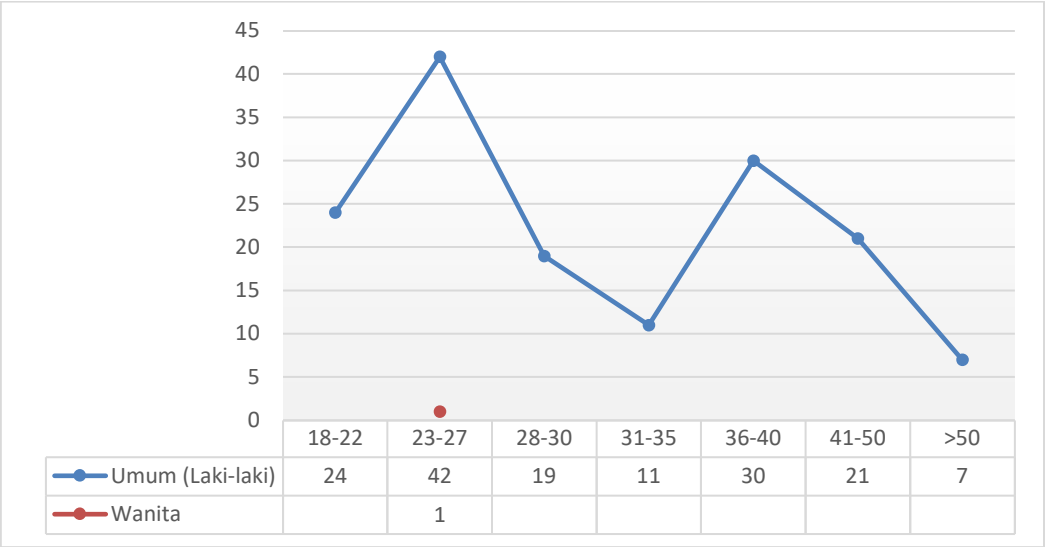
Tabel 7.2 Jumlah Penghuni LAPAS Menurut Jenis Lapas dan Kelompok Umur Tahun 2022

No	Jenis Lapas	Kelompok umur (Tahun)						
		18-22	23-27	28-30	31-35	36-40	41-50	>50
1	Umum (Laki-laki)	24	42	19	11	30	21	7
2	Anak	-	-	-	-	-	-	-
3	Wanita	-	1	-	-	-	-	-
	Jumlah	24	43	19	11	30	21	7

Sumber Data : Lapas Kelas III Talu

Dari tabel 7.2 di atas bisa dilihat bahwa penghuni lapas terbanyak adalah laki-laki pada kelompok umur 23-27 tahun berjumlah 43 orang, kelompok umur 36-40 tahun yang berjumlah 30. Hal ini menandakan bahwa pada rentang usia tersebut rentan melakukan tindak kejahatan.

Gambar 7.2 Jumlah Penghuni LAPAS Menurut Jenis Lapas dan Kelompok Umur Tahun 2022



Sumber Data : Lapas Kelas III Talu

Dari grafik terlihat bahwa penghuni lapas paling banyak ada pada rentang usia 23-27 tahun berjumlah 43 orang dan paling sedikit ada pada kelompok umur 50 tahun ke atas. Tidak ada Analisa yang pasti mengapa kelompok umur 23-27 tahun paling banyak melakukan kejahatan, akan tetapi pelaku kejahatan semakin mengarah ke umur muda. Data ini memberi gambaran bahwa penghuni Lapas adalah mereka yang masih berusia produktif. Kondisi ini akan sangat berdampak terhadap keluarga dan anak-anak yang memerlukan orang tua sebagai penanggung jawab ekonomi dan pendidikan mereka. Bagi kelompok yang berusia muda hal ini akan berdampak terhadap masa depan mereka karena pada usia muda yang seharusnya mulai memiliki kemapanan hidup, namun harus mendekam di Lapas.

c. Jumlah Penghuni Lapas menurut Jenis Lapas dan Jenis Kasus

Tabel berikut ini menyajikan data tentang Penghuni Lapas menurut jenis lapas dan jenis kasus.

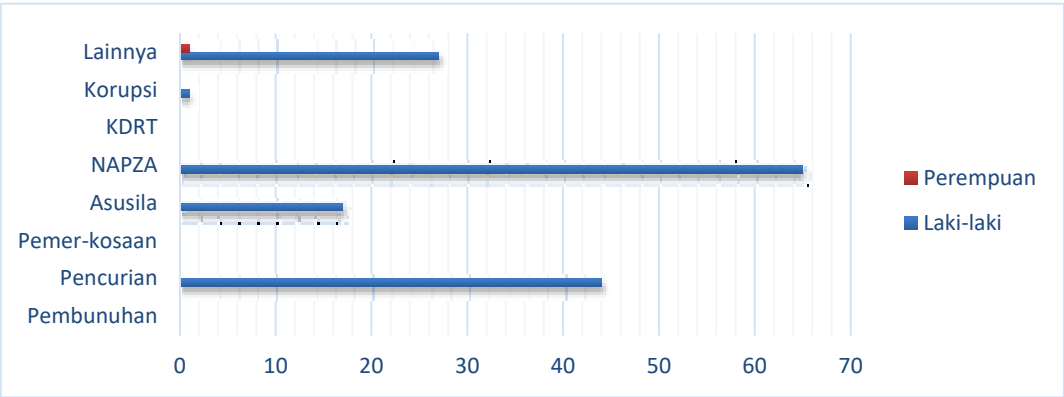
Tabel 7.3 Jumlah Penghuni Lapas Menurut Jenis Lapas dan Jenis Kasus Tahun 2022

No	Lapas	Kasus							
		Pembu- nuhan	Pencu- rian	Pemer- kosaan	Asusila	NAPZA	KDRT	Korupsi	Lainnya
1	Umum (Laki-laki)	-	44	-	17	65	-	1	27
2	Anak	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Wanita	-	-	-	-	-	-	-	1
	Jumlah	-	44	-	17	65	-	1	28

Sumber Data : Lapas Kelas III Talu

Pada tabel 7.3 di atas dapat dilihat bahwa kasus yang paling banyak menghuni Lapas Terbuka dan Rutan Talu berasal dari NAPZA dan Pencurian baik untuk kelompok umum (Laki-laki) maupun kelompok wanita. Selain itu terdapat Kasus lainnya sebanyak 28 orang dengan kasus sebagai berikut; Kekerasan (pasal 170 KUHP), Perjudian (pasal 303 KUHP), Illegal Logging/ kehutanan, Penipuan (pasal 378 KUHP), Penadahan (pasal 480 KUHP) dan lain sebagainya.

Gambar 7.3 Jumlah Penghuni Lapas Menurut Jenis Lapas dan Jenis Kasus Tahun 2022



Sumber Data : Lapas Kelas III Talu

d. Jumlah Jenis Lapas menurut Kabupaten

Tabel berikut ini menyajikan data tentang jumlah Lapas di Pasaman Barat.

Tabel 7.4 Jumlah Jenis Lapas di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022

No	Kabupaten	Lapas Umum (Laki-laki)	Lapas Anak	Lapas Wanita
1	Lapas Terbuka Kelas IIB	1	-	-
2	Lapas Kelas III Talu	1	-	-

Sumber Data : Lapas Kelas III Talu, Lapas Terbuka Pasaman Barat

Dari tabel 7.4 di atas terlihat bahwa Pasaman Barat hanya mempunyai lapas khusus untuk Lapas Umum (laki-laki). Sedangkan Lapas Anak dan Lapas Wanita tidak tersedia di Pasaman Barat.

e. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi

Di Indonesia, dalam upaya untuk mengentaskan kemiskinan, Dinas Sosial mengelompokkan penduduk yang menjadi target, yaitu kelompok penduduk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Menurut Dinas Sosial, setidaknya terdapat 22 definisi operasional dan karakteristik dari masing-masing jenis PMKS, salah satunya adalah Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE). Faktor-faktor yang menyebabkan wanita menjadi WRSE adalah perceraian/kematian suami, tingkat pendidikan rendah, pekerjaan dengan gaji rendah.

Dalam sebuah keluarga miskin, perempuan senantiasa sebagai katup penyelamat bagi perekonomian keluarga dikarenakan oleh berbagai peran perempuan miskin yang diambil dalam keluarga meliputi: pertama, sebagai pengelola keuangan keluarga; kedua, sebagai penanggung jawab seluruh pekerjaan domestik; ketiga, sebagai pencari nafkah keluarga; dan keempat, sebagai salah satu simpul jaringan sosial yang penting dalam hal transfer sosial, khususnya pada masa-masa kritis dan krisis.

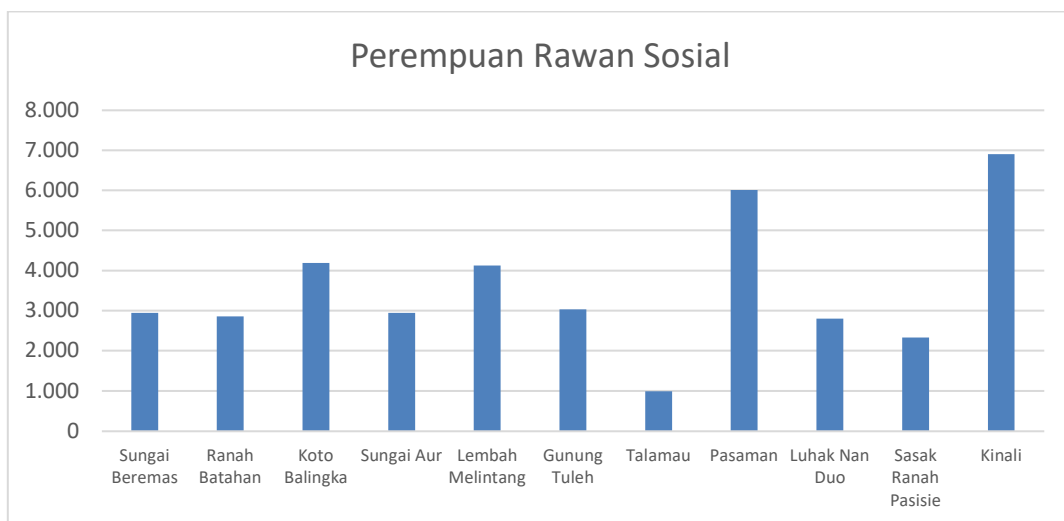
Tabel 7.5 Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah
1	Sungai Beremas	2.941
2	Ranah Batahan	2.860
3	Koto Balingka	4.186
4	Sungai Aur	2.941
5	Lembah Melintang	4.124
6	Gunung Tuleh	3.029
7	Talamau	993
8	Pasaman	6.009
9	Luhak Nan Duo	2.797
10	Sasak Ranah Pasisie	2.330
11	Kinali	6.901
	Kab. Pasaman Barat	39.111

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat

Terdapat tiga alasan penting kenapa perempuan wajib diberdayakan dalam konteks pengentasan kemiskinan, yaitu: (1) perempuan mempunyai kepentingan yang sama dalam pembangunan, dan juga merupakan pengguna hasil pembangunan yang mempunyai hak sama dengan laki-laki; (2) perempuan memiliki kepentingan yang khusus sifatnya bagi perempuan itu sendiri dan anak-anak, yang kurang optimal jika digagas oleh laki-laki karena membutuhkan kepekaan yang sifatnya khusus, terkait dengan keseharian, sosio kultural yang ada; dan (3) pemberdayaan melibatkan perempuan dalam pembangunan, secara tidak langsung akan memberdayakan dan menularkan semangat yang positif kepada generasi penerus, yang pada umumnya dalam keseharian sangat lekat dengan sosok ibu

Gambar 7.4 Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022



Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat

f. Lansia Terlantar

Lanjut usia (lansia) adalah suatu kelompok umur yang mengalami peningkatan disetiap tahunnya, dimana dari kelompok umur ini adalah seseorang yang sudah mencapai usia 60 tahun keatas. Berdasarkan undang-undang No.13 tahun 1998 lanjut usia (lansia) adalah seseorang yang mencapai usia 60 tahun keatas. Sedangkan Lanjut Usia terlantar seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan terlantar secara psikis dan sosial.

Pada tahun 2022 , menurut data Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat tidak terdapat terlantar, seperti yang terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 7.6 Jumlah Lansia Terlantar Miskin Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	Sungai Beremas	-	-	-
2	Ranah Batahan	-	-	-
3	Koto Balingka	-	-	-
4	Sungai Aur	-	-	-
5	Lembah Melintang	-	-	-
6	Gunung Tuleh	-	-	-
7	Talamau	-	-	-
8	Pasaman	-	-	-
9	Luhak Nan Duo	-	-	-
10	Sasak Ranah Pasisie	-	-	-
11	Kinali	-	-	-
Pasaman Barat		-	-	-

Sumber : Dinas Sosial Tahun 2022

Menurut data Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat, pada tahun 2022 tidak ada lansia terlantar di Kabupaten Pasaman Barat

Ada beberapa faktor penyebab dimana lanjut usia menjadi terlantar, yaitu :

1. Ketiadaan sanak keluarga, kerabat dan masyarakat lingkungan yang dapat memberikan bantuan tempat tinggal dan penghidupannya.
2. Kesulitan hubungan antara lanjut usia dengan keluarga dimana selama ini ia tinggal.
3. Ketiadaan kemampuan keuangan/ekonomi dari keluarga yang menjamin penghidupannya secara layak

g. Penyandang Disabilitas (Penda)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang dipandang belum berperspektif hak asasi manusia, lebih bersifat belas kasihan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas masih dinilai sebagai masalah sosial yang kebijakan pemenuhan haknya baru bersifat jaminan sosial, rehabilitasi sosial, bantuan sosial, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Penyandang disabilitas seharusnya mendapatkan kesempatan yang sama dalam upaya mengembangkan dirinya melalui kemandirian sebagai manusia yang bermartabat.

Sesuai undang-undang tersebut, definisi penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Ragam penyandang disabilitas meliputi penyandang disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik, yang dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 7.7 Jenis dan Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Menurut Kecamatan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022

No.	Kecamatan	Jenis Penyandang Disabilitas																								Total	
		Tuna Netra		Tuna Rungu		Tuna Grahita		Tuna Daksa/Cacat Fisik		Tuna Laras		Anak Yang Memiliki kecerdasan di atas rata - rata dan/atau bakat istimewa		Tuna Ganda		Autis		Gangguan Pemusatan Perhatian dan Hiperaktivitas/GPPH (Attention and Hyperactivity)		Lamban Belajar		Kesulitan Belajar		Gangguan Komunikasi			
P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L		
1	Sungai Beremas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Ranah Batahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
3	Koto Balingka	-	-	-	-	3	2	2	10	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	19
4	Sungai Aur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Lembah Melintang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Gunung Tuleh	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6	22
7	Talamau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Pasaman	-	1	-	-	5	7	-	-	-	-	-	-	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
9	Luhak Nan Duo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
10	Sasak Ranah Pasisie	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
11	Kinali	-	1	-	7	5	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
	Pasaman Barat	7	2	1	7	13	17	2	10	-	1	-	-	7	6	3	3	-	-	-	-	-	-	-	5	8	92

Sumber data : Dinas Sosial

Data Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022 mencatat ada 92 orang Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Jenis ABK yang terdapat pada Kabupaten Pasaman Barat adalah Tuna Netra, Tuna Rungu, Tuna Grahita, Tuna Daksa/ Cacat Fisik, Tuna Laras, Tuna Ganda, Autis, dan Gangguan Komunikasi. Berikut penjelasan dari beberapa istilah disabilitas tersebut di atas.

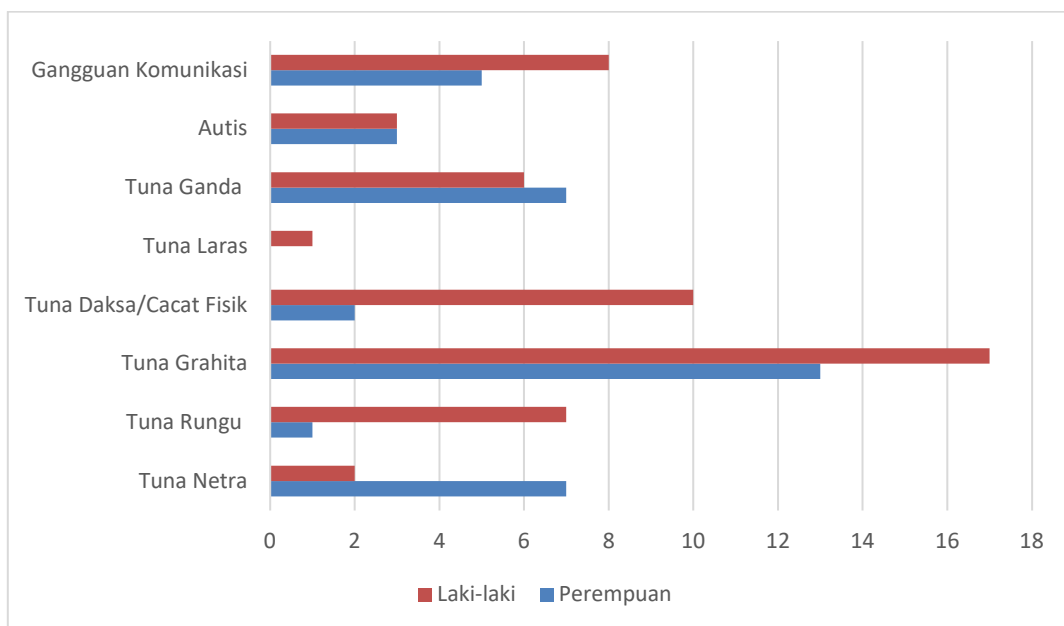
1. Tunanetra adalah mereka yang tidak memiliki penglihatan sama sekali (buta total) hingga mereka yang masih memiliki sisa penglihatan tetapi tidak mampu menggunakan penglihatannya untuk membaca tulisan biasa berukuran 12 point dalam keadaan cahaya normal sekalipun.
2. Tuna rungu adalah istilah yang merujuk pada orang yang tidak dapat mendengar. Seseorang dikatakan tuna rungu apabila ia tidak mampu atau kurang mampu dalam mendengar suara. Secara medis, tuna rungu atau ketunarunguan artinya kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar yang disebabkan oleh kerusakan dan non fungsi dari sebagian atau seluruh alat pendengaran.
3. Tunagrahita adalah sebutan bagi orang-orang dengan kemampuan intelektual dan kognitif yang berada di bawah rata-rata dibandingkan orang pada umumnya. Kondisi ini biasanya terdeteksi sejak masa kanak-kanak, tetapi bisa pula muncul ketika dewasa. Anak dengan tunagrahita dapat dikenali dari proses berpikir dan belajar yang lebih lambat dibandingkan anak-anak lain seusianya. Tak hanya itu, seorang anak tunagrahita juga kurang cakap dalam mempraktikkan keterampilan saat menjalani kegiatan sehari-hari secara normal.
4. Tuna daksa adalah kondisi anak yang memiliki anggota tubuh tidak sempurna. Ketidaksempurnaan ini hanyalah secara fisik (tulang, sendi otot), sedangkan fungsi pancaindra penderita tuna daksa masih normal sehingga kelainan ini kerap disebut juga sebagai cacat tubuh, disabilitas fisik.
5. Tunalaras adalah anak yang mengalami gangguan atau hambatan emosi dan

berkelainan tingkah laku, sehingga kurang dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Beberapa ciri tunalaras adalah suka berkelahi, memukul, punya karakter pemaarah, sering melanggar aturan, tidak mau bekerja sama, dan sebagainya.

6. Tunaganda (*double handicap atau multiple handicap*) adalah anak yang memiliki kombinasi kelainan (baik dua jenis kelainan atau lebih) yang menyebabkan adanya masalah pendidikan yang serius, sehingga dia tidak hanya dapat diatas dengan suatu program pendidikan khusus untuk satu kelainan saja, melainkan harus didekati dengan variasi program pendidikan sesuai kelainan yang dimiliki. Berberapa macam tunaganda antara lain ; tunanetra-tunawicara, tunanetra-tunarungu, tunanetra-tunadaksa, tunanetra-tunagrahita, tunanetra-tunalaras, tunanetra-kesulitan belajar khusus.
7. Autisme adalah gangguan perilaku dan interaksi sosial akibat kelainan perkembangan saraf otak. Kondisi ini menyebabkan penderitanya sulit berkomunikasi, berhubungan sosial, dan belajar. Autisme disebut juga sebagai gangguan spektrum autisme atau *autism spectrum disorder* (ASD). Istilah spektrum sendiri mengacu pada gejala dan tingkat keparahan penyakit ini yang berbeda-beda pada tiap penderitanya. Gangguan yang termasuk dalam ASD adalah sindrom Asperger, gangguan perkembangan pervasif (PPD-NOS), gangguan autistik, dan *childhood disintegrative disorder* (sindrom Heller). Kondisi ini sering kali dikaitkan juga dengan sindrom savant.
8. Yang dimaksud dengan gangguan komunikasi meliputi berbagai lingkup masalah yaitu gangguan bicara, bahasa, dan mendengar. Gangguan bahasa dan bicara melingkupi gangguan artikulasi, gangguan mengeluarkan suara, afasia (kesulitan menggunakan kata-kata, biasanya karena memar atau luka pada otak), dan keterlambatan di dalam berbicara atau berbahasa. Keterlambatan bicara dan

bahasa tergantung dari beberapa penyebab, termasuk di dalamnya adalah faktor lingkungan atau gangguan pendengaran.

Gambar 7.5 Jenis dan Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Menurut Kecamatan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022



Dari grafik di atas terlihat bahwa penyandang disabilitas terbanyak adalah Tuna Grahita, baik laki-laki maupun perempuan. Selain itu, Tuna Daksa/Cacat Fisik juga merupakan disabilitas terbanyak terutama laki-laki. Secara keseluruhan, penyandang disabilitas terbanyak merupakan jenis kelamin laki-laki. Akan tetapi, hal ini tidak ada kaitannya dengan kondisi apapun.

Data Jenis dan Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Kecamatan tahun 2022 pada Kabupaten Pasaman Barat dapat terlihat pada tabel dibawah ini :

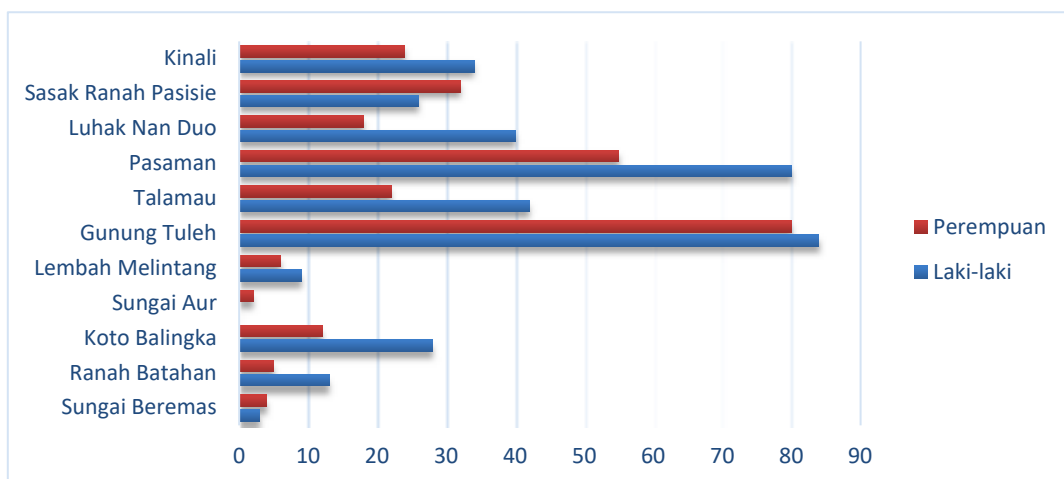
Tabel 7.8 Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Kecamatan di Pasaman Barat Tahun 2022

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	Sungai Beremas	3	4	7
2	Ranah Batahan	13	5	18
3	Koto Balingka	28	12	40
4	Sungai Aur	-	2	2
5	Lembah Melintang	9	6	15
6	Gunung Tuleh	84	80	164
7	Talamau	42	22	64
8	Pasaman	80	55	135
9	Luhak Nan Duo	40	18	58
10	Sasak Ranah Pasisie	26	32	58
11	Kinali	34	24	58
Pasaman Barat		359	260	619

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat

Penyandang disabilitas di kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2022 mencapai 619 orang, dimana ada 359 orang laki-laki dan 260 orang perempuan. Apabila dilihat per kecamatannya, jumlah penyandang disabilitas terbanyak ada di Kecamatan Gunung Tuleh dengan jumlah 164 orang dan Kecamatan Pasaman sebanyak 135 orang. Angka ini tentunya sangat tinggi apabila dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Belum diketahui penyebab pastinya mengapa dua kecamatan tersebut terdapat penyandang disabilitas yang cukup tinggi, akan tetapi hal ini pastinya akan menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat dalam memberikan perlindungan dan hak-hak para penyandang disabilitas.

Gambar 7.6 Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Kecamatan di Pasaman Barat Tahun 2022



Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat

Tabel 7.9 Jumlah Penyandang Disabilitas/Cacat Anak dibawah Umur 18 Tahun Menurut Kecamatan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022

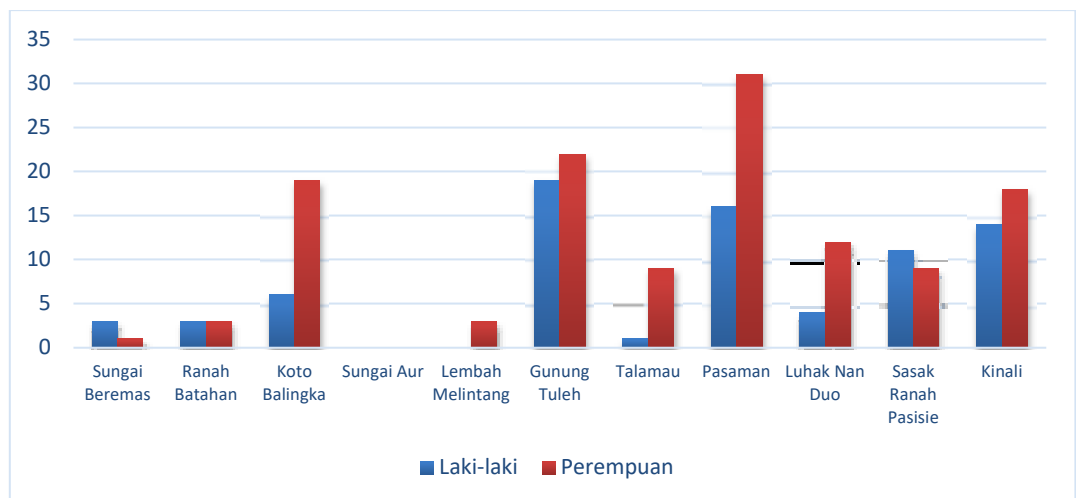
No	Kecamatan	Jenis Kelamin		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	Sungai Beremas	3	1	4
2	Ranah Batahan	3	3	6
3	Koto Balingka	6	19	25
4	Sungai Aur	-	-	-
5	Lembah Melintang	-	3	3
6	Gunung Tuleh	19	22	41
7	Talamau	1	9	10
8	Pasaman	16	31	47
9	Luhak Nan Duo	4	12	16
10	Sasak Ranah Pasisie	11	9	20
11	Kinali	14	18	32
Pasaman Barat		77	127	204

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat

Data Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat mencatat ada 204 orang anak penyandang disabilitas. Anak disabilitas laki – laki berjumlah 77 orang atau sebesar 37,74 persen dan 127 orang anak penyandang disabilitas perempuan atau sebesar 62,26 persen. Jumlah terbanyak ada di Kecamatan Pasaman (47 orang) dan Kecamatan Gunung Tuleh (41 orang).

Anak Penyandang Disabilitas adalah anak yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berintegrasi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan anak lainnya berdasarkan kesamaan hak. Perlindungan Khusus Anak Penyandang Disabilitas adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak penyandang disabilitas untuk memenuhi hak-haknya dan mendapatkan jaminan rasa aman, terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

Gambar 7.7 Jumlah Penyandang Disabilitas/Cacat Anak dibawah Umur 18 Tahun Menurut Kecamatan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022



Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat

7.2 Bidang Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan

Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Mungkin tak ada yang menandingi Indonesia dalam hal kekayaan alam. Negeri ini begitu melimpah dengan kekayaan alam yang dapat dijadikan sumber penghidupan.

Lingkungan hidup adalah satu-satunya isu global yang mungkin bisa menyaingi isu terorisme. Dibalik dari dampaknya, penataan lingkungan hidup yang semrawut bisa memakan korban lebih besar ketimbang aksi terorisme. Banjir, longsor, badai dan puting beliung adalah beberapa contoh bencana alam yang disebabkan adanya gangguan pada lingkungan hidup.

Pemanfaatan sumber daya alam harus berwawasan lingkungan. Kita tidak seharusnya memanfaatkan sumber daya alam yang ada semuanya disekitar kita. Walaupun untuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui, kita harus menghemat dalam pemakaiannya, karena tidak dapat diperbaharui, ataupun kalau bisa dibentuk kembali memerlukan jutaan tahun lamanya.

Tabel 7.10 Data Terpilah Bidang SDA dan Lingkungan Tahun 2019

No.	Isu Strategis	Dukungan Pemerintah	Peran Masyarakat Terhadap Isu	
			L	P
1.	Mitigasi dan Adaptasi			
	"Tanam dan Peihara" Pohon ;	-	-	-
	Pelestarian hutan	-	-	-
	Pengendalian Penduduk	-	-	-
	Pengendalian Pengelolaan Sampah	Sosialisasi Program Sedekah Sampah	1200	1500
2.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Potensi SDA Daerah			
	Obat-obatan	-	-	-
	Kosmetika	-	-	-
	Makanan dan minuman	-	-	-
3.	Pemanfaatan sumber daya air dan energy			
	Penghematan air	-	-	-
	Pelestarian air	-	-	-
	Daur ulang air	-	-	-
	Penggunaan bahan ramah lingkungan-hindari kimia//B3	-	-	-
	Pendayagunaan energi bio dan diperbarukan	-	-	-
	Efisiensi transportasi	-	-	-
4.	Pengelolaan Sampah			
	<i>Reduce</i> (mengurangi sampah)	-	-	-
	<i>Reuse</i> (menggunakan ulang)	Bank Sampah Tuah Basamo Kapa dan Bank Sampah Induk DLH	8	4
	<i>Recycle</i> (mendaur ulang)	-	-	-
	<i>Replant</i> (menanam kembali)	-	-	-

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup Pasaman Barat

Catatan : Data tahun 2022 tidak tersedia

Bab VIII

Kekerasan Terhadap Perempuan dan Perlindungan Anak



BAB VIII

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

8.1 Kekerasan Terhadap Perempuan

Kekerasan pada perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi (Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap perempuan 1993).

Kekerasan pada perempuan yaitu setiap tindakan kekerasan berdasarkan gender yang menyebabkan kerugian atau penderitaan fisik, seksual atau psikologis terhadap perempuan, termasuk ancaman untuk melaksanakan tindakan tersebut dalam kehidupan masyarakat dan pribadi (Apong, dalam Martha 2003:113). Tindakan kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi sepanjang siklus kehidupan perempuan. Dalam bab ini kita akan membahas kekerasan terhadap perempuan, baik perempuan sebagai korban maupun pelaku kekerasan terhadap perempuan itu sendiri.

1. Perempuan Sebagai Korban

Tindakan kekerasan yang menempatkan seorang perempuan sebagai korban dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan. Kekerasan ini baik yang berupa kekerasan fisiko psikologis, finansial, spiritual, maupun seksual, terutama pada seorang perempuan dapat mengakibatkan dampak kesehatan yang sangat berat.

Dampak fisik umumnya tidak meneolok, tapi dampak psikologisnya yang pada umumnya cukup berat dan membutuhkan intervensi dari para profesional dibidang kesehatan, sosial, dan yuridis. Dalam bidang ynridis seorang perempuan yang mengalami masalah kekerasan mempunyai beberapa hak yang dapat dipergunakannya untuk melindungi agar dampak psikologis yang dialaminya tidak bertambah parah. Jika dilihat dari sisi perempuan sebagai korban, maka kekerasan tersebut dapat dibagi lagi ke dalam beberapa kelompok.

a. Kelompok Umur

Tabel 8.1 Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022

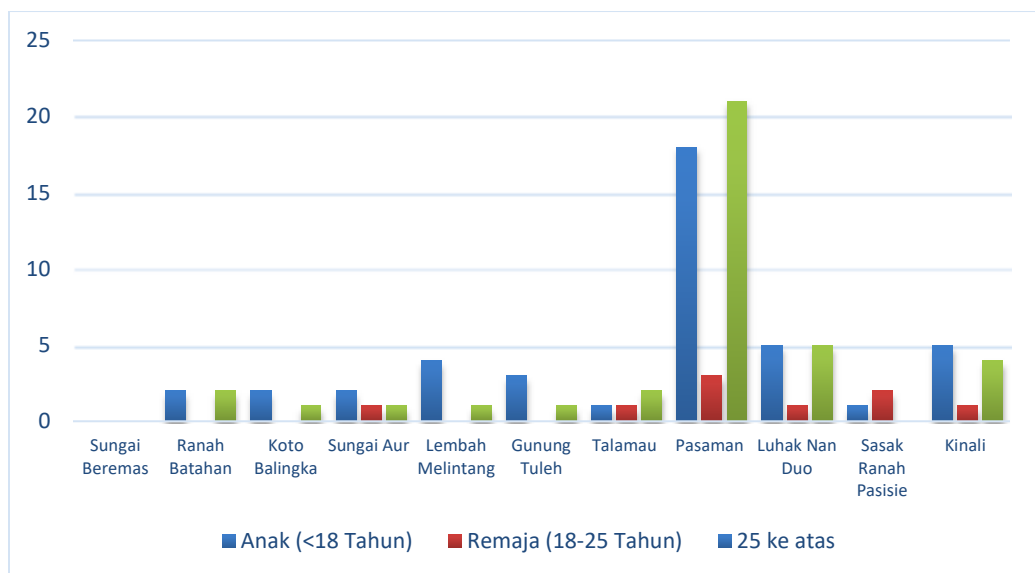
No	Kecamatan	Kelompok Umur			
		Anak (<18 Tahun)	Remaja (18-25 Tahun)	25 Tahun ke atas	Total
1	Sungai Beremas	-	-	-	0
2	Ranah Batahan	2	-	2	4
3	Koto Balingka	2	-	1	3
4	Sungai Aur	2	1	1	4
5	Lembah Melintang	4	-	1	5
6	Gunung Tuleh	3	-	1	4
7	Talamau	1	1	2	4
8	Pasaman	18	3	21	42
9	Luhak Nan Duo	5	1	5	11
10	Sasak Ranah Pasisie	1	2	-	3
11	Kinali	5	1	4	10
	Kab. Pasaman Barat	43	9	38	90

Sumber Data : UPPA Polres, P2TP2A Kab. Pasaman Barat

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa jumlah terbanyak korban kekerasan terhadap perempuan terjadi pada kelompok umur 18 tahun ke bawah. Terdapat 43 kasus kekerasan terhadap perempuan pada kelompok umur tersebut. Berdasarkan beberapa penelitian, penyebab utamanya adalah penyalahgunaan media sosial. Kasus paling banyak ada di Kecamatan Pasaman yakni 18 kasus.

Pada Kelompok umur Remaja (18-25) tahun merupakan kelompok umur yang paling sedikit mengalami kekerasan yakni hanya sebanyak 9 kasus. Hal ini disebabkan perempuan pada umur tersebut sudah bisa menjaga dan membela diri karena sudah masuk fase usia remaja dan dewasa. Sedangkan kekerasan terhadap perempuan pada kelompok umur 25 tahun ke atas cukup banyak terjadi yakni 38 kasus. Hal ini dikarenakan pada fase tersebut perempuan umumnya sudah berumah tangga dan KDRT merupakan kasus yang paling banyak mereka alami.

Gambar 8.1 Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022



Sumber Data : UPPA Polres, P2TP2A Kab. Pasaman Barat

Dari grafik terlihat bahwa kekerasan terhadap perempuan kerap terjadi pada kelompok umur anak (kurang dari 18 tahun). Menurut beberapa penelitian, terjadinya kekerasan ini disebabkan dari berbagai hal. Di antaranya budaya patriarki, ketidakadilan gender, kualitas yang hidup rendah. Lalu pola asuh yang salah, kemiskinan, tayangan media yang tidak medidik, dan gangguan psikologis-jiwa. Kecamatan yang paling banyak kasus kekerasan terhadap perempuan pada kelompok anak ada di Kecamatan Pasaman. Pada kecamatan ini merupakan kecamatan yang kepadatan penduduknya cukup tinggi.

b. Tingkat Pendidikan

Tabel 8.2 Korban Kekerasan terhadap Perempuan menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022

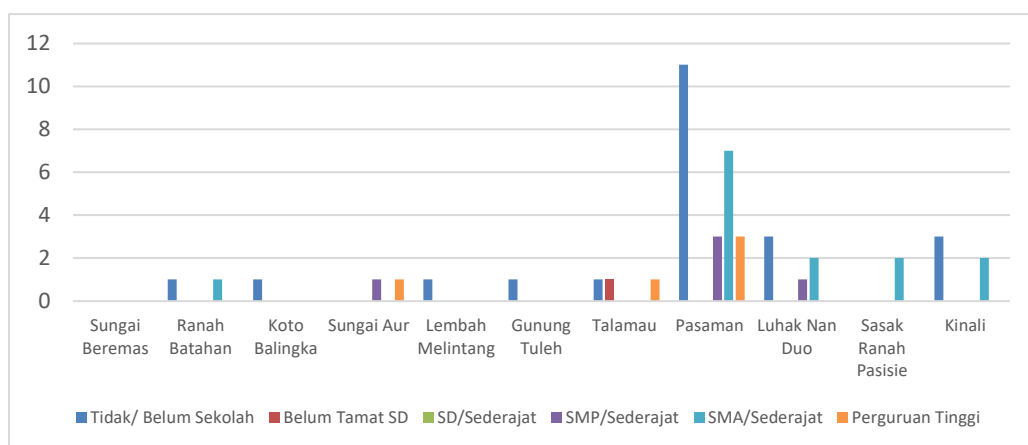
No	Kecamatan	Tingkat Pendidikan						Total
		Tidak/ Belum Sekolah	Belum Tamat SD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat	Perguruan Tinggi	
1	Sungai Beremas	-	-	-	-	-	-	-
2	Ranah Batahan	1	-	-	-	1	-	1
3	Koto Balingka	1	-	-	-	-	-	1
4	Sungai Aur	-	-	-	1	-	1	2
5	Lembah Melintang	1	-	-	-	-	-	1
6	Gunung Tuleh	1	-	-	-	-	-	1
7	Talamau	1	1	-	-	-	1	2
8	Pasaman	11	-	-	3	7	3	24
9	Luhak Nan Duo	3	-	-	1	2	-	6
10	Sasak Ranah Pasisie	-	-	-	-	2	-	2
11	Kinali	3	-	-	-	2	-	5
	Pasaman Barat	22	1	-	5	14	5	47

Sumber Data : UPPA Polres, P2TP2A Kab. Pasaman Barat

Perempuan yang menjadi korban dicatat disini adalah mereka yang berumur 18 tahun ke atas. Pada dasarnya kekerasan tidak memandang tingkat pendidikannya. Terlihat bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh banyak terhadap seseorang dalam mengalami tindakan kekerasan. Jika dilihat per kecamatannya, terlihat bahwa perempuan sebagai korban yang paling terbanyak ada di Kecamatan Pasaman yakni sebanyak 24 kasus.

Kecamatan Pasaman identik dengan masyarakat perkotaan, dimana Kecamatan Pasaman merupakan Ibukota Kabupaten Pasaman Barat. Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di perkotaan disebabkan akibat efek penggunaan media sosial. Perempuan terdidik, minimal SMA di perkotaan disebut lebih aktif menggunakan media sosial ketimbang mereka yang ada di pedesaan. Selain efek penggunaan media sosial, perilaku sosial perempuan di perkotaan dan pedesaan juga bisa menjadi sebab mengapa angka kekerasan terhadap perempuan selalu tinggi. Kontrol sosial di pedesaan dinilai lebih ketat ketimbang di perkotaan.

Gambar 8.2 Korban Kekerasan terhadap Perempuan menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022



Sumber Data : UPPA Polres, P2TP2A Kab. Pasaman Barat

Dari grafik di atas terlihat bahwa perempuan sebagai korban kekerasan tidak memandang tingkat Pendidikan, apakah ia berpendidikan tinggi atau rendah. Terlihat bahwa perempuan lulusan perguruan tinggi pun menjadi korban kekerasan. Apabila dilihat per kecamatan, perempuan korban kekerasan paling banyak terjadi di Kecamatan Pasaman dan Kecamatan Sasak Ranah Pasisie dengan tingkat Pendidikan korban adalah SD/Sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ Sederajat.

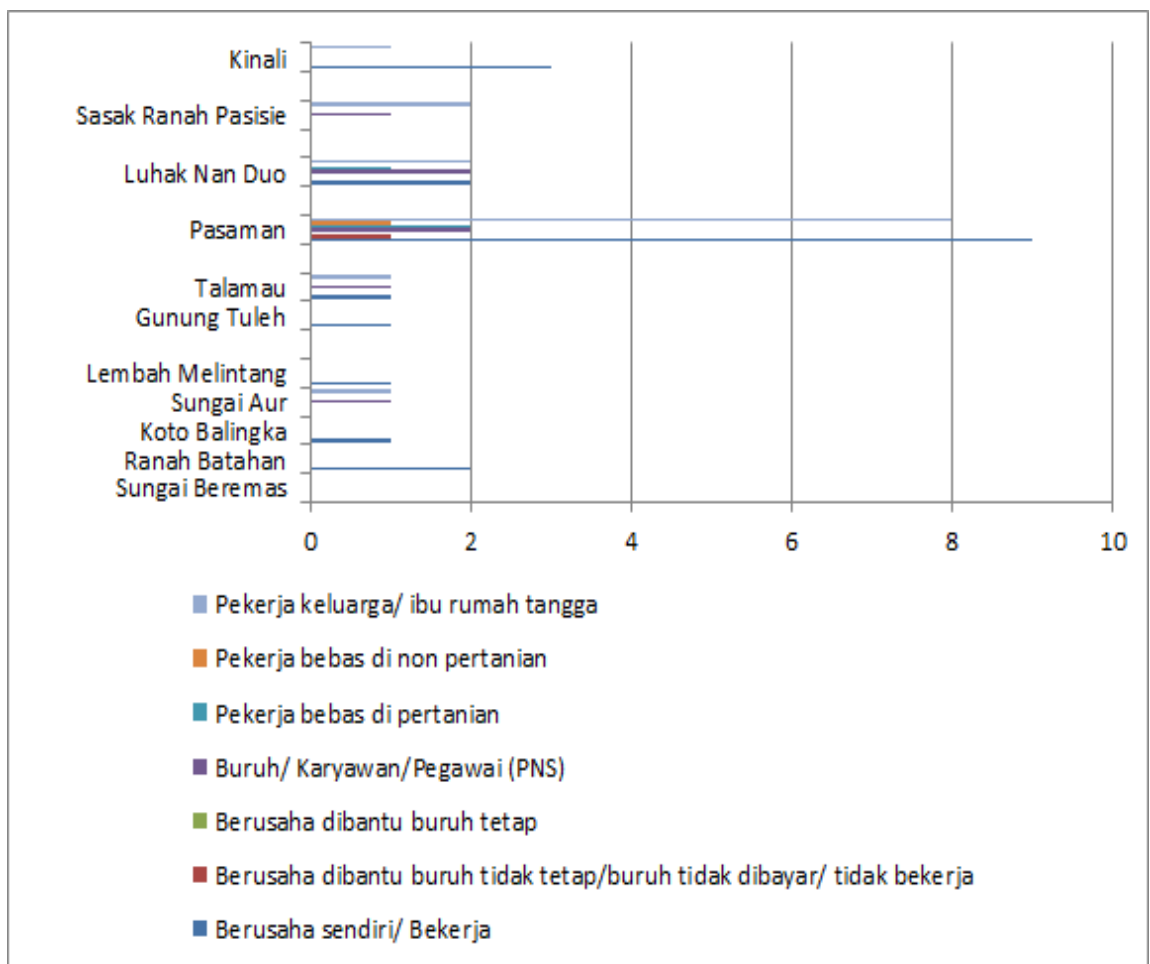
c. Status Pekerjaan

Tabel 8.3 Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Status Pekerjaan di Kab. Pasaman Barat Tahun 2022

No	Kecamatan	Status Pekerjaan								Total
		Berusaha sendiri/ Bekerja	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	Berusaha dibantu buruh tetap	Buruh/ Karyawan/ Pegawai (PNS)	Pekerja bebas di pertanian	Pekerja bebas di non pertanian	Pekerja keluarga/ ibu rumah tangga	Tidak bekerja	
1	Sungai Beremas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Ranah Batahan	2	-	-	-	-	-	-	-	2
3	Koto Balingka	1	-	-	-	-	-	-	-	1
4	Sungai Aur	-	-	-	1	-	-	1	-	2
5	Lembah Melintang	1	-	-	-	-	-	-	-	1
6	Gunung Tuleh	1	-	-	-	-	-	-	-	1
7	Talamau	1	-	-	1	-	-	1	-	3
8	Pasaman	9	1	-	2	2	1	8	-	23
9	Luhak Nan Duo	2	-	-	2	1	-	2	-	7
10	Sasak Ranah Pasisie	-	-	-	1	-	-	2	-	3
11	Kinali	3	-	-	-	-	-	1	-	4
Pasaman Barat		20	1	-	7	3	1	15	-	47

Sumber Data : UPPA Polres, P2TP2A Kab. Pasaman Barat

Dari tabel 8.3 di atas terlihat bahwa jumlah perempuan mengalami kekerasan ada sebanyak 47 orang. Jika dilihat dari status pekerjaan, yang paling banyak mengalami kekerasan adalah mereka yang bekerja sebagai Berusaha Sendiri/Bekerja dan Perempuan Tidak Bekerja yakni masing-masing sebanyak 20 orang. Apabila dilihat per kecamatan, Kecamatan Pasaman merupakan kecamatan yang paling banyak terjadi kekerasan terhadap perempuan yakni sebanyak 23 kasus.



d. Status Perkawinan

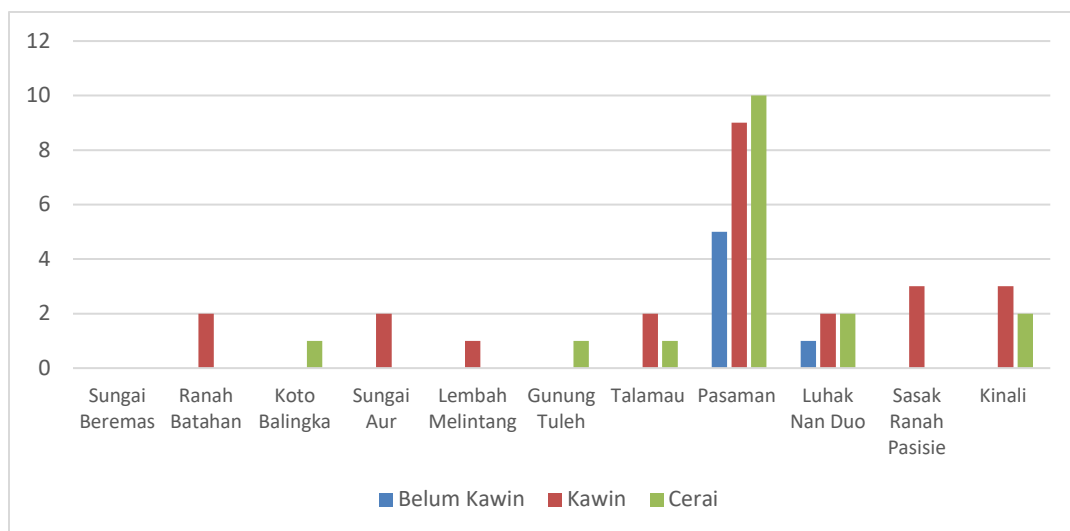
Tabel 8.4 Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Status Perkawinan di Kab. Pasaman Barat Tahun 2022

No	Kecamatan	Status Perkawinan		
		Belum Kawin	Kawin	Cerai
1	Sungai Beremas	-	-	-
2	Ranah Batahan	-	2	-
3	Koto Balingka	-	-	1
4	Sungai Aur	-	2	-
5	Lembah Melintang	-	1	-
6	Gunung Tuleh	-	-	1
7	Talamau	-	2	1
8	Pasaman	5	9	10
9	Luhak Nan Duo	1	2	2
10	Sasak Ranah Pasisie	-	3	-
11	Kinali	-	3	2
	Kab. Pasaman Barat	6	24	17

Sumber Data : UPPA Polres, P2TP2A Kab. Pasaman Barat

Berdasarkan data di atas, perempuan yang berstatus kawin lebih banyak mengalami kekerasan daripada perempuan yang belum kawin dan atau cerai. Pada tabel 8.4 diatas terlihat bahwa sebanyak 24 kasus kekerasan terhadap perempuan ada pada status kawin. Sedangkan perempuan belum kawin mengalami kekerasan lebih sedikit yakni 6 kasus dan perempuan yang sudah bercerai 17 kasus kekerasan. Hal ini membuktikan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) masih menjadi perhatian serius para perempuan apabila tidak ingin mengalami kekerasan terhadap dirinya. Selain KDRT, kekerasan terhadap perempuan yang berstatus kawin adalah penelantaran oleh pasangan atau tidak diberi nafkah.

Gambar 8.4 Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Status Perkawinan di Kab. Pasaman Barat Tahun 2022



Sumber Data : UPPA Polres, P2TP2A Kab. Pasaman Barat

Dari grafik di atas terlihat bahwa korban kekerasan terhadap perempuan paling banyak terjadi di Kecamatan Pasaman, baik yang berstatus belum kawin, kawin maupun cerai. Ada 24 kasus yang terjadi di Kecamatan Pasaman dengan rincian perempuan status belum kawin 5 orang, perempuan status kawin 9 orang dan perempuan status cerai sebanyak 10 orang. Kecamatan Pasaman yang merupakan Ibu Kota Kabupaten Pasaman Barat yang juga disebut daerah perkotaan menjadi salah satu alasan tingginya kekerasan terhadap perempuan. Salah satu alasannya adalah mobilisasi masyarakat, agresivitas masyarakat di perkotaan. Kemudian juga hubungan interaksi masyarakat di perkotaan. Ini yang menjadi salah satu faktor menyebabkan kenapa di wilayah perkotaan lebih tinggi daripada di pedesaan

e. Jenis Kekerasan

Tabel 8.5 Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Jenis Kekerasan di Kab. Pasaman Barat Tahun 2022

No	Kecamatan	Jenis Kekerasan					
		Fisik	Psikis	Seksual	TPPO	Penelantaran	Lainnya
1	Sungai Beremas	-	-	-	-	1	-
2	Ranah Batahan	2	1	-	-	-	-
3	Koto Balingka	-	1	-	-	1	-
4	Sungai Aur	1	1	-	-	-	-
5	Lembah Melintang	1	1	-	-	-	-
6	Gunung Tuleh	1	1	-	-	-	-
7	Talamau	2	1	-	-	1	-
8	Pasaman	11	8	2	-	11	-
9	Luhak Nan Duo	6	3	-	-	-	-
10	Sasak Ranah Pasisie	2	3	-	-	-	-
11	Kinali	3	-	1	-	3	-
	Pasaman Barat	29	20	3	-	17	-

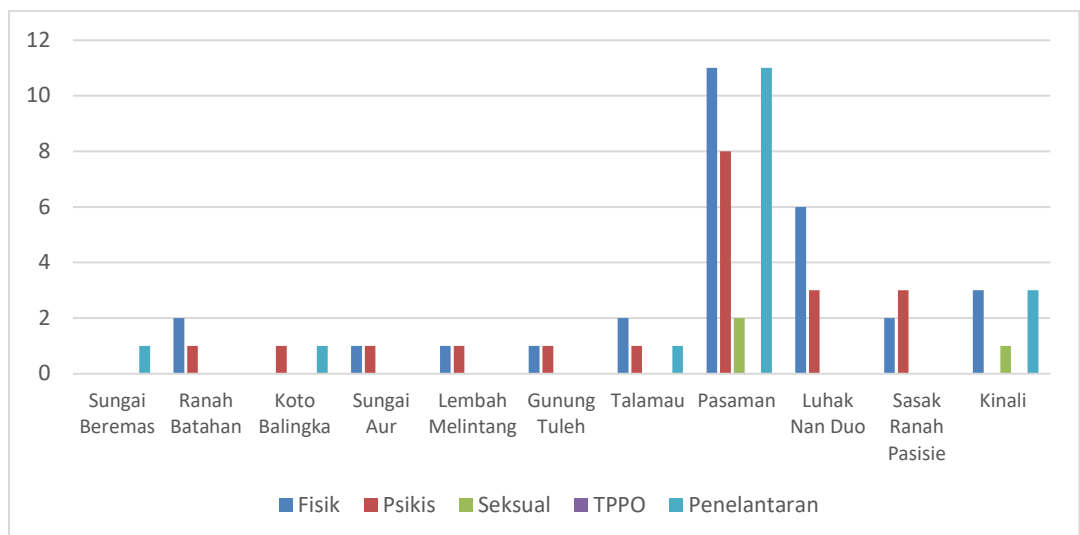
Sumber Data : UPPA Polres, P2TP2A Kab. Pasaman Barat

Berdasarkan tabel 8.5 diatas menunjukkan bahwa kekerasan yang paling sering dialami perempuan adalah kekerasan dalam bentuk fisik yakni sebanyak 29 kasus. Penyebab kekerasan fisik yang paling utama adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Selain itu terdapat juga kekerasan secara psikis sebanyak 20 kasus. Kekerasan psikis adalah tindakan yang bertujuan merendahkan citra seorang perempuan, baik melalui kata-kata maupun perbuatan yang menekan emosi korban semisal ucapan menyakitkan, kata-kata kotor, bentakan, hinaan atau ancaman.

Sedangkan kekerasan seksual yang dialami perempuan di Pasaman Barat ada sebanyak 3 kasus. Pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan bisa berasal dari orang-orang terdekat (seperti pasangan, pacar, kerabat, dan lain-lain) dan berada

dalam ranah privat. Walaupun angkanya tidak sebanyak kekerasan fisik, namun hal ini cukup menjadi perhatian Pemerintah Daerah karena dampak yang dialami oleh korban sangat dalam sekali. Selain itu terdapat 17 kasus berupa tindakan penelantaran dalam rumah tangga, pengabaian tanggung jawab, diskriminasi karena jenis kelamin, pemaksaan pernikahan, ingkar janji, perselingkuhan, poligami ilegal dan perceraian sepihak.

Gambar 8.5 Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Jenis Kekerasan di Kab. Pasaman Barat Tahun 2022



Sumber Data : UPPA Polres, P2TP2A Kab. Pasaman Barat

Dari grafik di atas terlihat bahwa kekerasan paling banyak terjadi di Kecamatan Pasaman dengan jenis kekerasan berupa Fisik, Psikis dan Penelantaran. Kecamatan Sungai Beremas merupakan kecamatan yang paling sedikit korban kekerasannya yakni 1 jenis kasus saja.

f. Tempat Kejadian

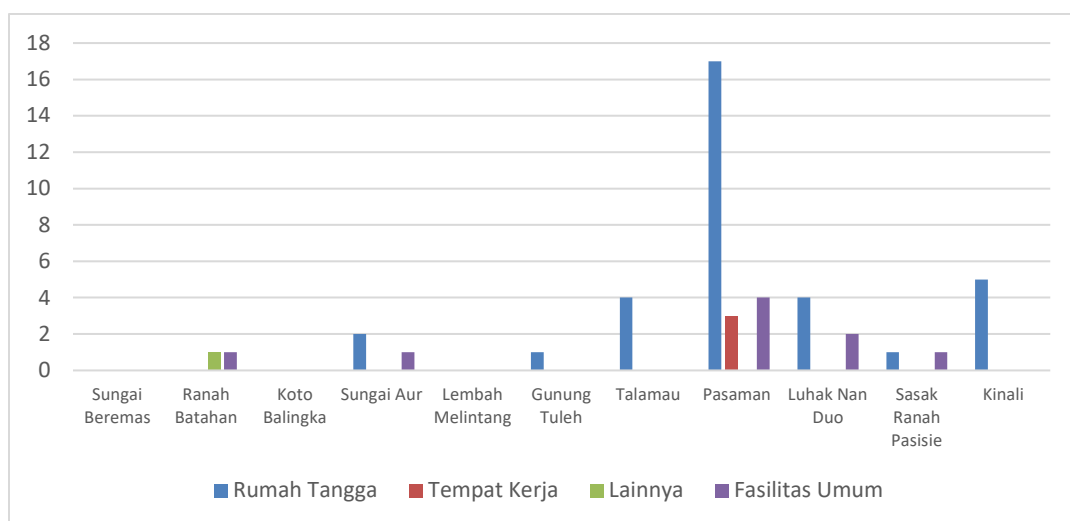
Tabel 8.6 Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Tempat Kejadian di Kab. Pasaman Barat Tahun 2022

No	Kecamatan	Tempat Kejadian			Fasilitas Umum
		Rumah Tangga	Tempat Kerja	Lainnya	
1	Sungai Beremas	-	-	-	-
2	Ranah Batahan	-	-	1	1
3	Koto Balingka	-	-	-	-
4	Sungai Aur	2	-	-	1
5	Lembah Melintang	-	-	-	-
6	Gunung Tuleh	1	-	-	-
7	Talamau	4	-	-	-
8	Pasaman	17	3	-	4
9	Luhak Nan Duo	4	-	-	2
10	Sasak Ranah Pasisie	1	-	-	1
11	Kinali	5	-	-	-
Pasaman Barat		34	3	1	9

Sumber Data : UPPA Polres, P2TP2A Kab. Pasaman Barat

Rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang paling aman dan nyaman bagi perempuan. Namun kenyataannya, bila dilihat dari tabel diatas, tidak semua perempuan merasa lebih aman dan nyaman berada dalam rumah tangganya. Berdasarkan data Polres dan P2TP2A Pasaman Barat tersebut terlihat bahwa ada sebanyak 34 kasus kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga (KDRT) dan terjadi ditempat kerja 3 kasus, pada fasilitas umum sebanyak 9 kasus dan kemudian kemudian tempat lainnya sebanyak 2 kasus.

Gambar 8.6 Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Tempat Kejadian di Kab. Pasaman Barat Tahun 2022



Sumber Data : UPPA Polres, P2TP2A Kab. Pasaman Barat

Dari grafik di atas terlihat bahwa Kecamatan Pasaman merupakan kecamatan tertinggi korban kekerasan terhadap perempuan. Rumah tangga ternyata merupakan tempat kekerasan terhadap perempuan terbanyak dibanding tempat lain. Di Kecamatan Pasaman, terdapat 17 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di rumah tangga yang disebut dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), selain itu juga terjadi di Tempat kerja dan Fasilitas Umum.

KDRT atau *domestic violence* merupakan kekerasan berbasis gender yang terjadi di ranah personal. Kekerasan ini banyak terjadi dalam hubungan relasi personal, dimana pelaku adalah orang yang dikenal baik dan dekat oleh korban, misalnya tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, ayah terhadap anak, paman terhadap keponakan, kakek terhadap cucu. Kekerasan ini dapat juga muncul dalam hubungan pacaran, atau dialami oleh orang yang bekerja membantu kerja-kerja rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Selain itu,

KDRT juga dimaknai sebagai kekerasan terhadap perempuan oleh anggota keluarga yang memiliki hubungan darah.

g. Jenis Pelayanan yang diberikan

Tabel 8.7 Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Jenis Pelayanan Yang Diberikan di Kab. Pasaman Barat Tahun 2022

No	Kecamatan	Jenis pelayanan yang diberikan				
		Penangana Pengaduan	Pelayanan Kesehatan	Rehabilitasi Sosial	Penegakan dan Bantuan Hukum	Pemulangan & Reintegrasi
1	Sungai Beremas	-	-	-	-	-
2	Ranah Batahan	1	-	-	1	-
3	Koto Balingka	1	-	-	-	-
4	Sungai Aur	-	-	-	2	-
5	Lembah Melintang	1	-	-	-	-
6	Gunung Tuleh	1	-	-	-	-
7	Talamau	1	1	-	2	-
8	Pasaman	11	1	-	13	-
9	Luhak Nan Duo	3	-	-	3	-
10	Sasak Ranah Pasisie	-	-	-	2	-
11	Kinali	3	-	-	2	-
	Pasaman Barat	22	2	0	25	-

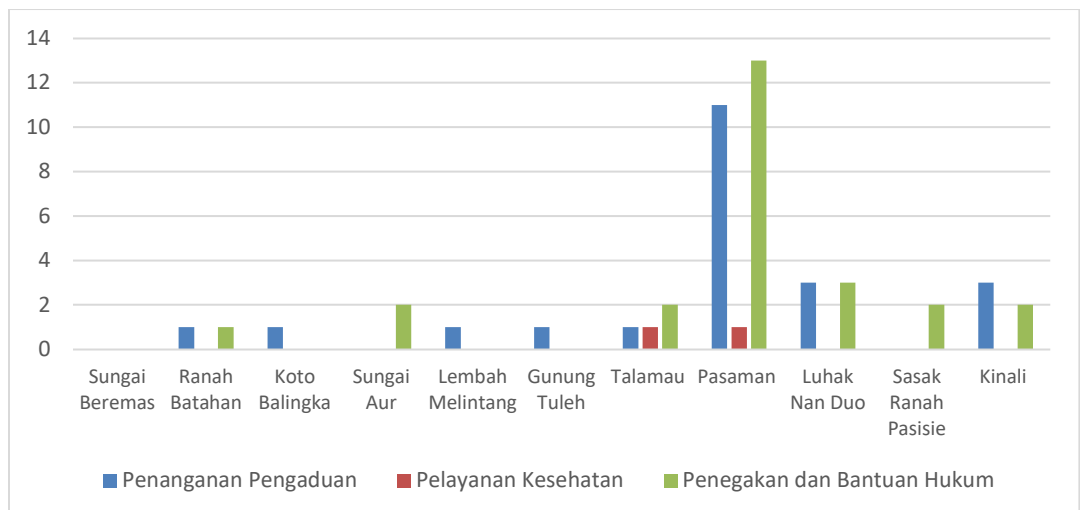
Sumber Data : UPPA Polres, P2TP2A Kab. Pasaman Barat

Polres Pasaman Barat selaku institusi yang bertugas melindungi kaum perempuan dari tindak kekerasan sudah melakukan berbagai hal dalam melindungi perempuan korban kekerasan. Dalam hal ini memberikan jenis pelayanan berupa Penegakan dan Bantuan Hukum. Yaitu memberikan kepastian hukum kepada pelaku kekerasan terhadap perempuan. Dengan terlebih dahulu menerima laporan pengaduan korban dalam bentuk Laporan Polisi, setelah mengumpulkan bukti yang cukup melalui proses penyelidikan dan Penyidikan,

serta telah menetapkan tersangka dalam Laporan Polisi tersebut selanjutnya melengkapi berkas perkara yang akan dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat, dan setelah berkas perkara dianggap lengkap selanjutnya terhadap pelaku akan disidangkan pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat.

Dari data diatas terlihat bahwa sudah 15 kasus yang ditangani oleh Polres Pasaman Barat yakni dalam bentuk penegakkan dan bantuan hukum. Adapun bantuan yang diberikan terhadap korban berupa menaikkan kasus sampai pengadilan terhadap pelaku serta melakukan pendampingan bersama pengacara. Kasus yang paling banyak ditangani berada di Kecamatan Pasaman yakni sebanyak 13 kasus. Adapun jenis pelayanan lainnya juga diberikan oleh P2TP2A antara lain penanganan pengaduan sebanyak 22 kasus dan Rehabilitasi Sosial sebanyak 2 kasus.

Gambar 8.7 Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Jenis Pelayanan Yang Diberikan di Kab. Pasaman Barat Tahun 2022



Sumber Data : UPPA Polres, P2TP2A Kab. Pasaman Barat

Kasus yang paling banyak ditangani oleh Polres Pasaman Barat dan P2TP2A Pasaman Barat adalah Penanganan Pengaduan dan Penegakan dan Bantuan Hukum. Kasus yang banyak terjadi ada di Kecamatan Pasaman.

h. Frekuensi Kekerasan

Tabel 8.8 Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Frekuensi Kekerasan di Kab. Pasaman Barat Tahun 2022

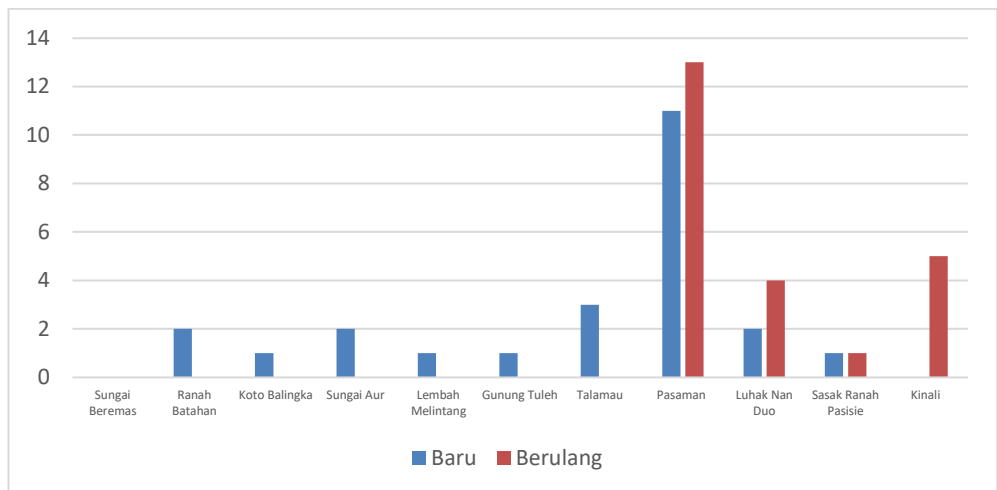
No	Kecamatan	Frekuensi Kekerasan		
		Baru	Berulang	Rujukan
1	Sungai Beremas	-	-	-
2	Ranah Batahan	2	-	-
3	Koto Balingka	1	-	-
4	Sungai Aur	2	-	-
5	Lembah Melintang	1	-	-
6	Gunung Tuleh	1	-	-
7	Talamau	3	-	-
8	Pasaman	11	13	-
9	Luhak Nan Duo	2	4	-
10	Sasak Ranah Pasisie	1	1	-
11	Kinali	-	5	-
	Kab. Pasaman Barat	24	23	-

Sumber Data : UPPA Polres, P2TP2A Kab. Pasaman Barat

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan bahwa banyak perempuan yang baru mengalami kekerasan baik secara fisik maupun secara psikis. Meskipun tidak sebanyak perempuan yang baru mengalami kekerasan, nyatanya kekerasan yang terjadi secara berulang juga banyak dialami oleh perempuan di Pasaman Barat . Hal ini membuktikan bahwa perempuan korban kekerasan sangat sulit untuk melepaskan diri dari Ingkaran kekerasan itu sendiri sehingga mereka mengalami

kekerasan secara berulang-ulang. Selain itu, sifat perempuan yang pemaaf membuat pasangannya kembali melakukan kekerasan yang berulang. Dari tabel tersebut terdapat 23 kasus kekerasan yang berulang dan 24 kasus kekerasan perempuan yang baru. Kasus kekerasan paling banyak terjadi di Kecamatan Pasaman, yaitu kekerasan baru sebanyak 24 kasus dan kasus berulang sebanyak 23 kasus.

Gambar 8.8 Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Frekuensi Kekerasan di Kab. Pasaman Barat Tahun 2022



Sumber Data : UPPA Polres, P2TP2A Kab. Pasaman Barat

Dilihat pada grafik di atas, kekerasan terhadap perempuan menurut frekuensi kekerasannya paling banyak merupakan kasus baru. Hanya empat kecamatan yang terdapat kasus berulang. Kekerasan paling banyak terjadi di kecamatan Pasaman, baik kasus kekerasan yang baru maupun kasus kekerasan yang berulang.

2. Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan terhadap perempuan tidak lepas dari relasi kuasa yang timpang.

Kasus kekerasan terhadap perempuan dapat berupa kekerasan dalam rumah tangga atau keluarga, ataupun kekerasan seksual. Pelaku kekerasan terhadap perempuan seringkali merupakan orang terdekat dari korban itu sendiri. Di sisi lain ada konteks budaya patriarki yang luar biasa. Kekerasan terhadap perempuan terjadi lintas kelas, lintas pendidikan, dan lintas elemen.

Angka kekerasan terhadap perempuan ini luar biasa tingginya. Ketika muncul angka kekerasan terhadap perempuan, itupun sebenarnya hanya sekedar kasus yang dilaporkan. Faktanya justru jauh lebih besar. Kekerasan seksual antara lain perkosaan, pemaksaan pelacuran atau perempuan yang dilacurkan, pelecehan seksual, perkawinan paksa. Perkawinan anak seringkali lekat dengan perkawinan paksa, dimana jika ditelusuri tidak ada anak yang sukarela menikah.

a. Tingkat Pendidikan

Tabel 8.9 Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Tingkat Pendidikan di Kab. Pasaman Barat Tahun 2022

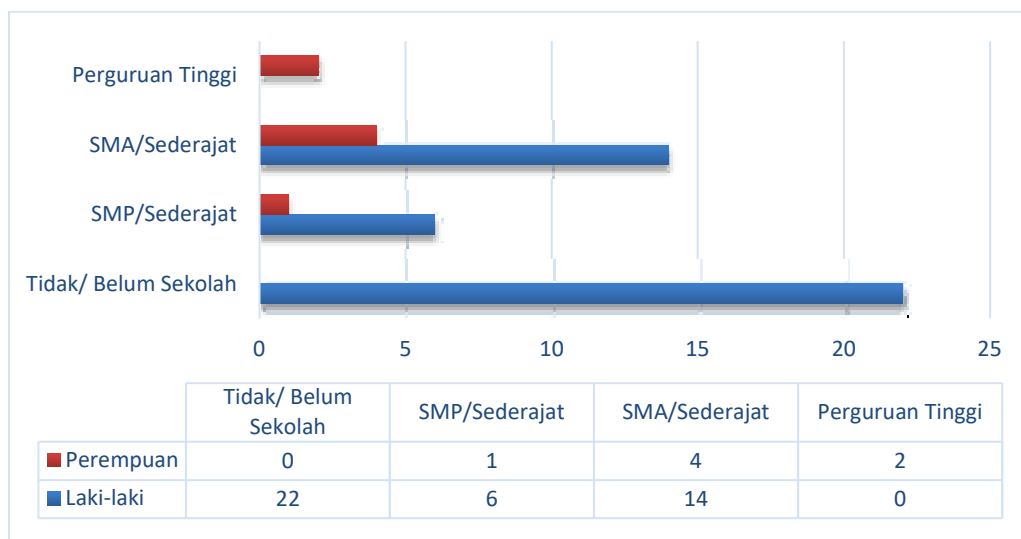
No	Kecamatan	Tidak/ Belum Sekolah		Belum Tamat SD		SD/ Sederajat		SMP/ Sederajat		SMA/ Sederajat		Perguruan Tinggi	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Sungai Beremas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Ranah Batahan	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
3	Koto Balingka	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Sungai Aur	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
5	Lembah Melintang	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Gunung Tuleh	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Talamau	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
8	Pasaman	11	-	-	-	-	-	3	-	9	1	-	2
9	Luhak Nan Duo	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
10	Sasak Ranah Pasisie	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
11	Kinali	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
Pasaman Barat		22	-	-	-	-	-	6	1	14	4	-	2

Sumber Data : UPPA Polres, P2TP2A Kab. Pasaman Barat

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah pelaku kekerasan terhadap perempuan sebanyak 49 orang, akan tetapi jika dilihat dari jumlah korban hanya berjumlah 47 orang. Yang menyebabkan lebih banyak pelaku dibandingkan jumlah korban karena dalam 1 kasus atau Laporan Polisi, ada pelaku yang lebih dari 1 orang. Pelaku tindak pidana kekerasan terhadap perempuan tidak hanya dari jenis kelamin laki-laki saja, melainkan dari sesama perempuan. Dapat dilihat dari tabel diatas, pelaku kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh laki-laki adalah sebanyak 42 orang, dan yang dilakukan oleh perempuan sendiri adalah sebanyak 7 orang. Pelaku yang paling banyak pada tingkat pendidikan Tidak/belum sekolah sebanyak 22

orang, SMP/ sederajat sebanyak 7 orang, SMA /sederajat sebanyak 18 orang, dan pelaku pada tingkat perguruan tinggi sebanyak 2 orang.

Gambar 8.9 Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Tingkat Pendidikan di Kab. Pasaman Barat Tahun 2022



Sumber Data : UPPA Polres, P2TP2A Kab. Pasaman Barat

Jika dilihat garafim di atas, pelaku kekerasan terhadap perempuan berdasarkan tingkat Pendidikan, maka yang paling banyak dilakukan oleh pelaku yang tidak/belum tamat sekolah. Dari grafik tersebut tidak menggambarkan hubungan antara pelaku kekerasan dengan tingkat pendidikan. Hal ini berarti, setiap orang berpeluang menjadi pelaku kekerasan terhadap perempuan tanpa memandang tingkat pendidikannya.

b. Status Pekerjaan

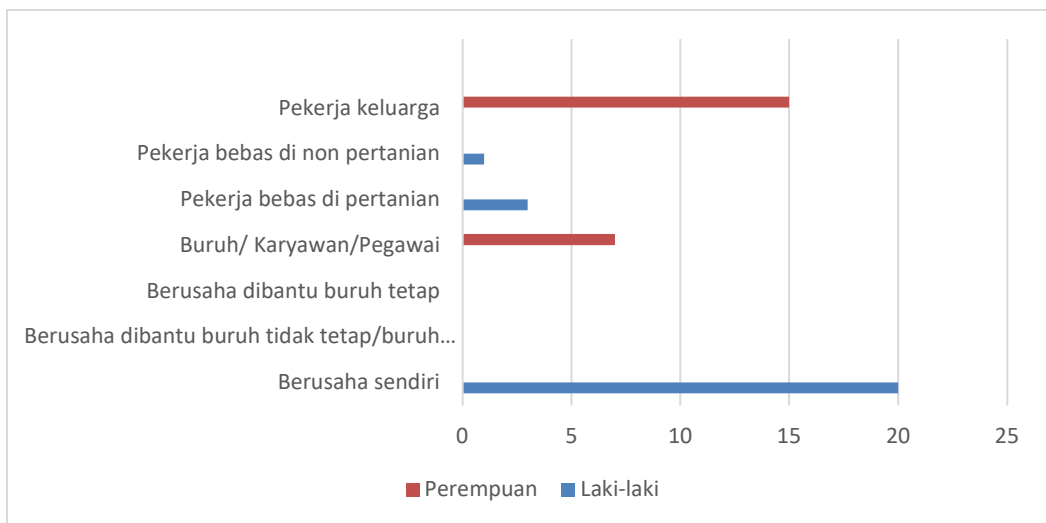
Tabel 8.10 Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Status Pekerjaan di Kab. Pasaman Barat Tahun 2022

No	Kecamatan	Berusaha sendiri		Berusaha dibantu buruh tetap/buruh tidak dibayar		Berusaha dibantu buruh tetap		Buruh/ Karyawan /Pegawai		Pekerja bebas di pertanian		Pekerja bebas di non pertanian		Pekerja keluarga	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Sungai Beremas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Ranah Batahan	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-
3	Koto Balingka	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Sungai Aur	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Lembah Melintang		-	-	-	-	-	-	1	-	-		-	-	1
6	Gunung Tuleh	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Talamau	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Pasaman	1	-	-	-	-	-	-	1			-	-	-	1
9	Luhak Nan Duo	9	-	1	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	8
10	Sasak Ranah Pasisie	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	2
11	Kinali	-	-	-	-	-	-	-	1		-		-	-	2
	Pasaman Barat	20	-	1	-	-	-	-	7	3	-	1	-	-	15

Sumber Data : UPPA Polres, P2TP2A Kab. Pasaman Barat

Pada tabel diatas terlihat status pekerjaan seseorang pelaku kekerasan tidak memandang status pekerjaannya. Terlihat status pekerjaan tidak berpengaruh banyak terhadap seseorang yang melakukan tindak kekerasan. Pelaku kekerasan paling banyak dilakukan oleh orang yang berusaha sendiri atau berwiraswasta sebanyak 18 orang. Kemudian 7 orang yang bekerja sebagai buruh/karyawan/PNS dan 2 orng pekerja disektor pertanian, 1 orang pekerja bebas di non pertanian, selanjutnya terdapat 15 orang yang bekerja sebagai pekerja keluarga/ibu rumah tangga.

Gambar 8.10 Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Status Pekerjaan di Kab. Pasaman Barat Tahun 2022



Sumber Data : UPPA Polres, P2TP2A Kab. Pasaman Barat

Grafik di atas menggambarkan bahwa pelaku kekerasan terhadap perempuan jika dilihat dari status pekerjaannya, yang paling banyak ialah mereka yang berusaha sendiri seperti pedagang, wirausahawan. Kemudian, pelaku terbanyak kedua adalah mereka yang bekerja sebagai pekerja keluarga. Tidak ada yang mendasari hubungan antara status pekerjaan dengan pelaku kekerasan terhadap perempuan. Akan tetapi, jika dilihat sekilas status pekerjaan yang berusaha sendiri dan pekerja keluarga adalah pekerjaan yang melibatkan perempuan itu sendiri di dalamnya.

c. Hubungan dengan Korban

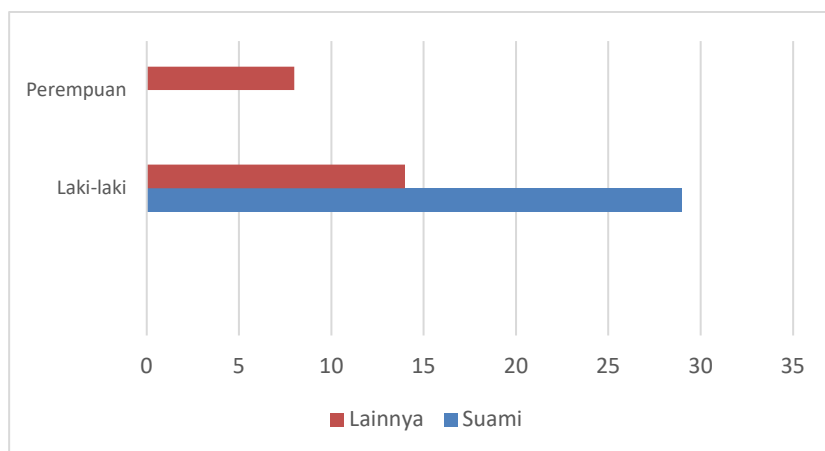
Tabel 8.11 Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Hubungan Dengan Korban di Kab. Pasaman Barat Tahun 2022

No	Kecamatan	Hubungan dengan Korban						
		Orang Tua		Keluarga		Suami	Lainnya	
		L	P	L	P		L	P
1	Sungai Beremas	-	-	-	-	-	-	-
2	Ranah Batahan	-	-	-	-	-	2	-
3	Koto Balingka	-	-	-	-	-	-	-
4	Sungai Aur	-	-	-	-	2	1	1
5	Lembah Melintang	-	-	-	-	-	-	-
6	Gunung Tuleh	-	-	-	-	1	1	-
7	Talamau	-	-	-	-	2	2	-
8	Pasaman	-	-	-	-	14	7	4
9	Luhak Nan Duo	-	-	-	-	4	1	1
10	Sasak Ranah Pasisie	-	-	-	-	1	-	2
11	Kinali	-	-	-	-	5	-	-
	Pasaman Barat	-	-	-	-	29	14	8

Sumber Data : UPPA Polres, P2TP2A Kab. Pasaman Barat

Berdasarkan tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak kekerasan yang paling sering terjadi terhadap perempuan adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Hal ini bisa dilihat pada data diatas dimana pelaku kekerasan terhadap perempuan paling banyak dilakukan oleh suaminya sendiri. Dari 47 kasus kekerasan, 29 kasus diantaranya dilakukan oleh suami korban sendiri, 18 kasus dilakukan oleh keluarga dan beberapa kasus disebabkan oleh hubungan lainnya seperti keluarga, teman, rekan kerja dan sebagainya.

Gambar 8.11 Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Hubungan Dengan Korban di Kab. Pasaman Barat Tahun 2022



Sumber Data : UPPA Polres, P2TP2A Kab. Pasaman Barat

d. Kebangsaan

Tabel 8.12 Pelaku Kekerasan terhadap Perempuan Menurut Kebangsaan di Kab. Pasaman Barat Tahun 2022

No.	Kecamatan	Kebangsaan			
		Indonesia		Asing	
		L	P	L	P
1	Pasaman Barat	42	8	-	-
	Pasaman Barat	42	8	-	-

Sumber Data : UPPA Polres, P2TP2A Kab. Pasaman Barat

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa seluruh pelaku kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2022 dilakukan oleh Warga Negara Indonesia (WNI).

8.2 Perlindungan Terhadap Anak

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Sedangkan Perlindungan anak didefinisikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pada hakikatnya, perlindungan terhadap anak adalah agar anak dapat menikmati hak-hak mereka, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, sosial-budaya, hukum, dan keberlangsungan hidup, serta memperoleh perlindungan yang memadai. Salah satu yang perlu diperhatikan misalnya kepemilikan akta lahir, karena kepemilikan akta lahir sangat penting sebagai identitas awal sebagai warga negara Indonesia.

a. Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak adalah tindak kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan emosional, atau pengabaian terhadap anak. Di Amerika Serikat, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) mendefinisikan penganiayaan anak sebagai setiap tindakan atau serangkaian tindakan wali atau kelalaian oleh orang tua atau pengasuh lainnya yang dihasilkan dapat membahayakan, atau berpotensi bahaya, atau memberikan ancaman yang berbahaya kepada anak.

Sebagian besar terjadi kekerasan terhadap anak di rumah anak itu sendiri dengan jumlah yang lebih kecil terjadi di sekolah, di lingkungan atau organisasi tempat anak berinteraksi. Ada empat kategori utama tindak kekerasan terhadap

anak yakni pengabaian, kekerasan fisik, pelecehan emosional/psikologis, dan pelecehan seksual anak.

b. Jenis Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak dapat mengambil beberapa bentuk. Empat jenis utama adalah kekerasan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran. Kekerasan fisik adalah agresi fisik diarahkan pada seorang anak oleh orang dewasa. Hal ini dapat melibatkan meninju, memukul, menendang, mendorong, menampar, membakar, membuat memar, menarik telinga atau rambut, menusuk, membuat tersedak atau menguncang seorang anak.

Penelantaran anak adalah di mana orang dewasa yang bertanggung jawab gagal untuk menyediakan kebutuhan memadai untuk berbagai keperluan, termasuk fisik (kegagalan untuk menyediakan makanan yang cukup, pakaian, atau kebersihan), emosional (kegagalan untuk memberikan pengasuhan atau kasih sayang), pendidikan (kegagalan untuk mendaftarkan anak di sekolah), atau medis (kegagalan untuk mengobati anak atau membawa anak ke dokter).

Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau pelanggaran yang dilakukan oleh remaja yang lebih tua terhadap seorang anak untuk mendapatkan stimulasi seksual. Bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya), paparan senonoh dari alat kelamin kepada anak, menampilkan pornografi kepada anak, kontak seksual yang sebenarnya terhadap anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak, melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik, atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak.

Dari semua kemungkinan bentuk pelecehan, pelecehan emosional adalah yang paling sulit untuk didefinisikan. Itu bisa termasuk nama panggilan, ejekan, degradasi, perusakan harta benda, penyiksaan atau perusakan terhadap hewan peliharaan, kritik yang berlebihan, tuntutan yang tidak pantas atau berlebihan, pemutusan komunikasi, dan pelabelan sehari-hari atau penghinaan.

Tabel 8.13 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak Menurut Kecamatan dan Jenis Kekerasan Tahun 2022

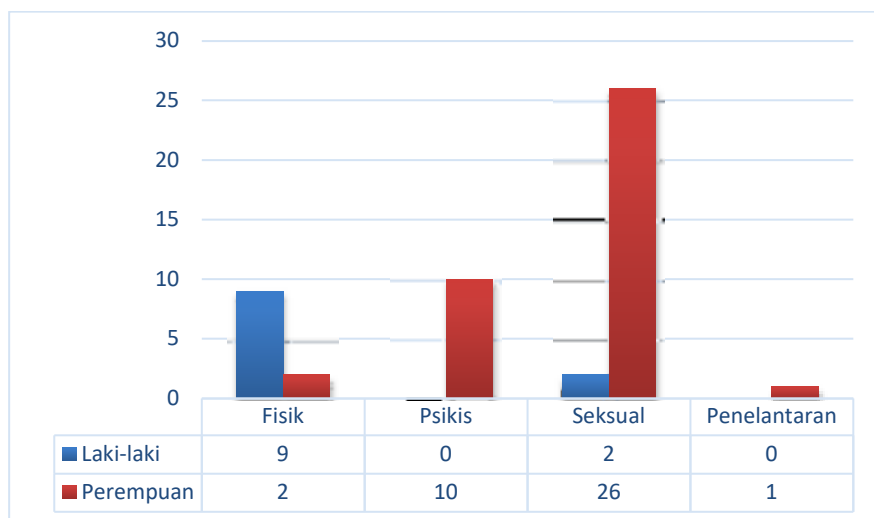
No	Kecamatan	Jenis Kekerasan											
		Fisik		Psikis		Seksual		Eksploi-tasi		Penelan-taran		Lainnya	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Sungai Beremas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Ranah Batahan	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-
3	Koto Balingka	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
4	Sungai Aur	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-
5	Lembah Melintang	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
6	Gunung Tuleh	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
7	Talamau	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
8	Pasaman	3	1	-	5	1	11	-	-	-	-	-	-
9	Luhak Nan Duo		-	-	2	1	2	-	-	-	-	-	-
10	Sasak Ranah Pasisie	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
11	Kinali	1	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
	Pasaman Barat	9	2	-	10	2	26	-	-	-	1	-	-

Sumber Data : UPPA Polres, P2TP2A Kab. Pasaman Barat

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa jenis kekerasan terhadap anak yang paling banyak terjadi adalah kekerasan seksual terhadap anak yakni sebanyak 43 korban, sebagian besar perempuan sebanyak 39 orang dan laki-laki sebanyak 14 orang. Banyak hal yang menyebabkan kekerasan terhadap anak diantaranya pengaruh buruk media sosial (tidak bisa mengontrol media sosial tersebut) dan ada

juga penyimpangan perilaku seksual dari pelaku. Selain kekerasan seksual, anak-anak juga mengalami kekerasan fisik.

Gambar 8.12 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak Menurut Kecamatan dan Jenis Kekerasan Tahun 2022



Sumber Data : UPPA Polres, P2TP2A Kab. Pasaman Barat

Dari grafik di atas tergambar bahwa kekerasan terhadap anak paling banyak terjadi adalah kekerasan seksual dan paling banyak terjadi terhadap perempuan. Selain kekerasan seksual, kekerasan psikis juga banyak terjadi terhadap anak terutama anak perempuan. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian khusus para orang dewasa bahwasanya pelaku kekerasan terhadap anak khususnya anak perempuan rentan terjadi terutama anak perempuan.

c. Tempat Kejadian Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak bisa terjadi di mana saja. Pelakunya bukan hanya orang lain, tapi juga orang terdekat. Namun, tahukan bahwa ada beberapa tempat paling krusial terjadinya kekerasan pada anak dimana saja itu. Tabel berikut ini menyajikan data kekerasan terhadap anak menurut tempat kejadian.

Tabel 8.14 Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Menurut Kecamatan dan Tempat Kejadian Tahun 2022

No	Kecamatan	Tempat Kejadian			
		Rumah	Lingkungan	Sekolah	Lainnya
1	Sungai Beremas	-	-	-	-
2	Ranah Batahan	1	1	1	-
3	Koto Balingka	2	-	-	-
4	Sungai Aur	1	1	-	-
5	Lembah Melintang	1	-	-	3
6	Gunung Tuleh	2	-	1	-
7	Talamau	1	-	-	-
8	Pasaman	9	7	-	3
9	Luhak Nan Duo	4	-	1	-
10	Sasak Ranah Pasisie	-	-	1	-
11	Kinali	-	1	2	2
	Pasaman Barat	21	10	6	8

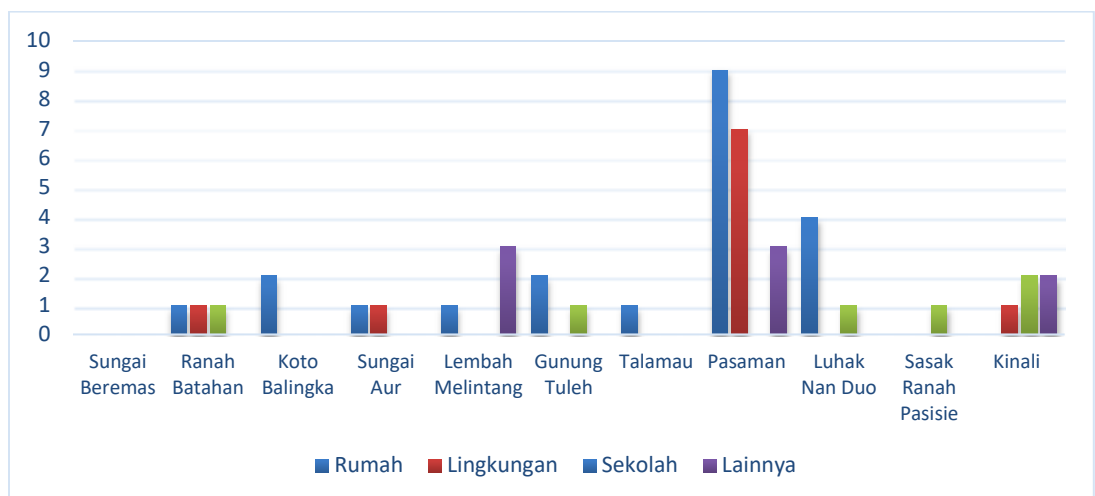
Sumber Data : UPPA Polres, P2TP2A Kab. Pasaman Barat

Dari data di atas terlihat bahwa sebagian besar kekerasan terhadap anak lingkungan tempat tinggal. Dari tabel diatas menunjukkan bahwa lingkungan tempat tinggal anak juga berperan besar dalam penyebab kekerasan terhadap anak yakni 43 orang. Kekerasan tersebut bisa didapatkan dari teman sebaya atau bahkan orang yang lebih dewasa. Tempat kekerasan terhadap anak yang biasa terjadi selanjutnya adalah sekolah.

Dari tabel diatas terlihat bahwa ada 6 orang anak mengalami tindak kekerasan di sekolah. Kekerasan tersebut bisa dilakukan oleh teman sekolah atau bahkan juga guru sekolahnya. Selain itu, ada 8 kasus terjadi di tempat lainnya. Hampir semua lingkungan menjadi tidak aman bagi anak. Tempat terjadinya kekerasan terhadap anak yang selanjutnya adalah terjadi dirumahnya sendiri dimana ada 21 kasus kekerasan.

Faktanya adalah 73,7 Persen Anak Indonesia Mengalami Kekerasan di Rumahnya Sendiri. Meski disertai dalih "mendidik anak", k ekerasan terhadap anak tak sepatutnya dianggap sebagai kewajiban. Menghukum anak dengan kekerasan pun bisa diimbuhi pembenaran bahwa yang dilakukan adalah "pukulan sayang" atau "hukuman yang masuk akal." Dianggap sebagai hal yang galib, tindakan kekerasan terhadap anak menembus batas kelas, status sosial, ekonomi, dan budaya di seluruh dunia.

Gambar 8.13 Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Menurut Kecamatan dan Tempat Kejadian Tahun 2022



Sumber Data : UPPA Polres, P2TP2A Kab. Pasaman Barat

Dari grafik terlihat bahwa Kecamatan Pasaman merupakan kecamatan paling tinggi terjadi kekerasan terhadap anak. Tempat terjadinya kekerasan terhadap anak paling sering terjadi di rumah dimana hampir semua kecamatan punya kasus serupa. Selain rumah, tempat kekerasan terhadap anak dilihat dari sisi korbannya juga sering terjadi di lingkungan seperti lingkungan tempat tinggal. Apa yang kita yakini saat ini bahwa rumah dan lingkungannya merupakan tempat teraman anak, ternyata berbanding terbalik dengan kenyataannya.

d. Lembaga Layanan Yang Menangani Kekerasan Terhadap Anak

Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, upaya hukum perlindungan terhadap anak sudah banyak mengalami kemajuan. Hal ini ditandai dengan ditetapkan dan disahkannya beberapa peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak. Pemerintah juga memfasilitasi kepada lembaga kemasyarakatan dalam upaya penguatan lembaga dan jejaring serta kemitraan untuk peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak.

Salah satu upaya tersebut adalah pembentukan Forum Lembaga Layanan yang melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga yang bergerak di bidang perlindungan anak. Forum Lembaga Layanan Perlindungan Anak ini adalah suatu wadah untuk meningkatkan kerjasama antar lembaga layanan, meningkatkan koordinasi dan membangun jaringan kemitraan sehingga dapat meningkatkan efektifitas layanan terhadap perempuan dan anak.

Tabel 8.15 Jumlah Lembaga Layanan Yang Menangani Anak Korban Kekerasan Menurut Kabupaten Tahun 2022

No	Kabupaten	LBH	UPPA	Trauma Center	Women Crisis Center	Shelter	Rumah Singgah	RPSA	Panti Asuhan Anak
1	Pasaman Barat	-	32	-	-	-	-	-	-
	Pasaman Barat	-	32	-	-	-	-	-	-

Sumber Data : UPPA Polres, P2TP2A Kab. Pasaman Barat

e. Sifat Lembaga Layanan Anak Korban Kekerasan

Kekerasan terhadap anak sudah berada pada tahap yang sangat mengkhawatirkan yang berdampak buruk bagi masa depan bangsa dan negara. Karena anak adalah aset bangsa dan merupakan generasi penerus bangsa, maka anak yang mengalami kekerasan perlumendapatkan penanganan secara optimal untuk mengembalikannya ke kondisinormal diperlukan suatu kebijakan berupa pedoman penanganan kekerasanterhadap anak sebagai acuan bagi pemerintah dan masyarakat dalam memberikan pelayanan terhadap anak yang mengalami kekerasan sesuai yang dibutuhkan. Berikut ini merupakan tabel Lembaga yang Menangani Anak Korban Kekerasan Menurut Sifatnya.

Tabel 8.16 Lembaga yang Menangani Anak Korban Kekerasan Menurut Sifatnya di Kab. Pasaman Barat Tahun 2022

No	Kabupaten	Lembaga Layanan	Sifat Lembaga Layanan	
			Satu Atap	Berjejaring
1	Pasaman Barat	PPT	-	-
2		P2TP2A	-	1
3		RPSA	1	-
4		RPTC	-	-
5		Shelter/Rumah Singgah	-	-

Sumber Data : UPPA Polres, P2TP2A Kab. Pasaman Barat

f. Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Menurut Jenis Layanan Yang Diberikan

Anak korban kekerasan telah diberikan pelayanan yang maksimal oleh pemerintah daerah, seperti yang terlihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 8.17 Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak menurut Kecamatan Jenis Pelayanan Yang Diberikan dan Jenis kelamin Tahun 2022

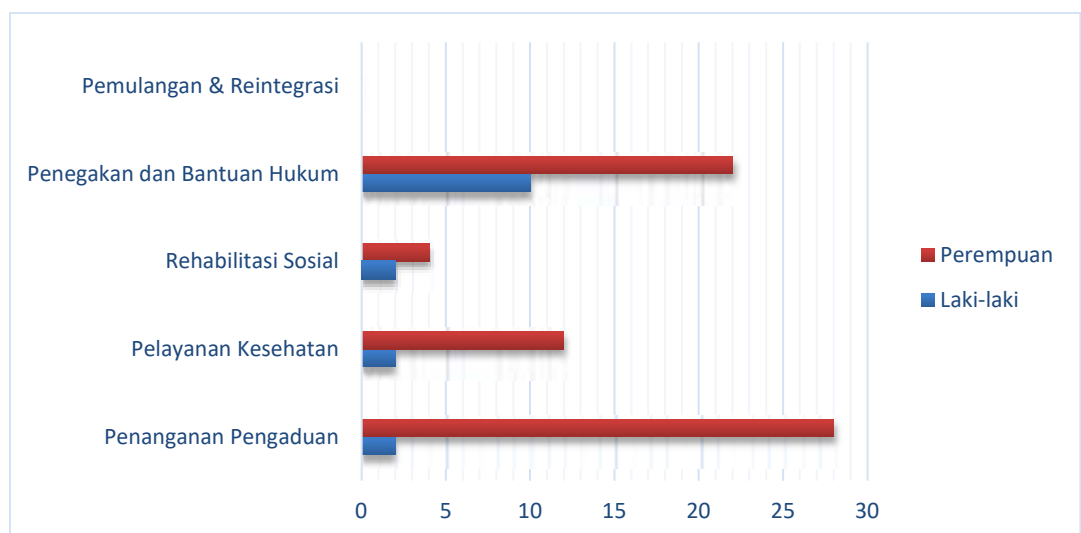
No	Kecamatan	Jenis pelayanan yang diberikan									
		Penanganan Pengaduan		Pelayanan Kesehatan		Rehabilitasi Sosial		Penegakan dan Bantuan Hukum		Pemulangan & Reintegrasi	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Sungai Beremas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Ranah Batahan	-	2	-	2	2	2	-	1	-	-
3	Koto Balingka	-	3	-	2	-	2	-	2	-	-
4	Sungai Aur	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
5	Lembah Melintang	-	2	-	1	-	-	3	1	-	-
6	Gunung Tuleh	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
7	Talamau	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
8	Pasaman	-	15	2	4	-	-	3	9	-	-
9	Luhak Nan Duo	-	3	-	1	-	-	2	1	-	-
10	Sasak Ranah Pasisie	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Kinali	-	2	-	2	-	-	1	4	-	-
	Pasaman Barat	2	28	2	12	2	4	10	22	-	-

Sumber Data : UPPA Polres, P2TP2A Kab. Pasaman Barat

Pelayanan kepada anak korban kekerasan yang paling banyak dilakukan adalah memberikan bantuan hukum. Dari tabel diatas terlihat bahwa sebanyak 32 orang anak telah diberikan bantuan hukum. Polres Pasaman Barat dalam hal ini memberikan jenis pelayanan berupa Penegakan dan Bantuan Hukum. Yaitu memberikan kepastian hukum kepada pelaku kekerasan terhadap anak. Dengan

terlebih dahulu menerima laporan pengaduan korban dalam bentuk Laporan Polisi, setelah mengumpulkan bukti yang cukup melalui proses penyelidikan dan Penyidikan, serta telah menetapkan tersangka dalam Laporan Polisi tersebut selanjutnya melengkapi berkas perkara yang akan dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat dan setelah berkas perkara dianggap lengkap selanjutnya terhadap pelaku akan disidangkan pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat.

Gambar 8.14 Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak menurut Kecamatan Jenis Pelayanan Yang Diberikan dan Jenis kelamin Tahun 2022



Sumber Data : UPPA Polres, P2TP2A Kab. Pasaman Barat

Korban kekerasan terhadap anak sudah banyak dibantu oleh pemerintah mulai dari penanganan pengaduan sampai bantuan hukum. Dari grafik di atas terlihat bahwa jumlah korban yang dilayani pengaduannya tidak jauh berbeda dengan penegakan dan bantuan hukum terhadap korban. Jika tren ini terus meningkat, tidak tertutup kemungkinan para anak sebagai korban kekerasan akan lebih tergerak untuk mengadukan apa yang mereka alami.

g. Pelaku

Kekerasan terhadap anak adalah peristiwa perlukaan fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak. Oleh karena itu tidak jarang pelaku kekerasan terhadap anak adalah orang-orang terdekat dari korban itu sendiri baik itu yang berada dalam lingkungan keluarga, tempat tinggal dan bahkan juga lingkungan sekolahnya. Melakukan kekerasan terhadap anak berarti melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, dengan sanksi pidana berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Kekerasan pada anak bisa memunculkan masalah fisik maupun psikologis pada si anak di kemudian harinya. Secara fisik mungkin bisa dilihat dari sekujur tubuhnya ada tanda tanda bekas kekerasan. Secara psikis, anak yang menjadi korban kekerasan dapat mengalami masalah kejiwaan seperti : gangguan stres pasca trauma, depresi, cemas, dan psikotik. Orang tua sering sekali tidak menyadari atau terlambat mengetahui bahwa anaknya menjadi korban kekerasan. Oleh karena itu penting bagi orang tua untuk mengenali tanda dan gejala kemungkinan anak menjadi korban kekerasan.

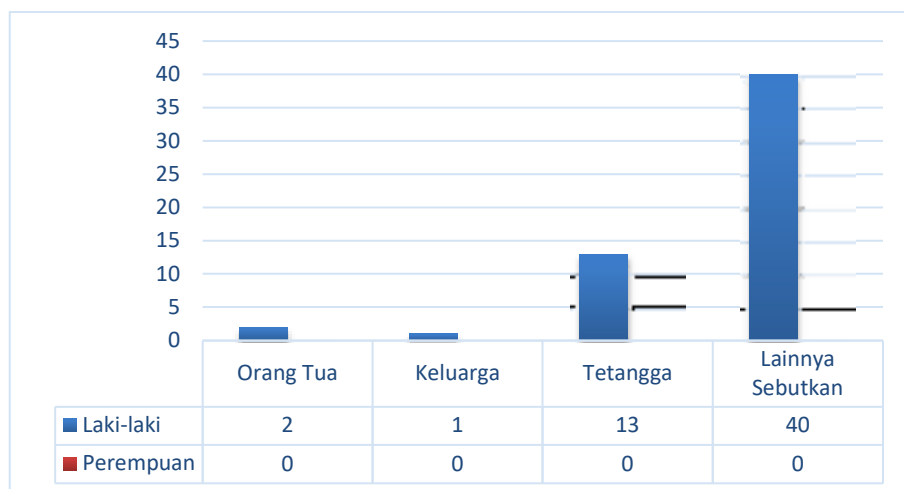
Tabel 8.18 Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Menurut Hubungan Pelaku dan Jenis Kelamin Tahun 2022

No	Kecamatan	Hubungan Pelaku									
		Orang Tua		Keluarga		Tetangga		Petugas di sekolah		Lainnya Sebutkan	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Sungai Beremas	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
2	Ranah Batahan	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
3	Koto Balingka	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
4	Sungai Aur	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
5	Lembah Melintang	-	-	-	-	1	-	-	-	4	-
6	Gunung Tuleh	1	-	-	-	1	-	-	-	2	-
7	Talamau	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
8	Pasaman	-	-	-	-	7	-	-	-	16	-
9	Luhak Nan Duo	-	-	-	-	1	-	-	-	5	-
10	Sasak Ranah Pasisie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Kinali	1	-	-	-	-	-	-	-	7	-
	Pasaman Barat	2	-	1	-	13	-	-	-	40	-

Sumber Data : UPPA Polres, P2TP2A Kab. Pasaman Barat

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah pelaku kekerasan terhadap anak paling banyak dilakukan oleh bukan orang terdekat korban seperti teman atau bahkan orang yang tidak dikenal yakni sebanyak 40 orang dan ini mengindikasikan bahwa diluar sana masih sangat rawan keselamatan anak. Orang tua juga menjadi pelaku kekerasan terhadap anak yakni sebanyak 2 orang, sedangkan keluarga dan tetangga juga menjadi pelaku kekerasan terhadap anak yang masing-masing sebanyak 1 orang dan 13 orang.

Gambar 8.15 Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Menurut Hubungan Pelaku dan Jenis Kelamin Tahun 2022



Sumber Data : UPPA Polres, P2TP2A Kab. Pasaman Barat

Garafik di atas menggambarkan pelaku kekerasan terhadap anak yang semuanya dilakukan oleh laki-laki. Pelaku kekerasan paling banyak adalah Lainnya yaitu bisa jadi teman, atau bahkan orang yang tidak dikenal.

h. Anak Terlantar

Di dalam UUD 1945 Pasal 34 dikatakan sebagai berikut “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara” yang artinya adalah pemerintah dan Negara mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk pemeliharaan dan pembinaan dalam melindungi fakir miskin dan anak terlantar. Seringkali masyarakat seolah mengabaikan dengan adanya fakir miskin dan anak terlantar dan dianggap tidak penting dan tidak ikut andil dalam pembangunan bangsa.

Anak terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan

ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.

Kriteria:

1. Berasal dari keluarga fakir miskin;
2. Anak yang dilalaikan oleh orang tuanya; dan
3. Anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Pada tahun 2020, menurut data Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat tidak terdapat laporan anak terlantar, seperti yang terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 8.19 Jumlah Anak Terlantar Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2022

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Total
		L	P	
1	Sungai Beremas	0	0	0
2	Ranah Batahan	0	0	0
3	Koto Balingka	0	0	0
4	Sungai Aur	0	0	0
5	Lembah Melintang	0	0	0
6	Gunung Tuleh	0	0	0
7	Talamau	0	0	0
8	Pasaman	0	0	0
9	Luhak Nan Duo	0	0	0
10	Sasak Ranah Pasisie	0	0	0
11	Kinali	0	0	0
	Pasaman Barat	0	0	0

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa tidak ada anak terlantar di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022.

i. Kepemilikan Akta Kelahiran

Akta kelahiran atau bisa disebut dengan akta lahir adalah tanda bukti berisi pernyataan yang teramat sangat penting dan diperlukan guna mengatur dan menyimpan bahan keterangan tentang kelahiran seorang bayi dalam bentuk selembarnya kertas yang sudah dicetak. Setiap kalinya, istilah seperti ini dapat mengacu kepada setiap catatan resmi berlandaskan undang-undang yang resmi menetapkan hal-hal mengenai kelahiran seorang anak dan juga berlaku pada salinan lembaran pencatatan akta lahir yang dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.

Tabel 8.20 Jumlah Anak Yang Berumur Dibawah 18 Tahun Dengan Kepemilikan Akta Lahir Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2022

No.	Kecamatan	Memiliki Akta Lahir			Tidak Memiliki Akta Lahir			Total (Memiliki Akte dan Tidak Memiliki Akte)
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	
1	Sungai Beremas	5.582	5.072	10.654	5.349	4.847	10.196	20.850
2	Lembah Melintang	9.967	9.359	19.326	9.752	9.160	18.912	38.238
3	Pasaman	14.160	13.386	27.546	13.923	13.213	27.136	54.682
4	Talamau	5.430	5.004	10.434	5.330	4.912	10.242	20.676
5	Kinali	13.733	12.731	26.464	13.403	12.454	25.857	52.321
6	Gunung Tuleh	4.735	4.404	9.139	4.634	4.306	8.940	18.079
7	Raah Batahan	5.199	5.009	10.208	5.033	4.845	9.878	20.086
8	Koto Balingka	6.159	5.797	11.956	6.027	5.673	11.700	23.656
9	Sungai Aur	7.174	6.647	13.821	6.981	6.488	13.469	27.290
10	Luhak Nan Duo	8.067	7.452	15.519	7.848	7.244	15.092	30.611
11	Sasak Ranah Pasisie	2.755	2.520	5.275	2.695	2.477	5.172	10.447
	Pasaman Barat	82.961	77.381	160.342	80.975	75.619	156.594	316.936

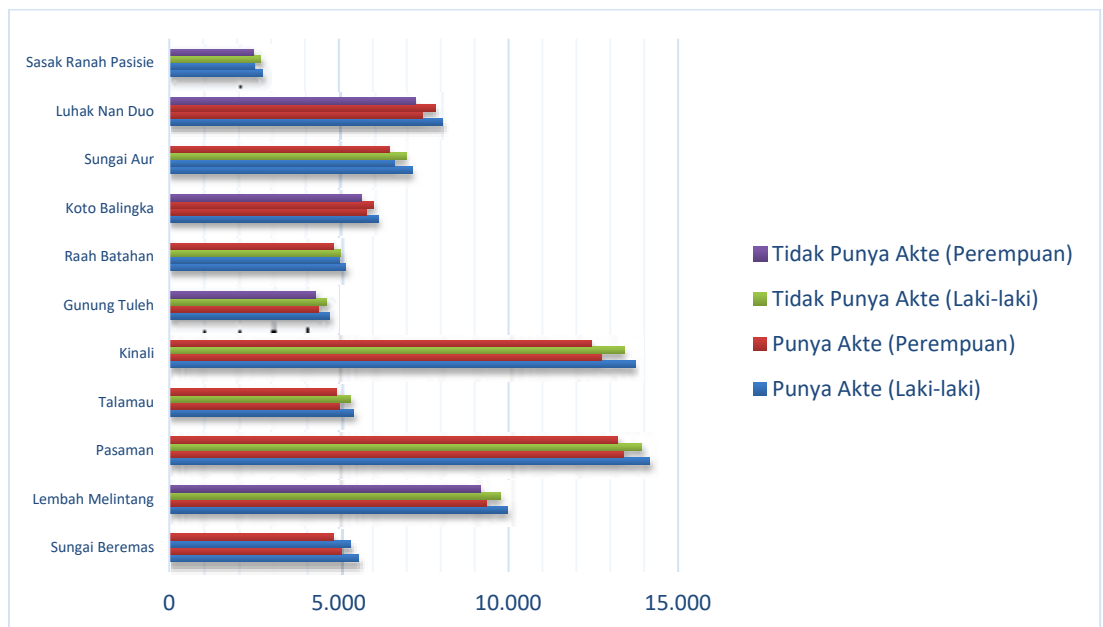
Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Seperti dapat dilihat pada Tabel 8.21, anak laki-laki yang memiliki akta kelahiran sedikit lebih tinggi dibanding anak perempuan yaitu masing masing sebesar 82.961 jiwa untuk laki-laki dan 77.381 jiwa untuk perempuan. Jumlah anak yang memiliki akta kelahiran terendah ada di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie yakni sebesar 5.275 orang dari jumlah anak dibawah usia 18 tahun.

Jumlah anak yang memiliki akta kelahiran sebanyak 160.342 jiwa dari 164.090 jiwa. Jumlah anak yang belum memiliki akte kelahiran juga cukup tinggi. Tercatat sebanyak 156.594 orang anak yang belum memiliki akte kelahiran, yang terdiri dari 80.975 anak laki-laki dan 75.619 anak perempuan. Hal ini tentunya masih menjadi perhatian Pemerintah Daerah karena masih banyaknya anak dibawah usia 18 tahun yang belum memiliki akta lahir.

Karena alasan tertentu, informasi penyebab ketidakpunyaan akta kelahiran tidak dapat ditampilkan pada buku ini. Namun demikian, seperti hal yang sering kita ketahui alasan ketidakpunyaan biaya diperkirakan masih menjadi penyebab utama ketidakpunyaan akta kelahiran baik pada anak laki- laki dan anak perempuan. Dengan telah adanya biaya gratis pada setiap pembuatan akta kelahiran, seperti yang diatur pada UU nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan perubahan UU nomor 24 tahun 2013 tentang akta kelahiran, maka penekanan sosialisasi kepada orang tua terutama yang tinggal pada wilayah dan akses yang sulit, menjadi sangat penting untuk dilaksanakan. Selain sosialisasi, pemberian reward bagi orang tua yang akan mendaftarkan anaknya yang lahir untuk dibuatkan akta kelahiran mungkin bukan hal yang tabu untuk dilakukan.

Gambar 8.16 Jumlah Anak Yang Berumur Dibawah 18 Tahun Yang Memiliki Akta Lahir Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2022



Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Jika dibandingkan antara jumlah anak di bawah 18 tahun yang sudah memiliki Akte Kelahiran dan yang belum hampir sama, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Hampir di setiap kecamatan menunjukkan grafik yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa masih belum program pembuatan akte kelahiran belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat di seluruh kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat. Berbanding lurus dengan jumlah penduduknya, jumlah anak dibawah 18 tahun, baik yang sudah punya akte kelahiran maupun yang belum memiliki berada di Kecamatan Pasaman, Kecamatan Kinali dan Kecamatan lembah Melintang.

j. Lingkungan Keluarga & Pengasuhan Alternatif

Seorang anak adalah harapan orang tua yang berharga. Dalam rangka untuk mendapatkan anak yang sehat dan cerdas sesuai dengan pertumbuhan mereka, anak-anak perlu dipenuhi haknya baik untuk fisik, psikologis, kebutuhan sosial dan spiritual. Dalam pertumbuhan dan perkembangannya, anak memerlukan peran orang dewasa baik itu orang tuanya untuk memenuhi kebutuhannya seperti kebutuhan makan, perawatan, pendidikan, bimbingan, perasaan aman dan pencegahan penyakit. Namun pada kenyataannya tidak semua orangtua dapat menjalankan fungsinya dengan baik, sehingga mereka merasa perlu mengalihkan tanggung jawab tersebut pada orang lain atau lembaga sosial, seperti orangtua asuh atau panti asuhan.

Pengasuhan alternatif merupakan pengasuhan berbasis keluarga pengganti atau berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang dilaksanakan oleh pihak-pihak di luar keluarga inti atau kerabat anak. Pengasuhan alternatif bisa dilakukan melalui sistem orang tua asuh (fostering), wali (guardianship) atau pengangkatan anak dan pada pilihan terakhir adalah pengasuhan berbasis residential (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak). Pengasuhan tersebut, kecuali pengangkatan anak, bersifat sementara, dan apabila setelah melalui asesmen, orang tua atau keluarga besar atau kerabat anak dianggap sudah mampu untuk mengasuh anak, maka anak akan dikembalikan kepada asuhan dan tanggung jawab mereka.

Tujuan dari pengasuhan alternatif, termasuk yang dilakukan melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus diprioritaskan untuk menyediakan lingkungan yang dapat memenuhi kebutuhan kasih sayang anak, kelekatan (attachment), dan permanensi melalui keluarga pengganti

Tabel 8.21 Jumlah Anak Yang Ditampung di Panti Asuhan dan Non Panti Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	Sungai Beremas	-	-	-
2	Ranah Batahan	68	60	128
3	Koto Balingka	38	77	115
4	Sungai Aur	37	20	57
5	Lembah Melintang			
6	Gunung Tuleh	16	14	30
7	Talamau	57	58	115
8	Pasaman	8	5	16
9	Luhak Nan Duo	-	-	-
10	Sasak Ranah Pasisie	-	-	-
11	Kinali	-	-	-
Pasaman Barat		222	239	461

Sumber : Dinas Sosial Tahun 2022

Data Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 mencatat jumlah anak perempuan yang ditampung di panti asuhan dan non panti sebanyak 461 orang yang terdiri dari jumlah anak perempuan yang ditampung di panti asuhan dan non panti sebanyak 239 orang (51,84 %). Sedangkan jumlah anak laki – laki yang ditampung di panti asuhan dan non panti sebanyak 222 orang (11,16%). Anak – anak ditampung pada 9 panti asuhan yatim piatu yang tesebar pada 6 Kecamatan.

Adapun anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif adalah anak yang berada pada situasi sebagai berikut:

1. Keluarga anak tidak memberikan pengasuhan yang memadai sekalipun dengan dukungan yang sesuai, mengabaikan, atau melepaskan tanggung jawab terhadap anaknya

2. Anak yang tidak memiliki keluarga atau keberadaan keluarga atau kerabat tidak diketahui.
3. Anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, penelantaran, atau eksploitasi sehingga demi keselamatan dan kesejahteraan diri mereka, pengasuhan dalam keluarga justru bertentangan dengan kepentingan terbaik anak.
4. Anak yang terpisah dari keluarga karena bencana, baik konflik sosial maupun bencana alam.

Kabupaten Pasaman Barat mempunyai 9 Panti Asuhan Yatim Piatu pada 6 kecamatan, seperti yang terlihat pada table dibawah ini :

Tabel 8.22 Jumlah Panti Asuhan Yatim Piatu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Panti Asuhan Anak Yatim Piatu
1	Sungai Beremas	-
2	Ranah Batahan	2
3	Koto Balingka	2
4	Sungai Aur	-
5	Lembah Melintang	1
6	Gunung Tuleh	1
7	Talamau	2
8	Pasaman	1
9	Luhak Nan Duo	-
10	Sasak Ranah Pasisie	-
11	Kinali	-
Pasaman Barat		9

Sumber : Dinas Sosial Tahun 2022

8.3 Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)

Anak berkebutuhan khusus (Heward) adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukan pada ketidakmampuan mental, emosi atau fisik. Yang termasuk kedalam ABK antara lain: tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, gangguan prilaku, anak berbakat, anak dengan gangguan kesehatan, dan kesulitan bersosialisasi. istilah lain bagi anak berkebutuhan khusus adalah anak luar biasa dan anak cacat. Karena karakteristik dan hambatan yang dimiliki, ABK memerlukan bentuk pelayanan pendidikan khusus yang disesuaikan dengan kemampuan dan potensi mereka, contohnya bagi tunanetra mereka memerlukan modifikasi teks bacaan menjadi tulisan Braille (tulisan timbul) dan tunarungu berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat (bahasa tubuh).

Salah satu perlindungan khusus diberikan kepada anak penyandang cacat atau Anak Berkebutuhan Khusus di bidang pendidikan adalah adanya Sekolah Luar Biasa untuk anak-anak tersebut. Jumlah Anak berkebutuhan khusus yang tercatat oleh Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat secara rinci dapat dilihat pada Tabel berikut.

a. Sekolah Luar Biasa

Sekolah Luar Biasa (SLB) adalah lembaga pendidikan yang merupakan bagian terpadu dari sistem pendidikan nasional yang secara khusus diselenggarakan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental sosial, tetapi memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Sekolah luar biasa merupakan bagian dari lembaga pendidikan yang mampu mewadahi dan menyelenggarakan pendidikan secara khusus untuk anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus pula. Sekolah Luar Biasa menyelenggarakan pendidikan untuk peserta didik dengan kebutuhan khusus seperti tunanetra, tunarungu dan tunawicara, tunadaksa, tunalaras, tunaganda dan anak terbelakangan.

Tabel 8.23 Jumlah SLB Negeri dan Swasta Menurut Kabupaten Tahun 2022
Kabupaten Pasaman Barat

No	Kabupaten	SLB Negeri				Jumlah	SLB Swasta				Jumlah
		TK	SD	SMP	SMA		TK	SD	SMP	SMA	
1	Sungai Beremas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Ranah Batahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Koto Balingka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Sungai Aur	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
5	Lembah Melintang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Gunung Tuleh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Talamau	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
8	Pasaman	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2
9	Luhak Nan Duo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Sasak Ranah Pasisie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Kinali	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	Pasaman Barat	-	1	-	-	1	-	4	-	-	4

Sumber Data : referensi.data.kemdikbud.go.id

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa Sekolah Luar Biasa di Kabupaten Pasaman Barat hanya masih terbatas pada Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB). Sedangkan untuk jenjang TK, SMP dan SMA masih belum tersedia. Ada beberapa hal yang menyebabkan belum tersedianya jenjang pendidikan tersebut diantaranya masih rendahnya kemauan orang tua untuk memasukkan anaknya ke Sekolah Luar Biasa, tenaga pengajar yang terbatas dan penyebab eksternal lainnya. Dari 3 SLB yang ada, 1 SLB Negeri berada di Kecamatan Sungai Aur (di SLB Sungai Aur juga menerima jenjang pendidikan SMPLB dan SMALB) serta 2 SLB Swasta berada di Kecamatan Pasaman (*SLB Ummi Khaira*) dan Kinali (*SLB Baitul Fattahu*).

Tabel 8.24 Jumlah Siswa SLB Negeri dan Swasta Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2022

No	Kabupaten	SLB Negeri								Jumlah
		TK		SD		SMP		SMA		
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Pasaman Barat			19	17					36

Sumber Data : referensi.data.kemdikbud.go.id

Lanjutan

No	Kabupaten	SLB Swasta								Jumlah
		TK		SD		SMP		SMA		
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Pasaman Barat			68	56					124

Sumber Data : referensi.data.kemdikbud.go.id

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah siswa SLB Negeri sebanyak 36 yang terdiri dari 19 orang laki-laki dan 17 orang perempuan. Semuanya adalah siswa SDLB Negeri Sungai Aur. Sedangkan jumlah siswa SLB Swasta sebanyak 124 orang yang terdiri dari 68 orang laki-laki dan 56 orang perempuan.

Tabel 8.25 Jumlah Guru SLB Negeri dan Swasta Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2022

No	Kabupaten	SLB Negeri								Jumlah
		TK		SD		SMP		SMA		
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Pasaman Barat	-	-	2	9	-	-	-	-	11

Sumber Data : referensi.data.kemdikbud.go.id

Lanjutan

No	Kabupaten	SLB Swasta								Jumlah
		TK		SD		SMP		SMA		
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Pasaman Barat	-	-	1	17	-	-	-	-	18

Sumber Data : referensi.data.kemdikbud.go.id

Terbatasnya jumlah tenaga pengajar membuat Sekolah Luar Biasa sulit berkembang dan dipercaya para orang tua anak berkebutuhan khusus. Dari 5 sekolah SLB yang ada, jumlah guru di SLB Negeri ada 11 orang yang terdiri 2 orang guru laki-laki dan 9 orang guru perempuan. Begitu juga halnya dengan SLB Swasta, terdiri 1 orang guru laki-laki dan 17 orang guru perempuan.

b. Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)

Anak berkebutuhan khusus (Heward) adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi atau fisik. Yang termasuk kedalam ABK antara lain: tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, gangguan prilaku, anak berbakat, anak dengan gangguan kesehatan, dan kesulitan bersosialisasi. istilah lain bagi anak berkebutuhan khusus adalah anak luar biasa dan anak cacat. Karena karakteristik dan hambatan yang dimiliki, ABK memerlukan bentuk pelayanan pendidikan khusus yang disesuaikan dengan kemampuan dan potensi mereka, contohnya bagi tunanetra mereka memerlukan modifikasi teks bacaan menjadi tulisan Braille (tulisan timbul) dan tunarungu berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat (bahasa tubuh).

Tabel 8.26 Jenis dan Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Tahun 2022

No	Kecamatan	Jenis ABK (Anak Berkebutuhan Khusus)									
		Tuna Netra		Tuna Rungu		Tuna Grahita		Tuna Daksa/ Cacat Fisik		Tuna Laras	
		P	L	P	L	P	L	P	L	P	L
1	Sungai Beremas	-	-	-	-	-	-	4	3	-	-
2	Ranah Batahan	-	-	-	-				1	2	-
3	Koto Balingka	-	-	-	-	3	2	4	11	-	-
4	Sungai Aur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Lembah Melintang	-	-	-	-	-	-	1	6	-	-
6	Gunung Tuleh	6	5	3	1	-	1	27	26	2	6
7	Talamau	1	-	-	-	-	-	14	18	-	1
8	Pasaman	4	2	2	-	8	21	15	23	-	4
9	Luhak Nan Duo	-	1	-	-	1	4	6	21	-	
10	Sasak Ranah Pasisie	2		3	1		3	9	5	-	2
11	Kinali	1	1	3	7	8	10	8	9	-	1
Pasaman Barat		14	9	11	9	20	41	88	123	2	2

Lanjutan

No	Kecamatan	Jenis ABK (Anak Berkebutuhan Khusus)									
		Kecerdasan diatas rata-rata		Tuna Ganda		Autis		Gangguan Pemusatan Perhatian dan Hiperaktivitas/GP PH		Lamban Belajar	
		P	L	P	L	P	L	P	L		
1	Sungai Beremas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Ranah Batahan	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
3	Koto Balingka	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
4	Sungai Aur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Lembah Melintang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Gunung Tuleh	-	-	-	2	6	-	-	-	-	-
7	Talamau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Pasaman	-	-	-	3	1	2	-	-	-	-
9	Luhak Nan Duo	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-
10	Sasak Ranah Pasisie	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
11	Kinali	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
Pasaman Barat		-	-	-	7	10	3	3	-	-	-

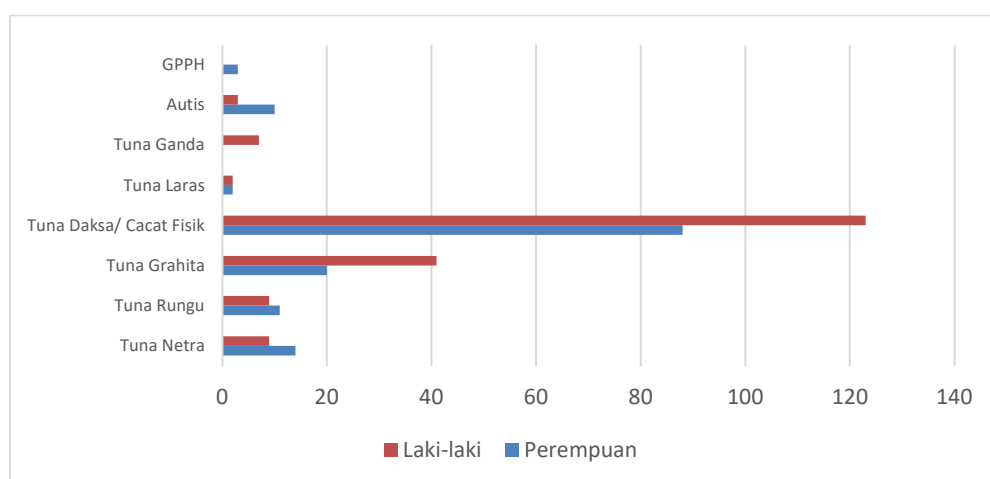
Lanjutan

No	Kecamatan	Jenis ABK			
		Kesulitan Belajar		Gangguan Komunikasi	
		P	L	P	L
1	Sungai Beremas	-	-	-	-
2	Ranah Batahan	-	-	-	-
3	Koto Balingka	-	-	-	-
4	Sungai Aur	-	-	-	-
5	Lembah Melintang	-	-	-	-
6	Gunung Tuleh	-	-	-	-
7	Talamau	-	-	-	-
8	Pasaman	-	-	-	-
9	Luhak Nan Duo	-	-	-	-
10	Sasak Ranah Pasisie	-	-	-	-
11	Kinali	-	-	-	-
Pasaman Barat		-	-	-	-

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat

Data Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 mencatat ada 359 orang Anak Berkebutuhan Khusus, dimana banyak terdapat pada Tunadaksa/cacat fisik dengan total sebanyak 211 orang (58,33%), dengan rincian Perempuan berjumlah 38 orang (41,70%) dan laki laki berjumlah 123 orang (58,29%). Urutan kedua diikuti oleh Tuna grahita dengan jumlah sebanyak 61 orang dengan jumlah perempuan 20 orang (32,78%) dan laki laki berjumlah 41 orang (67,21%). Dan Urutan Ketiga terbanyak diikuti oleh ABK Tunaganda dengan jumlah 32 orang (8,91%) dengan rincian jumlah anak perempuan berjumlah 10 orang (31,25%) dan laki laki berjumlah 22 (68,75%). Selanjutnya data Tuna Netra berjumlah 23 orang dengan rincian anak perempuan sebanyak 14 orang (60,86%) dan laki laki berjumlah 9 orang (39,13%). Data Tunarungu berjumlah sebanyak 28 orang dengan jumlah perempuan 11 orang (55,0%) dan laki laki berjumlah 9 orang (45,0%). Data anak autis sebanyak 8 orang dengan jumlah perempuan 4 orang (50%) dan laki laki 4 orang (50%). Data Anak Tunalaras sebanyak 4 orang dengan jumlah anak perempuan 2 (50%) orang dan laki laki 2 orang (50%).

Gambar 8.17 Jenis dan Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Tahun 2022



Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat

8.4 Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)

Anak yang berhadapan dengan hukum menurut Pasal 1 ayat (2) UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban hukum, dan anak sebagai saksi tindak pidana.

Mengacu pada pasal tersebut, anak yang berhadapan dengan hukum terdiri dari :

1. Anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana, yaitu anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana, yaitu anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan dialaminya sendiri.

Dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak belum genap berumur 18 tahun dan diajukan tetapi belum mencapai umur 21 tahun, anak tersebut tetap diajukan ke persidangan anak. Dengan mempertimbangkan perlindungan terhadap harkat dan martabat anak, terdapat ketentuan khusus yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperlakukan anak yang berhadapan dengan hukum. Tidak hanya itu, terdapat perhatian khusus terhadap hak-hak anak yang harus dipenuhi saat menjalani proses peradilan pidana.

Tabel 8.27 Jumlah Anak berhadapan dengan Hukum Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2022

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Total
		L	P	
1	Sungai Beremas	-	-	-
2	Ranah Batahan	1	-	1
3	Koto Balingka	2	-	2
4	Sungai Aur	-	-	-
5	Lembah Melintang	-	-	-
6	Gunung Tuleh	2	-	2
7	Talamau	-	-	-
8	Pasaman	2	-	2
9	Luhak Nan Duo	5	-	5
10	Sasak Ranah Pasisie	1	-	1
11	Kinali	-	-	-
Pasaman Barat		13	-	13

Sumber Data : UPPA Polres, P2TP2A Kab. Pasaman Barat

Berdasarkan catatan dari Polres Kabupaten Pasaman Barat, jumlah anak yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Pasaman Barat selama tahun 2022 berjumlah 13 orang anak, dimana semuanya adalah anak laki-laki.

Tabel 8.28 Peraturan Perundang-Undangan Yang Digunakan Dalam Penanganan ABH Tahun 2022

No	Peraturan Perundang-Undangan	Kepolisian	Kejaksaan	Pengadilan	Bapas	Lapas	Keterangan
1.	UU No. 23/2002	√	-	-	-	-	-
2.	KUHP	√	-	-	-	-	-
3	UU PKDRT	√	-	-	-	-	-
4.	UU TPPO	-	-	-	-	-	-
5	Lainnya	-	-	-	-	-	-

Sumber Data : Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lapas

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa terdapat 3 payung hukum yang bisa membantu anak-anak yang berhadapan dengan hukum yaitu UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, KUHP dan UU PKDRT.

8.5 Anak Dibawah 18 Tahun Korban Penyalah Gunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA)

Sanksi pidana narkoba terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba harus sesuai dengan Pasal 112 dan 127 UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba. Undang-Undang tersebut mengatur bahwa setiap orang yang menderita akibat pemakaian obat golongan I dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun serta korban penyalahgunaan wajib menjalankan rehabilitasi medis dan sosial.

Sedangkan bagi anak yang menyalahgunakan narkoba, penanganan pidananya diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Tetapi, lamanya pidana dibatasi oleh Pasal 79 dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak bahwa pidana maksimum yang dapat dijatuhkan kepada seorang anak paling banyak $\frac{1}{2}$ (setengah) dari pidana maksimum bagi seorang anak dengan orang dewasa.

Maraknya kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja tentu disebabkan oleh beberapa faktor pendukung, diantaranya yaitu rasa penasaran yang tinggi atau pun trend dan lingkungan pertemanan. Lingkungan pertemanan menjadi salah satu faktor pendukung yang paling tinggi seorang remaja menggunakan narkoba, mungkin banyak dari mereka yang berawal dari coba-coba karena bujukan teman dan berujung menjadi ketergantungan. Kurangnya edukasi terkait bahaya narkoba di kalangan remaja juga dapat membuat semakin meluasnya kasus penyalahgunaan narkoba.

Tabel 8.29 Jumlah Anak Dibawah 18 Tahun Korban Penyalah Gunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) Tahun 2022

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Total
		L	P	
1	Sungai Beremas	-	-	-
2	Ranah Batahan	-	-	-
3	Koto Balingka	-	-	-
4	Sungai Aur	-	-	-
5	Lembah Melintang	-	-	-
6	Gunung Tuleh	-	-	-
7	Talamau	2	-	2
8	Pasaman	-	-	-
9	Luhak Nan Duo	-	-	-
10	Sasak Ranah Pasisie	-	-	-
11	Kinali	-	-	-
Pasaman Barat		2	-	2

Sumber Data : Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pasaman Barat

Berdasarkan table 8.29 diatas terlihat bahwa di Kecamatan Talamau terdapat 2 orang anak umur dibawah 18 tahun dengan jenis kelamin laki-laki, yang menjadi korban Penyalah Gunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA).

BAB IX

DAFTAR JENIS DATA KELEMBAGAAN



BAB IX

DAFTAR JENIS DATA KELEMBAGAAN

9.1 Kelembagaan Pengarusutamaan Gender

Kelembagaan PUG adalah kelembagaan yang memenuhi unsur-unsur prasyarat PUG, yang berfungsi secara efektif dalam satu sistem berkelanjutan dengan norma yang disepakati dalam pemenuhan hak-hak asasi perempuan dan laki-laki secara adil untuk mencapai kesetaraan antara perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan dan tingkatan pemerintahan.

PUG adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki untuk memberdayakan perempuan dan laki-laki mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dari seluruh kebijakan, program, kegiatan di berbagai bidang kehidupan pembangunan nasional dan daerah. Indonesia telah memiliki komitmen kuat dalam mengupayakan terwujudnya kesetaraan dan pengarusutamaan gender. Hal ini dibuktikan dengan adanya komitmen pemenuhan hak-hak dasar perempuan antara lain dalam UUD 1945, Inpres No. 9 Tahun 2000, dan Peraturan Presiden tentang RPJMN 2020-2024.

Dalam rangka mendorong, mengefektifkan serta mengoptimalkan upaya PUG secara terpadu dan terkoordinasi, di dalam Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yang mengamanatkan bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, perlu

melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional. PUG menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan fungsional utama semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah.

Tabel 9.1 Daftar Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Berdasarkan Kabupaten Tahun 2022

No	Kabupaten	Nama P2TP2A	Alamat	Dasar Hukum pembentukan
	Pasaman Barat	P2TP2A Amanah	Jl. M.Nastsir Simpang Empat Pasaman Barat	Perbup

Sumberdata : DPPKBP3A Kab. Pasaman Barat

Tabel 9.2 Jumlah dan Jenis Kebijakan/Program/Kegiatan Yang Responsif Gender Tahun 2022

No	Kabupaten	Jenis Kebijakan/Program/Kegiatan	Nomor	Dikeluarkan Oleh	Jumlah
1.	Pasaman Barat	1. SK Pembentukan Tim Penggerak Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Kab. Pasaman Barat	188.45/ BUP.PASBAR / 2022	Bupati Pasaman Barat	1
		2. Perbup Rencana Aksi Daerah Pengarus Utamaan Gender Kab. Pasaman Barat	03 Tahun 2020	Bupati Pasaman Barat	1

SumberData : DPPKBP3A Kab. Pasaman Barat

Tabel 9.3 Jumlah dan Jenis Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan Tahun 2022

No	Kabupaten	Jenis Peraturan Daerah	Nomor	Dikeluarkan Oleh	Jumlah
1	Pasaman Barat	Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat	11 Tahun 2016	Bupati Pasaman Barat	1

SumberData : DPPKBP3A Kab. Pasaman Barat

Tabel 9.4 Jumlah dan Jenis Kebijakan/Program/Kegiatan tentang Perlindungan Perempuan Tahun 2022

No	Kabupaten	Jenis Kebijakan/Program/Kegiatan	Nomor	Dikeluarkan Oleh	Jml
1	Pasaman Barat	1. Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual (GN Aksa) 2. Pengembangan P2TP2A	SK No. 188.45/232 /Bup.Pasbar /2020	Bupati Pasaman Barat	1

SumberData : DPPKBP3A Kab. Pasaman Barat

Tabel 9.5 Daftar Kelembagaan Unit Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Di Pasaman Barat Tahun 2022

No.	Kab/ Kota	Nomenklatur Kelembagaan	Dasar Hukum/Tahun Pembentukan	Nama Pimpinan/ Eselonisasi	Alamat Kantor (Telp. Fax, Email)
1	Pasaman Barat	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pasaman Barat, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Eselon II	Jl. M. Natsir Simpang Empat, Telp/Fax : (0753) 7464100/ 7464105

SumberData : DPPKBP3A Kab. Pasaman Barat

Tabel 9.6 Gugus Tugas dan Kebijakan terkait Pemeberantasan Perdagangan Orang Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022

No.	Kabupaten	Gugus Tugas		Rencana Aksi Daerah PP- TPPO		Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)		Produk Hukum (Perda/SK/SE)	Koordinasi dengan daerah lain
		Ada	Tidak	Ada	Tidak	Ada	Tidak		
1	Pasaman Barat	√		√		√		Perbup No. 18 Th. 2016 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang	

Sumber data : DPPKBP3A Kab. Pasaman Barat

9.2 Kelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak

Pengarusutamaan Hak Anak yang selanjutnya disebut PUHA adalah strategi perlindungan anak dengan mengintegrasikan hak anak ke dalam setiap kegiatan pembangunan yang sejak penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari berbagai peraturan perundangan-undangan, kebijakan, program, dan kegiatan dengan menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Tabel 9.7 Jumlah dan Jenis Peraturan Daerah yang peduli Anak Tahun 2022

No	Kabupaten	Jenis Peraturan Daerah	Nomor	Dikeluarkan Oleh	Jumlah
1	Pasaman Barat	Peraturan Daerah Kab. Pasaman Barat tentang Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak	10 Tahun 2016	Bupati	1
2	Pasaman Barat	Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang Kabupaten Layak Anak	37 Tahun 2015	Bupati	1
3	Pasaman Barat	Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang Tata Cara Pelayanan Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	12 Tahun 2020	Bupati	1

Sumber Data : DPPKBP3A Kab. Pasaman Barat

Tabel 9.8 Jumlah Kelembagaan Tumbuh Kembang dan Kelangsungan Hidup Anak Tahun 2022

No	Kecamatan	Bina Keluarga Balita (BKB)	Bina Keluarga Remaja (BKR)	Posyandu	Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Panti Asuhan Anak Yatim Piatu
1.	Sungai Beremas	6	6	19	1	-
2.	Ranah Batahan	6	3	37	2	2
3.	Koto Balingka	7	2	36	3	2
4.	Sungai Aur	6	2	33	2	-
5.	Lembah Melintang	5	2	59	2	1
6.	Gunung Tuleh	10	2	33	2	1
7.	Talamau	17	4	47	1	2
8.	Pasaman	8	4	69	4	1
9.	Luhak Nan Duo	14	2	37	3	-
10.	Sasak Ranah Pasisie	7	5	20	1	-
11.	Kinali	12	5	87	1	-
	Pasaman Barat	98	37	987	26	9

SumberData : DPPKBP3A, Dinkes, Dinas Pendidikan, Dinsos

Tabel 9.9 Jumlah Kelembagaan Partisipasi Anak Tahun 2022

No	Kabupaten	Organisasi Forum Anak	Kegiatan Ekstrakurikuler	Telepon Sahabat Anak 129
1	Pasaman Barat	1	-	-

Tabel 9.10 Jumlah Kelembagaan Untuk Perlindungan Anak Tahun 2022

No	Kabupaten	Gugus Tugas Trafiking	Gugus Tugas KLA	LPA	KPAID	Lain-lain
1	Pasaman Barat	1	1	-	-	-



BAB X

PENUTUP

BAB X

PENUTUP

Buku Profil Gender dan Anak Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 yang disusun oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Pasaman Barat diharapkan dapat membantu pemerintah dalam melakukan analisis gender sesuai tugas dan fungsi masing-masing SKPD. Dalam proses pengumpulan data ini, berbagai kendala dan tantangan telah dihadapi. Dengan demikian, semoga keterbatasan ini dapat dipahami bersama.

Dokumen Penyusunan Buku Profil Gender dan Anak Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 ini diharapkan bisa menjadi panduan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan. Dengan demikian, integrasi gender dalam proses perencanaan dan penganggaran bisa menjadi luaran yang diharapkan, sebagaimana telah diatur dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 yang dapat diwujudkan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Akhirnya, setiap dokumen kebijakan/program/kegiatan bisa menjadi panduan untuk memperhatikan aspek gender.